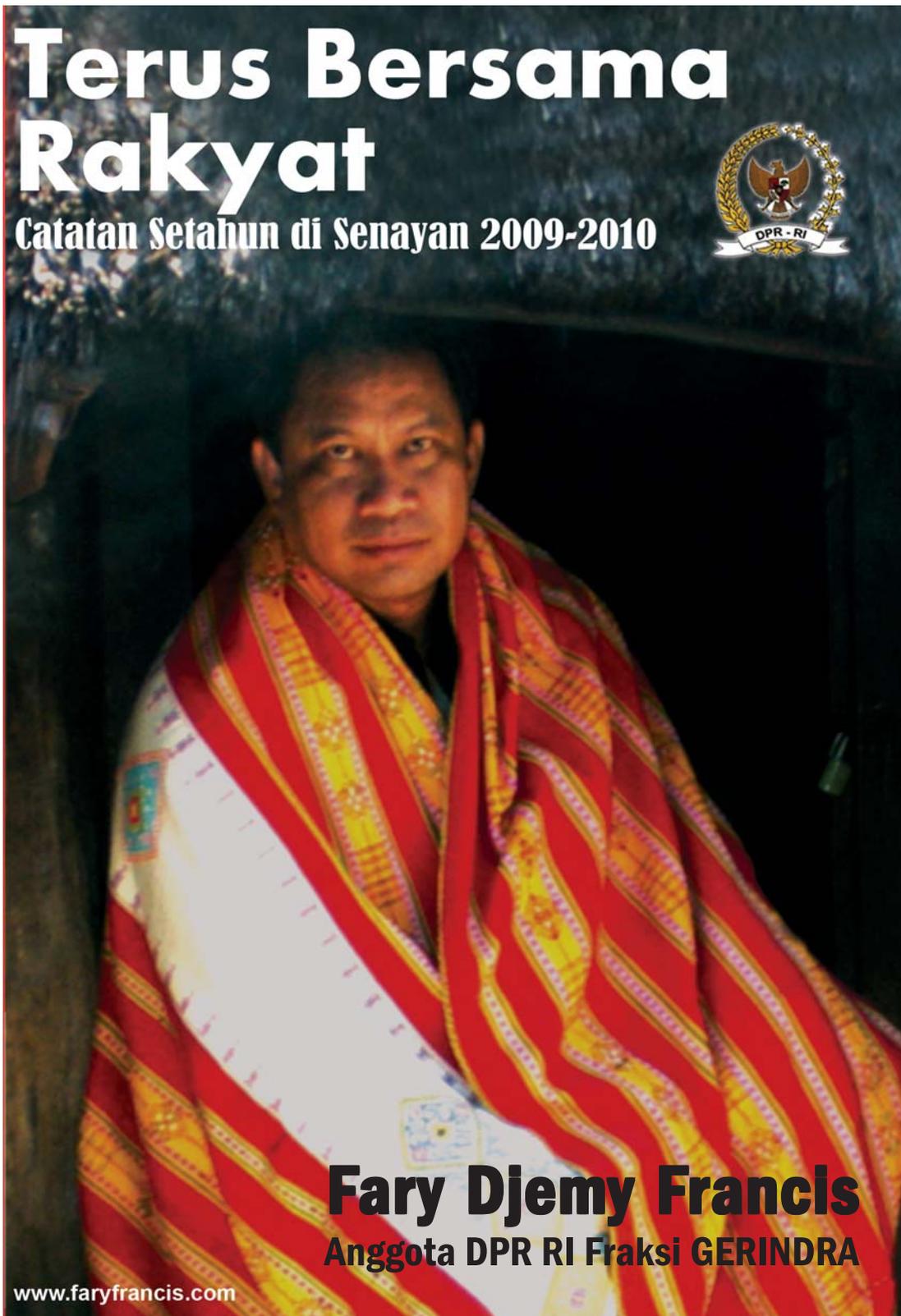


Terus Bersama Rakyat

Catatan Setahun di Senayan 2009-2010



Fary Djemy Francis
Anggota DPR RI Fraksi GERINDRA

www.faryfrancis.com



Fary Djemy Francis
Anggota DPR RI Fraksi GERINDRA

Terus Bersama Rakyat

Catatan Setahun di Senayan 2009 - 2010

**Terus Bersama Rakyat
Catatan Setahun di Senayan 2009 -2010**

**Penulis :
Fary Djemy Francis**

**Editor :
Yohanes Ghewa
Ali Mustofa**

**Diterbitkan oleh:
Rumah Rakyat Indonesia Raya
Jalan Asoka 20 Oetona
Kupang Nusa Tenggara Timur 2010**

**Lay Out/Penyunting :
Yeremias Ndoen, Susan Marey**

KATA PENGANTAR

Jakarta 1 Oktober 2009. Tanggal yang selalu membuat hati saya bergetar, tertulis pada selembar kertas putih yang lebar, dan terbingkai pada sebuah frame permanent yang tak pernah melar, terpampang di atas meja di depan kursi kerja saya. Pada hari itu dalam keadaan sadar sesungguhnya, saya menandatangani Pakta Integritas dengan berikrar, sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, akan Menggunakan segala potensi yang saya miliki untuk secara proaktif mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan mendorong pembangunan nasional yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan.

Tanggal itu sudah lewat, sudah lebih dari setahun yang lalu, tetapi suasana batin yang menyelimuti saya menjelang dan pada saat saya menorehkan tandatangan di atas Pakta Integritas itu masih sangat kental dan terekam sempurna dalam pikiran dan hati sanubari saya sehingga saya sendiri tidak dapat meramalkan,

entah kapan baru saya dapat melupakannya. Yang saya tahu persis, hanyalah bahwa TUHAN telah memakai orang biasa. Karena itu saya yakin, apa yang saya miliki mungkin tidak terlihat banyak, tetapi ketika saya menyerahkannya kepada sentuhan tangan TUHAN, maka saya akan mengerti bagaimana hidup saya tidak pernah menjadi sama. Dalam semangat itulah saya mengumpulkan dan menjalin kembali lembaran-lembaran pengalaman saya selama setahun silam dalam format buku untuk menjadi bahan refleksi dan introspeksi bagi saya sendiri, dan pada saat yang sama berharap, dapat pula menjadi pisau bedah bagi tuan dan puan, bagi sesama sejawat Anggota DPR di pusat maupun daerah, bagi seluruh rakyat NTT, dan teristimewa bagi saudara dan sahabat yang telah menetapkan saya menjadi wakil yang memperjuangkan aspirasi bersama.

Buku Catatan ini bukanlah laporan kajian ilmiah, atau hasil investigasi suatu kasus yang sarat dengan kaidah dan tuntutan metodologis. Karena itu, seperti sebuah menu masakan, buku ini isinya macam-macam, ada laporan kerja dari bulan ke bulan, ada ulasan terhadap isu aktual tertentu, dan ada pula hasil permenungan yang memperlihatkan sikap saya terhadap berbagai fenomena di dalam lingkungan dewan maupun di tengah-tengah masyarakat. Bahasa yang digunakanpun sangat sederhana, yang dikemas sedemikian rupa sehingga siapapun yang membacanya akan dengan mudah memahami pesan maupun kesan yang terkandung dalam tiap bagiannya, dengan harapan dapat menemukan sendiri jawaban atas pertanyaan tentang “Apa yang Dikerjakan Seorang Anggota DPR dengan Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasannya?” Dengan demikian tuan dan puan, serta saudara dan sahabat dengan mudah dapat meyapa, memantau, memberi saran, bahkan ‘menegur’ saya apabila dipandang telah menyimpang dari Pakta Integritas yang telah saya ikrarkan itu.

Kendati buku catatan ini terlihat sederhana, sesungguhnya ada banyak orang hebat yang telah secara langsung atau tidak

langsung membuat buku ini tampil dalam wujudnya seperti sekarang ini. Karena itu, dengan setulus-tulusnya saya mengucapkan terimakasih kepada Ketua Badan Pertimbangan Partai Gerindra, Ketua Umum DPP Partai Gerindra dan Pimpinan Fraksi Gerindra yang telah sejak awal terus menerus mengobarkan semangat kerakyatan dalam menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai anggota DPR RI dari Gerindra. Terimakasih juga saya ucapkan kepada Pimpinan Komisi V, Badan Anggaran DPR RI dan para sejawat senior di mana dari mereka saya beroleh kesempatan untuk belajar langsung dari sumber pertama mengenai fungsi-fungsi kedewanan dan aktualisasinya. Terimakasih yang tak terhingga juga saya haturkan kepada semua pihak yang dengan caranya masing-masing telah turut membentuk dan mengarahkan visi dan misi kedewanan saya selama setahun silam. Dan yang terakhir kepada semua rakyat NTT yang telah mempercayakan sura mereka melalui saya ... yakinlah bahwa saya akan menjalankan amanat itu sebaik-baiknya karena saya percaya '*vox populi vox deo...*'

Jakarta 19 Oktober 2010

Fary Djemy Francis
Anggota DPR RI A-43



Sekapur Sirih Ketua Fraksi Gerindra DPR RI

Ketika membaca bagian pendahuluan dari buku catatan ini, saya teringat isi Manifesto Perjuangan Partai Gerindra yang menyatakan diri tampil di pentas demokrasi untuk perubahan kepemimpinan nasional, dan perubahan tata laksana penyelenggaraan Negara. Seperti gayung bersambut, kita dapat dengan mudah melihat, Manifesto Perjuangan Partai Gerindra menyediakan filosofi perjuangan dan buku ini menyajikan bagaimana strategi perjuangannya. Di sini kita juga dapat membaca bagaimana penulisnya menempatkan Manifesto Perjuangan Partai Gerindra dalam situasi nyata, dalam kondisi sehari-hari yang indikatornya terukur dan target-targetnya terjangkau.

Ini adalah salah satu bentuk perjuangan bersama rakyat serta menjadikan kekuatan rakyat sebagai kekuatan utama dalam membangun bangsa dan masyarakat Indonesia. Dan ini mungkin terlaksana hanya apabila rakyat dan wakil rakyat yang menjadi representasi Partai Gerindra di DPR RI memiliki kesamaan visi,

misi, tujuan dan komitmen. Buku ini sedang merintis jalan menuju kolaborasi besar yakni kekuatan rakyat dan soliditas wakilnya di DPR RI. Dan rahasia besar yang coba diungkap melalui buku catatan ini adalah 'KETERBUKAAN' yang mencerminkan integritas wakil rakyat mengedepankan prinsip-prinsip disiplin, kedaulatan, kemandirian, persamaan hak, kerjasama gotong royong dan musyawarah seperti yang diamanatkan oleh para pendiri Partai Gerindra melalui Manifesto Perjuangan Partai Gerindra.

Meskipun tampil dalam format yang merakyat, dengan bahasa dan tema-tema aktual yang disari dari tengah dunia nyata yakni masyarakat desa, petani, nelayan, guru, dan alam lingkungan mereka, buku ini saya pandang efektif menjangkau seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat dalam pendidikan politik yang elegan. Saya yakin, siapapun yang membacanya, dari anak-anak hingga orang dewasa, dapat dengan mudah menyerap dan memahami pesan-pesan pemberdayaan dan pendidikan politik yang terkandung di dalamnya.

Di dalam buku catatan ini kita lihat bagaimana saudara Fary Francis 'belajar' memangku peran dan tanggung jawabnya mulai dari hal-hal yang paling kecil dan sederhana. Keberpihakannya terhadap ekonomi kerakyatan juga tampak dari upayanya memperjuangkan pembangunan infrastruktur yang memungkinkan sebagian terbesar rakyat banyak secara langsung mendapat manfaat dan memiliki akses kepada infrastruktur tersebut khususnya berkaitan dengan infrastruktur Desa, Tani dan Nelayan. Desakan kepada pemerintah agar serius mengusut persoalan pencemaran Laut Timor, perjuangannya membuka trayek KM Penumpang Awu ke Pulau Sabu, operasionalisasi dari Rumah Rakyat Indonesia Raya sebagai Rumah Aspirasi, kampanye gerakan Panen Air, Ramaikan Laut Sawu dan Tidur di Rumah Rakyat di desa adalah sebagian kecil dari banyak terobosan yang telah dan secara konsisten terus dilakukannya sehingga ruang aspirasi, ekspresi dan improvisasi bagi masyarakat desa, daerah

terisolir, terluar dan terdepan dari republik ini terbuka dan semakin luas dari waktu ke waktu.

Sejujurnya, saya secara pribadi maupun dalam kapasitas sebagai unsur pimpinan Fraksi Partai Gerindra di DPR RI merasa bangga sekaligus malu, malu karena walaupun saya tidak dan belum dapat menemani secara penuh anggota fraksi karena keadaan diluar kehendak saya tetapi teman teman tetap disiplin dengan hati yang bersih mengemban tugas dan terus mengabdikan pada rakyat, karena itu dengan terbitnya buku "Terus Bersama Rakyat, Catatan Setahun di Senayan 2009-2010" ini kita semua sesungguhnya diajak untuk melihat kembali ke belakang dan bertanya "apakah saya telah menjalankan Manifesto Perjuangan Partai Gerindra dengan penuh tanggung jawab?"

Akhirnya, atas nama unsur pimpinan Fraksi Partai Gerindra saya menyatakan rasa bangga atas jerih payah saudara Fary Djemy Francis yang di tengah-tengah jadwal kegiatan dewan yang sangat ketat masih sempat menuangkan buah pikiran dan membagi pengalaman kemasyarakatannya dengan rekan-rekan Anggota DPR di Fraksi Partai Gerindra ini untuk maju dan berkembang bersama.

Salam Indonesia Raya.

Jakarta 19 Oktober 2010

Widjono Hardjanto
Ketua Fraksi Gerindra



Sekapur Sirih Ketua Komisi V DPR RI

Saya mengenal Sdr. Fary Djemy Francis dari responnya yang cepat terhadap berbagai isu pembangunan, dari analisisnya yang tajam, dan rekomendasinya yang realistis dalam setiap kesempatan baik di rapat komisi dengan mitra maupun para sejawat di Komisi V DPR RI. Sebagaimana kita ketahui, Komisi V DPR RI membidangi Perhubungan, Telekomunikasi, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pembangunan Pedesaan Kawasan Tertinggal dengan mitra kerja Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Badan SAR Nasional, dan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoardjo; yang semuanya merupakan para pihak (stakeholder) yang langsung berhadapan dengan rakyat dengan seluruh keberadaan dan dinamikanya. Karena itu bukanlah hal yang kebetulan apabila sebagian besar Anggota Komisi V ini adalah orang-orang dari latar belakang yang bersentuhan langsung dengan rakyat, misalnya mantan Birokrat, Pegiat LSM, Pengusaha, Akademisi, dan Alim Ulama.

Sebagai Rekan sesama di Komisi V, saya kenal Fary Djemy Francis berasal dari latar belakang Aktifis LSM yang bergelut di bidang pemberdayaan masyarakat. Karena itu ketenangannya dalam menyimak informasi dari mitra terkait, responnya yang santun terhadap rencana maupun rekomendasi pemecahan masalah dalam bidang tertentu baik ketika berhadapan dengan mitra kerja maupun di tengah-tengah pembahasan dengan para sejawat di Komisi V telah turut menciptakan atmosfer yang menumbuhkan semangat kekompakan dan persaudaraan dalam perjuangan membela kepentingan rakyat terutama perjuangannya terhadap Infrastruktur Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan. Dan, sebagian dinamika Komisi V DPR RI terekam dengan sempurna di dalam catatannya. Karena itu saya menyatakan salut atas keberaniannya untuk mempersilahkan siapapun untuk membuka "Catatan Setahun di Senayan 2009-2010" yang kebanyakan orang menganggapnya bersifat rahasia.

Lebih lanjut, buku "Terus Bersama Rakyat, Catatan Setahun di Senayan 2009-2010" ini dengan segala keberadaannya, saya pandang telah menjadi perintis dan media yang sangat komunikatif dan interaktif yang secara simultan telah memberi nilai tambah bagi upaya peningkatan kapasitas penulis dan rakyat konstituennya. Karena itu kepada saudara Fary Djemy Francis saya ucapkan selamat atas terbitnya buku catatan ini, yang menurut hemat saya telah menambah khasanah media pendidikan politik infrastruktur dalam arti yang sesungguhnya.

Jakarta 20 Oktober 2010

Dra. Yasti Soepredjo Mokogow
Ketua Komisi V DPR RI

DAFTAR ISI

Kata Pengantar *iii*

Sekapur Sirih Ketua Fraksi Gerindra DPR RI *vii*

Sekapur Sirih Ketua Komisi V DPR RI *xi*

Daftar Isi *xiii*

Prolog *xv*

Bagian 1 Laporan Kerja

November 2009 : **Berjuang Dari Senayan** *Membawa Amanat Rakyat Mencapai Legislasi, Anggaran dan Pengawasan* **1**

Desember 2009 : **Kolaborasi Kampung dan Senayan** *Bergandeng Tangan Menggapai Cita-cita Bersama* **11**

Januari 2010 : **Pembangunan Yang Berpihak Rakyat Miskin?** *Anggarkan Rupiah Murni!* **23**

Februari 2010 : **Rumah Rakyat Indonesia Raya** *Mengentaskan Kendala Komunikasi Dengan Konstituen* **29**

Maret 2010 : **Bertindak Sebagai Konstituen dan Tinggal Bersama Rakyat Bentuk Pemantauan dan Pengawasan Kolaboratif** 39

April 2010 : **Rumah Untuk MBR Tanggungjawab Negara Yang Belum Terwujud** 49

Mei 2010 : **Dari KM Awu ke DAS Benenain Meretas Isolasi Sabu Raijua dan Gerakan Panen Air Untuk Timor** 57

Juni 2010 : **Pesan Dari Pulau Sumba Jangan Bilang Provinsi Kepulauan Harus Tertinggal** 71

Juli 2010 : **Belajar dari Austria Rumah Leo Bukti Kesungguhan Negara Memelihara Fakir Miskin dan Orang yang Terlantar** 85

Agustus 2010 : **RAPBN 2011 Pemerintah Terbelenggu Anggaran Defisit dan Kebutuhan Dasar Rakyat Semakin Morat Marit** 103

September 2010 : **Dilema Pinjaman Luar Negeri Salah Kelola Rakyat Jadi Korban** 115

Bagian II Pokok-pokok Pikiran

Mohon Maaf, Refleksi Setahun Menjadi Wakil Rakyat 121

Century Aib Yang Kontra Pro-Kerakyatan di Tengah Slogan 'Pembangunan Untuk Semua' 129

Tanggapan Atas Proposal Pembentukan Provinsi Flores 135

RUU Perumahan Dan Permukiman Untuk Siapa? 139

Belajar Dari Austria Rumah Untuk Rakyat 145

Pro Kontra Kepemilikan Rumah Bagi WNA di Indonesia 157

Pengelolaan DAS Benenain Berangkat Dari Pemahaman & Komitmen Bersama 183

DAS Benenain Sudahkah Menjadi Isu dan Aksi Bersama? 187

Sekitar Pro Kontra Rencana Pembangunan Gedung DPR RI 191

Frans Seda Pahlawan Nasional 197

Bagian III Liputan Media

"Ini Baru Wakil Rakyat." *Pos Kupang, Senin 21 Desember 2009*

"Pemerintah Diminta Jelaskan Penyimpangan APBN Rp. 27,4 Triliun"
Antara News, Selasa 20 Juli 2010

"Meneg LH : Laut Timor Tercemar" *Metro News, Rabu 17 Februari 2010*

"Meraih Asa Lewat Rumah Rakyat" *Bataviese.co.id, 8 Februari 2010*

"DPR Perjuangkan Perhubungan di NTT" *Website Pemeitah NTT*

"25 Mei, KM Awu Singgahi Sabu" *Timor Express, Kamis 29 April 2010*

"Penanganan Pencemaran Laut Timor, DPR Pertanyakan Menhub"
Timor Express, Selasa 19 Januari 2010

"Frans Seda Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional" *Pos Kupang, Rabu 6 Januari 2010*

"Gubernur NTT Ajak Bupati/Walikota Lobi DPR Perjuangkan Anggaran Bangun NTT" *Timor Express, Selasa 28 September 2010*

"DPR Sarankan Moratorium Utang" *Koran Jakarta, Rabu 21 Juli 2010*

PROLOG

Berjuang Membangun Kembali Indonesia Raya Melalui Infrastruktur Berbasis Pedesaan dan Pertanian

Setelah mengamati periode pemerintahan yang satu ke periode pemerintahan yang lain saya sampai pada kesimpulan bahwa gerak laju pembangunan di Indonesia semakin jauh dari cita-cita pembangunan yang diamanatkan oleh UUD 1945. Masyarakat pedesaan yang pernah unggul menyediakan pangan bagi Indonesia pada masa awal kemerdekaan, sekarang justru menjadi kuli di atas lahannya sendiri. Kebijakan pembangunan selama ini telah melesat ke arah yang salah. Karena itu Partai Gerindra yang mengusung visi menjadi partai politik yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial dan tatanan politik negara yang melandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, hadir seperti oase di padang gurun. Dan saya memandang sudah saatnya rakyat Indonesia menyatukan perjuangan untuk mewujudkan visi tersebut. Karena sebagaimana kita ketahui, Partai GERINDRA mengemban misi kehidupan berbangsa dan bernegara yang

mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan pemerataan hasil-hasil pembangunan bagi seluruh warga bangsa dengan mengurangi ketergantungan kepada pihak asing.

Mengacu pada kenyataan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia berdomisi di pedesaan dengan kondisi yang masih tertinggal maka upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia harus dimulai dari desa. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan pada Maret 2010 angka kemiskinan masih bertengger pada 31,02 juta jiwa atau sekitar 13,33 persen dari total penduduk Indonesia. Namun, penurunannya jauh lebih kecil daripada penurunan angka kemiskinan dari Maret 2008 ke Maret 2009. Kepala BPS Rusman Herawan mengatakan, pada Maret 2009 jumlah penduduk miskin mencapai 32,53 juta jiwa, sementara pada Maret 2008 mencapai 34,96 juta jiwa. Perbandingan penurunan angka kemiskinan dari Maret 2008 dan Maret 2009 mencapai 2,43 persen. Namun, penurunan angka kemiskinan dari Maret 2009 ke Maret 2010 hanya sebesar 0,82 persen. Lambatnya laju penurunan kemiskinan tersebut sejumlah kajian disebabkan oleh masih banyaknya permasalahan yang dihadapi baik dari aspek kebijakan maupun kemampuan desa itu sendiri di antaranya:

- **Rendahnya aset yang dikuasai masyarakat perdesaan.** Ini terlihat dari besarnya jumlah rumah tangga petani gurem (petani dengan pemilikan lahan kurang dari 0,5 ha) yang mencapai 13,7 juta rumah tangga (RT) atau 56,2 persen dari rumah tangga pertanian pengguna lahan pada tahun 2003.
- **Terbatasnya alternatif lapangan kerja berkualitas.** Kegiatan ekonomi di luar sektor budidaya pertanian, baik industri yang mengolah hasil pertanian maupun industri kerajinan serta jasa penunjang lainnya sangat terbatas. Sebagian besar kegiatan ekonomi di pedesaan masih mengandalkan produksi komoditas primer sehingga nilai tambah yang dihasilkan kecil.

- **Rendahnya tingkat pelayanan sosial.** Ini tercermin dari pelayanan sosial dasar (pendidikan dan kesehatan), prasarana permukiman (air minum, air limbah, persampahan dan drainase), infrastruktur sosial ekonomi (jalan, telekomunikasi, listrik), dan pasar yang masih terbatas di perdesaan.
- **Meningkatnya degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta meningkatnya konversi lahan pertanian subur dan beririgasi teknis untuk peruntukan lain.** Isu yang paling kritis terkait dengan produktivitas sektor pertanian adalah penyusutan lahan sawah dari 8,2 juta hektar pada tahun 1992 menjadi 7,8 juta hektar pada tahun 2000. Di samping itu juga terjadi peningkatan luas lahan kritis akibat erosi dan pencemaran tanah dan air.
- **Lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat.** Ini tercermin dari kemampuan lembaga dan organisasi dalam menyalurkan aspirasi masyarakat untuk perencanaan kegiatan pembangunan, serta dalam memperkuat posisi tawar masyarakat dalam aktivitas ekonomi.
- **Lemahnya keterkaitan kegiatan ekonomi baik secara sektoral maupun spasial.** Ini tercermin dari kurangnya keterkaitan antara sektor pertanian (primer) dengan sektor industri (pengolahan) dan jasa penunjang, serta keterkaitan pembangunan antara kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan. Kota-kota kecil dan menengah yang berfungsi melayani kawasan perdesaan di sekitarnya belum berkembang sebagai pusat pasar komoditas pertanian; pusat produksi, koleksi dan distribusi barang dan jasa; pusat pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah non pertanian; dan penyedia lapangan kerja alternatif (non pertanian).
- **Belum optimalnya pemanfaatan peluang di era globalisasi dan liberalisasi perdagangan serta antisipasi risiko yang menyertainya.** Sektor pertanian Indonesia dalam era

perdagangan bebas saat ini berada pada posisi yang kurang menguntungkan dengan berbagai kesepakatan perdagangan dunia yang cenderung bias negara-negara maju, seperti keharusan penghapusan subsidi untuk pupuk, benih, dan input produksi pertanian lainnya, sementara berbagai proteksi dalam bentuk lain dan hambatan justru diterapkan negara-negara maju dalam rangka melindungi kepentingan petaninya.

- **Timbulnya hambatan (barrier) distribusi dan perdagangan antar daerah.** Dalam era otonomi daerah timbul kecenderungan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dalam bentuk pengenaan pajak dan retribusi (pungutan) yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, di antaranya pungutan yang dikenakan dalam aliran perdagangan komoditas pertanian antar daerah yang akan menurunkan daya saing komoditas pertanian.
- **Lemahnya koordinasi lintas bidang dalam pengembangan kawasan pedesaan.** Dalam implementasinya, pembangunan pedesaan akan melibatkan banyak aktor meliputi elemen pemerintah (pusat dan daerah), masyarakat, dan swasta.
- **Rendahnya kualitas SDM di pedesaan yang sebagian besar berkecakupan rendah (*low skilled*).** Ini ditunjukkan dengan rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas baru mencapai 5,84 tahun atau belum lulus SD/MI.
- Permasalahan-permasalahan di atas, langsung atau tidak langsung berkaitan erat dengan jumlah dan kualitas infrastruktur yang tersedia di pedesaan dari masa ke masa.

Sasaran Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia

Seperti saya gambarkan di atas, pembangunan pedesaan merupakan salah satu jawaban untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Negara, sudah barang tentu adalah pihak yang bertanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur sebagai

barang publik dan pemeratakan pembangunan secara adil, termasuk wilayah tertinggal dan kawasan pedesaan karena pembangunan perdesaan merupakan salah satu elemen penting dalam pemulihan ekonomi nasional. Pembangunan perdesaan yang terintegrasi dalam pembangunan daerah telah terbukti mampu menjadi kunci dalam mengatasi berbagai persoalan di perkotaan dalam masa krisis ekonomi. Oleh karena itu maka paradigma pembangunan yang bias perkotaan (urban-based) harus mulai ditinggalkan, dan diganti dengan pola pembangunan yang terintegrasi antara desa-kota, dan terintegrasi melalui pendekatan kewilayahan (regional).

Dalam konteks inilah saya memandang Partai Gerindra memainkan peranannya dengan mengoptimalkan perjuangan untuk memberikan manfaat terbesar bagi kepentingan petani dan masyarakat pedesaan. Visi Gerindra untuk pengembangan infrastruktur pedesaan melalui penyediaan akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan akses terhadap peningkatan kebutuhan sosial dan ekonomi pedesaan, mendorong upaya penanggulangan kemiskinan, serta menggerakkan upaya pembangunan sosial dan ekonomi daerah serta nasional menjadi spirit pembangunan yang *pro-poor, pro-growth dan pro-job*. Visi ini berangkat dari suatu keyakinan bahwa tersedianya infrastruktur pedesaan merupakan landasan bagi pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial dan ekonomi dalam upaya pengentasan masyarakat dari kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja dan pengembangan wilayah.

Dengan tersedianya infrastruktur pedesaan yang memadai, saya yakin masyarakat desa akan mampu untuk :

- Meningkatkan kesejahteraannya yang ditandai dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin serta meningkatnya taraf pendidikan dan kesehatan, terutama perempuan dan anak;

- Meningkatkan peran dan kontribusi kawasan pedesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi nasional yang diukur dari meningkatnya peran sektor pertanian dan non pertanian yang terkait dalam mata rantai pengolahan produk-produk berbasis pedesaan;
- Menciptakan lapangan kerja berkualitas di pedesaan yang ditandai dengan berkurangnya angka pengangguran terbuka dan setengah pengangguran;
- Meningkatkan kelayakhunian kawasan permukiman di pedesaan yang ditandai dengan meningkatnya akses rumah tangga ke pelayanan air bersih dan sanitasi, pelayanan prasarana pendidikan dan kesehatan, dan prasarana sosial ekonomi;
- Meningkatkan akses, kontrol dan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan pembangunan pedesaan yang ditandai dengan terwakilinya aspirasi semua kelompok masyarakat dan meningkatnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan.

Program Aksi Pembangunan Infrastruktur Pedesaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia

Program aksi yang saya maksudkan di sini dimaksudkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penyediaan infrastruktur pedesaan, merehabilitasi dan mengoptimalkan pemanfaatannya, serta meningkatkan pemeliharaan infrastruktur yang telah terbangun. Infrastruktur di sini meliputi jaringan prasarana dan sarana sosial ekonomi dan permukiman. Program-program aksi berikut ini adalah sebagian dari upaya untuk mencapai cita-cita dan tujuan pembangunan infrastruktur yang diuraikan di atas.

a) Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Bendungan dan Jaringan Pengairan Lainnya

Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, bendungan dan jaringan pengairan lainnya ditujukan untuk mewujudkan pengelolaan jaringan irigasi dan rawa serta jaringan pengairan lainnya untuk mendukung peningkatan produktifitas pertanian dan pencapaian ketahanan pangan nasional.

Kegiatan-yang dapat dilakukan antara lain, Pemberdayaan petani pemakai air terutama dalam hal pengelolaan jaringan irigasi; Pembangunan waduk-waduk/bendungan di daerah tertentu untuk menjaga ketersediaan air bagi kebutuhan pengairan sawah-sawah petani; Penguatan kelembagaan di tingkat pelaksana pengelola irigasi baik dari unsur pemerintah maupun petani; Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan rawa serta jaringan pengairan lainnya yang dirancang, dibangun dan dikelola sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan; Penegakan hukum dan peraturan terkait dengan pengelolaan sumber daya air; Optimalisasi pemanfaatan lahan irigasi dan rawa yang telah dikembangkan; dan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya.

b) Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan

Peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan yang mendukung pembangunan perdesaan mencakup kegiatan-kegiatan pokok antara lain Pembangunan dan pemeliharaan jembatan yang menghubungkan Desa dengan Desa dan antar desa dengan Kota untuk memperlancar akses distribusi barang dan jasa; Peningkatan/pembangunan jalan arteri primer yang merupakan jalur utama perekonomian yang menghubungkan antara Desa dengan daerah Perkotaan; Pembangunan jalan akses ke kawasan perdesaan, perbatasan, dan kawasan terisolir termasuk pulau kecil dan pesisir.

c) Pengembangan Sistem Pelayanan Air Minum dan Air Limbah

Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas air baku untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga, permukiman, dan industri di kawasan perdesaan. Peningkatan kualitas pengelolaan air minum dilakukan dengan pemberdayaan kelompok masyarakat pengelola air minum; revitalisasi dan optimasi prasarana dan sarana air minum; peningkatan penyediaan prasarana sanitasi yang berkualitas; peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan dan pengelolaan prasarana air minum perdesaan. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam program ini antara lain adalah Perlindungan dan pengelolaan sumber air baku dengan meningkatkan partisipasi masyarakat; rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana air baku yang telah terbangun; pembangunan prasarana pengambilan dan penyaluran air baku; Pengembangan prasarana dan sarana air minum dan air limbah di kawasan permukiman perdesaan; Pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah dibangun bersama-sama dengan partisipasi masyarakat setempat; dan Mendorong masyarakat perdesaan untuk dapat memenuhi kebutuhan akan air minum secara mandiri dan partisipatif

d) Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan dan Drainase

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan dan drainase melalui peningkatan perencanaan pengelolaan persampahan dan drainase agar dapat terintegrasi dengan baik. Kegiatan yang dapat dilakukan antara lain adalah Pengurangan timbulan sampah melalui pendekatan 3R (*reduce, reuse and recycle*); Pemisahan antar berbagai jenis sampah yaitu sampah basah dan sampah kering; Pembangunan

sarana pengelolaan limbah cair dan padat secara komunal secara partisipatif; Perencanaan, penyediaan prasarana dan sarana serta pengelolaan persampahan; serta Perencanaan, penyediaan prasarana dan pengelolaan drainase yang partisipatif

e) Pengembangan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana telematika

Pengembangan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana telematika bertujuan meningkatkan aksesibilitas masyarakat perdesaan terhadap informasi dan berbagai layanan telematika dengan tingkat pelayanan yang memadai.

Kegiatan pokok yang dapat dilakukan antara lain adalah Pembangunan prasarana telematika di kawasan permukiman perdesaan; dan Pengembangan dan mengimplementasikan konsep *telecenter* atau konsep lain yang memungkinkan masyarakat perdesaan untuk mengakses informasi dengan mudah dan murah.

f) Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan

Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan bertujuan meningkatkan aksesibilitas masyarakat perdesaan untuk memperoleh tenaga listrik semakin mudah, efisien, dengan harga yang wajar serta didukung oleh kualitas dan kuantitas yang memadai sesuai dengan standar yang berlaku. Kegiatan pokok yang dapat dilakukan antara lain adalah Ekstensifikasi dan intensifikasi jaringan listrik perdesaan melalui pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah perdesaan dan daerah yang belum berkembang. Kegiatan ini meliputi penambahan pembangkit tenaga listrik termasuk pembangkit skala kecil dengan memanfaatkan potensi energi lokal/setempat terutama energi terbarukan seperti PLT Piko/Mkro/Mini Hidro dan PLTS (pembangkit listrik tenaga surya),

pembangunan jaringan tegangan menengah dan tegangan rendah serta gardu distribusi; Menyediakan jaringan sarana-prasarana kelistrikan yang terjangkau oleh kemampuan masyarakat pedesaan

Visi, misi dan program pembangunan infrastruktur pedesaan sebagaimana tersebut adalah cita-cita yang akan dilaksanakan manakala partai ini dipercaya oleh rakyat untuk menjadi pelaksana Pemerintahan di negeri ini. Namun sementara hal itu belum dapat dilakukan, saat ini Partai Gerindra yang telah memiliki 26 Anggota dan duduk di Fraksi Partai Gerindra DPR RI adalah merupakan duta-duta partai yang akan memperjuangkan infrastruktur pedesaan khususnya bidang pertanian. Kepada merekalah visi dan misi pembangunan infrastruktur pedesaan tersebut mencoba untuk diperjuangkan baik lewat fungsi legislasi, anggaran maupun pengawasan.

Perjuangan Partai Gerindra DPR RI Bidang Infrastruktur Pedesaan

Sejumlah langkah strategis yang telah dilakukan oleh Fraksi Partai Gerindra DPR RI yang duduk di Komisi V adalah sebagai berikut.

Pada Skala Nasional

Melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, Anggota DPR RI Fraksi Gerindra di Komisi V aktif membangun argumentasi dan alternatif pemecahan masalah dengan cara antara lain :

- Mengkritisi Peraturan dan pelaksanaan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Perpres Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Namun, sejauh ini PP tersebut masih menyimpan banyak kelemahan antara lain diizinkan nya pengalihan saham justru bagi proyek tol baru. Padahal, yang kini butuh pengalihan saham adalah proyek tol yang

terbengkalai. Selain itu belum ada pedoman yang rinci terhadap aturan dalam Perpres No 13/2010 untuk tiap sektor. Misalnya pedoman dibidang pengerjaan jalan tol, kereta api, hingga prasarana air minum agar investor tidak ragu menanamkan modalnya di sektor-sektor tersebut.

- Mendorong perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa agar lebih mencerminkan perubahan paradigma pembangunan dari sentralistik ke desentralistik dan mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal. Saat ini kemiskinan mayoritas terdapat di perdesaan (63,41% penduduk miskin di perdesaan sesuai data BPS bulan Maret 2006). Melalui RUU Desa ini diharapkan akan dapat mendorong percepatan pembangunan pedesaan tersebut.
- Mendorong perwujudan RUU tentang Pola Pembangunan Daerah Tertinggal sebagai upaya mendorong terwujudnya pembangunan daerah tertinggal agar setara dengan daerah maju di Indonesia.
- Mendorong Pemerintah untuk terus melakukan langkah-langkah reformasi peraturan dan kebijakan bidang infrastruktur agar pembangunan infrastruktur lebih efektif dan efisien, berkepastian hukum serta adanya penyederhanaan birokrasi dalam peksanannya.
- Mendesak pemerintah untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan rakyat yang lebih mengakomodasi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah, dibandingkan dengan tujuan untuk menghimpun profit. Suara anggota Fraksi Gerindra di Komisi V DPR RI yang kritis sepanjang pembahasan RUU Perumahan dan Permukiman dan RUU Rumah Susun menjai tolok ukur kesungguhan Partai Gerindra untuk menyediakan infrastruktur perumahan yang memadai.
- Memastikan bahwa perencanaan anggaran dan skala prioritas pembangunan infrastruktur yang disusun oleh Pemerintah

berpedoman pada RPJPN dan RPJMN serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat pedesaan dan masyarakat daerah tertinggal.

- Mendorong Pemerintah agar senantiasa meningkatkan penerimaan Negara, laju pertumbuhan ekonomi serta kerjasama dengan pihak swasta sehingga dapat mempercepat kontribusi infrastruktur sebesar 5 % terhadap PDB terutama dialokasikan untuk infrastruktur pedesaan.
- Melakukan advokasi anggaran pembangunan infrastruktur berbasis Pedesaan dan Pertanian secara optimal Melakukan advokasi anggaran untuk memperlancar distribusi barang dan jasa serta mobilitas penduduk dalam rangka mendukung ekonomi kerakyatan
- (Melakukan advokasi anggaran untuk percepatan pemulihan infrastruktur di daerah konflik dan perbatasan guna mendukung percepatan pemulihan stabilitas keamanan dan pertahanan Mendorong Pemerintah melakukan Pengkajian dan penggalian sumber-sumber pembiayaan dari sektor pendapatan lain antara lain APBD melalui pajak Restribusi Daerah guna pemenuhan pembiayaan infrastruktur ke-PU-an
- Mengevaluasi dan mengaudit proyek-proyek infrastruktur yang manfaatnya belum optimal dirasakan oleh masyarakat. Agaknya perlu juga dilakukan evaluasi kinerja kontraktor yang sudah menjadi langganan penerima tender dalam pembangunan infrastruktur di tanah air.
- Mendorong Pemerintah agar segera membentuk kelembagaan baru yang mendukung pelaksanaan PPP (Public Private Project) guna percepatan pembangunan infrastruktur bekerjasama dengan pihak swasta.. Dimana dana yang bersumber dari APBN dan APBD dibebankan untuk pemenuhan infrastruktur dasar, sementara pemenuhan pembiayaan infrastruktur lainnya di gulirkan melalui skema PPP.

- Mendorong Pemerintah agar melakukan harmonisasi, reformasi, dan revisi terhadap berbagai aturan pusat dan daerah yang saling bertentangan dan menghambat investasi dalam bidang infrastruktur
- Mencermati kebijakan Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur apakah sudah mempertimbangkan dimensi spasial: infrastruktur nasional, regional, perkotaan, dan perdesaan. Karena pendekatan pengembangan wilayah dalam pembangunan infrastruktur dinilai mampu memenuhi berbagai tuntutan komabilitas tersebut
- Mengevaluasi kinerja Departemen Pekerjaan Umum berdasarkan Rencana Kerja Departemen Pekerjaan Umum tahun 2004-2009
- Mengevaluasi kinerja Kementerian Daerah Tertinggal berdasarkan Keputusan Menteri Negara RI No. 001/Kep/M-PDT/1/2005
- Mengevaluasi kinerja Kementerian Perumahan Rakyat berdasarkan Keputusan Menteri No: 001/Kep/M/PDT/1/2005
- Mengevaluasi kinerja Departemen Pekerjaan Umum berdasarkan Rencana Departemen Pekerjaan Umum tahun 2004-2009.

Skala Daerah

Sejak Oktober 2009 ada sejumlah inisiatif yang telah dilaksanakan di daerah termasuk NTT dalam format kemitraan dengan individu, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, akademik dan pemerintah dari level desa, kecamatan, kabupaten sampai provinsi, di antaranya :

- Meningkatkan relasi kemitraan dengan rakyat konstituen dengan membaur, tinggal dan bahkan tidur di rumah mereka pada setiap reses. Di sana saya menyelami realitas masyarakat desa dari berbagai latar belakang sosial dan keahlian sehingga dapat membawanya ke dalam konteks

legislasi, anggaran dan pengawasan dengan lebih mudah. Bersama-sama dengan anggota DPRD dari Partai Gerindra di provinsi dan Kabupaten kami bersepakat untuk menjadikan 'kebiasaan' ini sebuah gerakan menuju '**demokrasi kerakyatan**' yang benar.

- Memediasi tuntutan berbagai elemen masyarakat terhadap kasus pencemaran laut Timor oleh Perusahaan Montara Australia, mendesak Kementerian Perhubungan agar tanggap terhadap masalah lonjakan harga bahan pokok akibat lumpuhnya jalur transportasi laut antara Jawa dan NTT selama musim hujan.
- Merintis Rumah Rakyat Indonesia Raya. Ini adalah sebuah inisiatif menerobos kesulitan komunikasi dengan konstituen. Meskipun sebuah rumah, namun konteksnya lebih kepada suasana yang kondusif untuk siapapun yang merasa menjadi bagian dari anggota rumah untuk saling mengapresiasi, meneguhkan dan bahkan mengoreksi satu sama lain sehingga semua mendapat manfaat, sekurang-kurangnya ter-update setiap saat. Dari situlah fungsi kontrol berjalan dan evaluasi dapat dilakukan secara sinambung.
- Membuat catatan-catatan kritis kepada Kementerian Perhubungan, BMKG dan Basarnas terkait kecelakaan kapal motor Dumai Express di perairan kepulauan Riau. Kasus seperti itu telah terjadi berulang-ulang, namun terkesan diabaikan begitu saja oleh pemerintah.
- Mendesak pemerintah melakukan Good Practice Case Studies pengentasan Daerah Tertinggal, sehingga perencanaan lebih terarah, efektif dan efisien.
- Memfasilitasi Forum DAMRI yang datang ke Komisi V DPR RI untuk memperjuangkan hak-haknya.
- Berpartisipasi dalam usaha pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Melalui Kerjasama Antar Daerah (KAD) Dalam Pengelolaan

DAS Benenain NTT secara Terpadu. Target dari kolaborasi ini adalah membudayakan kebiasaan **memanen air hujan (*rain water harvesting*)** untuk menekan dampak kekeringan di NTT.

- Sejalan dengan komitmen untuk '**meramaikan laut sawu**' saya memfasilitasi pemerintah kabupaten Sabu Raijua untuk bertemu dengan Dirjen Perhubungan laut guna membahas peluang pembukaan route KM Awu ke pelabuhan kabupaten Sabu Raijua. Upaya itu berhasil dengan ditandatangani dan ditetapkannya route KM Awu yang menyinggahi Pulau Sabu sebulan sekali, sejak Juli 2010.
- Bersama masyarakat 4 kabupaten di pulau Sumba mengidentifikasi kondisi infrastruktur di pulau itu dan menghimpun kendala pembangunan yang terkait dengan disinkronisasi tata ruang dan peruntukannya.
- Belajar kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah Austria dalam mengoptimalkan pembangunan perumahan bagi masyarakat miskin, serta mengkaji kesesuaiannya dengan Indonesia.
- Menggagas dan melaksanakan Pelatihan Kader Pratama Gerindra sebagai bagian dari upaya regenerasi pendukung Gerindra di NTT.
- Menggagas perluasan manifesto dan visi misi Gerindra kepada Kalangan Generasi Muda di NTT melalui Pembinaan Kelompok Seni Tradisi Indonesia Raya yang disingkat Generasi Muda **PASTI Indonesia Raya**. Pemberian beasiswa bagi anak-anak berprestasi yang dilakukan dalam kerjasam dengan pihak gereja lokal juga merupakan bagian dari upaya ini.
- Berpartisipasi dalam forum pertemuan yang melibatkan pemerintah/kepala daerah untuk membahas pembangunan, kendala dan alternatif pemecahan yang realistis sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

Misi Belum Selesai ...

Tantangan pasti akan makin besar, namun keyakinan bahwa capaian akan lebih baik di masa depan juga makin kuat. Karena saya percaya bahwa bersama rakyat dan menjadi saudara mereka dan sahabat mereka setiap saat akan membuat benang kusut pembangunan di masa lalu dapat diuraikan dengan lebih bijak dan dengan demikian pembangunan infrastruktur berbasis desa akan dapat membawa Indonesia Raya menjadi lebih bermartabat dan makmur. Salam Indonesia Raya.***

Bagian I

LAPORAN KERJA

Berjuang Dari Senayan

**Membawa Amanat
Rakyat Mencapai
Legislasi Anggaran
dan Pengawasan**



Laporan Kerja saya pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2009-2010 periode 1-30 November 2009, yang merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap amanat Fraksi Gerindra ini, memuat sejumlah kesimpulan/keputusan yang dicapai dalam rapat-rapat Komisi, Panitia dan Badan berdasarkan peran anggota sebagai berikut:

1. Ketua Poksi Gerindra Komisi V DPR RI
2. Badan Anggaran DPR RI
3. Panitia Ad-Hoc MPR RI

Dalam periode tersebut saya mengikuti berbagai kegiatan, baik yang terjadwal maupun yang bersifat insidental berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dewan di bidang legislasi, penganggaran maupun pengawasan dengan senantiasa mengusung isu-isu kerakyatan sesuai dengan garis perjuangan fraksi dan Manifesto Gerindra. Kegiatan yang terjadwal tersebut termasuk 12 kali rapat di Komisi V yang meliputi 6 kali Rapat Intern, 2 kali Rapat Kerja (Raker), 2 kali Rapat Dengar Pendapat

November 2009

(RDP) dan 2 kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

Sementara itu dalam melaksanakan peran di Panitia Ad-Hoc MPR RI saya mengikuti sejumlah kegiatan antara lain rapat, sosialisasi, dan TOT antara lain 6 kali rapat, 2 kali konsinyering, 1 kali sosialisasi dan 1 kali TOT. Sedangkan dalam kapasitas sebagai anggota Badan Anggaran DPR RI dalam periode yang sama, saya juga mengikuti sejumlah rapat dan salah satu di antaranya adalah rapat dengan agenda Dengar Pendapat Umum Badan Anggaran Dengan Para Pakar tentang Prospek APBN 2010 yang terlaksana pada tanggal 30 November 2009. Berbagai isu telah dibahas dalam rapat-rapat tersebut, namun saya memandang penting untuk menggaris bawahi sejumlah isu aktual yang sesuai dengan fungsi DPR RI dan selaras dengan Garis Perjuangan Fraksi Gerindra sebagaimana diuraikan berikut ini.

Fungsi Legislasi

Pada aspek ini, Komisi V DPR RI menyoroti mandeknya penyelesaian berbagai peraturan teknis baik dalam bentuk peraturan pemerintah maupun peraturan menteri dalam ruang lingkup kementerian/lembaga sebagaimana diamanatkan oleh berbagai undang-undang. Misalnya, kepastian implementasi dana preservasi jalan sesuai dengan amanat UU 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan; lanjutan pembahasan bersama Departemen Hukum dan HAM mengenai peraturan pemerintah dan peraturan turunannya terkait dengan UU No. 17 Tahun 2007 tentang pelayaran yang hingga saat ini belum diselesaikan.

Dalam konteks menjalankan fungsi legislasi ini pula, Poksi Gerindra secara tegas mendesak Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kementerian Perumahan Rakyat agar perumusan RUU percepatan pembangunan Daerah Tertinggal segera dilakukan agar selanjutnya diajukan kepada DPR RI dan persiapan untuk melakukan segera revisi UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, dan revisi UU No. 16 tahun

November 2009

1985 tentang rumah susun agar dapat dimasukkan dalam prolegnas 2009-2014. Dua buah usul RUU yang disebutkan terakhir ini berhasil masuk dalam agenda prolegnas 2010-2024 sebagai usul inisiatif Komisi V DPR RI dari Poksi Gerindra. Menurut pandangan Komisi V DPR RI, implementasi dari UU tersebut akan berdampak signifikan terhadap kepastian dan kejelasan aturan hukum bagi melaksanakan program pembangunan daerah tertinggal bidang pembangunan perumahan.

Desakan lain dari Komisi V DPR RI yang mengemuka adalah agar pemerintah menyelesaikan secepatnya produk perundang-undangan turunan dari UU No 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika; melakukan sosialisasi UU No 31 tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, termasuk kelembagaan BMKG kepada semua pemangku kepentingan (usulan percepatan penyelesaian produk UU No. 31 Tahun 2009 tersebut diinisiasi oleh Poksi Gerindra, mengingat UU tersebut berkorelasi positif dengan upaya mitigasi bencana, yang bersama-sama dengan fluktuasi harga migas dan nilai tukar rupiah, merupakan salah satu variabel langsung yang mempengaruhi kemampuan ekonomi rakyat kecil di Indonesia). Dalam rangka itu pula Komisi V DPR RI juga meminta BASARNAS untuk mempersiapkan kajian dan naskah akademik dan rancangan legislasi tentang pencarian, dan pertolongan yang komprehensif dengan mengakomodir keterpaduan semua pemangku kepentingan. Komisi V DPR RI juga mendesak agar draft naskah akademik dan draft RUU tentang pencarian dan pertolongan (Search dan Rescue) dapat diusulkan menjadi agenda Prolegnas 2009-2014. Sedangkan dengan BUMN Karya, Komisi V DPR RI sepakat terhadap perlunya melakukan revisi UU No. 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi dalam upaya pengembangan iklim usaha industry konstruksi dan konsultasi dengan substansi materi antara lain (1) Kesetaraan owner dengan pelaksana; (2) pekerjaan; (3) Kebijakan atas eskalasi harga dan (4) Kejelasan kontrak pekerjaan yang melibatkan asosiasi.

Fungsi Anggaran

November 2009

Komisi V DPR RI menyatakan akan memperjuangkan peningkatan anggaran guna pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana BMKG, BASARNAS dan BPLS, guna mendukung program mitigasi dan adaptasi bencana alam yang berpihak pada rakyat, termasuk pendeteksian dini, pencarian dan pertolongan, serta penanggulangan bencana; sementara itu, kepada Departemen Pekerjaan Umum Komisi V menyatakan dapat memahami daya serap APBN 2009, meskipun telah mencapai 81,89% kinerja fisik dan 75,58% kinerja keuangan (per 13 November 2009); pada saat yang sama Komisi V DPR RI tetap melakukan koreksi dengan cara meminta Departemen Pekerjaan Umum untuk terus meningkatkan kinerja dalam rangka mewujudkan pengelolaan anggaran Negara yang lebih optimal dengan melakukan terobosan-terobosan dalam menyelesaikan hambatan yang dihadapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, utamanya pada pelaksanaan anggaran stimulus fiskal 2009 yang disampaikan per Oktober 2009 baru mencapai 50,61% kinerja fisik dan 50,11 % kinerja keuangan.

Sementara itu, dalam melaksanakan fungsi anggarannya pula, Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal agar penyusunan RKA-K/L APBN 2010-2014 termasuk pembiayaan pembangunan yang berasal dari PHLN, harus berbasis kebutuhan, distribusi yang proporsional, tidak tumpang tindih dengan instansi lain, mengakomodasi hasil kunjungan kerja, kunjungan lapangan, kunjungan perorangan (reses) serta memperhatikan usulan Komisi V DPR RI secara sungguh-sungguh dengan tetap mengacu pada Renstra KPDT 2010-2014.

Komisi V DPR RI juga mendesak Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal untuk meningkatkan daya serap APBN 2009 di mana per tanggal 31 Oktober 2009 realisasinya baru mencapai 61,51% pada BA 67 dan 57,76% pada BA 999, selanjutnya Komisi V DPR RI meminta KPDT untuk terus meningkatkan kinerja untuk mewujudkan pengelolaan anggaran Negara yang lebih optimal dengan melakukan terobosan-

November 2009

terobosan dalam menyelesaikan hambatan yang dihadapi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Apabila persoalan-persoalan tersebut dapat diatasi oleh KPDT, Poksi Gerindra mendukung Komisi V untuk memberikan perhatian secara khusus untuk penambahan anggaran KPDT untuk APBN-P maupun APBN Murni 2011.

Terhadap BMKG dan Basarnas, Komisi V DPR RI menyatakan dalam rapat dengar pendapat 30 November 2009, akan mendukung pemenuhan sarana dan prasarana yang diperlukan BMKG dan Basarnas untuk mengejar target back log yang direncanakan dalam periode APBN 2010-2014. Selanjutnya Komisi V DPR RI mendesak BMKG dan Basarnas mengajukan usulan disertai argumentasi professional kepada Bappenas dan Menteri Keuangan terkait urgensi sarana dan prasarana tersebut. Pada bagian lain, Komisi V DPR RI juga mendesak BMKG, Basarnas, dan BPLS untuk meningkatkan daya serap APBN TA. 2009 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat BMKG baru mencapai penyerapan sebesar 74% kinerja fisik dan 67,77% kinerja keuangan per 25 November 2009; dan Basarnas mencapai penyerapan sebesar 87,49% kinerja fisik dan 79,08% kinerja keuangan pada tanggal yang sama. Sedangkan BPLS mencapai penyerapan 32,87% per 24 November 2009. Atas temuan tersebut Komisi V DPR RI menyatakan dapat memahami keterbatasan anggaran APBN 2010 di BMKG dan Basarnas, untuk itu Komisi V DPR RI sepakat untuk melakukan evaluasi kembali APBN 2010 melalui mekanisme perubahan/penyesuaian secepatnya, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi Pengawasan

Dari 3 fungsi yang diemban Komisi V DPR RI dalam periode 1-30 November 2009, fungsi pengawasan terkesan paling menonjol. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya desakan Komisi V DPR RI kepada mitra untuk meningkatkan kinerja mereka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Desakan tersebut

November 2009

didasarkan pada analisis Komisi V DPR RI terhadap kinerja mitra kerja dalam penyerapan anggaran maupun kemajuan fisik. Salah satu manifestasi fungsi pengawasan tersebut adalah kesediaan Komisi V DPR RI untuk mengawal dan memastikan bahwa setiap program pemerintah yang direncanakan dan dilaksanakan oleh mitranya, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, termasuk program 100 hari pertama pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II dapat tercapai sesuai rencana dan bermanfaat bagi peningkatan harkat, martabat dan hajat hidup setiap orang Indonesia. Sebagai contoh, Komisi V DPR RI mendesak pemerintah untuk secara berkala melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan sarana dan prasarana keselamatan serta kelaikan dari moda transportasi untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya peristiwa kecelakaan transportasi; meminta pemerintah untuk menetapkan secara jelas indikator keberhasilan penanganan Angkutan Natal 2009 dan Tahun Baru 2010 (seperti menurunnya jumlah kecelakaan baik pada moda transportasi darat, laut maupun udara, menurunnya waktu tunggu dan antrean khususnya di penyeberangan Merak-Bakauheni dan penyeberangan Banyuwangi-Gilimanuk, menurunnya tingkat keterlambatan—delay time pada moda transportasi darat, laut maupun udara, menurunnya tingkat kemacetan jalan raya khususnya pada jalur angkutan Natal/Tahun Baru 2009/2010, berkurangnya calo tiket, dan tercapainya harga tiket yang stabil dan wajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku).

Indikator-indikator tersebut menurut pandangan Komisi V DPR RI akan dijadikan patokan dalam evaluasi tingkat keberhasilan Angkutan Natal 2009 dan Tahun Baru 2010. Komisi V mengingatkan pemerintah agar pemerintah memetik pelajaran dari kasus kecelakaan KM Dumai Express, dan mendesak Departemen Perhubungan, c.q. Dirjen Perhubungan Laut untuk melakukan investigasi secara cepat dan menyeluruh atas penyebab kecelakaan serta memaparkan hasil investigasi tersebut kepada Komisi V DPR RI sebagai bahan evaluasi berkaitan dengan fungsi

November 2009

pengawasan DPR RI yang diikuti dengan langkah-langkah serta pemberian sanksi hukum dan/atau administratif bagi mereka yang terbukti bersalah. Dalam rangka itu dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan DPR RI termasuk implementasi paket undang-undang transportasi yaitu UU No. 23 tahun 2007 tentang perkotaan; UU No 17 tahun 2008 tentang pelayaran; UU No 1 tahun 2009 tentang penerbangan dan UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Komisi V DPR RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) keselamatan transportasi untuk melakukan investigasi terhadap berbagai kecelakaan transportasi akhir-akhir ini.

Kesimpulan

Sampai dengan akhir November 2009, saya telah menjalankan tugas dan tanggung jawab konsitusional melalui peran saya sebagai Ketua Poksi Fraksi Gerindra Komisi V DPR RI secara optimal. Hal itu dapat dilihat dari sejumlah pandangan kreatif orisinal, usulan yang persuasif maupun penegasan-penegasan yang argumentatif; baik yang bertujuan apresiatif maupun korektif guna meneguhkan dan meningkatkan kualitas maupun kapasitas mitra dalam peran mereka sebagai penyelenggara utama berbagai program pembangunan di setiap kementerian/lembaga. Beberapa dari antara pandangan, usulan maupun penegasan dari saya yang didukung oleh anggota POKSI Gerindra di Komisi V adalah (1) mendesak pemerintah agar memasukkan kasus pencemaran laut Timor dalam agenda 100 hari Menteri Perhubungan; (2) mendorong Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal untuk melakukan Good Practices Case Studies di 50 daerah yang telah dinyatakan keluar dari daerah tertinggal sehingga lesson learned dari 50 daerah tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu panduan pembangunan daerah yang masih dalam kategori tertinggal; (3) Mendesak pemerintah untuk memusatkan perhatian secara sungguh-

November 2009

sungguh pada setiap upaya pembangunan daerah tertinggal melalui alokasi anggaran yang pro poor, pro job dan pro growth (yang selaras dengan garis perjuangan Fraksi Gerindra) dan meminta agar anggaran pembangunan daerah tertinggal sedapat mungkin diambil dari APBN murni dan apabila ada peluang pinjaman luar negeri (PHLN), hendaknya fungsinya hanya sebagai dana pendamping saja.

Selain itu, sebagai ketua Poksi Gerindra di Komisi V, saya melakukan pertemuan-pertemuan internal dengan Sdr. Nur Iswanto

(A-20) dan Gunadi Ibrahim (A-22) untuk menyamakan gerak dan pembagian peran untuk masing-masing anggota baik berupa pandangan menyangkut issue-issue fraksi maupun berkaitan dengan fokus rancangan undang-undang yang akan dikawal saat pembagian tim kerja RUU. Sebagai Anggota tim ad hoc MPR yang bertugas menyusun Tata Tertib MPR, beberapa usulan dan penegasan saya yang memperlihatkan relevansinya dengan garis perjuangan Fraksi Gerindra diantaranya pasal 1 ayat 2 dan ayat 7, pasal 3 ayat, dan lain-lain (lihat Daftar Invenstaris Masalah

“... mendesak pemerintah agar memasukkan kasus pencemaran laut Timor dalam agenda 100 hari Menteri Perhubungan; mendorong Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal untuk melakukan Good Practices Case Studies di 50 daerah yang telah dinyatakan keluar dari daerah tertinggal sehingga lesson learned dari 50 daerah tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu panduan pembangunan daerah yang masih dalam kategori

November 2009

Rancangan Peraturan Tata Tertib MPR RI halaman 1-12). Masih dalam rangkaian upaya menggalang pemahaman masyarakat untuk kembali ke UUD 1945 yang asli, saya bersama pimpinan dan anggota Fraksi Gerindra di MPR RI telah menyusun Rencana Aksi Untuk Menyelenggarakan Workshop dan Diskusi dengan tema-tema aktual sepanjang tahun 2010

Dan, sebagai Anggota Badan Anggaran di Komisi V DPR RI, saya sejauh ini aktif memberikan masukan dalam rangka pemantapan Tim Badan Anggaran Komisi V DPR RI. Selain itu saya juga aktif dalam kegiatan orientasi berkaitan dengan alur, mekanisme, pemahaman dan asumsi-asumsi makro sehingga semua Anggota Badan Anggaran memperoleh pemahaman yang sama, dan dengan demikian dapat menjadi asumsi kerja saat pembahasan anggaran baik APBN-P 2010 maupun APBN murni tahun anggaran 2011.***

RESES I

Kolaborasi Kampung dan Senayan

Bergandeng Tangan
Menggapai Cita-cita
Bersama



Kunjungan Kerja Reses Masa Sidang Pertama ke Daerah Pemilihan (DAPIL) NTT dilaksanakan dari tanggal 6 Desember 2009 sampai tanggal 4 Januari 2010. Kunjungan Individu ke Dapil NTT diselingi oleh kunjungan kerja Komisi V ke Maluku Utara dari tanggal 9-11 Desember 2009 dan juga kegiatan Workshop Penilaian Rancangan UU yang dilaksanakan di Bogor dari tanggal 21-23 Desember dan kegiatan konsiyering Tim Ad hoc MPR yang dilaksanakan dari tanggal 23-24 Desember 2009.

Berkaitan dengan tujuan reses, kali ini saya fokus pada 4 (empat) tujuan utama, yaitu ; 1) Silaturahmi dangan Pimpinan Daerah Baik Gubernur maupun Bupati bersama Mitra Kerja untuk menjelaskan peran dan garis perjuangan saya di DPR RI, 2) Bertemu & Berdialog secara langsung dengan Konstituen, untuk menyampaikan terima kasih dan sekaligus mendengar issue yang selama ini masyarakat gumulkan, 3) Membangun kebersamaan & persaudaraan melalui tidur di rumah masyarakat dan ikut bersama merasakan persoalan masyarakat berkaitan dengan

Desember 2009

infrastuktur dasar di desa, selain itu sebagai fungsionaris partai pada masa reses ini juga melakukan konsolidasi DPD, DPC dan penguatan bagi Anggota DPRD untuk mendengarkan masukan rencana membangun Rumah Konstituen.

Pada kunjungan Reses kali ini, saya mengajak Asisten (Suna Marey) dan Tenaga Ahli (Yan Ghewa) mengikuti rangkaian kunjungan baik saat bertemu dengan Pemerintah Daerah maupun dengan Masyarakat Umum.

Strategi Kunjungan dan Garis Perjuangan Fraksi

Kunjungan kali ini, saya mencoba untuk membuat suasana non formil dan menghindari protokoler. Saya berusaha memposisikan diri menjadi bagian dari aktifis LSM dan bagian dari masyarakat yang pertemuannya dirancang TIDAK RESMI walaupun ada beberapa Desa yang telah mempersiapkan rangkaian kunjungan secara resmi, namun saya meminta untuk tidak dilakukan, intinya saya datang sebagai KELUARGA, sebagai SAHABAT, tidak dilihat sebagai ANGGOTA DPR RI. Dibeberapa Desa yang saya kunjungi sengaja saya tidak memberi informasi kepada Kepala Desa supaya mereka tidak menyibukkan diri untuk mempersiapkan kunjungan saya sebagaimana kunjungan pejabat-pejabat yang datang dari propinsi dan pusat.

Strategi ini saya gunakan selain untuk tetap menyatu tetapi juga dari pengalaman sebelumnya, strategi ini akan membuat masyarakat merasa ini bagian dari dirinya bukan orang baru. Walaupun demikian, saat bertemu dengan Pimpinan Daerah baik Gubernur dan Bupati selalu diatur secara protokoler. Mengingat waktu yang sangat terbatas, reses kali ini saya fokus di daratan Timor dan Kabupaten Rote.

Temuan –Temuan Utama

Pertemuan dengan Pimpinan Daerah Wakil Gubernur NTT, Bupati Kabupaten Kupang, Walikota Kupang, Bupati TTS, Bupati

Desember 2009

“...Kunjungan kali ini, saya mencoba untuk membuat suasana non formil dan menghindari protokoler. Saya berusaha memposisikan diri menjadi bagian dari aktifis LSM dan bagian dari masyarakat yang pertemuannya dirancang TIDAK RESMI walaupun ada beberapa Desa yang telah mempersiapkan rangkaian kunjungan secara resmi, namun saya meminta untuk tidak dilakukan, intinya saya datang sebagai KELUARGA, sebagai SAHABAT, tidak dilihat sebagai ANGGOTA DPR

TTU dan Bupati Belu : Pertemuan ini bertujuan selain untuk memperkenalkan diri berkaitan dengan cakupan kerja saya di DPR RI termasuk didalamnya garis perjuangan dalam rangka membangun infrastruktur pedesaan, tani & nelayan. Pertemuan ini juga saya ingin menginformasikan berkaitan keberadaan saya di wilayah kerja pimpinan daerah sebelum terjun ke masyarakat. Selain itu, pada kesempatan tersebut saya juga menjelaskan berkaitan dengan dukungan RPJMD

propinsi NTT yang mendukung pembangunan pertanian dan nelayan di NTT karena itu bagian dari garis perjuangan fraksi GERINDRA. Beberapa usulan berkaitan dengan kebutuhan masing masing daerah baik propinsi maupun kabupaten saya lampirkan sebagai satu kesatuan dari laporan ini. Pada kesempatan pertemuan dengan pimpinan daerah, saya mengajak anggota DPRD sebagai upaya penguatan kapasitas dalam melakukan bergaining politik termasuk bagaimana cara meyakinkan kepada pimpinan bahwa fraksi Gerindra memiliki garis perjuangan dari

Desember 2009

“...11 LSM menyepakati untuk mengawal program program infrastruktur pedesaan, ...jaringan akan melakukan evaluasi kerja program infrastruktur desa dari dana APBN kemudian akan ditindaklanjuti dengan seminar hasil evaluasi yang akan mengundang Dinas PU sebagai Satker dan saya sendiri berjanji akan hadir dan ikut membahas temuan jaringan LSM...”

pusat sampai daerah diharapkan bisa bersinergi. Catatan Khusus untuk Kota Kupang yang karena kesibukan Wakil Walikota Kupang, akhirnya tidak bertemu sesuai dengan agenda yang sudah disepakati.

Pertemuan dengan Forum Academia NTT ; Forum ini merupakan para akademisi muda NTT yang selama ini memberikan masukan-masukan untuk pembangunan NTT yang terdiri dari aktifis LSM,

Birokrasi, Akademisi, Mahasiswa dan Rohani-wan. 4 point issue yang diangkat dari pertemuan untuk dikawal oleh forum ini adalah : 1) Membangun Gerakan Memanen Air, 2) Meramaikan Laut Sawu, 3) Pendidikan politik bagi masyarakat, 4) Issue perbatasan celah Timor & Australia. Narasumber yang memberikan input adalah Pius Rengka (Mantan Anggota DPRD NTT), Piet Djami Rebo (Mantan Kadis Kimpraswil), Prof Mia Noach (Academisi) selain itu dihadiri Rohaniawan, wartawan dan aktifis LSM. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini saya mendorong Suster Cilia Laurentia (penerima Award academia) untuk mengusulkan pilot proyek gerakan memanen air di kabupaten Sabu, selain itu untuk meramaikan laut Sawu, saya bersama dengan rekan Komisi V dapil NTT akan memperjuangkan di DPR RI bersama mitra terkait.

Pertemuan dengan Jaringan LSM dikordinir oleh Alfa Omega

Desember 2009

diruang pertemuan yayasan Alfa Omega ; Pertemuan ini sebagai upaya mendengarkan isue-isue infrastruktur desa dari kacamata LSM, hadir 11 LSM dan menyepakati untuk mengawal program program infrastruktur pedesaan, jaringan akan melakukan evaluasi kerja program infrastruktur desa dari dana APBN kemudian akan ditindaklanjuti dengan seminar hasil evaluasi yang akan mengundang Dinas PU sebagai Satker dan saya sendiri berjanji akan hadir dan ikut membahas temuan jaringan LSM. Direncanakan 1 (satu) LSM akan mengevaluasi 1 proyek P2IP di daerah binaannya.

Pertemuan dan Dialog dengan Masyarakat di Desa-Desa ; pertemuan dengan masyarakat desa bertujuan selain untuk menyampaikan terima kasih secara langsung bahwa saya telah terpilih sebagai Anggota DPR RI juga saya menjelaskan bidang kerja saya di DPR termasuk juga berkaitan dengan garis perjuangan Fraksi Gerindra. Pada kesempatan itu juga saya ingin mempertegas bahwa kekuatan persaudaraan dan pertemanan bagian dari pendekatan kita selama bersama dengan masyarakat sehingga saya memilih tidur di rumah penduduk disamping bersama masyarakat melihat langsung dan merasakan persoalan infrastruktur dasar di Desa. Tujuan lain dari kunjungan kali ini adalah memastikan alur perjuangan yang selama ini berbasis masyarakat tetap menjadi bagian dari pendekatan perjuangan saya di DPR RI. Pada perkunjungan ini, masyarakat tidak banyak menyampaikan persoalan dan kebutuhannya karena masyarakat, kemungkinan masyarakat tahu bahwa saya adalah bagian dari mereka yang sudah mengenal Desa dan tahu persoalan yang akan diperjuangkan di pusat, walaupun demikian beberapa Desa mengusulkan beberapa isue untuk diperjuangkan di pusat. Saya juga meminta agar usulan tersebut direncanakan melalui proses perencanaan dari desa melalui musrenbagdes yang nantinya dikirimkan kepada saya. Paling tidak perjuangan program infrastruktur dasar Desa selama 5 tahun ini bisa saya perjuangkan

Desember 2009

sesuai dengan mekanisme yang ada.

Natal Bersama Menteri Percepatan Pembangunan Daerah tertinggal bersama dengan Pemda dan masyarakat Kabupaten Rote Ndao ; Kegiatan ini adalah upaya kami anggota DPR RI komisi V Dapil NTT mengajak Menteri PDT berkunjung ke Rote Ndao untuk melihat secara langsung Pulau Rote pulau terselatan Indonesia, pulau terluar, kabupaten tertinggal dan kabupaten kepulauan sebanyak 106 pulau. Diharapkan melalui kunjungan ini Menteri mendapat gambaran umum karakteristik pulau Rote dan Timor di propinsi NTT. Selain itu juga bisa bersama sama dengan masyarakat Rote saling bersilaturahmi.

“...dalam pertemuan dengan Academia NTT disepakatai isu-isu utama perjuangan yakni : 1) Membangun Gerakan Memanen Air, 2) Meramaikan Laut Sawu, 3) Pendidikan politik bagi masyarakat, 4) Issue perbatasan celah Timor & Australia...saya mendorong anggota forum yang memiliki keahlian dalam bidang pengelolaan sumber daya air untuk mengusulkan pilot proyek gerakan memanen air di kabupaten Sabu, selain itu untuk meningkatkan aktifitas lalu lintas laut di perairan laut Sawu, saya bersama dengan rekan Komisi V dapil NTT akan memperjuangkan di DPR RI bersama mitra terkait...”

Perspektif Kedepan sebagai Rekomendasi

Berangkat dari temuan-temuan tersebut diatas, tantangan

Desember 2009

yang mendesak dipertimbangkan sebagai usulan untuk diperjuangkan berkaitan dengan infrastruktur adalah sebagai berikut :

Mengacu kepada diskusi dengan wakil gubernur dan mitra kerja di tingkat provinsi serta dokumen-dokumen perencanaan yang tersedia (seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah NTT 2009-2013 dan Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur masing mitra kerja) maka menurut saya perlu perhatian serius pada sejumlah usulan yang berkaitan dengan peningkatan infrastruktur terutama infrastruktur yang mendukung pembangunan di wilayah pedesaan dan pertanian seperti

Program Pembangunan Jalan/Jembatan dengan indikator :

- Meningkatnya permukaan jalan provinsi dalam kondisi baik dan sedang dari 20.9% (2006) menjadi minimal 30% pada tahun 2013.
- Bertambahnya panjang jembatan yang dapat dilewati kendaraan
- Meningkatnya kecepatan rata-rata layanan jalan provinsi menjadi 50 km/jam
 - meningkatnya sarana dan prasarana angkutan umum
 - meningkatnya pelayanan pengujian dan keselamatan transportasi
 - meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana bongkar muat barang dan hewan di setiap pelabuhan
 - meningkatnya kualitas pelayanan di terminal bandar udara
- Meningkatnya prosesntase tingkat fungsional daerah irigasi terhadap lahan potensial dari 55.6% (2005) menjadi 65% pada tahun 2013
- meningkatnya ketersediaan air baku untuk irigasi dan air bersih

Desember 2009

- Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana dan fasilitas perhubungan dengan indikator.
- Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, sumber daya air dan jaringan pengairan lainnya dengan indikator
- Pengembangan perumahan dan pemukiman
 - Meningkatnya kepemilikan rumah bagi masyarakat dari 87% menjadi minimal 90%.
 - Meningkatnya prosentase perumahan yang layak huni: atap layak dari 70.63% (2006) menjadi 80% pada tahun 2013 dan dinding permanen.
 - Menurunnya prosentase rumah tangga dengan sumber air bersih dari mata air tak terlindung 8.47% (2006) menjadi maksimal 7.4 % tahun 2013.
- Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
 - Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana jalan/jembatan lingkungan pemukiman, perumahan, air bersih, listrik dan pasar desa.
 - Meningkatnya aksesibilitas orang barang dan jasa sari dan antar wilayah

Pada dasarnya program pembangunan di provinsi NTT telah tercantum dalam RPJMD, sebagaimana dijelaskan di atas. Pada saat kunjungan kerja, setelah menjelaskan garis perjuangan fraksi, hanya ada 1 mitra kerja yang mengajukan usulan yaitu dari Dinas Perhubungan NTT dengan usulannya berupa Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari beberapa usulan tersebut menurut saya dari diskusi dan pendalaman selama masa reses yang sifatnya mendesak untuk diperjuangkan penganggarannya adalah :

- Program Pembanguann Saranan dan prassarana Sungai, Danau dan Penyeberangan dengan kegiatan : lanjutan pembangunan dermaga penyeberangan di Lewoleba, Sabu, Waikelo (SBD), dan Maropokot (Nagekeo)
- Pembangunan dermaga penyeberangan yang baru di Adonara (Flotim), hansisi (Semau), Baranusa (Pulau

Desember 2009

Pantar)

- Pembangunan Kapal Motor Penyeberangan dengan kapasitas 200 GRT dan 600 GRT.
- Lanjutan pembangunan pelabuhan laut di Komodo (Manggarai barat), Maumbawa (Ngada), Waewole (Manggarai Timur), Reo (Manggarai), Larantuka (Flores Timur).
- Program Pembangunan transportasi laut dengan kegiatan subsidi angkutan laut perintis pada rute R13, R14 dan R15.
- Program Pembangunan Transportasi Udara dengan kegiatan subsidi angkutan udara perintis rute Kupang-Sabu, Sabu-Waingapu, Kupang-Atambua.
- Perpanjangan landasan Pacu dari 900 meter menjadi 1400 meter pada bandara Lekunik (Rote Ndao), Tardamu (Sabu), Wunopito (Lembata) dan Gewayan Tana (Flotim).
- Pembangunan fasilitas keselamatan penerbangan pada bandara Mali (Alor), Haliwen (Belu), Bandara Frans Sales Lega (Manggarai), Tambolaka (SBD), Aroeboesman (Ende), Soa (Ngada), Umu Mehang Kunda (Sumba Timur).
- Peningkatan Peralatan Navigasi Penerbangan pada bandara EL Tari, Waioti (Sikka), Umu Mehang Kunda (Sumba Timur), Komodo (Manggarai Barat) dan Tambolaka (SBD).
- Sub Sektor Transportasi Darat
- Sub Sektor Transportasi Laut.
- Sub Sektor Transportasi Udara.

Mengacu pada diskusi dan referensi tersebut perlu dipertimbangkan program kabupaten TTS dan kabupaten Belu sebagai kabupaten yang menjadi fokus kunjungan masa reses saya kali ini sebagai berikut :

KABUPATEN TTS

- Usulan Program Pembangunan Infrastruktur (proposal

Desember 2009

terlampir) untuk bidang-bidang berikut dengan total dana sebesar Rp 266.750.000.000 (dua ratus enam puluh enam miliar 750 juta rupiah).

- Bidang Sarana dan Prasarana Irigasi berupa pembangunan bendungan, dan rehabilitasi /pemeliharaan jaringan irigasi
- Bidang prasarana jalan berupa peningkatan dan pemeliharaan jalan serta pembangunan jembatan
- Program Pengembangan kawasan pemukiman terpadu yang terdiri dari :
 - Pembangunan rumah sehat semi permanen type 36m2 sebanyak 225 unit.
 - Pembangunan prasarana lingkungan terdiri dari :
 - + Pembangunan drainase lingkungan 7500 km.
 - + Pembangunan jalan lingkungan 6722 km.
 - + Pembangunan 5 unit pasar desa.
 - + Pembangunan sub BTS di 20 desa.

BELU

Dalam pertemuan saya dengan bupati dan mitra kerja terkait terungkap usulan-usulan :

- Pembangunan Wilayah perbatasan di daerah tertinggal di kabupaten belu teridir idari
- Pengembangan perekonomian kawasan perbatasan berbasis sumber daya lokal
- peningkatan kualitas SDM masyarakat perbatasan melalui peningkatan pelayanan sarana sosial dasar
- penyediaan pemukiman yang layak melalui peningkatan pelayanan prasarana dasar pemukiman
- peningkatan pelayanan transportasi untuk mengatasi keterisolasian wilayah perbatasan dari pusat-pusat perumbuhan
- penguatan aspek pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan

Dalam diskusi terbatas dengan bupati Belu ada sejumlah

isu yang perlu diperjuangkan terutama :

- Usulan peningkatan status jalan provinsi menjadi jalan negara berkaitan dengan letak kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste.
- Membuka isolasi desa-desa sepanjang perbatasan dengan cara membangun jalan yang menghubungkan desa-desa tersebut sepanjang garis batas RI dan Timor Leste.
- Pengembangan fasilitas pelabuhan bongkar muat Atapupu.
- Pembangunan fasilitas keselamatan penerbangan dan peningkatan peralatan navigasi pada bandara Haliwen.

Perspektif Masyarakat termasuk Orang Desa, LSM, dan Akademisi :

- Forum Academia NTT ; Ada isu-isu aktual yang diangkat dari pertemuan untuk dikawal oleh forum ini adalah : 1) Membangun Gerakan Memanen Air, 2) Meramaikan Laut Sawu, 3) Pendidikan politik bagi masyarakat, 4) Issue perbatasan celah Timor & Australia. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini saya mendorong anggota forum yang memiliki keahlian dalam bidang pengelolaan sumber daya air untuk

“...dalam momen ini saya mempertegas bahwa kekuatan persaudaraan dan pertemanan merupakan landasan dari pendekatan kita selama ini, karena itu tidak banyak terungkap permintaan-permintaan yang sifatnya spontanitas. Sebaliknya di atas prinsip persaudaraan dan persahabatan yang telah terjalin selama ini mereka percaya bahwa apa yang saya perjuangkan merupakan bagian dari perjuangan mereka...”

Desember 2009

mengusulkan pilot proyek gerakan memanen air di kabupaten Sabu, selain itu untuk meningkatkan aktifitas lalu lintas laut di perairan laut Sawu, saya bersama dengan rekan Komisi V dapil NTT akan memperjuangkan di DPR RI bersama mitra terkait.

- Jaringan LSM ; Dalam rangka mengawal program-program infrastruktur pedesaan, jaringan sepakat melakukan evaluasi kerja program infrastruktur desa dari dana APBN kemudian akan ditindaklanjuti dengan seminar hasil evaluasi yang akan mengundang Dinas PU sebagai Satker dan saya sendiri berjanji akan hadir dan ikut membahas temuan jaringan LSM. Direncanakan 1 (satu) LSM akan mengevaluasi 1 proyek Pengembangan Infrastruktur Perdesaan dan proyek infrastruktur dasar lainnya di daerah binaan LSM masing-masing.
- Masyarakat di Desa-Desa ; Dalam momen ini saya mempertegas bahwa kekuatan persaudaraan dan pertemanan merupakan landasan dari pendekatan kita selama ini, karena itu tidak banyak terungkap permintaan-permintaan yang sifatnya spontanitas. Sebaliknya di atas prinsip persaudaraan dan persahabatan yang telah terjalin selama ini mereka percaya bahwa apa yang saya perjuangkan merupakan bagian dari perjuangan mereka. Namun, berdasarkan pengalaman bermitra dengan masyarakat selama ini, mereka berhasil merumuskan sejumlah isu yang berkaitan dengan infrastruktur dasar perdesaan, seperti akses transportasi (ke tempat-tempat pelayanan umum seperti pasar, kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan), air bersih, listrik, perumahan dan infrastruktur dasar lainnya. Terungkap pula bahwa usulan untuk mengatasi permasalahan di bidang-bidang tersebut telah kerap kali diajukan melalui forum musrenbangdes setiap tahun, namun realisasinya kebanyakan berbeda dengan usulan mereka. Karena itu mereka berharap saya dapat memperjuangkannya melalui mekanisme yang ada selama 5 tahun ini.***

Pembangunan Yang Berpihak Rakyat Miskin?

Anggarkan Rupiah Murni !



Dalam Masa Sidang II Tahun Sidang 2009-2010 periode 1-31 Januari 2010 ini saya telah mengikuti sejumlah kegiatan di tingkat Fraksi, Komisi-V, Badan Anggaran, dan Panitia Ad-Hoc di MPR-RI.

Dalam setiap kegiatan, baik di fraksi, Komisi V, Badan Anggaran, maupun Panitia Ad-Hoc MPR-RI, saya tak henti-hentinya menyuarkan keberpihakan kepada kebijakan yang pro rakyat dalam trilogi pro poor, pro job dan pro growth. Dengan berpijak pada trilogi tersebut, saya secara konsisten menyuarkan agar semua pihak senantiasa menyadari pentingnya menjalankan peran masing-masing sesuai dengan amanat partai yang tertuang dalam arah dan garis perjuangan partai, manifesto perjuangan dan prioritas pembangunan partai Gerindra. Dengan acuan tersebut, menurut saya setiap pendukung Gerindra harus memperlihatkan sikap kritis, sensitif dan responsif terhadap setiap gejala penyimpangan baik dalam bentuk kebijakan maupun tindakan yang dinilai dapat membawa dampak negatif bagi

Januari 2010

tercapainya perjuangan partai ini. Petani, nelayan dan pedagang pasar tradisional adalah kelompok-kelompok basis yang telah sekian lama termarginalkan, karena itu, Gerindra yang telah menaruh perhatian khusus dan telah menjalin hubungan baik dengan mereka, harus terus menerus menjadi mitra perjuangan yang setia, jujur dan dedikatif.

Di Komisi V DPR-RI, saya memberi perhatian serius terhadap sejumlah isu yang berkenaan langsung dengan hajat hidup orang banyak terutama lapisan masyarakat yang sehari-hari masih berkutat dengan upaya pemenuhan kebutuhan pokok seperti pangan dan perumahan. Hal itu tampak pada sikap dan pandangan-pandangannya selama menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan sebagai berikut.

Fungsi Legislasi.

Pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2009-2010 periode 1-31 Januari 2010 ini saya telah banyak mencurahkan perhatiannya kepada upaya terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat berpenghasilan rendah terhadap aspek perumahan, dengan menyampaikan sejumlah alasan rasional tentang pentingnya merevisi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Atas kepeduliannya yang tinggi terhadap permasalahan perumahan tersebut, saya kemudian ditugaskan oleh Pimpinan Fraksi Gerindra untuk duduk dalam Tim Kerja Pembentukan RUU Usul Inisiatif Komisi V DPR-RI tentang Perubahan atas UU Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman dan UU Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.

Fungsi Penganggaran.

Seperti pada masa sidang I, pada masa sidang II ini, saya masih secara konsisten mengajukan hasil telaahan dan pikiran kritisnya kepada kementerian dan lembaga mitra kerja Komisi V

Januari 2010

DPR-RI, terutama Kementerian PDT atas kinerja mereka dalam perencanaan dan penganggaran yang dipandang kurang sinkron dengan implementasinya. Berkaitan dengan itu, saya menyoroti pentingnya Kementerian PDT mengalokasikan anggaran yang lebih besar dari sumber dari rupiah murni, daripada pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) karena sangat naif apabila pemerintah mengandalkan PHLN untuk pembangunan daerah tertinggal, padahal dari hasil evaluasi, anggaran dari sumber PHLN selalu sulit diserap secara optimal karena banyaknya persyaratan yang gagal dipenuhi oleh pemerintah RI. Dampaknya adalah, seperti yang terjadi pada Tahun Anggaran 2009, terbengkalainya berbagai program pengentasan daerah tertinggal yang langsung bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak. Ini tentu saja kontraproduktif dengan prioritas pembangunan tahun anggaran tersebut yang berkaitan dengan upaya peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan perdesaan, percepatan pertumbuhan yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur dan energy.

Fungsi Pengawasan.

Mandegnya arus perhubungan dan transportasi laut yang mengakibatkan lonjakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan berbagai kebutuhan pokok di sejumlah kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur dalam periode November-Januari 2010 telah menjadi fokus perhatian saya dalam rapat-rapat dengar pendapat maupun rapat kerja dengan Kementerian Perhubungan RI. Dalam setiap rapat tersebut, secara berulang kali saya menyoroti lambannya kinerja pemerintah dalam meng-address isu-isu transportasi laut, yang berdampak pada stagnannya arus barang, maupun manusia baik antar provinsi maupun antar kabupaten/pulau di provinsi NTT. Isu-isu tersebut kemudian memuncak pada minggu terakhir bulan Januari 2010 dan mengakibatkan terjadinya krisis listrik di Kabupaten Sabu-Raijua. Krisis tersebut berdampak

Januari 2010

pada lumpuhnya aktivitas perkantoran yang menggunakan listrik PLN yang selama ini menggunakan bahan bakar solar (Media Indonesia Senin 25 Januari 2010). Karena itu dalam Rapat Kerja dalam rangka Evaluasi Program/Kegiatan TA 2009 dan Persiapan Program/Kegiatan 2010 pada tanggal 25 Januari 2010 dengan tegas menyatakan agar Menteri Perhubungan segera mengambil tindakan untuk mengendalikan dampak krisis BBM di pulau tersebut dan di

wilayah lain di Nusa Tenggara Timur. Selain itu, saya juga meminta agar Kementerian Perhubungan menyediakan kapal laut dengan gross register ton (GRT) yang sesuai dengan karakter laut di NTT yang bergelombang tinggi. Pada saat itu, 7 kapal Ferry yang beroperasi di perairan NTT kapasitasnya hanya 500-600 GRT, padahal yang dibutuhkan adalah kapal dengan kapasitas 1.200-2000 GRT, seperti diutarakan oleh Manager Operasional PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Kupang Arnoldus Yansen, di Kupang (Antara Kamis, 14 Januari 2010).

Terkait dengan upaya mengatasi masalah transportasi laut di NTT seperti yang lantang disuarakan oleh saya di Komisi V DPR-RI, pada tanggal 23 Maret 2010, Kementerian Perhubungan

”...Kementerian PDT harus mengalokasikan anggaran yang lebih besar dari sumber rupiah murni, daripada pinjaman/hibah luar negeri (PHLN), karena sangat naif apabila pemerintah mengandalkan PHLN untuk pembangunan daerah tertinggal,... PHLN selalu sulit diserap secara optimal karena banyaknya persyaratan yang gagal dipenuhi oleh pemerintah RI...”

Januari 2010

RI menyerahkan sebuah kapal Ferry dengan bobot mati 650 GT, kepada pemerintah NTT dengan tujuan untuk meningkatkan arus angkutan manusia dan barang di provinsi dengan corak kepulauan ini (Kompas, 24 Maret 2010).***

Rumah Rakyat Indonesia Raya

Mengentaskan Kendala Komunikasi Dengan Konstituen



Kegiatan utama saya pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2009-2010 periode Februari 2010 ini masih berkisar pada rapat-rapat di Fraksi Gerindra, Komisi V DPR-RI, Badan Anggaran, Panitia Ad-Hoc, dan Paripurna. Selain itu, saya juga terlibat dalam berbagai aktifitas yang masih berada dalam cakupan pelaksanaan fungsi konstitusional seorang anggota DPR-RI yaitu melaksanakan penugasan komisi V ke daerah-daerah untuk melakukan sosialisasi UU Nomor 22 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan di Provinsi Bali, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Barat. Berikut ini adalah uraian kegiatan saya yang paling menonjol baik di Fraksi Gerindra, Komisi V, maupun Badan Anggaran DPR-RI.

Di Fraksi Gerindra.

Dalam upaya mempertahankan hubungan dan komunikasi yang berkelanjutan dengan konstituennya, pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2009-2010, periode Februari 2010, saya melanjutkan upaya yang telah dirintis pada bulan sebelumnya, yakni menembus

Februari 2010

kendala komunikasi dengan konstituen dan simpatisan Gerindra di NTT dengan menginisiasi berdirinya sebuah jejaring yang mengaitkan anggota DPR dan DPRD, Para Pengurus Partai dari Tingkat DPD sampai ke Ranting, Para Kader, Relawan, Konstituen dan Simpatisan Gerindra di seluruh pelosok Nusa Tenggara Timur. Jaringan yang kemudian dideklarasikan pada tanggal 6 Februari 2010 di Kupang itu, bernaung di bawah Rumah Rakyat Indonesia Raya yang mengandalkan trust dan kesetiaan.”

Rumah Rakyat Indonesia Raya ini menurut saya, layaknya sebuah JARINGAN SATELIT yang menjembatani PARLEMEN dengan RAKYAT sehingga persoalan-persoalan aktual maupun strategis dapat dikelola secara sigap dan proporsional. Untuk itu Rumah Rakyat Indonesia kemudian membuka LAYANAN ASPIRASI RAKYAT NTT melalui:

- Po Box Rumah Rakyat Indonesia Raya 555
- HP SMS Rumah Rakyat Indonesia Raya 081 259 333 555; dan
- Facebook Rumah Rakyat Indonesia Raya

Mengapa Rumah Rakyat Indonesia Raya?

Setidaknya ada empat alasan mendasar yang mendorong lahirnya Rumah Rakyat Indonesia Raya, yaitu (1) Hubungan antara rakyat dan parlemen yang masih banyak hambatannya, terutama soal akses rakyat untuk menyampaikan aspirasi yang bebas hambatan; (2) Terbatasnya mekanisme dan ruang untuk membangun hubungan rakyat dan parlemen; (3) Akses terbuka hanya saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) namun yang dapat berinteraksi langsung biasanya hanyalah segelintir kelompok masyarakat, sehingga parlemen seringkali tidak dapat menyerap aspirasi rakyat secara optimal; dan (4) Kebutuhan akan sebuah wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat maupun parlemen tersebut secara interaktif.

Apa yang unik dari Rumah Rakyat Indonesia Raya?

Rumah Rakyat Indonesia Raya berdiri di atas Fondasi berupa Aspirasi yang merupakan manifestasi dari menguat, meluas, dan memuncaknya issue-issue social, ekonomi, politik, dan hankamnas sebagai akibat dari berkembangnya fenomena inkonsistensi, inkonstitusi, dan melemahnya jati diri bangsa seperti yang telah diulas dalam Mukadimah Manifesto Perjuangan GERINDRA; dengan Bangunan Utama adalah Gotong Royong, Kedaulatan, Kemandirian, Persamaan HAK, Disiplin, dan Muayawarah

Selain untuk menembus kebuntuan komunikasi politik antara rakyat dengan parlemen, Rumah Rakyat Indonesia Raya dioptimalkan menjadi wahana penguatan akses publik kepada parlemen sebagai bentuk penghargaan bagi konstituen; dan diarahkan menjadi wahana pendidikan politik untuk mendukung tercapainya era politik transaksional positif dan bukannya materi. Dengan demikian akan tampak sejauh mana

anggota parlemen memberdayakan konstituen dan mencari solusi nyata memecahkan issue berbasis rakyat.

Mandat Rumah Rakyat Indonesia Raya?

Sebagai sebuah media, Rumah Rakyat Indonesia Raya memiliki mandat, secara collective collegial menjalankan peran Fasilitator/Mediator dalam rangka memperjuangkan, menanamkan, mengembangkan dan menegakkan jati diri, visi misi, prinsip-prinsip dan pokok-pokok perjuangan sesuai dengan

Februari 2010

Manifesto Perjuangan GERINDRA yaitu membangun kembali Indonesia Raya dengan berbagai strategi yang konstitusional antara lain (1) menggalang dan mengembangkan hubungan kemitraan yang mutualistik; (2) melakukan analisis issue strategis berbasis rakyat; (3) merumuskan rencana aksi untuk merespon setiap issue yang berkaitan dengan hajat hidup rakyat; (4) Mengeksekusi rencana aksi disertai pemantauan yang sistematis, dimana rakyat sebagai aktor utama; dan (5) melakukan evaluasi dan umpan balik bersama rakyat secara berkala.

Platform Rumah Rakyat Indonesia Raya?

Rumah Rakyat Indonesia Raya berdiri di atas Fondasi berupa Aspirasi yang merupakan manifestasi dari menguat, meluas, dan memuncaknya issue-issue social, ekonomi, politik, dan hankamnas sebagai akibat dari berkembangnya fenomena inkonsistensi, inkonstitusi, dan melemahnya jati diri bangsa seperti yang telah diulas dalam Mukadimah Manifesto Perjuangan GERINDRA; dengan Bangunan Utama adalah Gotong Royong, Kedaulatan, Kemandirian, Persamaan HAK, Disiplin, dan Musyawarah.

Filosofi Rumah Rakyat Indonesia Raya?

Do not think for a Constituent. Think as a Constituent!
Dengan paradigma berpikir seperti ini, setiap anggota Rumah Rakyat Indonesia Raya baik yang saat ini menjadi wakil rakyat di parlemen, maupun rakyat itu sendiri senantiasa mempertahankan nilai-nilai luhur, kehormatan dan martabat mereka sebagai seorang konstituen.

Siapa Yang Mengelola Rumah Rakyat Indonesia?

Saat ini Rumah Rakyat Indonesia Raya dikelola oleh seorang sekretaris eksekutif yang berkedudukan di Kupang, ibukota provinsi Nusa Tenggara Timur, dan sehari-hari bersinergi dengan sel-sel

Februari 2010

jaringan yang berada di ibukota negara Jakarta, setiap kabupaten, kecamatan dan desa di NTT.

Di Komisi V DPR-RI.

Pada masa sidang II Tahun Sidang 2009-2010 saya secara serius mencurahkan perhatian terhadap upaya/perjuangan karyawan PERUM DAMRI di Departemen Perhubungan, dalam rangka memperoleh hak-hak mereka seperti antara lain (1) menaikkan batas usia pensiun menjadi 56 tahun; (2) kejelasan perhitungan jaminan hari tua; (3) penyesuaian gaji karyawan sesuai standar gaji PNS yang berlaku saat ini; dan (4) jaminan kesehatan karyawan melalui kerjasama dengan asuransi.

Dalam upaya mendapatkan hak-haknya itu, para karyawan DAMRI yang diwakili oleh Forum Peduli Nasib Karyawan DAMRI, pada tanggal 6 Januari 2010 melakukan audiensi dengan Komisi V DPR-RI dalam rangka mencari dukungan politik Komisi V DPR-RI dengan harapan hak-hak mereka yang telah diperjuangkan sejak tahun 2001 mendapat perhatian selayaknya dari Manajemen DAMRI. Dan atas perhatian serius yang telah diberikan oleh Poksi Gerindra di Komisi V DPR-RI, Forum Peduli mengirim Surat Ucapan Terimakasih pada tanggal 6 Februari 2010. Selanjutnya, masih dalam rangkaian upaya tersebut, Forum memohon waktu audiensi khusus dengan Anggota Poksi Gerindra di Komisi V, Komisi VI dan Komisi IX. Audiensi tersebut akhirnya dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2010 di Ruang Rapat Fraksi Gerindra DPR-RI Nusantara I Lantai 17. Dalam audiensi itu Forum membeberkan riwayat perjuangan mereka yang telah mencapai 10 tahun, namun belum dapat dipenuhi oleh Manajemen dan Direksi DAMRI. Karena itu, Forum berharap, Fraksi Gerindra dapat berjuang bersama-sama mereka melalui mekanisme yang tersedia di Komisi DPR-RI. Menanggapi keluhan Forum, anggota Poksi Gerindra di Komisi V, Komisi VI dan Komisi IX—DPR RI menyarankan kepada Forum agar mencari dukungan juga dari fraksi-fraksi lainnya, sehingga pada

Februari 2010

saatnya nanti perjuangan Forum tersebut dibahas lintas fraksi, dan dengan demikian dapat berdampak signifikan terhadap mereka. Selain audiensi seperti diuraikan di atas, sebagian anggota Forum secara khusus mendatangi saya di ruang kerjanya untuk menyatakan terimakasih dan memohon agar Partai Gerindra melalui saya tak henti-hentinya menyuarkan perjuangan Forum demi nasib lebih dari 24.000 karyawan di seluruh tanah air.

Rekomendasi Aksi

Berangkat dari kesungguhan dan ketulusan membantu pemecahan masalah yang sedang dihadapi oleh Forum DAMRI, poksi Gerindra di Komisi V, VI dan IX di DPR-RI, menyatakan akan melakukan pemantauan dan pengawalan secara berkelanjutan dan terus menerus di masing-masing komisi, terutama pada saat komisi membahas agenda yang berkaitan langsung dengan isu Forum DAMRI tersebut.

Di Badan Anggaran DPR-RI

Analisis dan kritik yang diarahkan kepada pemerintah sebagai bagian dari upaya-upaya pembenahan mekanisme dan strategi perencanaan dan penggunaan anggaran pembangunan menjadi salah satu instrumen pengawasan yang dioptimalkan fungsinya melalui Badan Anggaran DPR-RI. Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN 2008 misalnya, saya menyayangkan:

- (1) Disclaimer berulang yang (menurut BPK) disebabkan antara lain oleh kelemahan system pengendalian internal; ketidakpatuhan pemerinta terhadap peraturan perundang-undangan; belum jelasnya penyajian ekuitas Bank Indonesia sebagai investasi permanent lainnya kepada LKPP.
- (2) Terjadinya kecenderungan pengabaian lembaga penegak hukum terhadap temuan penyelidikan BPK tentang ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

- (3) Berlanjutnya kebijakan PHLN yang terus dijalankan oleh pemerintah dari tahun ke tahun.
- (4) Tidak jelasnya analisis dan dampak positif maupun negatif yang diakibatkan oleh lonjakan harga minyak pada tahun 2008.

Atas penjelasan pemerintah yang menyatakan telah melakukan analisis dan tindak lanjut terhadap penyebab disclaimer terutama mengenai kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan, saya melalui Pandangan Akhir Fraksi Gerindra Terhadap Rancangan Undang-undang tentang Pertanggung-jawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2008, berpendapat, pemerintah tetap harus membuktikan kesungguhannya melaksanakan efisiensi anggaran dan penggunaannya dengan sedapat mungkin menghindari terulangnya kasus-kasus (1)-(4) di atas dengan cara :

- Melakukan penilaian kinerja terhadap Kementerian Negara / Lembaga (K/L) berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam disiplin anggaran serta menerapkan sistem pemberian imbalan dan sanksi (reward dan punishment system) kepada K/L termasuk satuan kerja

“...atas penjelasan pemerintah...penyebab disclaimer terutama dikarenakan kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, meminta pemerintah untuk membuktikan kesungguhannya melaksanakan efisiensi anggaran dan penggunaannya dengan sedapat mungkin menghindari terulangnya kasus-kasus tersebut..”

Februari 2010

- pengguna anggaran di lingkungan K/L yang bersangkutan.
- Menyederhanakan mekanisme pemindahtanganan/hibah aset yang berasal dari dana dekonsentrasi/tugas pembantuan kepada pemerintah daerah
- Menyempurnakan mekanisme pencairan/penarikan pinjaman luar negeri sehingga dana talangan yang belum terselesaikan dapat diminimalkan.
- Mengkaji dan menyempurnakan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang di bidang keuangan Negara serta memberikan punishment kepada K/L yang mengelola PNBP di luar mekanisme APBN;
- Menindaklanjuti rekomendasi BPK RI berkaitan dengan hasil pemeriksaan atas LKPP tahun 2008 yang belum diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
- Mengoptimalkan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) untuk melakukan review atas LKPP dan LKKL;
- Dalam RUU APBN Perubahan, pemerintah melengkapi dengan usulan kriteria mengenai besaran anggaran tertentu yang dapat melebihi pagu anggaran.
- Melanjutkan program pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pegawai di K/L dan pemerintah daerah.

Rekomendasi Aksi

Semenjak penegasan di atas di sampaikan dalam forum Rapat Paripurna, Fraksi Gerindra menyatakan akan melakukan pengawasan secara intensif hingga disclaimer BPK dalam penyelidikan Pelaksanaan APBN tidak terjadi lagi dan dalam rangka itu Fraksi Gerakan Indonesia Raya sekali lagi menegaskan dukungan diterapkannya reward dan punishment terhadap K/L yang tidak mengindahkan rekomendasi ini.

Februari 2010

Penutup

Laporan Kerja ini dibuat dalam kerangka pertanggungjawaban konstitusional saya terhadap fungsi fungsi DPR yang sedang diemban saat ini, sekaligus sebagai media berbagi informasi dengan semua pihak yang membutuhkannya.***

RESES II

Bertindak Sebagai Konstituen & Tinggal Bersama Rakyat

**Bentuk Pemantauan
dan Pengawasan
Kolaboratif.**



Laporan Kerja bulan Maret 2010 ini berisi butir-butir temuan dari hasil Kunjungan Kerja Periode Reses Masa Sidang II Tahun 2009-2010 yang berlangsung pada tanggal 1-30 Maret 2010 dengan uraian sebagai berikut.

Kunjungan Kerja Individu

Kemitraan DPR(D) dengan Rakyat.

Sebagai *follow up* kegiatan sebelumnya, pada bulan Maret 2009 ini untuk kepentingan penguatan dan pemantapan partai dan Fraksi Gerindra, dalam kunjungan kerja individu di NTT, saya melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan anggota DPRD kabupaten dan provinsi dari Gerindra dalam rangka membahas isu-isu aktual di berbagai bidang termasuk pengembangan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Tujuannya adalah untuk menemukan isu-isu bersama dari DPR

Maret 2010

dan masyarakat untuk diusulkan melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran yang berlaku, mulai dari Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) hingga Musrenbangnas. Selanjutnya DPR(D) dan masyarakat berbagi peran dan tanggung jawab untuk mengawal usulan-usulan tersebut dalam seluruh rangkaian sejak proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan/implementasi, monitoring/evaluasi, pemanfaatan dan pemeliharaannya.

Optimalisasi RRIR

Pelaksanaan peran dan tanggung jawab yang diemban masing-masing pihak, untuk saat ini dikontrol dalam sebuah kerangka kerjasama yang mutualistik melalui media Rumah Rakyat Indonesia Raya (RRIR). Karena strategisnya RRIR itu, dalam kunjungan kerja individu ini pula saya memberi perhatian serius terhadap upaya optimalisasi fungsi RRIR dengan memfasilitasi pengelola RRIR di Kupang untuk terus menerus menyebarkan informasi tentang RRIR melalui berbagai media dan kesempatan. Untuk menjangkau kelompok masyarakat yang memiliki akses ke media sangat kecil, misalnya kelompok petani, buruh, dan kaum perempuan desa, saya mendorong pengelola untuk menemui anggota masyarakat dari kalangan tersebut dan membahas peluang-peluang kerjasama untuk menambah penghasilan keluarga, misalnya dengan budidaya tanaman sayuran dan ternak kecil. Diharapkan dalam proses membangun kemitraan, analisis masalah, pengembangan rencana aksi, implementasi dan monitoring maupun evaluasi dan feedback pengelola maupun kelompok masyarakat dapat menyerap aspirasi masing-masing, menemukan isu bersama dan menggagas pemecahannya secara bersama pula. Gagasan-gagasan tersebut disambut dengan antusias oleh pengelola dan saat ini sedang ditindaklanjuti oleh pengelola bersama-sama dengan sejumlah relawan Indonesia Raya di Kupang. Pendekatan seperti ini akan diperluas dan diimplementasi

Maret 2010

Dalam semangat “berdiri sama tinggi, duduk sama rendah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing” saya datang menemui konstituen seperti yang biasa saya lakukan sebelum menjadi anggota DPR. Pada agenda kunjungan kerja pribadi masa reses bulan Maret 2010 ini, saya datang ke desa Usapinasi kecamatan Polen, TTS, tinggal dan membaur dalam kondisi apa adanya di masyarakat. Dalam semangat kemitraan sejati itulah kedua belah pihak, anggota DPR dan masyarakat konstituen maupun simpatisannya saling menyerap aspirasi yang sesungguhnya.

secara bertahap di kabupaten lain di Pulau Timor, Sumba, Rote Ndao, Sabu, dan wilayah lainnya di NTT.

Rekomendasi Aksi

Melihat strategisnya posisi RRIR dalam konfigurasi pengembangan kapasitas masyarakat dan DPR (D) di berbagai bidang termasuk politik, sosial maupun ekonomi di NTT, maka saya menyarankan agar media tersebut dijadikan filter untuk mengembleng kader-kader baru

Gerindra Pra Ham-balang. Untuk men-capai tujuan tersebut saya meminta kepada alumni Hambalang untuk menyusun kurikulum pelatihan kader dan dengan dukungan anggota DPR(D) provinsi maupun kabupaten/kota, menyelenggarakannya secara teratur sesuai dengan kebutuhan dan jadwal Hambalang.

Tidur di Rumah rakyat: Mendorong Perubahan Perilaku

Maret 2010

DPR(D)

Kemitraan sejati, adalah sebuah keniscayaan dalam suatu simbiosis yang mutualistik. Keterbukaan dan kerelaan untuk berbagi menjadi syarat utama dalam membangun dan melestarikan kemitraan sejati itu. Dalam semangat “berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing” saya datang menemui konstituen, dan seperti yang biasanya sebelum menjadi anggota DPR, saya pada agenda kunjungan kerja pribadi pada masa reses bulan Maret 2010 ini, datang ke desa Usapinasi kecamatan Polen, TTS, tinggal dan membaur dalam kondisi apa adanya di masyarakat. Dalam semangat kemitraan sejati itulah kedua belah pihak, anggota DPR dan masyarakat konstituen maupun simpatisan saling menyerap aspirasi yang sesungguhnya. Di situlah DPR melakukan observasi suasana masyarakat berkaitan dengan terbatasnya ketersediaan air bersih, dan infrastruktur pendukung sosial, ekonomi, kesehatan, pertanian, dll.

Kebiasaan mendekatkan diri dengan masyarakat konstituen, dengan cara datang dan tinggal bersama di rumah masyarakat ini mengundang simpati anggota DPRD TTS, dan secara spontan mereka mengikuti jejak saya, datang, tinggal, mengamati, bicara, mendengar dan saling berbagi. Di situlah isu-isu strategis dan isu-isu aktual bertautan dalam hidup keseharian konstituen dan masyarakat (desa) pada umumnya. Anggota DPR(D) pun dapat merasakan langsung kondisi hidup yang sesungguhnya sehingga diskusi berjalan natural, dan dengan mudah DPR(D) dan masyarakat dapat mengidentifikasi isu bersama dan berbagi peran sehingga semua pihak mendapatkan manfaat apabila isu tertentu dipecahkan. Isu-isu tersebut kemudian diformulasi dalam format program, untuk diperjuangkan pada masing-masing jenjang kewenangan. Misalnya yang menyangkut P2IP akan diperjuangkan melalui Komisi V DPR RI atau komisi lain yang relevan di jenjang kabupaten maupun

Maret 2010

provinsi. Dalam suasana itu pula saya menemukan ternyata masyarakat sendiri tidak banyak usulannya, yang penting bagi mereka adalah DPR(D) yang mereka pilih, selalu menjadi bagian dari mereka yang kapan saja dapat dihubungi melalui berbagai media. Sesungguhnya, itulah kerinduan mereka terhadap wakilnya. Menanggapi usulan-usulan masyarakat tersebut, saya mendorong masyarakat untuk melakukannya dalam skala kecil (pilot) dulu, dan setelah semua paham metodenya baru diaplikasikan dalam skala yang lebih luas. Dengan pendekatan ini, masyarakat/rakyat bersama wakilnya sama-sama belajar “menemukan” sehingga peluang untuk “melakukan” yang menjadi prasyarat sustainability dari sebuah tindakan sudah tergambar pada tahap ini. Tujuan akhirnya adalah tercapainya perubahan perilaku semua pihak, baik DPR(D) maupun masyarakat/rakyat dalam bersama-sama membedah isu, menggagas rencana aksi, menjalankan dan memantaunya, serta mengevaluasi agar dinamika demokratis senantiasa menjadi warna kehidupan.

Kunjungan Kerja Komisi V DPR-RI: Maluku

Ada 2 isu strategis yang menjadi pusat perhatian kunjungan kerja Komisi V DPR-RI kali ini. saya mendapat giliran untuk datang ke Kabupaten/Kota Tual untuk mengamati perkembangan pembangunan infrastruktur di kedua kabupaten/kota tersebut. Dari hasil pengamatan tersebut, saya menyimpulkan adanya dua hal yakni adanya ketimpangan antara kondisi infrastruktur pemerintah dan pusat-pusat pelayanan publik. Dapat dilihat dengan kasat mata, bangunan kantor Bupati, Kantor DPR dan Rumah Jabatan terlihat sangat menyolok baik dari desain arsitektur maupun perlengkapannya; dibandingkan dengan misalnya, bangunan pasar, sekolah dan rumah sakit di ibu kota ke dua kabupaten/kota tersebut. Di Tual, misalnya, terminal penumpang angkutan laut sudah tidak layak lagi bagi manusia karena saat ini bangunannya sudah tak ber dinding, dan yang tinggal hanyalah seng penutup

Maret 2010

atap, lantai tanah, dan tidak fasilitas keamanan pelayaran sama sekali tidak tersedia. Sementara itu, mengenai kondisi transportasi di wilayah Maluku Tenggara Barat wakil bupati Maluku Tenggara Barat berkomentar bahwa "...kapal laut yang mengangkut manusia, sudah tidak manusiawi lagi karena pada setiap pelayaran dari dan keluar dari kabupaten Maluku Tenggara, manusia, hewan dan barang, bercampur aduk menjadi satu di atas geladak..." dan sudah barang tentu tidak nyaman dan tidak higienis. Menurut bupati, sudah berulang kali dia mengajukan telaahan dan usulan ke pemerintah pusat untuk memberi perhatian khusus terhadap persolan tersebut namun sampai saat ini belum juga dipenuhi.

Kondisi serupa dapat juga dilihat di bandara Dumatubun di Langgur. Di bandara ini, kerikil bertebaran di landasan pacu. Pada saat kunjungan kerja ini, kepala bandara menyampaikan, sehari sebelum rombongan tiba di Tual, dia menumpulkan tidak kurang dari 2 truk kerikil di landasan pacu bandar udara tersebut. Hal ini tentu saja, mengganggu kenyamanan dan keselamatan penerbangan yang saat ini menjadi salah satu visi Departemen Perhubungan RI. Karena itu saya berpendapat agar pemeliharaan fasilitas bandara yang sudah ada harus menjadi perhatian khusus, tidak hanya mengusulkan atau memperhatikan yang baru. Berbagai hasil investigasi terhadap keselamatan penerbangan selama ini menunjukkan peluang terjadinya kecelakaan justru banyak terjadi akibat faktor teknis pada bandarannya. Sarana prasarana umum ini terkesan dibangun seadanya, dan perlengkapannya pun terlampaui jauh dari kelayakan, padahal menurut hemat saya, justru sarana dan prasarana tersebutlah yang harus dibuat lebih bagus dengan perlengkapan dan kualitas pelayanan yang lebih memadai, karena di situ pula kinerja pelayanan pemerintah dan keberpihakan kepada rakyat tercermin. Kondisi di atas hanyalah segelintir fakta yang menunjukkan betapa lebarnya kesenjangan antara Indonesia Bagian Timur dan Indo-

Maret 2010

nesia Bagian Barat yang disebabkan oleh timpangnya pembangunan antara kedua wilayah tersebut.

Rekomendasi Aksi

Ke depan, saya berpendapat, perlunya kajian-kajian untuk menganalisis hubungan sebab akibat ketimpangan pembangunan di kawasan timur Indonesia untuk menemukan evidence based-nya sehingga dengan demikian, perencanaan dan penggarannya bisa lebih efisien dan efektif.

Kunjungan Badan Anggaran DPR-RI ke Kalimantan Barat

Agenda kunjungan Badan Anggaran DPR-RI di Kalimantan Barat diwarnai oleh pembahasan mendalam tentang status provinsi tersebut sebagai salah satu wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara asaing, yaitu dengan negara bagian Serawak, Malaysia Timur. Meskipun telah terhubung melalui jalan darat Pontianak-Entikong Kuching di Serawak Malaysia, kondisi sosial ekonomi warga negara RI sepanjang perbatasan tersebut ternyata tidak semulus jalan aspalnya.

Ternyata provinsi dengan luas wilayah 147.307 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 4.165.308 jiwa yang tersebar di 14 kabupaten/kota, 164 kecamatan ini (Permendagri Nomor 6 Tahun 2008) masih menyimpan desa-desa yang masih menjadi kantong-kantong kemiskinan yang memerlukan penanganan khusus terkait status desa-desa tersebut sebagai desa miskin, dan terdepan sepanjang garis perbatasan Malaysia dan Indonesia. Tercatat ada 1.301 desa (Panduan Kunjungan Kerja Badan Anggaran DPR-RI 30-31 Maret 2010) yang terkategori miskin karena kondisi infrastruktur yang serba terbatas. Karena itu saya melalui Badan Anggaran DPR RI mendesak agar pemerintah daerah kabupaten, provinsi dan pusat melakukan inventarisasi potensi, sumber daya dan penyebab lambatnya pemba-ngunan, termasuk

Maret 2010

“... melalui Badan Anggaran DPR RI mendesak agar pemerintah daerah kabupaten, provinsi dan pusat melakukan inventarisasi potensi, sumber daya dan penyebab lambatnya pembangunan, termasuk pengembangan infrastruktur di desa-desa perbatasan sehingga terdapat sinkronisasi dan keselarasan perencanaan maupun penganggaran di setiap level pemerintahan...”

pengembangan infrastruktur di desa-desa tersebut sehingga terdapat sinkronisasi dan keselarasan perencanaan maupun penganggaran di setiap level pemerintahan.

Rekomendasi Aksi

Dalam rangka menangani pembangunan wilayah perbatasan negara secara integratif;

bertahap dan berkesinambungan maka saya pada acara Kunjungan Kerja tersebut meminta kepada Pemerintah provinsi Kalimantan Barat untuk menyipkan berbagai data dan informasi yang menyangkut antara lain (1) Peta yang memperlihatkan kedudukan desa-desa miskin di antara desa-desa lainnya; (2) wilayah termasuk pulau yang memiliki potensi konflik dengan negara tetangga; (3) faktor-faktor penyebab konflik; (4) Kekuatan dan kelemahan pengamanan dan pengawasan terhadap wilayah perbatasan tersebut, termasuk kesenjangan antara kondisi real dan kondisi idealnya; (6) Kendala yang dihadapi (baik makro maupun mikro) yang dihadapi oleh provinsi Kalimantan Barat dalam upaya pembangunan wilayah perbatasan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional tentang arah dan pengembangan wilayah perbatasan (Perpres 7/2005 RPJM Nasional 2004—2009); (5) Kekurangan yang dialami oleh pemerintah provinsi dalam

Maret 2010

rangka menyediakan jangkauan pelayanan dasar di daerah perbatasan maupun daerah tertinggal; (6) Masalah-masalah mendasar yang terkait dengan persoalan keterbatasan anggaran; (7) Langkah strategis yang sudah dilakukan di wilayah perbatasan Kalimantan Barat untuk mengimbangi infrastruktur dan daya saing industri di wilayah perbatasan di Malaysia?; (8) kebijakan dan program khusus dari pemerintah daerah kabupaten/provinsi dan pusat yang terkait dengan daerah perbatasan dan daerah tertinggal dan hasil-hasilnya.***

Rumah Untuk MBR

Tanggungjawab Negara Yang Belum Terwujud



Laporan Kerja saya periode April 2010 ini memuat gagasan dan upaya saya dalam memecahkan berbagai isu baik yang terkait dengan **kebijakan** berskala nasional maupun **inisiatif-inisiatif** pemberdayaan masyarakat di tingkat regional maupun lokal. Ada tiga isu di mana saya mencurahkan perhatiannya secara paripurna, karena dipandang berdampak langsung pada rakyat dan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan yang ***pro poor, pro job, pro growth dan pro environment***. Ketiga isu tersebut adalah:

1. APBN-P 2010
2. RUU Perumahan dan Permukiman
3. Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu.

April 2010

APBN-P 2010 dan Peran Pemerintah mengeksekusi program yang *pro poor, pro job, pro growth dan pro environment.*

Kebijakan anggaran yang mengatur sumber penerimaan dan pengeluaran pemerintah sesungguhnya adalah salah satu instrument ampuh yang dimiliki negara untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Apalagi penyusunan rencana, pelaksanaan serta pengawasan anggaran dilakukan secara bersama oleh Pemerintah dengan DPR. Maka adalah ideal sekali apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut dikelola secara lebih adil, berimbang dan merata sehingga tercapai pembangunan yang lebih berpihak pada pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, semakin besar APBN semakin merata pembangunan untuk seluruh rakyat.

Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan pada negara untuk melaksanakan pembangunan dengan tujuan meningkatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (lihat Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal dalam UUD 1945 baik yang asli maupun hasil amendemennya). Pasal 23 ayat 1 misalnya dengan jelas menegaskan bahwa APBN harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Masih banyak pasal dalam konstitusi yang mengatur dengan jelas hak rakyat dan tugas negara untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat; tentang pengelolaan ekonomi dan sumber daya alam sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; amanah bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara; hak rakyat atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dll. Karena itu saya dalam setiap rapat, baik di Badan Anggaran DPR-RI, Komisi V DPR-RI maupun di Panitia Ad-Hoc MPR-RI, secara konsisten menyuarakan pentingnya pemerintah melakukan evaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan terpenuhinya amanat UUD 1945 tersebut. Dengan kata lain, perubahan anggaran dilakukan karena pertimbangan kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan pemerintah atau sekedar menjalankan kebiasaan yang telah

April 2010

“...berkaca pada pelaksanaan APBN, maupun APBN-P sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa meningkatnya APBN/P dari tahun ke tahun, sangat kecil korelasinya dengan terpenuhinya kesejahteraan rakyat...”

berlangsung dari tahun ke tahun. APBN-Perubahan 2010 hendaknya dilandasi oleh spirit tersebut.

Karena itu, berkaca pada pelaksanaan APBN, maupun APBN-P sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa meningkatnya APBN/P dari tahun ke tahun, sangat kecil korelasinya dengan terpenuhinya kesejahteraan rakyat. Sebagai ilustrasi, APBN meningkat pesat dari Rp 380 triliun (2004) menjadi sekitar Rp 980 triliun (2008). Namun, hasil pembangunan yang diperoleh selama

periode tersebut tidak sebanding. Untuk pengentasan kemiskinan, misalnya, meskipun anggaran kemiskinan meningkat tajam dari Rp 18 triliun (2004) menjadi sekitar Rp 70 triliun (2008), akan tetapi jumlah orang miskin tidak berkurang secara signifikan. Bila pada tahun 2004 jumlah orang miskin sebanyak 36 juta orang maka pada tahun 2008 tetap sebesar 35 juta orang. Bahkan jumlah orang miskin kemungkinan akan lebih besar bila survei dilakukan setelah kenaikan harga BBM bulan Mei 2008 (Hendri Saporini dalam buku *APBN Yang Menggelembung vs. Kesejahteraan Yang Menurun: Perlunya Kebijakan Yang Pro Pengentasan Kemiskinan*).

Maka, tak pelak lagi, strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mau tidak mau harus dilandasi kebijakan makroekonomi yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat atau *pro-poor macroeconomic policy*. Tentu saja kebijakan harus dilakukan secara menyeluruh/komprehensif baik pada kebijakan fiskal dan moneter maupun industri dan perdagangan. Di sinilah peran DPR-

April 2010

RI melalui fungsi legislasi, penganggaran, pengawasannya. Kritik saya terhadap Rancangan APBN-P 2010 yang diajukan pemerintah, dapat dibaca pada naskah *Pandangan Akhir Mini Fraksi Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPR RI Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas UU No.47 Tahun Anggaran 2009 Tentang APBN Tahun Anggaran 2010 Beserta Nota Perubahannya.*

Rancangan Undang-undang Perumahan Permukiman dan Keberpihakannya Terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah (BPR).

Berangkat dari kenyataan bahwa pemerintah masih mengalami *baglog* pembangunan perumahan sebesar 8 juta unit pada tahun 2009, padahal tujuan utama pembangunannya adalah memenuhi kebutuhan perumahan bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) saya memberi masukan agar Rancangan Undang-undang (RUU) hasil revisi terhadap Undang-undang No. 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman (UU 4/1992) baik teknis maupun substantif tidak mengabaikan hak-hak rakyat terutama MBR.

Menurut analisis saya salah satu sebab dari mandegnya pembangunan perumahan dan permukiman untuk kalangan MBR tersebut, adalah karena landasan hukum bagi program-program kementerian perumahan rakyat ini, tidak *diupdate* sesuai dengan perkembangan dan peningkatan kebutuhan dasar masyarakat. Akibatnya kementerian/lembaga yang membidangi pembangunan perumahan rakyat bekerja kurang optimal. Karena itu UU hasil revisi nanti diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat, bagi pelaksanaan program-program pembangunan di bidang perumahan rakyat tersebut.

Lebih lanjut saya dalam rapat-rapat rutin maupun Panitia Kerja di Komisi V menegaskan agar dilakukan evaluasi program mana yang harus dilanjutkan dan mana yang harus dihentikan.

April 2010

Misalnya, pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang banyak dibangun tapi tidak dihuni. Sehingga, yang harus didorong di masa mendatang adalah membangun perumahan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat namun harganya terjangkau, misalnya Perumnas yang nyata-nyata lebih banyak diminati masyarakat (*Lihat lampiran 2 dan 3 untuk menyimak gagasan yang lengkap*).

Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Melalui Kerjasama Antar Daerah (KAD) Dalam Pengelolaan DAS Benenain secara Terpadu.

Benenain adalah nama sebuah sungai di pulau Timor yang merupakan urat nadi penyalur kehidupan masyarakat di wilayah itu. Sejarah orang Timor, tidak dapat dipisahkan dengan peran sungai Benenain yang secara geografis melintasi 3 wilayah administrasi pemerintahan yakni kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Timor Tengah Utara (TTU) dan Belu. Telah berabad-abad lamanya sungai ini memberikan penghidupan bagi manusia di tiga wilayah tersebut, namun sejak tahun 1939 sejarah mencatat Benenain mulai membawa prahara. Bahkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini masyarakat Belu yang bermukim di hilir Benenain lebih banyak menyimpan catatan kelam bencana daripada kemakmurannya. Benenain kini lebih sering meluap, menenggelamkan dan menghanyutkan apa saja yang berdiri di atas tanah. Rumah, ternak, tanaman, bahkan nyawa penduduk telah menjadi korban keganasan Benenain. Pada bulan Mei 2000, tercatat 125 orang di kecamatan Malaka Barat dan Malaka Tengah Kabupaten Belu meninggal dunia dalam sekejap akibat hempasan luapan sungai tersebut. Sejak saat itu Benenain mulai lebih dikenal sebagai penyebar ancaman dan pembawa mala petaka bagi penduduk di dua kecamatan tersebut, dan bersamaan dengan berulangnya peristiwa sedih dari tahun ke tahun, masyarakat mulai mencari sebab musababnya.

April 2010

Pada tahun 2006, Forum DAS NTT menemukan bahwa meluapnya sungai Benenain pada tiap musim hujan berkaitan erat dengan menurunnya daya dukung lingkungan Benenain di wilayah hulu. Forum DAS mencatat luas lahan kritis di wilayah hulu pada saat itu sudah mendekati angka 90%. Aktifitas *illegal logging*, perladangan berpindah, pembakaran pada sabana, peternakan sapi dengan pola penggembalaan dan lepas liar, penambahan penduduk dan perluasan pemukiman yang tidak berwawasan lingkungan merupakan sebagian dari sekian banyak tekanan terhadap DAS Benenain tersebut. Perekonomian masyarakatpun melemah bersamaan dengan merosotnya daya dukung lingkungan di wilayah hulu, tengah, maupun hilir. Maka tidak heran apabila dalam 10 tahun terakhir kasus rawan pangan, kurang gizi, KLB malaria, diare, dll merebak di 3 wilayah kabupaten tersebut dan menjai persoalan kronis yang hingga hari ini belum terpecahkan.

Pada tahun 2003 pernah dilakukan MOU antar 4 Bupati sederatan Timor untuk bekerja sama mengelola DAS Benenain-Noelmina tetapi tidak pernah diimplementasikan. Pada tahun 2007 juga pernah dilakukan perjanjian kerjasama antara kabupaten dan sektor serta stakeholder lain, yaitu deklarasi Buat, TTS, guna menangani permasalahan DAS Benenain-Noelmina, akan tetapi kembali mengalami nasib yang sama, yaitu minimnya upaya mengimplemetasikannya. Akhirnya, pada tahun 2008 ditetapkan Perda NTT No. 5/2008 tentang Pengelolaan DAS terpadu yang mewajibkan kerjasama lintas wilayah dan sektoral dalam penangan semua DAS yang bersifat lintas kabupaten di NTT secara terpadu (*Mikael L. Riwukaho, 2010*).

Terbitnya Perda 5/2008 yang diharapkan dapat mendorong percepatan revitalisasi kawasan DAS Benenain ternyata belum membawa dampak apa-apa. Salah satu alasannya adalah lemahnya kemampuan provinsi untuk mendanai program revitalisasi tersebut. Maka pada tahun 2010, pemerintah provinsi

April 2010

NTT dengan dukungan GTZ DeCGG (*Decentralization as a Contribution to Good Governance*) mengajukan gagasan pengelolaan DAS terpadu tersebut dalam sebuah kerangka Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan harapan, persoalan menurunnya daya dukung lingkungan DAS Benenain dapat ditangani secara holistik dan integratif oleh PEMDA Provinsi NTT dan 3 kabupaten yang dilalui oleh DAS tersebut.

Saya memandang gagasan tersebut adalah sebuah upaya strategis yang berdampak sangat signifikan terhadap hajat hidup sekitar 1 juta jiwa manusia di wilayah itu. Karena itu saya terpanggil untuk menyumbang gagasan sekaligus mengawal program tersebut dari permulaan, dengan harapan, cita-citanya agar masyarakat Timor dan NTT pada umumnya dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri dapat segera terwujud. Dalam kapasitasnya sebagai wakil rakyat dari NTT saya berperan sebagai fasilitator yang dapat membantu forum KAD dan pemerintah pusat bisa lebih mudah merealisasikan gagasan pengelolaan DAS Benenain secara terpadu. Dengan demikian, cita-citanya agar di masa depan, masyarakat Timor dan NTT pada umumnya bisa lebih sejahtera dengan **Gerakan Panen Air untuk Kehidupan** dapat menjadi kenyataan.***

Dari KM Awu ke DAS Benenain

Meretas Isolasi Sabu
Raijua dan Gerakan
Panen Air Untuk Timor



Pada bulan Mei 2010 fokus perhatian saya pada isu lingkungan dan upayanya meramaikan laut Sawu semakin meningkat. saya bahkan hadir sendiri dalam sebuah workshop di Kupang, guna menekankan sekaligus mendorong agar Kerjasama Antar Daerah Kabupaten dan Provinsi untuk pengelolaan DAS Benenain secara terpadu dilaksanakan dengan landasan kesamaan pemahaman dan komitmen yang kuat. Karena itu menurut saya, semua pihak yang telah menyatakan komitmennya untuk bergabung memecahkan isu DAS Benenain ini, baik dari kalangan birokrat, teknokrat, para praktisi maupun masyarakat harus dapat menunjukkan kontribusi nyata, siapa buat apa, di mana dan bagaimana.

Sedangkan dalam rangka mendorong gerakan meramaikan laut Sawu ke arah yang lebih operasional, saya pada periode Mei 2010 aktif mengkampanyekan pentingnya perhatian pemerintah terhadap penyediaan fasilitas transportasi laut yang lebih memadai di NTT agar dapat meningkatkan kualitas aksesibilitas

Mei 2010

masyarakat kawasan itu, terutama di daerah terpencil, dan kawasan pulau-pulau terluar dan terdepan.

Komitmen untuk merealisasikan gagasan-gagasan itu dapat dilihat dari sejumlah rangkaian kegiatan antara lain:

1. Menyampaikan catatan kritis dalam Workshop tentang KAD Dalam Pengelolaan DAS Benenain.
2. Fasilitasi Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dan Kementerian Perhubungan untuk membuka Rute Pelayaran Kapal Angkutan Penumpang ke Sabu
3. Penanganan Kemelut yang Melibatkan Administrator Pelabuhan Tenau Kupang dan Perusahaan Pelayaran Lokal

Catatan Kritis dalam Workshop KAD untuk Pengelolaan DAS Benenain

Saya memiliki motivasi sangat kuat untuk merespon upaya pemerintah NTT yang menginisiasi dan mendorong terealisasinya Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk melakukan pengelolaan DAS Benenain secara terpadu. Sehingga sejak upaya ini dicanangkan pada 17 April 2010, saya konsisten memantau dan mengawasi prosesnya dengan harapan nasib dari inisiatif ini tidak berakhir seperti beberapa kesepakatan kerjasama atau MoU sebelumnya. Apalagi KAD Dalam Negeri ini sudah memiliki landasan hukum yang kuat yakni UU 32/2004, PP 50/2007, Permendagri 19/2009, Permendagri 22/2009 dan Permendagri 23/2009 yang mengatur kewenangan pusat dan daerah dan memuat acuan kebijakan maupun pedoman teknis penyelenggaraan KAD itu sendiri.

Sedangkan dari aspek kemanusiaan dan kesejahteraan, saya terpenggil untuk melakukan akselerasi upaya normalisasi DAS Benenain sehingga dampak luapannya terhadap masyarakat di daerah hilir DAS tersebut, terutama di desa-desa dalam wilayah keca-matan Malaka Tengah dan Malaka Barat bisa

dikurangi secepatnya, karena upaya pemerintah kabupaten (Belu) selama ini untuk merelokasi masyarakat sasaran banjir tidak membuahkan hasil. Akibatnya, dari tahun ke tahun pemerintah dan masyarakat hanya bertindak reaktif, sehingga tidak memecahkan masalah secara tuntas. saya memandang desain KAD dari pemerintah NTT yang didukung oleh lembaga kerja sama bilateral Jerman, GTZ melalui program Decentralization as a Contribution for Good Governance (gtz

DeCGG) ini sebagai sebuah upaya proaktif yang mengkombinasikan pendekatan *mitigasi dan preparedness* dalam penganggulangan bencana. Dalam catatan, saya menandakan sebaik apapun desain yang akan dihasilkan, tanpa adanya komitmen untuk berpihak pada rakyat, maka hasilnya sudah bisa kita duga, yakni rekomendasi dan dokumentasi lagi.

Karena itu, saya menantang pemerintah provinsi NTT dan 3 kabupaten wilayah DAS Benenain, termasuk lembaga DPRD untuk membuktikan pada rakyat bahwa kali ini KAD dapat membawa dampak positif di masyarakat dengan hasil yang

“...saya menantang pemerintah provinsi NTT dan 3 kabupaten wilayah DAS Benenain, termasuk lembaga DPRD untuk membuktikan pada rakyat bahwa kali ini KAD dapat membawa dampak positif di masyarakat dengan hasil yang terukur. Saya juga mendorong para teknokrat untuk terus menerus melakukan kajian tentang pengelolaan DAS Benenain dengan hasil dan rekomendasi yang lebih operasional sehingga dapat dieksekusi oleh masyarakat sendiri...”

Mei 2010

terukur. Saya juga mendorong para teknokrat untuk terus menerus melakukan kajian tentang pengelolaan DAS Benenain dengan hasil dan rekomendasi yang lebih operasional sehingga dapat dieksekusi oleh masyarakat sendiri. Sedangkan pegiat LSM dihimbau agar bahu membahu dengan masyarakat, pemerintah dan akademisi mendampingi masyarakat mencari dan menemukan jalan keluar dari kemelut bencana yang berakar pada kearifan lokal, karena telah terbukti bahwa masyarakat tidak mau akar budayanya tercabut dari tanah air yang telah memberikan penghidupan baginya selama ini.

Dengan demikian tindakan sporadis untuk penyelamatan sementara seperti yang dilakukan pemerintah selama ini dapat dikurangi secara perlahan-lahan, dan masyarakat dapat lebih tenang dan nyaman menjalani hidup dan membangun masa depan mereka yang lebih baik. Dan untuk sementara, adalah bijak apabila pemerintah menerapkan desain *mitigasi dan preparedness* sambil melakukan pembenahan DAS untuk mencapai pengelolaan Benenain yang lestari, sehingga pemerintah dapat menata program untuk memecahkan isu-isu kronis lainnya seperti ketahanan pangan, kesehatan ibu dan anak (KIA) dan gizi. Masyarakat sendiri juga nantinya dapat lebih optimal bermitra dengan pemerintah dan pihak lain untuk memecahkan isu bersama di atas.

Dalam kerangka pengelolaan tersebut saya menandakan perlunya sinkronisasi program yang memastikan terpecahkannya isu biofisik dan sosial ekonomi secara berimbang. Artinya, dalam format KAD tersebut masyarakat menjadi aktor utama, dan tidak sampai termarginalkan oleh karena kepentingan pelestarian lingkungan yang terlampaui mengedepankan aspek biofisik. Program ini juga diharapkan dapat menjawab pertanyaan klasik yang senantiasa menggelitik siapapun yang kenal karakter Benenain. Pertanyaan tersebut antara lain **kenapa masyarakat di sana masih bisa bertahan, dan bahkan terus berkembang**

Mei 2010

sampai pada hari ini?, padahal ...”*Sungai Benenain setiap tahun selalu meluap. Warga di sekitar sungai itu sudah diminta untuk tidak lagi mendiami wilayah itu tetapi ditolak dengan alasan adat istiadat. Selain itu, tempat pemakaman para leluhur mereka di perkampungan itu yang tidak bisa ditinggalkan, kata Wakil Bupati Belu Gregorius Mau Bili.*” (Kupang, NTT Online 2 Desember 2008).

Sementara itu, saya juga menyertakan dalam catatan bahwa permasalahan pokok yang mengemuka dalam upaya KAD adalah kendornya upaya mengimplementasi prakarsa-prakarsa, termasuk MOU dan perjanjian kerjasama yang disebut di atas. Saya menandakan, meskipun Perda NTT No. 5/2008 telah disahkan 2 tahun lalu, pertanyaan tentang sejauh mana implementasi PERDA tersebut tampaknya masih relevan untuk diajukan. Sekarang kita sesungguhnya sedang *merefresh* upaya yang pernah dilakukan sebelumnya. Dan penyanggahnyapun masih relevan, atau bahkan muncul kesangsian, jangan-jangan hasilnya juga seperti yang sudah-sudah.

Saya juga menggugat peran para pihak dalam upaya KAD ini. Pertanyaannya adalah apakah DAS Benenain adalah isu bersama semua stakeholder seperti yang telah kita inventarisasi? Atau apakah DAS Benenanin telah sungguh-sungguh menjadi perhatian serius semua sektor kemakmuran dan penyedia sarana dan prasarana publik termasuk banyak LSM dan masyarakat di kawasan DAS itu sendiri? Andaikata jawaban pertanyaan ini adalah ya, lantas mengapa kerjasama antar stakeholder tersebut masih sangat lemah dan menimbulkan kesan yang sangat kuat terjadinya egosektoral dan bertentangan dengan sifat “externalities” DAS yang selalu lintas wilayah administrasi, sektor dan keilmuan? Padahal menurut hasil kajian yang dilakukan oleh Forum DAS NTT terungkap bahwa ekosistem DAS (kondisi lahan yang kritis), dari 384,330 ha ternyata ada 275,138 tergolong kritis dan 8.918 tergolong sangat kritis; penutupan lahan di hutan DAS ditemukan hanya tersisa 11%, padahal syarat UU 41/1999

Mei 2010

seharusnya sekurang-kurangnya 38% dan ekonomi masyarakat, PDRB Belu 6,33%; TTU 5,32%, TTS 6,21%. Bila data-data tersebut menggambarkan fakta dan realita sesungguhnya, maka tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan urat nadi perekonomian masyarakat banyak di Timor ini selain berkolaborasi dalam forum KAD yang sedang digagas.

Rekomendasi

Terhadap inisiatif menggalang KAD untuk Pengelolaan DAS Benenain secara terpadu saya merekomendasikan agar seluruh stakeholder (para pihak):

- Menjaga komitmen dan konsisten untuk bekerja maksimal.
- Mematuhi peraturan perundang-undangan yang memayungi KAD tersebut
- Menempatkan kepentingan kesejahteraan rakyat di wilayah DAS di atas segala-galanya, dan
- Merumuskan program-program KAD di DAS Benenain yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan

Fasilitasi Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dan Kementerian Perhubungan untuk membuka Rute Pelayaran Kapal Angkutan Penumpang ke Sabu.

Sesungguhnya upaya ini adalah lanjutan dari rangkaian gebrakan saya sejak dilantik menjadi Anggota DPR-RI pada tanggal 1 Oktober 2009 dan wujud dari komitmen diri untuk melakukan segala daya upaya dalam rangka “**meramaikan laut Sawu**”. Tentu masih lekat dalam ingatan kita bagaimana saya bersama 2 orang anggota DPR-RI dari Dapil NTT di Komisi V menggugat kementerian Perhubungan dan Kelautan yang lamban menanggapi kasus pencemaran Laut Timor oleh perusahaan perminyakan Australia. Masih dilandasi oleh keberpihakan terhadap rakyat banyak yang sangat terbatas aksesibilitasnya terhadap sarana prasarana ekonomi dan sosial, saya pada bulan

April 2010 menyimak dengan sungguh-sungguh aspirasi rakyat pulau Sabu yang telah menjadi kabupaten namun merasa terpencil sendiri di batas bagian selatan republik ini. Dalam sebuah perbincangan di sela-sela acara Musrenbang Provinsi NTT saya menyatakan kepada Pejabat Bupati Sabu Raijua yang datang membawa aspirasi rakyatnya untuk memfasilitasinya

“...dalam rangka meramaikan laut sawu saya mengupayakan pelayaran tetap ke Kab. Sabu Raijua....hasilnya sungguh menggembirakan karena dalam pertemuan dengan, Dirjen Perhubungan Laut dan pejabat Kabupaten Sabu Raijua sepakat membuka rute pelayaran baru ke Pulau Sabu dan tanggal 26 Mei 2010 ditetapkan sebagai hari pertama KM Awu melabuhkan jangkarnya di pelabuhan Seba, ibukota Kabupaten Sabu Raijua...”

bertemu dengan Dirjen Perhubungan Laut untuk membahas peluang pembukaan rute pelayaran baru kapal angkutan penumpang ke Sabu. Hasil perbincangan itu kemudian *dishare* oleh saya kepada Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI di Jakarta dan diagendakan oleh Dirjen Perhubungan untuk dibahas lebih lanjut dalam waktu dekat.

Pada awal Mei 2010, pejabat Bupati dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sabu Raijua tiba di Jakarta guna menindaklanjuti inisiatif awal di Kupang. Maka saya kemudian mengajak dua orang rekannya dari Dapil NTT di Komisi V untuk mendampingi kedua pejabat kabupaten tersebut. Hasilnya sungguh menggembirakan karena dalam pertemuan tersebut, Dirjen Perhubungan Laut dan kedua pejabat Kabupaten Sabu Raijua

Mei 2010

sepakat membuka rute pelayaran baru ke Pulau Sabu dan tanggal 26 Mei 2010 ditetapkan sebagai hari pertama KM Awu melabuhkan jangkarnya di pelabuhan Seba, ibukota Kabupaten Sabu Raijua. Meskipun, karena alasan teknis dan cuaca, hingga saat laporan ini dibuat, KM Awu belum berhasil merapat ke pelabuhan Seba, dan karena itu kerinduan masyarakat Sabu untuk menikmati sarana perhubungan laut yang lebih manusiawi belum tergapai. Terhadap kejadian yang di luar kemampuan kendalinya ini, hingga saat ini saya dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR-RI secara terus menerus membangun komunikasi yang konstruktif dengan Dirjen Perhubungan Laut dan Penjabat Bupati Sabu Raijua guna memastikan bahwa dalam beberapa saat ke depan, kerinduan masyarakat Sabu terobati.

Rekomendasi

Untuk mengantisipasi dan menghindari kegagalan berlabuh yang disebabkan oleh kendala teknis dan cuaca maka saya merekomendasikan kepada pemerintah kabuseluruh Sabu Raijua agar:

- Membenahi sarana prasarana pelabuhan Seba termasuk sistim navigasi kelautannya
- Menyiapkan masyarakat agar bersama-sama pemerintah merawat fasilitas pelayaran baik yang sudah ada maupun yang baru nanti
- Terus membangun komunikasi dengan Kementerian Perhubungan sehingga dapat mengantisipasi kendala sedini mungkin

Penanganan Kemelut yang Melibatkan Administrator Pelabuhan Tenau Kupang dan Perusahaan Pelayaran Lokal

Dalam kemelut ini ada 2 isue yang ditangani secara bersamaan oleh saya yakni:

Mei 2010

- Pembatalan Pemenang Tender pada Pelaksanaan Pelelangan/ Pengadaan Angkutan Laut Perintis Pangkalan Kupang Kode Trayek R-13 (KM. Nemberala) TA 2010, dan
- Laporan terkait dugaan Pungutan Liar yang dilakukan oleh Administrator Pelabuhan Tenau Kupang terhadap Perusahaan Pelayaran Lokal

Kedua isu itu mencuat di kalangan komisi V DPR-RI setelah mereka menerima tembusan surat yang dikirim oleh sekelompok pengusaha pelayaran di Kupang dan Kadin NTT. Setelah mendalami maksud surat tersebut, saya mengambil inisiatif selanjutnya dengan membahasnya bersama 2 anggota DPR-RI dari Dapil NTT di Komisi V yaitu Yoseph Nai Soi dari Fraksi Golkar, Saleh Husen dari Fraksi HANURA. Bertiga kemudian sepakat untuk mendalami kasus tersebut dengan cara melakukan koordinasi, pengumpulan data, dan kunjungan lapangan guna mendapat informasi dari sumber terkait; dan dalam konteks itu kedua rekan mempercayakan saya melakukan serangkaian kegiatan seperti diuraikan di bawah ini.

Koordinasi dengan pihak terkait

Setelah menerima informasi dari:

- (1) PD Kelautan Kabupaten Kupang, PT NCL dan PT STS, PT MOSACO, PT Surya Timur, PT. Indonesia Fery, PT. Ostem Corpo Rindo, dan PT. Bandar Bahari yang ditujukan kepada Ketua INSA (Indonesian National Shippower Assosciation) Provinsi NTT di Kupang tertanggal Kupang 27 April 2010 dengan Klasifikasi Penting,
- (2) Ketua Umum Kamar Dagang dan Indusrtri (KADIN) Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui surat yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan RI di Jakarta, tertanggal Kupang 30 April 2010 perihal Pungli dan KKN Administrator Pelabuhan Kupang; dan
- (3) pemberitaan Harian Timor Express tanggal 30 April 2010 dan Pos Kupang 1 May 2010 mengenai Dugaan Pungutan Liar yang

Mei 2010

dilakukan oleh saudara Belly J. Picarima, Administrator Pelabuhan Kupang,

Dalam rangka mengklarifikasi laporan tersebut di atas, saya pada tanggal 3 dan 5 May 2010 melakukan pembicaraan melalui telepon dengan sekretaris Dirjen Perhubungan Laut pada Kementerian Perhubungan RI. Pada kesempatan itu, sekretaris Dirjen Hubla menyatakan akan segera membentuk Tim Investigasi yang akan ditugaskan khusus untuk menyelidiki laporan tersebut.

Sambil menanti perkembangan pekerjaan Tim Investigasi Dirjen Hubla, saya mengumpulkan data-data dan informasi berkaitan dengan *track record* Administrator Pelabuhan Kupang, saudara Belly J. Picarima dari berbagai sumber, termasuk perorangan, media masa baik cetak maupun elektronik dengan maksud untuk memahami dan mendalami kasus tersebut secara lebih berimbang, komprehensif dan integral.

Kunjungan Lapangan

Guna menyerap detail dan konteks dari kasus tersebut secara lebih lengkap, saya melakukan kunjungan ke Kupang NTT pada tanggal 7-9 May 2010 dan melakukan pertemuan-pertemuan dengan pihak-pihak berikut:

KADIN dan Pengusaha/Pelaku Pelayaran

Pertemuan dengan para pejabat dari KADINDA NTT, DPD INSA NTT, Dinas Perhubungan NTT, Pengusaha/Pelaku Pelayaran dan Anggota DPRD NTT ini menegaskan bahwa:

- Benar, para Pengusaha/Pelaku Pelayaran di NTT telah mengajukan laporan mengenai pungutan tidak resmi (pungli) kepada Ketua INSA NTT tanpa direkayasa oleh siapapun.
- Benar, KADINDA NTT telah menulis dan mengirimkan laporan tentang dugaan Pungli dan KKN ke Kementerian Perhubungan RI.

Mei 2010

- Menurut pengakuan pihak pelapor, pungutan tidak resmi (liar) tersebut masih berlangsung sampai pada saat kunjungan kerja ini dilaksanakan
- Menurut para pengusaha/pelaku pelayaran, benar bahwa tindakan pungli tersebut telah menimbulkan berbagai masalah dalam kegiatan pelayaran di pelabuhan Tenau Kupang dan berdampak luas terhadap aktifitas kelautan di provinsi NTT; dan belum pernah terjadi sebelumnya.
- Pungutan tidak resmi yang diberitakan secara luas oleh 2 buah harian di NTT yakni Timor Express dan Pos Kupang dan sebuah Harian Nasional di Jakarta yakni Suara Pembaruan, telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat NTT dan berpotensi melemahkan semangat Gerakan Masuk Laut (GEMALA) yang akhir-akhir ini semakin gencar dilaksanakan baik oleh pemerintah daerah, pelaku pelayaran maupun masyarakat NTT, dan berpeluang besar mengganggu program-program pemerintah dalam upaya peningkatan ekonomi provinsi kepulauan.

PD Kelautan Kabupaten Kupang

Saya mendapatkan penjelasan langsung dari PD. Kelautan Kabupaten Kupang mengenai ketidakpuasan perusahaan tersebut terhadap keputusan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Kantor Administrator Pelabuhan Kupang sebagai berikut:

- Dibatakannya pengumuman pemenang pelelangan tahap II sebagai akibat dari tidak tersedianya kapal pengganti sesuai dengan kesepakatan/kontrak kerjasama PD. Kelautan Kabupaten Kupang dengan PT. Bimasraya; sesungguhnya disebabkan oleh karena kelalaian panitia/pejabat pengadaan pada pelelangan tahap II, dan hal itu dijadikan alasan oleh Adpel Kupang untuk membuka pelaksanaan pelelangan tahap III.

Mei 2010

- Pada pelelangan tahap III, PT. Surya Bintang Timur yang mengajukan harga penawaran tertinggi dinyatakan sebagai pemenang, dan pada saat bersamaan Adpel Kupang mengirim surat kepada PD. Kelautan Kabupaten Kupang yang berisi Pemberian Sanksi berupa pembatalan sebagai pemenang pada pelelangan tahap III dan *black list* dalam jangka waktu 2 tahun. Dari sini terlihat jelas bahwa pemberian sanksi terkait Pelelangan tahap II yang baru dilakukan pada saat Pengumuman Pemenang Pelelangan tahap III oleh Adpel Tenau Kupang (Belly J. Picarima) selaku PPK bertujuan untuk menggugurkan PD. Kelautan Kabupaten Kupang yang mengajukan penawaran terendah, dan dengan demikian dapat memenangkan PT. Surya Bintang Timur yang mengajukan penawaran tertinggi.
- PD Kelautan Kabupaten Kupang juga mendapat informasi dari wartawan Suara Pembaruan bahwa Dirut dan Direktur Operasi PT. Surya Bintang Timur tidak mengetahui keikutsertaan PT. Surya Bintang Timur dan tidak menandatangani dokumen penawaran terkait Pelaksanaan Pelelangan/Pengadaan Angkutan Laut Perintis Pangkalan Kupang Kode Trayek R-13 (KM. Nemberala) TA 2010. Sumber tersebut juga menyatakan bahwa Dirut dan Direktur Operasional PT. Surya Bintang Timur tidak pernah mengeluarkan surat kuasa untuk penunjukan kepala cabang PT. Surya Bintang Timur di Kupang. Hal ini menunjukkan bahwa ada indikasi pemalsuan dokumen oleh oknum-oknum tertentu.

Adpel Kupang dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Ketika kunjungan kerja ini dilaksanakan, Tim Investigasi dari Dirjen Hubla ternyata sedang melakukan investigasi terhadap Adpel Kupang. Karena itu saya dalam pertemuan dengan Adpel dan Panitia menegaskan bahwa Tim Investigasilah yang akan lebih intensif melakukan pendalaman dan penyelidikan kasus tersebut dengan beberapa catatan antara lain:

Mei 2010

- Adpel menyatakan bahwa pungutan liar yang dituduhkan kepadanya adalah tidak benar, namun yang bersangkutan mengakui bahwa setelah urusan administrasi selesai, pengusaha/pelaku pelayaran mengajaknya makan dan memberinya amplop yang dianggapnya sebagai bagian dari ucapan terimakasih dari para pengusaha/pelaku pelayaran.
- Tim Invesitigasi Hubla sendiri menyatakan bahwa dari hasil penyelidikan ada pernyataan Adpel yang memberi indikasi bahwa yang bersangkutan melakukan pungutan di luar ketentuan tetapi tidak sampai terlaksana.
- Berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, Adpel mengatakan bahwa apa yang dilakukannya telah sesuai dengan mekanisme dan Keppres 80 Tahun 2003.
- Menyangkut pemberian status black list terhadap PD. Kelautan Kabupaten Kupang, Adpel menyatakan bahwa telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan pengecekan lapangan terhadap keberadaan fisik kapal.
- Pada saat pertemuan dengan Panitia Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa saya berharap dapat bertemu dengan ketua panitia, saudari Sofia L. Rohi, SH namun ternyata yang bersangkutan tidak bisa hadir tanpa alasan, sehingga pertemuan tersebut hanya dihadiri oleh sekretaris dan anggota panitia saja.

Rekomendasi

Untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan oleh kedua kasus tersebut di atas kami, anggota Komisi V DPR-RI Dapil NTT menegaskan agar :

- Tim investigasi Dirjen Hubla melanjutkan penyelidikan dan apabila ditemui pelanggaran dalam proses perijinan untuk memperoleh dokumen pelayaran seperti yang dilaporkan oleh para pengusaha/pelaku pelayaran maka pejabat yang terkait harus ditindak tegas dan dilanjutkan dengan proses hukum.
- Memandang bahwa dugaan pungli tersebut telah menimbulkan ketidakharmonisan di antara pihak Adpel,

Mei 2010

- pengusaha/pelaku pelayaran dan masyarakat NTT seperti dijelaskan di atas, maka diminta agar Adpel Kupang, saudara Belly J. Picarima dipindahkan ke wilayah lain di luar NTT.
- Tim Investigasi Dirjen Hubla diminta untuk melakukan telaahan lebih mendalam terhadap kasus Pengadaan Barang/Jasa Kantor Adpel Kupang terkait pengadaan kapal perintis R-13, dan apabila ditemukan penyimpangan, harus ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Kami menghargai keputusan Adpel Kupang berkaitan dengan pemberian status *black list* terhadap PD. Kelautan Kabupaten Kupang, meskipun demikian kami berharap, agar pemberian status tersebut perlu mempertimbangkan asas keadilan dan keseimbangan karena alasan tidak adanya kapal pengganti, bukan semata-mata kesalahan PD. Kelautan Kabupaten Kupang karena ada Kontrak Kerjasama dengan pihak ke dua dalam hal ini PT. Bimasraya Surabaya (copy dokumen Kontrak Kerjasama terlampir); selain itu PD. Kelautan Kabupaten Kupang adalah Perusahaan Daerah yang sedang didorong perannya untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat Kabupaten Kupang yang berbasis laut dan kepulauan. Dalam alur pikir logis, pemberian status *black list* tersebut, sama artinya dengan mematikan perusahaan tersebut, padahal mestinya Adpel Kupang dapat menjalankan peran pembinaan dengan lebih dahulu memberikan Surat Teguran/Peringatan.
 - Tim Investigasi Dirjen Hubla agar melakukan pengawasan secara lebih ketat dan berkesinambungan terhadap pemenang tender Pengadaan Barang/Jasa di Kantor Adpel Kupang R-13, atas nama PT. Surya Bintang Timur, sehingga dapat memberikan pelayanan maksimal sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati, termasuk melanjutkan penyelidikan atas dugaan pemalsuan dokumen seperti yang pernah diadakan oleh PD. Kelautan Kabupaten Kupang.***

RESES III

Pesan dari Pulau Sumba

**Jangan Bilang Provinsi
Kepulauan Harus
Tertinggal**



Laporan Kunjungan Kerja pada Masa Reses Persidangan III Tahun Sidang 2009-2010 ini dibagi dalam dua bagian yakni *Bagian Pertama* berisi laporan Kunjungan Kerja Anggota Komisi V DPR-RI di Provinsi Kepulauan Riau; dan *Bagian Kedua* memuat temuan selama Kunjungan Kerja saya di Daerah Pemilihan (DAPIL) II Nusa Tenggara Timur.

I. Kunjungan Kerja Anggota Komisi V DPR-RI di Provinsi Kepulauan Riau

Kegiatan ini dilaksanakan selama 4 hari sejak 21 sampai dengan 24 Juni 2010. Dalam periode tersebut saya bersama-sama dengan 21 orang anggota Komisi V DPR-RI melakukan peninjauan, pertemuan, penyerapan aspirasi, dialog, dan komunikasi intensif dengan pemerintah daerah, serta masyarakat luas berkaitan dengan pembangunan beberapa objek penting dan strategis di wilayah tersebut. Substansi kegiatan selama 4 hari kunjungan tersebut antara lain :

- Peninjauan dan ekspose dengan Kepala Bandara Hang Nadim, BMKG dan Basarnas

Juni 2010

- Peninjauan dan ekspose di Pelabuhan ASDP Telaga Punggur
- Peninjauan dan ekspose di Rusunawa Muka Kuning.
- Pertemuan dengan Walikota Batam dan Ketua Badan Pengusahaan Batam
- Pertemuan dan paparan mengenai infrastruktur dengan Wakil Gubernur beserta Muspida Kepulauan Riau dan instansi terkait
- Peninjauan dan ekspose di Pelabuhan Laut Dompok.
- Peninjauan dan ekspose dengan Ka Bandara Raja Haji Fisabilillah dan Ka. UPT BMKG.
- Peninjauan dan ekspose pembangunan penyediaan air baku Sei Pulau
- Peninjauan Ruas Jalan Lintas Barat Pulau Bintan (Ruas Gesek – Simpang Busung)
- Peninjauan Pembangunan Jembatan Kang Boy.
- Peninjauan pembangunan jembatan Anculai.
- Peninjauan pembangunan penyediaan air baku Sei Jago.
- Peninjauan Pelabuhan Malarko Tanjung Balai Karimun.
- Pertemuan dan paparan mengenai infrastruktur dengan Bupati Karimun.

Dalam hasil peninjauan, pengamatan, dialog maupun diskusi dilakukan dengan berbagai elemen dan pelaku pembangunan di provinsi Kepulauan Riau termasuk pemerintah yang menjadi mitra kerja utama Komisi V DPR-RI saya berpendapat provinsi Kepulauan Riau telah berhasil mengoptimalkan posisi strategisnya sebagai sebuah provinsi kepulauan yang berbatasan langsung dengan Negara lain yakni Vietnam dan kamboja di Sebelah Utara; Singapura dan Malaysia di sebelah Barat; dan Malaysia di sebelah Timur. Hal itu terbukti dari index pembangunan manusia provinsi ini yang mencapai rata-rata di IPM Nasional.

Saya menarik pelajaran penting dari kunjungan ke provinsi Kepulauan Riau yakni provinsi kepulauan tidak harus tertinggal. Pelajaran ini akan sangat bermanfaat untuk disumbangkan bagi

Juni 2010

pemerintah provinsi (kepulauan) lainnya seperti NTT atau Sulawesi Utara yang juga langsung berbatasan dengan wilayah Negara lain.

Meskipun demikian, saya juga mencatat sejumlah tantangan yang penting untuk diperhatikan oleh pemerintah provinsi Kepulauan Riau dan masyarakatnya agar kemajuan yang telah dicapai saat ini dapat dipertahankan, dan terus ditingkatkan melalui peluang strategis yang terbentang di depan. Catatan-catatan saya berkaitan dengan bidang kerja Komisi V DPR-RI antara lain:

A. Sektor Pekerjaan Umum

1. Subsektor Sumber Daya Air

Hal-hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan pembangunan di sub sektor sumber daya air adalah;

1. Optimalisasi jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya untuk pertanian dan pemenuhan kebutuhan air lainnya di Provinsi Kepulauan Riau
2. Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Kapasitas saluran drainase primer di perkotaan untuk mengantisipasi banjir
3. Pembangunan sarana dan prasarana pengendalian banjir pada daerah-daerah yang rawan bencana banjir.
4. Pembangunan prasarana pengaman pantai untuk mengurangi abrasi yang terjadi pada hampir seluruh pesisir pantai di Kepulauan Riau.
5. Dukungan dana Pemerintah Pusat harus dapat dioptimalkan sehingga pembangunan prasarana sumber daya air dapat memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat.
6. Membangun sinergisitas masyarakat sekitar untuk melakukan pengelolaan dan pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.

2. Subsektor Bina Marga

Hal-hal yang harus diperhatikan untuk melakukan perbaikan di sektor ini adalah;

Juni 2010

1. Peningkatan penyediaan jaringan sarana dan prasarana jalan dan jembatan yang terintegrasi sehingga dapat meningkatkan produktifitas.
2. Diperlukan perawatan yang lebih baik dan menyeluruh untuk menjaga kualitas sarana dan prasarana jalan
3. Dibutuhkan upaya penggalan dana dengan mengoptimalkan sumber pendanaan pemerintah daerah, pinjaman dari lembaga internasional, dan keterlibatan pihak-pihak lain. Hal ini mengingat kondisi keuangan negara yang relatif terbatas.

3. Subsektor Cipta Karya

Hal-hal yang harus diperhatikan untuk melakukan perbaikan di sektor ini adalah;

1. Peningkatan pembangunan infrastruktur air bersih agar terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat
2. Perlu perhatian lebih pada infrastruktur sampah, air limbah dan drainase kawasan pemukiman.
3. Perlunya dukungan pendanaan dari pemerintah untuk mempercepat pembangunan subsektor cipta karya di Provinsi Kepulauan Riau

B. Sektor Perhubungan

1. Subsektor Perhubungan Darat

Hal-hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan pembangunan di subsektor perhubungan adalah sebagai berikut;

1. Peningkatan koordinasi antar berbagai dinas yang terkait dengan dalam pembangunan dermaga sehingga terjadi keterpaduan antara pembangunan fasilitas dermaga dengan pembangunan infrastruktur jalan.
2. Pembangunan yang bersumber dari APBN harus benar-benar mempertimbangkan aspek ekonomi dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Kepulauan Riau.
3. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan seperti rambu-rambu lalu lintas.

2. Subsektor Perhubungan Laut

Hal-hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan pembangunan di subsektor perhubungan adalah sebagai berikut;

1. Peremajaan fasilitas pelabuhan dan dermaga yang sudah melewati umur teknis, perlu segera dilaksanakan untuk meningkatkan keselamatan proses bongkar/muat barang dan turun/naik penumpang, sehingga jika musim tertentu yang membuat keadaan arus, angin dan gelombang kurang bersahabat dapat menurangi resiko kecelakaan yang merugikan harta benda dan juga merenggut nyawa manusia.
2. Pembangunan pelabuhan khususnya yang bersumber dari APBN pada masing-masing daerah harus tetap memperhatikan aspek kelayakan ekonomi dan kemanfaatan yang optimal bagi kawasan Kepulauan Riau secara keseluruhan. Oleh karena itu perlu dilakukan koordinasi antar wilayah sehingga dapat sinergis dan saling memberikan penguatan bagi pertumbuhan ekonomi keseluruhan.
3. Perlu segera dipersiapkan penataan pelabuhan dan dermaga sesuai dengan Undang-undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

3. Subsektor Perhubungan Udara

Hal-hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan pembangunan di subsektor perhubungan udara antara lain sebagai berikut;

1. Pembangunan Transportasi Udara khususnya bandara-bandara perintis harus dimaksimalkan karena memiliki peran vital untuk menghubungkan beberapa Kabupaten di Kepulauan Riau.
2. Penggunaan dana APBN harus dapat dioptimalkan mengingat keterbatasan keuangan negara. Selain itu juga diupayakan sumber pendanaan lain di luar APBN.

C. Sektor Meteorologi dan Geofisika

Hal-hal yang harus diperhatikan untuk melakukan perbaikan pada Stasiun Meteorologi di Kepulauan Riau adalah;

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia
2. Meningkatkan dengan kondisi Geografis Kepulauan Riau yang wilayahnya 96% berupa perairan, terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil, serta bersinggungan dengan lalu lintas pelayaran

Juni 2010

dan penerbangan Internasional yang padat, maka direkomendasikan BMG dapat membangun Stasiun Maritim di Provinsi Kepulauan Riau.

D. Sektor Perumahan Rakyat

Hal-hal yang harus diperhatikan untuk melakukan perbaikan di sektor ini adalah;

1. Pembangunan Rusunawa untuk masyarakat karyawan, buruh, daerah perbatasan, dan nelayan kurang mampu (di wilayah kumuh).
2. Mewujudkan rencana pembangunan rumah BTN bagi PNS, karyawan dan masyarakat di Kepulauan Riau
3. Memfasilitasi pembentukan *Housing Resource Center* di kabupaten/ kota, dan memfasilitasi pusat pembelajaran perumahan swadaya.
4. Memfasilitasi kebutuhan properti dan hunian bagi Badan Hukum dan Orang Asing.

E. Sektor Pembangunan Daerah Tertinggal

Hal-hal yang harus diperhatikan untuk melakukan perbaikan di sektor ini adalah;

1. Pembangunan infrastruktur desa dan peningkatan/ pemberdayaan ekonomi masyarakat desa tertinggal.
2. Peningkatan koordinasi untuk ketersediaan sarana dasar berupa layanan pendidikan dan kesehatan di daerah tertinggal.
3. Mengupayakan sumber-sumber pembiayaan yang tidak hanya berasal dari anggaran pemerintah pusat dan daerah seperti bantuan lembaga internasional, donor/*grant*, atau pinjaman lunak.
4. Mengotimalkan program-program Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal lainnya untuk mendorong kegiatan ekonomi masyarakat dan melibatkan partisipasi masyarakat serta dapat langsung dinikmati oleh masyarakat.

Juni 2010

II. Kunjungan Kerja di Daerah Pemilihan (DAPIL) II Nusa Tenggara Timur

Kalau pada masa reses persidangan I dan II saya memberi perhatian penuh pada isu-isu pembangunan di Pulau Timor (Belu, TTU, TTS dan Kupang) maka pada masa reses persidangan ke III ini, agenda kunjungan di arahkan ke Pulau Sumba.

SUMBA BARAT DAYA

Kegiatan di Pulau Sumba yang dimulai pada tanggal 28 Juni 2010 diawali dengan pertemuan dengan Pengurus DPC Gerindra di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) dan bersama-sama dengan pengurus DPC, saya mengunjungi desa Wee Manada di Kecamatan Laura.

Bersama pemerintah desa dan masyarakatnya, saya berhasil mengidentifikasi sejumlah masalah yang berkaitan dengan Pembangunan Daerah Tertinggal misalnya:

- Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pada tahun 2009 pemerintah provinsi NTT mengalokasikan bantuan berupa 100 unit PLTS untuk 100 KK, namun karena keterbatasan penyalangan masyarakat untuk pemeliharaan yang difasilitasi pemerintah, sebagian besar unit PLTS tersebut tidak berfungsi lagi. Masyarakat membutuhkan ketrampilan berkaitan dengan pemeliharaan, perawatan dan perbaikan ringan.
- SDI Wee Manada pada tahun 2009 mendapat bantuan pemerintah provinsi NTT berupa 1 unit computer namun hingga saat kunjungan ini belum dimanfaatkan karena tidak ada jaringan listrik di desa tersebut.

Pertemuan pada siang hari itu juga dilakukan bersama pengurus Credit Union Likus Aba yang berhasil mendorong berkembangnya kegiatan usaha tani bagi sekitar 800 lebih anggotanya.

Pada malam harinya, dalam pertemuan dengan wakil bupati, Kadis Perhubungan, Bappeda, Kadis PU dan Kadis PPO

Juni 2010

terungkap sejumlah isu yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur perhubungan darat, maupun perhubungan udara. Di sub sektor perhubungan darat, pemerintah kabupaten SBD mengusulkan peningkatan status jalan lintas utara pulau Sumba dari jalan provinsi menjadi jalan Negara; sedangkan di sub sector perhubungan udara dibahas pembangunan

Pemerintah provinsi NTT mengalokasikan bantuan berupa 100 unit PLTS untuk 100 KK, namun karena keterbatasan penyiapan masyarakat untuk pemeliharaan yang difasilitasi pemerintah sebagian besar dari PLTS itu tidak berfungsi lagi.

landasan pacu, penambahan mobil pemadam kebakaran, dan pembangunan ruang tunggu bandara Tambolaka, dengan total dana mencapai sekitar 14 miliar rupiah. Masih berkaitan dengan sub sector perhubungan udara, pemerintah kabupaten SBD juga mengusulkan pembangunan Depo Pertamina khusus untuk bandara Tambolaka, karena selama ini arus lalu lintas penerbangan dari bandara Tambolaka kadang tersendat akibat dari tidak sinambungnya persediaan bahan bakar yang disuplai dari Depo Pertamina Kabupaten Sumba Timur. Dalam kesempatan itu juga, Bappeda Kabupaten SBD mengusulkan pemanfaatan DAK bidang pendidikan untuk renovasi dan rehabilitasi ruang kelas SD maupun SMP di wilayah itu.

SUMBA TENGAH

Persoalan paling pelik di kabupaten Sumba Tengah yang berhasil direkam oleh saya adalah tata guna lahan yang berkaitan dengan peruntukan lahan untuk kawasan lindung dan kawasan budi daya, yang sesungguhnya secara langsung berkaitan aktifitas pembangunan untuk daerah tertinggal. Sebagaimana kita ketahui

Juni 2010

di Pulau Sumba bagian barat terdapat sebuah Kawasan bernama Prai Langinu yang telah ditetapkan menjadi Taman Nasional. Kawasan itu meliputi 30% dari luas kabupaten Sumba Barat pada saat itu. Pada saat pemekaran kabupaten sekitar 5 tahun lalu, kawasan Taman Nasional/Hutan Lindung Prai Langinu seluruhnya masuk wilayah kabupaten Sumba Tengah, dan menurut perhitungan, luas kawasan lindung Prai Langinu yang ditutupi oleh hutan pinus tersebut ternyata mencakup 70% dari luas kabupaten Sumba Tengah. Hal ini berarti hanya ada sekitar 30% luas wilayah yang diperuntukkan bagi kegiatan budidaya, termasuk pemukiman, dan aktifitas social lainnya, padahal lebih dari 90% masyarakat kabupaten tersebut yang menggantungkan nasibnya pada sector pertanian dengan lahan sebagai factor produksi utamanya. Persoalan controversial antar kawasan ini mulai merebak ketika para petani membutuhkan lahan lebih luas untuk budidaya maupun usaha tani misalnya untuk perladangan, sawah, mengambil air, dan kayu bakar, sementara pada yang sama peraturan perundang-undangan tidak membolehkan adanya aktifitas di kawasan lindung.

Di tengah maraknya kontroversi tersebut, masyarakat dikejutkan lagi oleh aktifitas eksplorasi pertambangan emas di kawasan lindung tersebut. Seorang sumber menyebutkan saat ini sudah ada 16 dari 25 titik eksplorasi yang telah dibor. Pengeboran yang dilakukan atas ijin pemerintah provinsi tersebut telah membuat cemas masyarakat 3 kabupaten yakni Sumba Barat, Sumba Tengah dan Sumba Timur karena selama ini 3 kabupaten tersebut mendapat suplai air baik untuk keperluan pertanian maupun rumah tangga dari kawasan Prai Langinu tersebut.

SUMBA BARAT

Kegiatan di Sumba Barat diawali dengan pertemuan bersama unsur pimpinan kabupaten di antaranya Bupati dan Wakil Bupati, Sekda para asisten, Kepala BPMD, Kadis Perhubungan, Bappeda, dan Anggota DPRD dari Gerindra.

Juni 2010

Dalam pertemuan tersebut dibahas rencana pembangunan pelabuhan rakyat/Jetty di Binatu Kecamatan Tana Riu, pantai utara. Sementara itu di sub sector perhubungan darat mengemuka pula usulan peningkatan status jalan lintas utara menjadi jalan Negara, dengan panjang ruas jalan mencapai 11 kilometer. Dan berkaitan dengan posisi Sumba Barat yang langsung berbatasan dengan wilayah perairan Australia, dikemukakan pula usulan pembangunan fasilitas keamanan, perhubungan, dan komunikasi strategis misalnya Pos Radar, dan Pos Angkatan Laut.

Kegiatan selanjutnya adalah pertemuan dengan pemerintah desa Sabali Luku, Wai Hura, Lapale dan Rua di Kecamatan Wanokaka, kabupaten Sumba Barat. Yang mengemuka dalam pertemuan dengan pemerintah dan masyarakat 4 desa tersebut adalah pembahasan tentang pentingnya sebuah jembatan di sungai Wano Kaka yang menghubungkan pemukiman penduduk dengan lahan persawahan. Selama ini, hasil panen diangkut dengan tenaga manusia melalui sungai yang airnya dalam dan deras. Dengan adanya jembatan tersebut para petani merasa bisa lebih optimal memanfaatkan areal yang merupakan lumbung pangan kabu-paten Sumba Barat tersebut. Jembatan itu, menurut warga desa akan memberi manfaat tidak hanya kepada 4 desa tersebut melainkan bagi seluruh kecamatan Wanokaka yang terdiri atas 8 desa.

SUMBA TIMUR

Kegiatan di Sumba Timur diawali di desa Mondu Lambi Kecamatan Lewa Tidaho. Di desa ini saya bertemu dengan pemerintah desa, sekretaris kecamatan, staff Dinas PU dan anggota masyarakat. Persoalan kritis di desa ini sering dirasakan saat musim penghujan. Air yang meluap dari sungai di desa ini menghasilkan arus yang sangat deras sehingga seringkali mengakibatkan anak-anak absen dari sekolah. Bahkan karena nekad menyeberang pada saat sedang banjir, hingga saat ini sudah ada 3 orang anak sekolah yang menjadi korban meninggal

dunia karena terbawa banjir. Bagi masyarakat desa ini, tidak ada hal yang lebih penting daripada jembatan desa yang telah lama menjadi kerinduan dan idaman mereka.

Dalam pertemuan itu terungkap pula persoalan tapal batas kawasan budidaya dan Taman Nasional/Hutan Lindung Mondu Lambi. Sekretaris Kecamatan, Benyamin Ringgi Dae bersama masyarakat desa setempat mengha-

rapkan perlunya penataan kawasan yang memperhatikan kepentingan masyarakat banyak, agar konflik terkait peruntukkan lahan seperti pernah terjadi 1 tahun lalu, yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia, bisa di kendalikan. Masyarakat desa hanya berharap agar mereka diijinkan untuk memanfaatkan kawasan Taman Nasional/Hutan Lindung Mondu Lambi tersebut sebagai tempat mengambi kayu kering (mati-dalam istilah setempat), dan air bersih. Sepengetahuan masyarakat, persoalan tapal batas Taman Nasional/hutan lindung ini telah ditangani oleh pemerintah kabupaten, namun hingga saat ini belum ada penjelasan dari yang berwenang.

Sementara dalam pertemuan dengan Bupati Sumba Timur dan aparat pemerintah kabupaten ada sejumlah isu yang mengemuka di Kabupaten Sumba Timur antara lain:

“...persoalan paling pelik di kabupaten Sumba Tengah yang berhasil direkam adalah tata guna lahan ,luas kawasan lindung Prai Langinu ternyata mencakup 70% dari luas kabupaten Sumba Tengah. Padahal lebih dari 90% masyarakat yang menggantungkan nasibnya pada sector pertanian dengan lahan sebagai factor produksi utamanya...”

Juni 2010

- Fluktuasi harga yang sangat ekstrim untuk kategori bahan kebutuhan pokok dan non lokal yang disebabkan oleh adanya monopoli sarana transportasi oleh kalangan pengusaha tertentu. Dalam keadaan demikian, masyarakat Sumba Timur tidak memiliki posisi tawar yang kuat, dan pasrah menjual produk lokal (termasuk pertanian) dengan harga murah (karena dikendalikan pemodal yang menguasai lalu lintas barang) dan membeli produk luar dengan harga mencapai 2 kali lipat dibandingkan dengan di Surabaya. Karena itu pemerintah kabupaten memohon agar pemerintah pusat menyediakan Kapal Roro bersubsidi yang secara teratur melayari trayek Sumba Timur-Surabaya. Dengan cara itu, pemerintah yakin masyarakat Sumba Timur memiliki posisi tawar yang lebih kuat sehingga produk mereka dapat dijual dengan harga yang pantas. Demikian pula, mereka dapat membeli barang-barang kebutuhan pokok maupun non-lokal dengan harga yang wajar.
- Tata Ruang dan Wilayah yang berkaitan dengan distribusi peruntukan lahan untuk keperluan konservasi dan budidaya. Dalam hal ini pemerintah kabupaten Sumba Timur berharap pemerintah pusat dalam batas-batas kewenangannya dapat melakukan peninjauan dari dekat sehingga kebutuhan masyarakat atas lahan budidaya dan kepentingan umum untuk keperluan konservasi dapat terjembatani.
- Seperti 3 kabupa-ten lainnya, bupati Sumba Timur juga mendorong terca-painya harapan bersama 4 kabupa-ten di Pulau Sumba NTT agar jalan lintas utara ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional.

Kesimpulan.

Setelah menyimak berbagai informasi dan aspirasi yang berkembang selama kunjungan kerja masa resess persidangan III di Kabupaten Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah dan Sumba Timur saya mencatat di Sumba terdapat sejumlah isu yang bersifat:

- *sektoral* misalnya di desa Wee Manada Kecamatan Wanokaka ada sebagian besar PLTS yang tidak dapat dimanfaatkan lagi karena telah rusak padahal baru setahun dipakai, dan komputer di SD yang tidak dapat digunakan karena tidak tersedianya jaringan listrik di desa tersebut.
- *lintas sektor* misalnya kebutuhan jembatan di desa Wee Manada dan Mondu Lambi, dan pengadaan kapal ro-ro untuk memperlancar lalulintas manusia dan barang;
- *lintas wilayah administrasi* misalnya aspirasi peningkatan status jalan lintas utara yang menghubungkan 4 kabupaten di pulau tersebut; isu pertambangan emas di kawasan Prai Lindu yang mengancam persediaan air 3 kabupaten di sekitar kawasan tersebut.

Melalui Komisi V DPR-RI, saya menegaskan agar pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga terkait secepatnya memberikan tanggapan terhadap permasalahan yang sifatnya lintas sektor dan lintas wilayah. Dalam hal yang berkaitan dengan usulan peningkatan Jalan Lintas Utara Pulau Sumba saya meminta perhatian Kementerian Perhubungan dan Kementerian PU untuk menindaklanjutinya sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Rekomendasi.

Melalui Komisi V DPR-RI, saya menegaskan agar pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga terkait secepatnya memberikan tanggapan terhadap permasalahan yang sifatnya lintas sektor dan lintas wilayah. Dalam hal yang berkaitan

Juni 2010

dengan usulan peningkatan Jalan Lintas Utara Pulau Sumba saya meminta perhatian Kementerian Perhubungan dan Kementerian PU untuk menindaklanjutinya sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan sesuai kewenangan masing-masing. Kementerian PU dan kementerian lain yang terkait agar secepatnya menindaklanjuti temuan berkaitan dengan pengelolaan ruang yang diduga tidak sesuai dengan peruntukannya, seperti dalam kasus eksplorasi pertambangan emas di kawasan Taman Nasional/hutan lindung Prai Lingu.

Penutup

Demikian Laporan Kunjungan Kerja ini dibuat untuk menjadi bahan evaluasi dan refleksi semua pihak yang diberi amanat khusus untuk menjadi pelayan dan abdi masyarakat, dengan harapan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peran dan batas kewewenangan masing-masing.***

Belajar dari Austria

**Rumah Leo, Bukti
Kesungguhan Negara
Memelihara Fakir
Miskin dan Orang
Terlantar**



Laporan Kerja saya pada bulan Juli 2010 ini mencakup ; pertama kegiatan Kunjungan Kerja Panitia Kerja Komisi V DPR RI Ke Austria dan Turki dalam rangka Pembahasan Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Tentang Perumahan dan Permukiman, kedua Kegiatan rutin DPR RI di Komisi V dan Badan Anggaran.

Dalam laporan ini saya mengemas lebih lengkap pembelajaran yang dipetik dari Kunjungan Kerja Panitia Kerja Komisi V DPR RI Ke Austria dan Turki dalam rangka Pembahasan Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Tentang Perumahan dan Permukiman.

Kunjungan Kerja Panitia Kerja Komisi V DPR RI Ke Austria dan Turki dalam rangka Pembahasan Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Tentang Perumahan dan Permukiman.

Kunjungan Kerja ini dilaksanakan dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui, mempelajari, mendapatkan data dan informasi, mencari contoh, membandingkan, dan memperoleh

Juli 2010

penjelasan langsung dari pihak pemerintah Austria dan Turki menyangkut kebijakan, pengaturan, dan pelaksanaan/ penyelenggaraan perumahan dan permukiman di kedua Negara tersebut.

Hasil yang diharapkan dari kunjungan kerja tersebut yaitu:

- Terbukanya akses langsung untuk kerjasama di bidang perumahan dan permukiman dengan Austria dan Turki
- Dapat belajar dari pengalaman Austria dan Turki mengenai masalah, formulasi kebijakan, dan strategi PERKIM khususnya tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan ketersediaan rumah dan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
- Terfasilitasinya kesempatan kerjasama dengan tujuan untuk memperkuat dan memformulasi masukan bagi pembahasan RUU Perkim yang sedang berjalan.

Dipilihnya Austria sebagai tujuan Kunjungan Kerja dalam rangka pembahasan RUU Perkim tersebut karena sejak dahulu hingga saat ini Austria dikenal sebagai Negara dengan sistim perumahan terbaik di antara Negara-negara Uni Eropa lainnya.

Untuk mencapai maksud, tujuan dan harapan yang diuraikan di atas, rombongan Panja Komisi V DPR RI berada di Austria sejak 28 sampai dengan 31 Juli 2010. Dan selama 4 hari tersebut Panja Komisi V DPR RI bertemu dengan Parlemen Austria, Duta Besa RI untuk Austria, Manajemen Socially Supported Housing Facility (SSHF) HAUS LEO dan Kementerian Ekonomi provinsi Upper Austria (*Wirtschafts Landersat*). Uraian masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut.

Pertemuan dengan Parlemen Austria.

Dalam pertemuan ini, delegasi Komisi V DPR RI mendapatkan informasi bahwa parlemen Austria menganut sistim

Juli 2010

bicameral (dua kamar) yakni DPR/*Nationalrat* dan DPR Negara bagian/*Bundesrat*. Pada saat ini jumlah anggota *Nationalrat* ada 183 orang dan *Bundesrat* 62 orang. Hubungan kerja *Nationalrat* dan *Bundesrat* bersifat dalam banyak hal bersifat komplementer, dalam pengertian, senator benar-benar berperan sebagai wakil daerah dan dipandang mengetahui persis keadaan daerah yang diwakilinya sehingga dalam rapat-rapat pembahasan isu-isu daerah, *Nationalrat* pasti mendengarkan dan memberi perhatian khusus terhadap isu-isu tersebut. Hal itu tampak dalam pelaksanaan fungsi parlemen sehari-hari. Misalnya, dalam rapat-rapat komisi *Nationalrat* untuk membahas RUU/*Bill* anggota *Nationalrat* dari Komisi lain dan anggota *Bundesrat* boleh mengikuti rapat-rapat tersebut meskipun hanya sebagai pendengar, artinya tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Mekanisme ini dijamin oleh peraturan perundangan atau tata tertib parlemen di negara itu.¹

Di Austria *Bill* diajukan oleh pemerintah, Private Member, Inisiatif Rakyat/Populer Initiative dan usulan *Bundesrat*. Sedangkan pembahasannya mengikuti mekanisme berikut, dimulai dari *Nationalrat* yang meliputi pembahasan draft 1 yang kemudian diserahkan kepada komisi yang membidangi isu tertentu dan menghasilkan pertimbangan awal termasuk voting. Selanjutnya, hasil pembahasan Komisi dilaporkan dalam rapat paripurna dimana terjadi pembahasan untuk musyawarah mufakat maupun voting. Setelah itu *Nationalrat* akan melakukan pembahasan tahap dua dan tiga kemudian memutuskan untuk menerima RUU dan ditetapkan menjadi UU.

Langkah berikutnya, UU tersebut diajukan kepada *Bundesrat* yang memiliki hak *veto* atau hak menolak UU yang telah ditetapkan oleh *Nationalrat* sebelum dilaksanakan. Undang-undang tersebut kemudian dibahas dalam komisi tertentu di *Bundesrat* untuk mencapai musyawarah mufakat atau voting, kemudian dilaporkan di rapat paripurna dan diambil keputusan.

Juli 2010

Ada 2 kemungkinan hasil pembahasan di Bundesrat. Bila Bundesrat menyatakan veto terhadap UU itu, maka Nationalrat harus memahaminya kembali. Sedangkan bila tidak menyatakan veto maka UU tersebut langsung diautentifikasi, ditandatangani, diumumkan dan dimuat dalam lembaran negara. Demikianlah, peran Nationalrat dan Bundesrat yang saling komplementer satu sama lain dan dengan demikian, ada jaminan bahwa setiap UU di negara itu telah mencerminkan aspirasi daerah dan aspirasi rakyat yang disalurkan melalui partai politik dukungannya.

Meskipun saat ini ada ratusan partai politik yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Austria, namun yang mendapat kursi di parlemen hanya ada 5 yakni Partai Sosial Demokrat Austria-SPO; Partai Rakyat Austria-OVP; Partai Hijau-Die Grunen; Partai Kebebasan Austria-FPO; dan Aliansi untuk Masa Depan Austria-BZO). Pada masa lalu ada dua partai yang pernah terwakili di parlemen Austria yakni Forum Liberal-LIF dalam periode 1993-1999 dan Partai Komunis Austria dalam periode 1945-1959.

Sebagaimana parlemen di negara lain di dunia, parlemen Austria juga mengemban setidaknya dua fungsi utama yakni fungsi legislasi dan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah/*executive branch*. Meskipun demikian, hubungan antara parlemen dan pemerintah oleh orang Austria sendiri bersifat abu-abu. Karena itu di pemerintahan Austria ada mayoritas parlemen yang mengusung pemerintahan dan oposisi.

Pertemuan dengan Manajemen HAUS LEO.

HAUS LEO adalah salah satu model perumahan yang dikembangkan dalam skema Socially Supported Housing Facility (SSHF). SSHF sendiri merupakan bagian dari program Public Housing di Austria. Sesungguhnya ada beberapa model Public Housing lain di Austria yang berkualitas namun yang menarik bagi saya untuk diulas lebih lanjut adalah HAUS LEO, karena menurut saya model inilah yang merepresentasikan tanggung jawab paling

realistis penyelenggara pemerintahan/negara terhadap warga negaranya.

HAUS LEO, semacam rumah singgah. Namun tidak seperti rumah singgah di Indonesia, di HAUS LEO orang dapat tinggal seumur hidup dengan jaminan standar hidup layak yang disediakan oleh pemerintah. HAUS LEO disiapkan oleh pemerintah untuk rakyat Austria yang mengalami kesulitan atau keterbatasan baik secara ekonomi maupun sosial, misalnya tidak mampu memiliki rumah sendiri, tidak mampu menyewa, atau yang sedang menga-

lami persoalan sosial di tengah keluarga/rumah tangga, termasuk orang cacat, penganggur, pecandu narkoba dan dalam sistim yang sangat selektif warga negara asing yang menjadi pencari suaka di Austria dapat memanfaatkan fasilitas ini.

HAUS LEO dapat juga dipandang sebagai pusat rehabilitasi berbagai persoalan. Karena itu, meskipun negara mengizinkan warganya dengan kriteria di atas untuk menjadi penghuni seumur hidup, setiap penghuni boleh juga meninggalkan HAUS LEO kapan saja dan dapat kembali lagi sesewaktu tergan-tung dari kondisi

“...HAUS LEO, semacam rumah singgah. Namun tidak seperti rumah singgah di Indonesia, HAUS LEO dapat juga dipandang sebagai pusat rehabilitasi berbagai persoalan. pemerintah Austria membuat rumah tersebut senyaman mungkin. Di HAUS LEO disediakan pelayanan pemulihan kehidupan/normalisasi kehidupan, pemulihan kondisi psikologis, dan kesehatan. Pelayanan ini diberikan oleh pekerja sosial sesuai dengan permasalahan yang dihadapi orang/keluarga yang tinggal di sana...”

“...Orang asing selain Masyarakat Eropa sangat sulit mendapatkan hak milik atas tanah, dan hanya bisa menyewa dan dievaluasi setiap tahun. Di Austria tidak ada sewa tanah jangka panjang. Hukum Austria memerintahkan agar pemerintah Austria memberikan kontribusi terhadap penyediaan lahan untuk kepentingan pembangunan perumahan social sehingga harga rumah terjangkau dan dapat diakses oleh seluruh masyarakatnya. Karena itu pemerintah melakukan pengawasan misalnya terhadap sistim perumahan sehingga ada kepastian saham keuntungan yang terbatas, sewa yang wajar, pemanfaatan asset yang

orang/keluarga tersebut. Karena itu HHSF membuat rumah dengan model HAUS LEO tersebut senyaman mungkin.

Di HAUS LEO disediakan pelayanan pemulihan kehidupan/normalisasi kehidupan, pemulihan kondisi psikologis, dan kesehatan. Pelayanan ini diberikan oleh pekerja sosial sesuai dengan permasalahan yang dihadapi orang/keluarga yang tinggal di sana. Penghuni HAUS LEO mencakup anak-anak sampai orang lanjut usia. Pada saat saya mengunjungi salah satu HAUS LEO di Kota Wina, penghuni dengan usia termuda adalah 30 tahun dan yang tertua 90 tahun. HAUS LEO

menampung penghuni laki-laki dan perempuan. Pada saat ini ada

Juli 2010

sekitar 12 rumah dengan konsep LEO yang dikelola oleh NGO dan menampung sekitar 700 orang.

Bagaimana Kebijakan Public Housing (PH) di Austria?

Public Housing di Austria adalah sebuah lembaga sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sejak tahun 1980-an pemerintah Austria menyerahkan tanggung jawab perumahan di Austria kepada daerah provinsi atau, dalam istilah Austria, *Lander*. Meskipun demikian peran pemerintah federal tetap signifikan terutama untuk menggodok peraturan perundang-undangan dan penerimaan pajak.

Sesuai dengan tujuan pembentukannya PH mempunyai tugas utama antara lain untuk:

- Mengurus orang yang membutuhkan bantuan, baik yang tinggal di rumah maupun di panti, termasuk bantuan untuk orang cacat.
- Menyediakan rumah/penampungan bagi yang tidak memiliki rumah atau sedang menghadapi masalah social yang harus mereka selesaikan, termasuk penganggur/tidak mempunyai pekerjaan sampai mendapatkan pekerjaan, pendapatan yang minim sehingga tidak mampu memiliki/menyewa rumah, tidak ada keluarga atau tidak mempunyai hubungan keluarganya, dan masalah narkoba.

PH merupakan wujud dari tanggung jawab pemerintah terhadap keluarga yang tidak mampu secara ekonomi atau social, dengan menyediakan suasana yang nyaman agar penghuninya tidak sampai mengalami trauma tersebut di atas secara berkelanjutan. Yang tidak memiliki pendapatan, selain diberi tumpangan gratis, juga disediakan bantuan social, sedangkan yang memiliki pendapatan pas-pasan menyewa dengan tarif sangat murah. PH juga melayani para pencari suaka ke Austria, meskipun dengan persyaratan yang sangat ketat.

Juli 2010

Mengapa Austria Menjadi yang terbaik di bidang perumahan?

Sebagaimana negara-negara lain di manapun di dunia, Austria juga memiliki cita-cita luhur untuk mensejahterakan rakyatnya. Dan menurut saya, salah satu kelebihan negara ini dalam memperjuangkan cita-cita tersebut adalah keberhasilannya membangun negaranya dalam semangat kemitraan antara pemerintah dan rakyatnya. Pemerintah Austria telah menempuh perjalanan panjang untuk sampai pada model pengelolaan perumahan rakyatnya seperti saat ini.

- Sejak abad 19 Austria mulai menyusun rapi arsitektur perkotaan dan perumahan. Didukung oleh 93 asosiasi perumahan.
- Pemerintah menyediakan rumah bagi rakyat dengan pola social partnership dimana setiap warga Negara berkewajiban untuk berperan serta dalam upaya penyediaan rumah yang layak bagi setiap orang karena rumah merupakan kebutuhan dasar dan hak asasi manusia yang mendasar.
- Kebijakan perumahan tidak diserahkan kepada mekanisme pasar, melainkan tetap dalam intervensi pemerintah sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah untuk mensejahterakan rakyat.
- Austria menganut penguasaan atas tanah dengan sistim hak milik.
- Orang asing selain Masyarakat Eropa sangat sulit mendapatkan hak milik atas tanah, dan hanya bisa menyewa dan dievaluasi setiap tahun. Di Austria tidak ada sewa tanah jangka panjang.
- Hukum Austria memerintahkan agar pemerintah Austria memberikan kontribusi terhadap penyediaan lahan untuk kepentingan pembangunan perumahan social sehingga harga rumah terjangkau dan dapat diakses oleh seluruh masyarakatnya. Karena itu pemerintah melakukan pengawasan misalnya terhadap sistim perumahan sehingga

ada kepastian saham keuntungan yang terbatas, sewa yang wajar, pemanfaatan asset yang efisien dan audit secara periodic.

- Mekanisme penyediaan dana untuk pembiayaan perumahan diatur dengan undang-undang dan jelas-jelas memperlihatkan keberpihakannya terhadap masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
- Pemerintah melakukan promosi skema intervensi perumahan dalam bentuk subsidi yang bertujuan untuk memberikan modal investasi sehingga harga rumah terjangkau bagi seluruh kalangan masyarakat.
- Subsidi diberikan melalui koperasi perumahan dengan sejumlah kemudahan seperti:
 - o Jangka waktunya panjang dan tingkat suku bunganya rendah dengan besar subsidi antara 30%-70% dari biaya konstruksi.
 - o Ada anuitas hibah/pinjaman baik dari pinjaman untuk biaya konstruksi maupun pinjaman lain dengan tujuan untuk mengurangi pembayaran dari hipotik.
 - o Tunjangan diberikan berdasarkan besarnya pendapatan dan ukuran rumah tangga. Meskipun demikian saat ini hanya ada 4% rumah tangga yang memanfaatkan tunjangan tersebut, dan hal ini adalah yang terendah di antara Negara-negara Eropa lainnya.
 - o Program pembelian rumah, tersedia bagi setiap individu sehingga siapapun dapat memiliki rumah dari jenis apapun.

Austria dikenal sebagai Negara dengan sistim perumahan terbaik di antara Negara-negara Uni Eropa lainnya. Kebijakan perumahan Austria yang berpihak pada MBR juga diperlihatkan dalam sistim pembiayaan perumahan melalui pemberian subsidi dengan dukungan komitmen hukum, keuangan, dan ekonomi serta politik yang kuat dalam kerangka kebijakan yang lebih luas. Dengan demikian pemerintah memiliki kewenangan menentukan

Juli 2010

biaya sewa agar tidak terlalu tinggi sehingga program perumahan dapat menjangkau semua lapisan terutama kalangan yang lemah secara ekonomi maupun social. Subsidi ini juga diberikan kepada asosiasi perumahan yang membangun perumahan dengan laba yang terbatas. Mekanisme subsidi ini berhasil mempengaruhi pembentukan harga di seluruh pasar perumahan sehingga dapat mengendalikan, bahkan menghindari kemungkinan berkembangnya mekanisme pasar bebas di bidang perumahan.

Meskipun disediakan fasilitas subsidi, pemerintah melaporkan bahwa sejak 8 tahun lalu (2002) prosentase masyarakat yang memilih tinggal di rumah pribadi telah mencapai 48%, yang memilih tinggal di kondominium sebesar 18% dan menyewa tempat tinggal sebesar 29%.² Pada saat ini, seiring dengan semakin pesatnya pertumbuhan jumlah rumah sosial, komposisi saham perumahan di Austria memperlihatkan bahwa 53% rumah tangga hidup dalam rumah hak milik mereka sendiri, 11% di kondominium dan 42% di rumah keluarga tunggal.

Sekilas Pandang tentang Austria.

Luas wilayah	: 83.870 km ²
Penduduk	: 8.3 juta (2009)
Batas	: Utara dengan Jerman dan Ceko Selatan dengan Slovenia dan Italia Barat dengan Swiss dan Liechtenstein Timur dengan Slowakia dan Hungaria.
Bahasa Nasional	: Jerman
Agama	: Katolik (74%), Protestan (5%), Muslim (4%), sisanya lain-lain.
Kepala Pemerintahan	: Perdana Menteri
Pendapatan perkapita	: \$US 32,800 (statistic WKO).
Pemerintahan	: 9 negara bagian yakni Wina, Voralberg, Tirol, Salzburg, Karnten

Juli 2010

(Carinthia), Steirmark (Styria), Oberosterreich (Upper Austria) dan Burgenland.

Kebijakan Perumahan Rakyat di Turki.

Hampir sama dengan di Austria, intervensi terhadap program perumahan rakyat di Turki juga sangat kuat. Kewenangan pembangunan perumahan rakyat di negara ini diserahkan kepada sebuah lembaga bernama TC Basbakanlik TOKI yang dibentuk pada tahun 2003 dan berkantor di Istanbul. TOKI berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. Dalam melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang perumahan rakyat TOKI mendapatkan dana dalam bentuk hutang modal serta fasilitas tanah dari pemerintah Turki.

TOKI membangun perumahan dengan tiga kategori yakni perumahan/rumah menengah, sedang, dan mewah. Harga rumah sederhana berukuran 95m² dengan fasilitas kamar tidur, kamar mandi, ruang keluarga dan dapur adalah 25.000 Euro; dan rumah sedang berukuran 100m² adalah 125.000 Euro. Sedangkan harga rumah mewah disesuaikan dengan permintaan pasar. Rumah mewah dibangun oleh sebuah badan yang khusus dibentuk oleh TOKI untuk tujuan tersebut. TOKI sendiri sebenarnya lebih berkonsentrasi pada pembangunan rumah susun (vertical house). TOKI juga diberi kewenangan untuk membangun dan mengelola kawasan kumuh, termasuk peremajaan kawasan/perumahan lama tanpa penggusuran.

Salah satu kebijakan TOKI adalah memberi kesempatan bagi warganya yang berpenghasilan 500 Euro ke bawah untuk memiliki rumah dengan cara mencicil.

Sekilas Pandang tentang Turki.

Luas : 783.562 km²
Pemnduduk : 73.914.000 (2008)

Juli 2010

Bahasa Nasional : Turki
Agama : 99% Islam
Kepala Pemerintahan : Perdana Menteri
Pendapatan perkapita : \$US13.920 (statistic WKO).

Turki adalah Negara berbentuk republic konstitusional yang demokratis, secular dan bersatu.

Kegiatan saya di Komisi V dan Badan Anggaran DPR RI

Rapat-rapat di Komisi V DPR RI masih diwarnai oleh kegiatan pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2011 dari Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra komisi V serta target untuk menghasilkan UU Perumahan dan Permukiman pada tahun sidang 2009-2010 ini. Komisi V DPR RI terutama melalui Panja RUU Perkim telah mencurahkan waktu dan pikiran secara lebih sungguh sehingga dalam masa sidang ke-IV tahun sidang 2009-2010 ini berhasil merumuskan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tersebut dan telah diserahkan kepada pemerintah untuk dikaji secara lebih detail. Ringkasan kegiatan rapat-rapat di Komisi V dan Badan Anggaran DPR RI dapat dibaca pada Risalah pada lampiran 1 di bagian akhir laporan ini.

Berkaitan dengan Revisi RUU Perumahan dan Permukiman secara khusus kami memberikan perhatian pada masalah kepemilikan rumah bagi WNA dan kepemilikan rumah bagi MBR, hal ini sesuai dengan semangat perjuangan Fraksi Gerindra.

Keberadaan orang asing (WNA) di Indonesia makin lama makin meningkat sehubungan dengan adanya era globalisasi, dimana perusahaan asing bebas untuk bergerak ataupun menjalankan usahanya di Indonesia. Tentu saja mereka membutuhkan tempat tinggal untuk menjalani kehidupannya sehari-hari. Selama ini pemerintah telah mengizinkan WNA yang berkedudukan di Indonesia memiliki sebuah rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan hak pakai atas tanah Negara, antara lain diatur dalam : Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996

Juli 2010

Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia; Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing; Surat Edaran Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 110-2871 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia; Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing; Surat Edaran Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 130-105/Sesmen/96 Tahun 1996 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing; Surat Edaran Menteri Negara Perumahan Rakyat No.124/UM0101/M/12/97 Tanggal 11 Desember 1997 Tentang Kelengkapan Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing.

Sudah tidak dipungkiri lagi bahwa dasar hukum dari penguasaan tanah oleh WNA dan Badan Hukum Asing (BHA) yang mempunyai perwakilan di Indonesia secara garis besar telah diatur dalam Pasal 41 & Pasal 42 Undang - Undang Pokok Agraria (UUPA) dan diatur lebih lanjut dalam PP No. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pakai (HP) atas tanah. Berdasarkan peraturan perundangan yang telah berlaku tersebut, maka WNA yang berkedudukan di Indonesia atau Badan Hukum Asing (BHA) yang memiliki perwakilan di Indonesia hanya diberi Hak Pakai (HP). Dengan demikian tidak dibenarkan Warga Negara Asing (WNA) atau Badan Hukum Asing

Juli 2010

(BHA) memiliki tanah dan bangunan dengan status Hak Milik (HM). Hubungan hukum antara Warga Negara Indonesia (WNI) maupun WNA, serta perbuatan hukum mengenai tanah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pasal 9 UUPA menyatakan hanya warga negara Indonesia sajalah yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang udara Indonesia.

Dalam penjelasannya dikatakan hanya Warga Negara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Hak milik kepada orang asing dilarang (Pasal 26 ayat 2 UUPA), dan pelanggaran terhadap pasal ini mengandung sanksi "Batal Demi Hukum." Namun demikian UUPA tidak menutup sama sekali kesempatan warga negara asing dan badan hukum asing untuk mempunyai hak atas tanah di Indonesia. Warga negara asing dapat mempunyai hak atas tanah di Indonesia, tetapi terbatas, yakni hanya boleh dengan status hak pakai. Sehingga dari prinsip nasionalitas ini, semakin jelas kepentingan warga negara Indonesia diatas segala-galanya baik dari segi ekonomi, sosial, politis dan malahan dari sudut Hankamnas.

Hak Pakai dan Hak Guna Usaha WNA dan BHA

Menurut Undang Undang No. 40 Tahun 1996 mengenai HP dan HGB atas tanah telah diatur selama jangka waktu 25 tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali selama 20 tahun. Ketentuan hukum yang telah berlaku sejak 13 tahun silam itu belum mengakomodasi kepentingan bisnis property dan bahkan menyebabkan pasar properti di Indonesia tidak sekompetitif di negara lain di Asia Tenggara, karena justru dalam Pasal 6 membatasi jangka waktu HP tanah oleh WNA hanya 25 tahun, dengan perpanjangan sampai tiga kali hingga 75 tahun.

Menurut hukum di Indonesia secara luas pihak yang berhak memperoleh tanah dengan status HP antara lain:

- Warga Negara Indonesia (WNI),

- Orang asing yang berkedudukan di Indonesia,
- Badan hukum yang didirikan menurut hukum di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia,
- Serta badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

Sehingga apabila terdapat status tanah hak milik yang ingin dikuasai oleh WNA, maka sebaiknya statusnya harus diturunkan terlebih dahulu menjadi HP dengan syarat WNA membuat surat permohonan untuk penurunan hak dengan melampirkan paspor dan KITTAS/KIMS baru setelah itu menghadap ke notaris untuk dapat dilakukan transaksi jual-beli. Sedangkan, bagi tanah waris yang jatuh kepada ahli waris yang berstatus WNA, maka menurut hukum Indonesia, dalam waktu 1 (satu) tahun kepemilikan tanah tersebut harus dialihkan dan apabila tidak dialihkan dengan sendirinya tanah tersebut jatuh ke tangan negara. Apabila terjadi kasus seperti itu, maka segera mungkin sebelum jangka waktu 1 tahun segera dilakukan pengalihan kepada pihak lain yang berstatus WNI.

Selanjutnya, bagi BHA dapat memiliki tanah di Indonesia dengan status HGB dengan BHA mengajukan permohonan HGB antara lain melampirkan sertifikat asli, fotokopi paspor, SPPT tahun terakhir, dan PPH/BPHTB. Jangka waktunya yaitu 25 tahun dan dapat diperpanjang menjadi 20 tahun. Orang atau badan hukum yang mempunyai HGB dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat tersebut dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan kepemilikannya. Jika HGB tersebut tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu 1 tahun, maka hak itu terhapus karena hukum, sehingga pihak yang dapat memperoleh HGB adalah WNI dan badan hukum yang didirikan menurut hukum di Indonesia dan berkedudukan Indonesia. Telah diatur juga persyaratan dihapusnya kepemilikan HGB antara lain :

- 1) Jangka waktu berakhir
- 2) Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat yang tidak dipenuhi

Juli 2010

- 3) Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya
- 4) Dicabut untuk kepentingan umum
- 5) Ditelantarkan
- 6) Tanahnya musnah

Sementara berkaitan dengan kegiatan Badan Anggaran, Saya bersama dengan anggota Badan Anggaran menyiapkan pandangan Fraksi tentang pertanggungjawaban LKP APBN TA 2009 ; Fokus pandangan fraksi menegaskan agar pemerintah memberikan penjelasan selengkap-lengkapnyanya atas temuan BPK dalam laporan Hasil Pemeiksaannya, khusus menyangkut ;

1. Anggaran belanja minimal sebesar Rp. 27,74 trilyun, telah digunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan klasifikasinya sehingga dapat memberikan informasi yang tidak tepat.
2. Terdapat permasalahan dalam pelaksanaan inventarisasi dan penilaian (IP) aset tetap sebesar Rp. 455,39 trilyun.
3. Pemerintah belum mencatat kewajiban kepada PT.Taspen (persero) Rp. 7,34 trilyun atas program tunjangan hari tua (THT) pegawai negeri sipil tahun 2007 -2009.

Selain itu, Fraksi Partai GERINDRA dalam pandangannya memberikan perhatian khusus terhadap cerminan kinerja pemerintah dalam pencapaian target anggaran selama tahun anggaran 2009 ternyata tidak bisa dipenuhi. Realisasi pendapatan negara dan hibah tahun 2009 hanya sebesar Rp. 866,8 trilyun, lebih rendah dibanding target yang ditetapkan APBNP sebesar Rp. 871,0 trilyun, begitupula dengan realisasi anggaran belanja negara hanya sebesar Rp. 954,0 trilyun dari target yang dipatok sebesar Rp. 1.000,8 trilyun.

Dengan rendahnya realisasi belanja tersebut maka realisasi pembiayaan justru melampaui kebutuhan untuk menambah defisit pada tahun 2009 yang mencapai Rp. 125,2 trilyun (2,4% dari PDB), padahal realisasi defisit hanya sebesar Rp. 88,62 trilyun. Dengan gambaran tersebut, Fraksi partai GERINDRA patut menduga bahwa ada kesengajaan dari

pemerintah untuk mengajukan defisit anggaran lebih besar dari kemungkinan realisasi yang bisa dicapai sehingga memberikan legitimasi agar meneruskan tradisi pembuatan utang luar negeri dan penebitan surat utang negara.

Berdasarkan pengamatan Fraksi Partai Gerindra, kebijakan fiskal yang tercermin dalam anggaran negara selama ini masih belum berperan maksimal dalam pencapaian tujuan nasional, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui fungsi kebijakan fiskal, yaitu fungsi alokasi, fungsi distri-

busi, dan fungsi stabilisasi. Padahal menurut amanat konstitusi, pemerintah seharusnya menggunakan kebijakan fiskal untuk memenuhi tugas pemerintah dengan memprioritaskan ;

- Tersedianya lapangan pekerjaan yang dapat memberikan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- Mewujudkan hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Termasuk dalam hal

“...pemerintah harus memberikan penjelasan selengkap-lengkapny atas temuan BPK dalam laporan Hasil Pemeiksaannya, khusus menyangkut ; 1). Anggaran belanja minimal sebesar Rp. 27,74 trilyun, telah digunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan klasifikasinya . 2). Terdapat permasalahan dalam pelaksanaan inventarisasi dan penilaian (IP) aset tetap sebesar Rp. 455,39 trilyun. 3). Pemerintah belum mencatat kewajiban kepada PT.Taspen (persero) Rp. 7,34 trilyun atas program tunjangan hari tua (THT) pegawai negeri sipil tahun 2007 -2009...”

Juli 2010

ini adalah hak untuk mendapat pendidikan khususnya pendidikan dasar bagi seluruh warga negara dan memenuhi hak setiap warga untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

- Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk fasilitas pelayanan umum yang layak, tempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan.
- Tersedianya jaminan sosial dan perlindungan bagi fakir miskin dan anak terlantar yang memungkinkan bagi mereka untuk pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Khusus mengenai pentingnya belanja subsidi untuk rakyat yang telah dialokasikan oleh pemerintah setiap tahun, Fraksi Partai GERINDRA memandang perlu dilakukan evaluasi agar alokasi dana subsidi dalam APBN menjadi lebih efektif. Lebih dari itu, kajian sangat diperlukan untuk melakukan koreksi terhadap politik anggaran subsidi. Dalam kebijakan alokasi subsidi, hal penting yang harus menjadi pertimbangan bukan hanya pada besarnya anggaran yang akan ditetapkan tetapi apakah anggaran subsidi yang akan ditetapkan itu dapat mencapai tujuannya. Oleh karenanya, penambahan atau pengurangan alokasi subsidi harus didasarkan pada dampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Penutup

Laporan ini dapat menjadi bahan pembelajaran bagi saya dalam rangka meningkatkan kontribusi pemikiran dan pengalaman untuk mendorong pembangunan infrastruktur melalui peran legislasi, penganggaran dan pengawasan yang lebih pro poor, pro job dan pro growth. Semoga.***

RAPBN 2011

Pemerintah Terbelenggu Anggaran Defisit



Kegiatan yang menonjol pada minggu pertama sampai dengan minggu ketiga bulan Agustus 2010 adalah kunjungan kerja yang terdiri dari kunjungan kerja Komisi V maupun kunjungan kerja ke Dapil masing-masing untuk mengisi agenda reses Masa Sidang III Tahun Sidang 2009-2010.

Selanjutnya saya kembali ke rapat-rapat di Komisi V maupun Badan Anggaran yang antara lain membahas Rancangan Undang-undang tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009; dan RUU Perumahan dan Permukiman. Hasil Rapat Pembahasan kedua RUU tersebut dapat dibaca dalam Ringkasan Rapat Komisi V DPR RI dan Ringkasan Rapat Badan Anggaran DPR RI terlampir. Laporan kerja kali ini mengulas kegiatan yang saya lakukan selama kunjungan kerja di Dapil II, termasuk capaian dan tindak lanjutnya.

Kegiatan Kunjungan Kerja

Pada kunjungan kerja Komisi V dan kunjungan kerja mengisi agenda reses Masa Sidang III Tahun Sidang 2009-2010 yang

Agustus 2010

dilaksanakan sejak minggu pertama sampai dengan minggu ketiga bulan Agustus 2010 ada 4 kegiatan utama yang saya laksanakan yakni:

- **Kegiatan Badan Anggaran DPR RI ; Pembahasan RUU APBN 2011 .**
- **Kegiatan Komisi V : Tindaklanjut Pembahasan RUU Usul Inisiatif Tentang Perumahan dan Permukiman dan Pembahasan RKL Mitra Kerja.**
- **Kunjungan DAPIL NTT : 1) Pelatihan Kader Pratama Gerindra Provinsi (PKPGP) NTT Angkatan I, 2) Pendampingan Kelompok Muda untuk Pelestarian Seni Tradisi, 3) Penguatan Kemitraan Jemaat dan Gereja Bagi Kelanjutan Pendidikan Anak.**

Kegiatan Badan Anggaran DPR RI ; Pembahasan RAPBN 2011 .

Fokus Pandangan Fraksi Gerindra berkaitan pada penetapan asumsi makro perekonomian Indonesia pada RAPBN 2011 yaitu ; pertumbuhan ekonomi 6,3% ; laju inflasi 5,3%; suku bunga SBI 3 bulan 6,5% ; nilai tukar Rp. 9.300 per dolar Amerika Serikat; Harga minyak US \$80,0 per barel dan lifting minyak sebesar 970 ribu barel perhari. Menurut Fraksi partai GERINDRA masih sangat normatif, pijakan asumsi tersebut tidak menunjukkan motivasi pemerintah untuk menggali tingginya potensi ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam memanfaatkan potensi ekonomi tinggi tersebut, pemerintah seharusnya fokus pada pembangunan ekonomi secara menyeluruh, dengan cara memusatkan perhatian untuk meningkatkan peran sektor manufaktur dan pertanian dalam perekonomian nasional. Namun asumsi makro ekonomi yang digunakan sebagai pijakan dalam menyusun RAPBN 2011 menunjukkan bahwa pemerintah masih mengandalkan pertumbuhan dari “non tradeable”. Kondisi ini mengkonfirmasi bahwa pemerintah tidak mampu mendorong, setidaknya, dua

Agustus 2010

sektor yaitu manufaktur dan pertanian yang dapat menyerap hingga separoh tenaga kerja yang ada.

Menurut Fraksi GERINDRA ; Pemerintah nampaknya masih terlena pada pencapaian pertumbuhan ekonomi tidak berkualitas yang dihasilkan dari konsumsi dan masuknya dana spekulatif dari luar negeri. Sementara itu pemerintah nampaknya tidak akan berbuat banyak dalam menyikapi terjadinya perlambatan di sektor industri. Padahal, untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri dibutuhkan kebijakan fiskal agar dunia usaha bisa lebih ekspansif dan harga produk barang dan jasa yang dihasilkan dapat memiliki nilai yang lebih besar.

Sementara itu, Pembangunan infrastruktur memang mendapatkan perhatian anggaran sangat besar, namun hanya memfokuskan pada infrastruktur perkotaan dan tidak banyak menyentuh infrastruktur pedesaan yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk memicu pertumbuhan daerah sekaligus mendorong terjadinya pemerataan pembangunan. Nampaknya pemerintah masih cenderung untuk melakukan pembangunan ‘flyover dan underpass’ yang sebenarnya sangat tidak relevan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Walaupun anggaran untuk itu sangat besar namun tidak akan memberikan dampak yang berarti terhadap perekonomian secara keseluruhan. Apalagi jika dilihat pada tahun 2009 dan 2010 pun, ternyata realisasi penyerapan anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum sangat lambat, yang mengindikasikan adanya permasalahan pada perencanaan dan alokasi anggaran.

Di luar permasalahan tersebut, soal kritis yang perlu dicermati dalam RAPBN 2011 adalah kesinambungan “anggaran defisit” yang dilakukan pemerintah. Anggaran defisit tersebut berlangsung pada saat tidak terlihat upaya pemerintah untuk mengefisienkan pengeluaran (terjadi pemborosan) dan optimalisasi penerimaan (khususnya pajak). Apabila dilihat dari segi pertumbuhan maka pos pendapatan negara pada tahun

Agustus 2010

anggaran 2011 hanya bertambah sebesar 9% dibanding tahun 2010 yaitu dari Rp. 992,4 trilyun menjadi 1.086,4 trilyun. Peningkatan tersebut merupakan yang terkecil selama periode 2005 s/d 2011. Kondisi tersebut bersamaan dengan kredibilitas pemerintah sekarang malah berada di titik terendah karena aib pajak yang menyeruak. Kondisi ini sebenarnya menjadi legitimasi untuk mempertanyakan kembali keberadaan defisit 1,7 persen dalam RAPBN 2011.

Kemudian tiga fungsi penting APBN meliputi stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Selama ini pemerintah nampaknya cenderung hanya menyantuni fungsi APBN sebagai instrumen alokasi dan stabilisasi perekonomian. Sebagaimana terlihat dalam lima tahun terakhir, persoalan ketimpangan pendapatan dan sektor ekonomi kian lebar. Rasio gini (untuk mengukur tingkat ketimpangan) justru meningkat bersamaan dengan stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2010 ini, subsidi pupuk dan listrik justru dikurangi sehingga mengakibatkan kenaikan harga. Di sini, fungsi APBN sebagai instrumen distribusi ekonomi menjadi tidak dapat bekerja secara maksimal. Karena itu, RAPBN 2011 seharusnya menggarisbawahi pentingnya fungsi distribusi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, baik antar penduduk maupun antarsektor ekonomi/wilayah. Dengan begitu, pertimbangan yang lebih utuh, matang, cermat, dan pemihakan yang lebih jelas dibutuhkan untuk mendesain perubahan RAPBN 2011 menjadi lebih kredibel.

Kebijakan anggaran yang disampaikan oleh pemerintah, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, masih tetap berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan pada pembiayaan yang diperoleh melalui sumber utang untuk menutupi defisit anggaran. Pada saat yang sama kebijakan fiskal tersebut membuat perekonomian semakin tergantung pada lembaga multilateral seperti Bank Dunia dan kehendak pasar yang dikendalikan pemodal asing. Kondisi ini membuat sektor riil melambat dibanding sektor jasa keuangan yang melaju pesat.

Agustus 2010

Pada saat bersamaan juga menghambat berjalannya agenda penciptaan lapangan kerja untuk mengatasi pengangguran dan pengentasan kemiskinan yang menjadi tugas utama pemerintah. Akibatnya kondisi pekerja di sektor informal semakin membengkak dan diikuti dengan semakin lebarnya kesenjangan ekonomi diantara kelompok masyarakat, termasuk kesenjangan antar daerah dan pelaku ekonomi. Kinerja kebijakan fiskal yang dicapai oleh pemerintah selama ini menunjukkan bahwa anggaran pemerintah berdampak kontraktif terhadap perekonomian nasional dan belum bisa berperan optimal dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Catatan penting lainnya adalah sehubungan dengan realisasi pembiayaan yang bisa dihimpun pemerintah selama ini sudah melebihi kebutuhan menutupi realisasi defisit dan berpotensi menambah berat beban fiskal dimasa-masa berikutnya. Potensi beban fiskal tersebut terutama berasal dari berkurangnya sumber penerimaan negara akibat realisasi program privatisasi dan penjualan aset program restrukturisasi.

Pilihan kebijakan fiskal dengan anggaran defisit yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang berjalan selama ini sudah sepatutnya untuk kita koreksi bersama. Pemerintah telah memilih untuk mempertahankan paradigma lama yang hanya berorientasi pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang menjadikan APBN defisit setiap tahun. Untuk menutupi defisit tersebut, pemerintah mengandalkan penerimaan dari sumber utang dan privatisasi BUMN.

Utang yang digunakan sebagai sumber pembiayaan pemerintah adalah penerbitan surat berharga negara, kemudian pinjaman luar negeri dan pinjaman siaga. Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) akan dilakukan dengan cara menerbitkan surat berharga dalam berbagai variasi tenor, meliputi jangka panjang dan jangka pendek. Sedangkan untuk pinjaman luar negeri masih akan mengandalkan pinjaman program dan pinjaman proyek

Agustus 2010

dari Bank Dunia, ADB, IDB, Jepang, Perancis dan kreditor bilateral lainnya. Kemudian diikuti dengan liberalisasi di sektor keuangan dan perdagangan demi kemudahan perusahaan multi-nasional dan perusahaan transnasional dalam mengakumulasikan keuntungan dari sumber-sumber perekonomian nasional.

Fraksi partai GERINDRA mendesak agar kebijakan anggaran yang dijalankan pemerintah bisa berkorelasi langsung dengan penguatan untuk kemandirian perekonomian nasional. Hanya dengan kemandirian perekonomian nasional kita bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat dan tumbuh menjadi bangsa yang makmur.

Fraksi partai GERINDRA mendesak agar kebijakan anggaran yang dijalankan pemerintah bisa berkorelasi langsung dengan penguatan untuk kemandirian perekonomian nasional. Hanya dengan kemandirian perekonomian nasional kita bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat dan tumbuh menjadi bangsa yang makmur

Latihan Kader Pratama Gerindra Provinsi NTT Angkatan I

Pelatihan ini merupakan salah satu bentuk tindak lanjut Pelatihan Kader Pratama Gerindra Tingkat Nasional (PKPGTN) Angkatan I di Hambalang. Pasca pelatihan saya melakukan diskusi dengan salah satu alumnus PKPGTN asal Nusa Tenggara Timur yakni saudara Jeremias Pandegani. Diskusi itu menghasilkan sejumlah kesepakatan antara lain pembentukan koperasi, pembinaan kelompok tani nelayan dan ternak, dan PKPG Tingkat Provinsi (PKPGTP). Khusus untuk PKPGTP ini saya bersama alumnus menyiapkan garis-garis besar program pelatihan, termasuk penyusunan kurikulum inti yang meliputi kegiatan kelas dan luar

Agustus 2010

kelas dengan menggunakan acuan kurikulum nasional untuk PKPGTN yang telah digunakan di Hambalang pada PKPGTN Angkatan I dan II.

Tujuan PKPGTP NTT ini adalah selaras dengan tujuan PKPGTN yakni membentuk kader Gerindra yang memiliki kapasitas pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang memadai untuk memperjuangkan visi, misi, nilai-nilai dan program-program utama Gerindra. Sementara itu sebagai bahan pengayaan, team penyelenggara PKPGTP NTT memasukkan muatan lokal berisi pembahasan tentang isu-isu lokal baik di pemerintahan, dunia usaha maupun kemasyarakatan misalnya pengenalan tentang fungsi pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten,kecamatan maupun desa; pengenalan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum; dan strategi memenangkan hati rakyat dengan apa sumberdaya yang tersedia pada diri masing-masing.

Karena itu PKPGTP NTT menggunakan pendekatan yang merupakan kombinasi antara model Hambalang untuk kegiatan dalam kelas, dan 5 tahapan mikro dalam program pemberdayaan masyarakat untuk kegiatan di luar kelas. Kelima tahapan itu adalah pengembangan kemitraan; analisis isu berbasis masyarakat, penyusunan rencana tindak lanjut, pelaksanaan dan pemantauan; dan evaluasi dan umpan balik.

Hasil yang dicapai dari PKPGTP NTT ini adalah teridentifikasinya kader-kader Gerindra berdasarkan potensi diri masing-masing. Selain itu berdasarkan penilaian tim penyelenggara ada 5 orang yang sangat layak diajukan ke PKPGTN Angkatan III nanti.

Peserta pelatihan adalah utusan dari 21 kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara Timur. Tim penyelenggara mengirim surat ke setiap DPC dengan alokasi peserta bervariasi antara 1-2 orang dengan alokasi terbesar untuk Kota Kupang, sehingga jumlah yang ditargetkan oleh Tim Penyelenggara mencapai 32

Agustus 2010

orang. Namun sampai pada saat PKPGTP diselenggarakan hanya ada 24 peserta yang datang dengan yang berasal dari Manggarai Barat, Manggarai, Nagekeo, Ende, Sikka, Flotim, Alor, Sumba Timur, Sumba Barat, Belu, masing-masing 1 orang; Timor Tengah Utara (TTU) dan Rote Ndao masing-masing 2 orang; Timor Tengah Selatan (TTS) 3 orang; dan Kota Kupang 6 orang. Usia peserta bervariasi antara 20-34 tahun.

PKPGTP NTT ini terselenggara berkat kerjasama dan peran serta anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten, DPD dan DPC Gerindra. Pihak-pihak tersebut melakukan seleksi secara bertahap mulai dari desa, kecamatan, dan kabupaten. Masing-masing kabupaten membiayai calon kadernya, sedangkan tempat dan fasilitas pelatihan didukung oleh saya sendiri selaku Anggota DPR RI.

Materi PKPGTP NTT disediakan oleh para alumnus PKPGTN I dan II. Sedangkan pembicara kunci dalam pelatihan ini adalah saya sendiri, Fary Djemy Francis, dan Pak Pius Lustri Lanang (dalam kapasitas beliau sebagai anggota DPR RI dan Pengurus DPP Gerindra), didukung oleh Narasumber seperti Wakil Gubernur NTT (Pak Esthon Funay), dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Kesbanglinmas Provinsi NTT, Dinas Koperasi Provinsi NTT, KOREM 161 Wirasakti, Politisi, dan LSM. Adapun muatan materi PKPGTP NTT ini meliputi antara lain Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, Wawasan Nusantara, Perkoperasian, Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Pertanian Berkelanjutan, Strategi Pemenangan Pemilu, dan Pembinaan mental spiritual.

Setelah PKPGTP NTT berlangsung selama 7 hari, dari tanggal 5-12 Agustus 2010, Tim Penyelenggaran mencatat ada 3 orang yaitu utusan dari Manggarai Barat, Sikka dan Flotim mencapai predikat sangat memuaskan, 10 orang dengan predikat memuaskan dan 11 orang dengan predikat cukup memuaskan.

Agustus 2010

Pada akhir pelatihan Tim Penyelenggara melakukan evaluasi dan umpan balik yang menghasilkan rencana tindak lanjut yaitu melaksanakan PKPGTP NTT Angkatan II pada minggu kedua/ ketiga bulan Oktober 2010 dengan target 40 orang. Direncanakan pula Angkatan ke IV dan seterusnya akan dilaksanakan secara bergilir per wilayah yakni wilayah Flores di Ende, wilayah Sumba di Waingapu, dan Wilayah Timor, Rote dan Sabu Raijua di Soe.

Pendampingan Kelompok Muda untuk Pelestarian Seni Tradisi

Program ini sebenarnya sudah dimulai pada bulan Juni 2010, yang berawal dari kajian yang dilakukan oleh 10 orang anak muda berjumlah yang sedang duduk di bangku SMP (1 orang), SMA (7 orang) dan Universitas (2 orang). Mereka melakukan observasi dan survey cepat yang menghasilkan informasi bahwa minat kalangan muda terhadap budaya lokal semakin menurun dan bahkan telah mencapai titik nadir. Dalam hal bermusik misalnya, hasil survey yang mereka lakukan menunjukkan bahwa ada lebih dari 60 grup band di Kota Kupang yang dibentuk baik untuk sekedar menyalurkan hobby maupun untuk tujuan komersil. Sementara grup musik tradisional hampir tidak ada sama sekali, padahal NTT memiliki beragam seni tradisional yang kalau dikemas dengan baik dan dikembangkan dengan sungguh-sungguh akan dapat mengangkat harkat, martabat dan taraf hidup masyarakatnya yang selama ini dikenal oleh orang luar (NTT) sebagai terbelakang. Kalangan anak muda ini kemudian mencoba melakukan observasi di sekitar Kota Kupang dan menemukan di sebuah tempat di Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, seorang pemain alat musik Sasando yang sudah berusia 73 tahun bernama Jeremias Pah. Mereka berbincang dengan Bai Jeremias, dan mencoba belajar dari dia, namun karena kesibukan di sekolah dan kampus, sementara tempat itu letaknya sekitar 20 km dari Kota Kupang, keinginan mereka terhenti di tengah jalan. Hal ini berkembang dalam sebuah diskusi informal antara saya dan

Agustus 2010

kelompok muda tersebut di sela-sela kunjungan kerja dalam rangka reses Masa Sidang III Tahun Sidang 2009-2010 pada bulan Juni 2010 di Kupang.

Sayapun merespon niat kelompok muda ini dan menyarankan mereka membuat proposal. Pada minggu ketiga bulan Juni 2010, saya menerima proposal mereka dan menyanggupi untuk membiayai sebagian dari usulan mereka. Maka terjadi kolaborasi antara saya dan kelompok muda yang menamakan diri **Pemuda Pelestari Seni Tradisi Indonesia Raya** (PASTI Indonesia Raya) ini, dan pada akhir bulan itu juga kelompok ini mulai berlatih dengan 5 buah sasando. Dan pada acara penutupan PKPGTP NTT Angkatan I mereka berhasil memukau peserta dan undangan dengan sejumlah lagu perjuangan dan lagu Pop yang diiringi petikan sasando.

Sesaat setelah acara selesai saya berbincang dengan kelompok ini dan mendukung niat mereka untuk menjaring anggota baru guna memperluas cakupan jumlah anak muda di bawah payung PASTI Indonesia Raya dengan menggunakan pendekatan belajar sebaya (*peer to peer learning*), artinya anggota kelompok yang telah terampil membimbing teman mereka agar lebih banyak lagi orang muda yang terampil dan mencintai seni tradisi nenek moyang. Kelompok ini bercita-cita untuk membuat anggotanya dari berbagai daerah terampil memainkan berbagai alat musik tradisional daerah masing-masing sehingga terwujud sikap saling memahami lintas budaya (*cross culture understanding*). Secara perlahan kelompok anak muda PASTI Indonesia Raya ini akan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar kota Kupang.

Kemitraan Jemaat dan Gereja Bagi Kelangsungan Pendidikan Anak.

Meskipun dalam 5 tahun terakhir ini pemerintah pusat telah menaikkan alokasi anggaran pendidikan secara signifikan, dan bahkan telah mencapai 20% dari APBN, sesuai perintah konsitusi, variabel lain yang menghambat masyarakat untuk menyekolahkan

Agustus 2010

anak-anaknya masih tetap dominan. Data sensus Penduduk Tahun 2010 mencatat jumlah penduduk NTT sampai dengan tahun 2010 mencapai 4.678.116 jiwa dan ketika ditilik dari tingkat pendidikannya terdapat 42,04% tidak berijazah; 32,20% tamat SD; 11,59% tamat SLTP; 11,28% tamat SLTA; 0,96% tamat perguruan tinggi. Itu artinya saat ini komposisi penduduk NTT didominasi oleh penduduk yang tanpa ijazah dan tidak tamat SD yang mencapai total 74,24% atau 3.473.033 jiwa yang secara kasat mata dapat dipandang sebagai kendala besar dari program pembangunan dengan asumsi bahwa transformasi berkorelasi positif dengan pendidikan formal waga negaranya.

Lebih lanjut data ini menggambarkan bahwa pengembangan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan formal bukanlah tanggungjawab pemerintah semata-mata, atau dengan kata lain kita tidak dapat sepenuhnya mengandalkan pemerintah dalam memajukan pendidikan generasi penerus bangsa. Atas dasar pikiran ini, saya terpanggil untuk melakukan diskusi dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat di berbagai gereja, dan menyimpulkan pentingnya aksi nyata dalam membantu mempersempit *gap* yang disebabkan karena perbedaan tingkat pendidikan seperti disebutkan di atas. Dengan logika sederhana saya membangun thesis demikian *“adalah baik untuk membantu masyarakat melalui pembangunan fasilitas umum, namun lebih baik lagi apabila membangun manusia-manusianya sampai pada jenjang kapasitas yang memadai sehingga pada suatu saat mereka bisa membantu lebih banyak daripada yang saya lakukan saat ini.”* Ternyata para pemuka tadi, dapat memahami jalan pikiran saya dan kami bersama-sama mencari model pengembangan sumber daya manusia yang langsung dapat dilakukan oleh orang per orang.

Pemberian beasiswa adalah salah satu model investasi jangka panjang di bidang sumber daya manusia. Dalam kesempatan diskusi dengan 3 tokoh gereja di sekitar Kota Kupang saya menyatakan kesediaan agar mulai tahun ajaran 2010 ini

Agustus 2010

memberikan beasiswa kepada 10 orang anak yang sedang belajar di SMP sebesar 100.000 per orang per bulan hingga mereka tamat. Kami berharap beasiswa ini akan mendorong penerimanya untuk lebih giat belajar dan memiliki orientasi pendidikan jangka panjang. Dalam rangka itu, pemuka gereja akan bertindak sebagai pendamping yang setiap saat dapat memantau, mengevaluasi, dan memberikan umpan balik kepada siswa maupun orang tua siswa agar dapat berprestasi setinggi-tingginya. Apabila model ini berhasil, pola kemitraan antara Jemaat dan Gereja akan dilanjutkan dengan menaikkan jumlah peserta pada tahun selanjutnya.

Pada waktu mendatang, pembelajaran untuk berbagi peran dan tanggung jawab dalam usaha memecahkan isu pendidikan ini akan diperluas ke bidang pemberdayaan masyarakat dalam konteks yang lebih luas.

Penutup

Laporan ini menjadi menjadi alat monitoring bagi saya dan fraksi Partai Gerindra agar dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan fungsi anggota DPR RI baik ke dalam di lingkungan fraksi, komisi, badan maupun panitia, dan ke luar, terhadap konstituen dan rakyat pada umumnya.***

Dilema Pinjaman Luar Negeri

Salah Kelola Rakyat Jadi
Korban



Kegiatan bulan September 2010 lebih banyak didominasi oleh acara-acara rutin di Komisi V maupun Badan Anggaran DPR RI, dan yang menonjol adalah:

- Rapat Kerja dengan Kementerian Perumahan Rakyat yang membahas alokasi anggaran dan RUU Perumahan dan Permukiman.
- Rapat Kerja dengan Kementerian Pekerjaan Umum yang membahas alokasi anggaran dan pembangunan infrastruktur yang pro-rakyat.
- Pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang bersumber dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN).

Pada akhir bulan September di tengah-tengah padatnya jadwal acara-acara rutin tersebut, saya bersyukur dapat ikut dalam pertemuan dengan gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) yang datang meng-*update* informasi tentang kondisi NTT hingga saat ini.

September 2010

Berikut ini adalah uraian ringkas mengenai proses dan capaian dari masing-masing kegiatan.

Rapat Kerja dengan Kementerian Perumahan Rakyat

Meskipun ini adalah rapat rutin, saya mencatat ada banyak kemajuan yang dicapai dalam Pembahasan Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) kali ini. Di bidang Perumahan Rakyat, Komisi V DPR RI berhasil mendesak pemerintah untuk menaikkan pagu bantuan pembangunan perumahan swadaya per kepala keluarga dari Rp 10 juta pada tahun anggaran 2010 menjadi Rp 15 juta pada tahun anggaran 2011. Dan untuk Nusa Tenggara Timur (NTT), alokasi anggaran untuk bidang perumahan rakyat pada tahun anggaran 2011 besarnya mencapai dua kali lipat dibandingkan dengan total anggaran selama 5 tahun terakhir.

Di bidang legislasi, melalui Panja Perumahan dan Permukiman yang dibentuk untuk membahas RUU Perumahan dan Permukiman, Komisi V DPR RI dan Kementerian Perumahan Rakyat berhasil mencapai sejumlah langkah maju antara lain kesepakatan untuk merumuskan kebijakan Perumahan yang lebih pro-rakyat. Salah satu contohnya adalah dalam bentuk keseimbangan proporsi alokasi unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan proporsi yang dapat dimiliki oleh orang asing. Dan lebih maju lagi, program pembangunan perumahan yang selama ini tersebar di berbagai kementerian, ke depan akan dikoordinir oleh kementerian khusus, sehingga program perumahan rakyat, apapun tujuan pembangunannya harus melalui 1 pintu saja. Dengan demikian anggaran akan lebih efisien dan pengawasannya akan menjadi lebih efektif.

Rapat Kerja dengan Kementerian Pekerjaan Umum

Dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Fraksi Gerindra di Komisi V berhasil meyakinkan pemerintah akan

September 2010

pentingnya pembangunan wilayah berwawasan lingkungan. Karena itu dalam rangka menyikapi dampak perubahan iklim terhadap manusia dan lingkungannya hidup maka pemerintah diminta untuk lebih inovatif menanggapi perubahan tersebut, terutama di wilayah dengan pola iklim ekstrim. Dalam konteks itu saya mengusulkan perlunya perhatian pemerintah terhadap upaya pemerintah dan masyarakat NTT untuk memenuhi kebutuhan akan air baik untuk pertanian dalam arti luas maupun untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Saya memandang pintu masuk yang paling tepat bagi upaya rehabilitasi dan pelestarian sumber daya air di NTT adalah merevitalisasi daerah aliran sungai (DAS) di 3 wilayah sungai yakni Benenain, Noelmina dan Aesesa. Dan untuk tahap pertama ini pusat perhatian pemerintah dan masyarakat NTT hendaknya diarahkan ke DAS Benenain yang secara *gradual* dalam 65 tahun terakhir ini telah memperlihatkan karakter yang membahayakan. Data yang diungkap Forum DAS NTT (2004) menyebutkan bahwa total luas lahan kritis DAS Benenain sampai pada saat itu telah mendekati 90% dengan segala dampaknya terhadap kehidupan masyarakat di wilayah hilir DAS tersebut. Karena itu saya menandatangani dalam berbagai Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Kementerian PU dan Kementerian terkait lainnya, agar mengalokasikan anggaran yang lebih proporsional bagi upaya rehabilitasi dan revitalisasi DAS di NTT. Dan Kementerian PU sudah setuju untuk mulai mengalokasikan anggaran yang lebih proporsional untuk penanganan isu DAS kritis tersebut sejak tahun 2011 dan seterusnya (Baca Artikel Lain Dalam Buku ini Untuk Tema Pinjaman Luar Negeri).

Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

Ini adalah persoalan komitmen untuk senantiasa berpihak pada rakyat. Sejak awal Fraksi Gerindra di Komisi V tak henti-hentinya mendesak pemerintah agar serius memperhatikan

September 2010

pengelolaan anggaran yang bersumber dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) yang selama ini dari tahun ke tahun semakin meningkat alokasinya tetapi penyerapannya selalu bermasalah. Salah satu contoh kasusnya adalah rendahnya daya serap pemerintah terhadap anggaran bersumber PHLN di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal pada tahun Anggaran 2008 dan 2009. Dari kaca mata pengawasan, Fraksi Gerindra di Komisi V mempertanyakan keseriusan pemerintah mengentaskan daerah tertinggal apabila masih mengandalkan PHLN yang telah diketahui terlalu banyak muatan kepentingan pihak donornya, sehingga pemerintah kita seringkali gagal memenuhi 'tuntutan' pihak donor tersebut, dan terkesan tunduk dan loyal pada donor. Keberpihakan pada rakyat harus diperlihatkan melalui politik anggaran yang pro-rakyat. Alokasi anggaran dari rupiah murni untuk memecahkan isu-isu strategis seperti pengentasan kemiskinan misalnya, adalah salah satu wujud dari keberpihakan tersebut.

Pertemuan Gubernur NTT dengan Anggota DPR dan DPD RI dari Dapil NTT

Dengan niat untuk merespon isu-isu pembangunan di daerah saya sangat antusias menerima undangan gubernur dan berkesempatan hadir pada pertemuan tersebut. Pertemuan ini digagas oleh pemerintah NTT dan di-*setting* untuk mengkomunikasikan keberhasilan dan kendala pembangunan di NTT agar pemerintah NTT dan Anggota DPR dan DPD RI bisa bersama-sama mencari solusi yang paling sesuai dengan karakter NTT dan realistis baik dari aspek legislasi, penganggaran maupun pengawasannya. Meskipun cukup kental dengan aroma anggaran, saya menilai pertemuan pada 27 September 2010 di Hotel Le Meridien tersebut menjadi satu langkah maju dari pemerintah NTT untuk membuka peluang koreksi dan mengidentifikasi alternatif solusi cerdas bagi kemajuan pembangunan NTT ke depan (Baca Refleksi 1 Tahun Menjadi Wakil Rakyat: Mohon Maaf).

Kesimpulan

Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat di bidang perumahan dan pemukiman masih menjadi persoalan krusial yang memerlukan penanganan yang sungguh-sungguh dalam semangat kepedulian yang tinggi. Dengan *backlog*/tunggakan lebih dari 8 juta unit (2008), pemerintah dituntut untuk bekerja ekstra keras. Karena itu RUU Perumahan dan Pemukiman yang saat tidak lama lagi segera diundangkan, dapat menjadi instrumen politik yang apabila digunakan secara bertanggung jawab akan bermakna bagi rakyat banyak dan sebaliknya bila dimanipulasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok maka akan kontra produktif dengan tujuan perumusannya. Karena itu sinergi kekuatan DPR dan Rakyat harus terus digalang sehingga dapat memperkecil peluang penyimpangan dan pencederaan oleh individu/kelompok tertentu dengan memakai UU sebagai topeng.

Pengawasan DPR RI hendaknya terus menerus diperluas ke sektor-sektor strategis lainnya sehingga peningkatan anggaran dari tahun ke tahun dapat berkorelasi positif dengan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat. Fakta memperlihatkan indikasi bahwa selama ini anggaran meningkat menurut deret hitung sementara kesejahteraan berjalan menurut deret ukur/deret tambah.

Pinjaman atau Hibah Luar Negeri (PHLN) hendaknya tidak sampai membebani APBN yang akhirnya menyengsarakan rakyat. Karena itu pemerintah harus selektif, bijak dan cerdas menetapkan skala prioritas pinjaman, dan bahkan menghindarinya bilamana tidak mendesak. PHLN dapat digunakan untuk membiayai pembangunan sektor publik yang prospektif, agar utang akibat dari pinjaman itu tidak dibebankan pada rakyat.

Cara pandang pembangunan berwawasan lingkungan harus disosialisasikan secara lebih luas dan gencar agar pengendalian persoalan degradasi lingkungan baik cakupan maupun kualitasnya dapat lebih efektif. Dan, perencanaan pembangunan berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS) sudah saatnya

September 2010

dimasukkan dalam konfigurasi pembangunan secara terpadu dan menyeluruh.

Penutup

Spirit dari laporan ini menjadi panduan saya secara pribadi maupun sebagai Anggota DPR RI untuk mengembang fungsi saya secara lebih bertanggung jawab. Dan karena telah saya buka menjadi milik publik maka sidang pembaca dapat dengan bijak memberikan usul, saran maupun tegur sapa untuk mencapai tujuan bersama dengan cara yang lebih baik.***

Pokok Pikiran I

Mohon Maaf

Refleksi Setahun Menjadi Wakil Rakyat

HARI ini saya bangun agak siang. Jam pada layar telepon genggam di tangan saya menunjuk angka 06:45, tanggal 28 September 2010. Padahal kemarin dan hari-hari sebelumnya saya biasanya sudah bangun jam empat atau jam lima pagi, kemudian membaca bahan presentasi, laporan, maupun rencana kerja pemerintah dan membuat catatan untuk dibahas dalam sidang komisi, badan, fraksi, atau panitia kerja hari itu. Sebelum sampai di ruang sidang, saya biasa mendiskusikannya lebih dulu dengan advisor sekaligus sahabat saya Pak Yan Ghewa di meja makan sambil sarapan, dan berlanjut di dalam mobil selama perjalanan menuju ruang sidang.

Saya terhenyak melihat tanggal itu, karena ternyata tiga hari lagi, genap setahun saya menjadi anggota DPR RI yang dalam acara-acara resmi sering disapa dengan 'yang terhormat' meskipun sebenarnya saya sendiri agak risih mendengar sapaan itu. Terlebih pada saat-saat awal. Namun lama kelamaan jadi biasa saja. Tadi malam pun saya masih mendengarnya dalam acara

Pokok-Pokok Pikiran

pertemuan dengan gubernur dan bupati/walikota se-NTT dan anggota DPR/DPD RI Dapil NTT.

Semalam semua anggota DPR berbicara, sementara saya sendiri memilih diam karena topik anggaran sepertinya jadi primadona malam itu. Seakan-akan peran, fungsi dan tanggung jawab anggota DPR RI itu hanya membahas anggaran. Sejujurnya saya ingin sekali menyinggung tugas dan fungsi lain dari seorang anggota DPR, yaitu soal pengawasan dan legislasi dalam kontribusinya terhadap peningkatan dan daya serap anggaran di NTT, yang kita tahu bersama masih belum menunjukkan tren membaik dari tahun ke tahun.

Mengenai hal ini, Pos Kupang pada bulan Februari 2008 melaporkan dana pembangunan yang bersumber dari APBN hanya bisa diserap 65,63 persen selama Januari-November 2007, dan yang bersumber dari APBD, khusus pos belanja langsung tingkat penyerapannya hanya mencapai 53,26 persen. Di tingkat kabupaten/kota bahkan lebih seret lagi. Dalam periode yang sama pada tahun 2007, secara umum, khusus pos belanja langsung, dari total alokasi dana Rp 3,26 triliun lebih, penyerapannya Rp 1,4 triliun lebih atau 44,29 persen dan pelaksanaan fisik 56,68 persen, meskipun acuannya adalah tujuh kabupaten yang memberi laporan November dan sembilan kabupaten memasukkan laporan per Oktober tahun 2007.

Namun, saya putuskan untuk tetap menahan diri sambil menunggu saat yang tampan untuk mengungkapkan dan membahasnya secara sungguh-sungguh karena atmosfer pertemuan malam itu, seperti saya katakan tadi, praktis dipenuhi oleh aroma anggaran. Padahal, hemat saya, peran pengawasan dan legislasi tidak kurang strategisnya dibandingkan dengan budgeting, apalagi bila dikaitkan dengan seretnya tingkat penyerapan seperti yang saya ungkapkan di atas, dan gencarnya perjuangan untuk menggolkan RUU Provinsi kepulauan yang akan berdampak besar terhadap pembangunan NTT.

Pokok-Pokok Pikiran

Setelah acara itu, saya menuju Puncak, Bogor karena ada agenda berkaitan dengan pembahasan asumsi APBN 2011. Dalam perangkap kemacetan sepanjang jalan tol Cibubur-Ciawi saya kembali merenungi acara tadi dan bertanya, bukankah ketiga peran DPR itu setara dan sama pentingnya? Mengapa banyak orang lebih terpicat membicarakan peningkatan besaran anggaran dan terkesan kurang peduli pada manajemen anggaran dan dampak anggaran itu pada rakyat NTT? Dari sini saya mulai memahami mengapa kinerja pelaksanaan anggaran belum sesuai dengan harapan. Dan sebagai anggota DPR saya berniat mulai lebih sensitif memperhatikan hal itu dengan melaksanakan fungsi kedewanan dalam satu paket utuh secara lebih paripurna, agar tidak terkesan terlepas-lepas. Sejumlah teman tadi malam mengirim SMS menanyakan kenapa saya diam saja? Saya menjawab singkat, mohon maaf, pada pertemuan berikut kita mesti berani jujur terhadap diri kita masing-masing, dan terutama terhadap rakyat yang menjadi alasan kita untuk berada pada posisi kita masing-masing saat ini.

Benar itu, memang telah menjadi niat saya sejak memutuskan untuk dicalonkan menjadi anggota DPR. Apalagi setelah dilantik 1 Oktober 2009 niat itu akhirnya bulat sudah. Saya mulai dengan berusaha untuk selalu konsisten. Dalam hal memanfaatkan waktu, misalnya, saya selalu berusaha untuk tiba lebih awal dan tinggalkan kantor lebih larut. Selama berada di kantor, saya mengikuti semua sidang dan kegiatan DPR yang diagendakan tiap hari, dan syukurlah, saat berbagai surat kabar dan media massa lainnya mengumumkan para anggota yang sering bolos saat paripurna, nama saya tidak tercantum di dalamnya.

Demikian pula, dalam kunjungan kerja saya berusaha membuat catatan atas semua yang saya temui, termasuk hal-hal yang oleh teman sejawat saya dianggap sepele. Misalnya saya pernah mengambil contoh batu dari sebuah landasan lapangan terbang perintis di Kabupaten Maluku Tenggara, kemudian

Pokok-Pokok Pikiran

memasukkannya dalam tas keresek dan saat sidang komisi saya menunjukkan bahwa kondisi landasan dengan struktur seperti itu sangat berbahaya bagi keselamatan penerbangan. Dalam sesi dialog, saya merasa lebih bersemangat mengobrol langsung bersama para petani, nelayan, pengemudi speed boat, ojek, sopir angkutan kota, maupun pemilik rumah sederhana. Dalam sesi seperti itulah saya menemukan dan memahami hubungan timbal balik antara konsep dan konteks pembangunan. Kemudian banyak yang bilang, apa yang saya lakukan sudah tepat, tetapi ada juga selentingan saya kurang beradaptasi pada aturan protokoler, terutama ketika saya berterus terang pada mereka untuk tidak dikeang oleh aturan protokol, makanya saya mohon maaf.

Ketika saya masih menjadi fasilitator masyarakat, banyak kali saya menemui kesulitan untuk bertemu dengan para pejabat. Saat ini setelah saya menjadi pejabat, banyak orang juga kepingin bertemu, meskipun kadang hanya sekadar bersalaman dan curhat. Karena itu, hal pertama yang saya nasihatkan kepada asisten saya adalah menyapa setiap telepon, membalas setiap SMS, mencari waktu yang pas, dan menyambut setiap tamu dengan ramah. Saya beruntung mendapatkan seorang asisten seperti Ibu Susan Marey, yang dapat menterjemahkan harapan saya secara sempurna. Misalnya ketika ada tamu yang kebingungan dan tersesat di tengah hiruk pikuk dan ketatnya pengamanan Senayan, dia akan dengan sigap berlari menjemputnya dan mendampingi sampai tiba di ruangan saya dengan sukacita.

Tak ada kategori tamu di kantor saya, orang kampung atau kota, rakyat jelata maupun pejabat semua adalah tamu VIP saya. Pernah sekali, pada bulan Agustus 2010, saya mendapat pesan singkat dari Kepala Bappeda NTT ingin bertemu untuk menyerahkan sejumlah dokumen terkait pembangunan infrastruktur. Saya pun bergegas meninggalkan kantor malam-malam, menemui beliau di Kantor Penghubung NTT di daerah Tebet, dan menerima dokumen tersebut dari tangannya. Terhadap

Pokok-Pokok Pikiran

apa yang saya lakukan, seorang teman di DPR RI kemudian nyeletuk “E... Anda ini anggota DPR RI lo...” Ya, ya! Saya lupa bahwa saya sudah menjadi anggota DPR. Dalam hal pertemuan pun, banyak yang saya jamu di kantor, kadang-kadang bahkan saya ajak menginap di rumah, dan sering pula di warung pinggir jalan saya lupa kalau saya sudah menjadi pejabat negara yang diatur secara protokoler. Tetapi di situlah kebahagiaan saya, mengalami kebersamaan dengan mereka dalam suasana yang serba biasa, dan pada saat bersamaan mengingatkan saya akan ramahnya bapak, ibu, saudara dan sahabat di kampung-kampung yang pernah saya singgahi. Terhadap pelayanan macam itu, ada banyak yang kemudian mengatakan, mereka sangat puas, tetapi saya kira, ada pula yang mungkin kecewa. Karena itu saya mohon maaf.

Penyakit rindu pada kampung dan desa memang sulit terobati di Senayan, karena itu saya sering tidak sabaran menanti saat reses - bukan karena saya akan dapat SPPD. Bukan itu. Bercengkrama, mengobrol, tukar pikiran, makan, mandi dan tidur di kampung, itulah yang sering saya tunggu-tunggu. Rupanya karena separuh lebih perjalanan karir saya ada di tengah dan bersama-sama mereka di kampung-kampung, jadi seorang fasilitator, sebuah peran yang amat sangat saya cintai, tetapi harus saya tinggalkan sementara karena saya bertekad untuk fokus ke peran, fungsi, dan tanggung jawab baru ini. Sejak masuk Senayan, hanya satu kali saya menjadi fasilitator di sebuah pelatihan. Namun, dari kampung-kampung saya mendapat cerita bahwa banyak yang gembira karena bisa bersama mereka selama reses.

Seminggu yang lalu, ketika membahas sumber pembiayaan APBN 2011, advisor saya bertanya apakah dengan mengandalkan PHLN (pinjaman dan hibah luar negeri) untuk menutupi defisit, bangsa kita tidak terjebak dalam kendali pihak luar? Saya jadi teringat tulisan saya di Pos Kupang, dua tahun lalu, yang mengulas isu yang sama dari perspektif cathaonic error. Namun bukan itu

Pokok-Pokok Pikiran

yang saya pikirkan. Saya justru merasa kehilangan sebagian dari diri saya yang suka menulis di media, berdiskusi di milis Forum Academia NTT (FAN), membimbing anak-anak di INCREASE, dan bersendagurau dengan aktivis LSM dan sahabat lainnya. Semuanya karena saya ingin fokus. Terhadap itu semua, sebagian teman saya mengatakan, apa yang saya lakukan sudah tepat, namun selebihnya menyarankan agar dijaga keseimbangannya supaya tidak terkesan lupa teman. Karena itu sekali lagi saya mohon maaf.

Untuk merespon saran teman-teman, di tengah ribut-ribut soal dana untuk rumah aspirasi, saya membuka Rumah Rakyat Indonesia Raya (R2IR) dengan kocek sendiri agar siapa pun, termasuk teman-teman di mana pun berada bisa curhat setiap saat. Caranya sangat sederhana, yakni kirim SMS ke 081 339 888 555; fax ke 0215755668 dan kirim komentar ke facebook: Kabar Fary Francis, ke Website: <http://www.faryfrancis.com> dan Kota Pos NTT 555.

Demikianlah usaha saya untuk melengkapi pemahaman tentang seluk beluk DPR RI, dan hubungannya dengan rakyat yang diwakilinya. Namun saya merasa selalu ada yang kurang. Ada peluang belajar lain bagi anggota DPR RI dengan melakukan studi banding di luar negeri, namun saya lebih memilih untuk ke daerah. Ada lima kali saya mendapat peluang itu, namun saya hanya menggunakannya 1 kali, yakni ke Austria dari tanggal 28 Juli-3 Agustus 2010. Itu pun karena saya pandang dapat memperluas wawasan dan kapasitas saya dalam rangka pembahasan RUU Perumahan dan Permukiman yang lebih berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah dan kepemilikan rumah bagi WNA. Di sana saya belajar tentang Leo Haus atau Rumah Leo untuk masyarakat kalangan tidak mampu. Bapak/ibu/saudara dan sahabat dapat membaca ulasannya di website saya <http://www.faryfrancis.com>. Karena kunjungan luar negeri tersebut saya harus meninggalkan 3 rapat paripurna, dan 2 rapat Badan Anggaran. Saya sungguh

Pokok-Pokok Pikiran

sangat menyesalinya, karena itu untuk ke sekian kalinya. Saya mohon maaf.

Komitmen saya untuk selalu ke daerah, seperti saya singgung di atas, sesungguhnya didorong oleh cita-cita saya selaku wakil rakyat untuk terlibat langsung dalam upaya memecahkan berbagai isu kronis seperti rawan pangan, gizi buruk, rumah layak huni maupun urusan transportasi di NTT. Saya sangat yakin, NTT tidak semiskin dan terbelakang seperti yang disebarluaskan selama ini. Saya hanya perlu terus menerus mencari dan menemukan strategi yang tepat agar Laut Sawu menjadi lebih ramai, air hujan semakin mudah dipanen, dan demokrasi dikembalikan kepada rakyat yang adalah empunya kekuasaan. Tuntutan saya dan teman-teman di Komisi V DPR RI agar pemerintah serius memecahkan persoalan pencemaran Laut Timor, permintaan untuk membuka rute pelayaran KM Awu ke Kabupaten Sabu Raijua, perjuangan untuk meningkatkan anggaran pembangunan transportasi laut maupun udara di Flores, Sumba, Timor, Alor, Lembata dan sekitarnya adalah bagian dari strategi meramaikan Laut Sawu tersebut.

Hari ini akan segera berakhir, namun dalam sebuah permenungan yang spontan itu, saya dapati bahwa selama satu tahun saya benar-benar telah mencari, menemukan, menghayati, dan belajar mengamalkan fungsi saya sebagai wakil rakyat. Akan tetapi semakin keras saya berusaha, semakin terasa pula saya belum banyak berbuat apa-apa. Dan saya harus jujur mengakui bahwa tugas sebagai wakil rakyat ternyata sangatlah berat, dan tidak seindah bayangan banyak orang. Oleh sebab itu demi kehormatan bapak, ibu, saudari, saudara dan sahabat semua, dan untuk kemuliaan namaNya, saya sekali lagi mohon maaf seraya memohon dukungan dan bimbingan dalam perjuangan 1 tahun mendatang. Dan, esok saya harus bangun lebih pagi untuk lanjutkan perjuangan.***

Pokok Pikiran II

Century

Aib Yang Kontra Pro-Kerakyatan di Tengah Slogan ‘Pembangunan Untuk Semua’

Program Pembangunan untuk semua sudah ramai digembar gemborkan akan ditata dalam 100 hari pertama presiden SBY-Boedioano. Akankah dalam 100 hari itu pemerintah benar-benar serius menghasilkan ‘cetak biru’ pembangunan lima tahun ke depan? Atau hanya sekedar ritual perayaan dan eforia kemenangan saja? Sanggupkah pemerintah berlapang dada membuka borok Century dan menyadari bahwa konsep neoliberalisme ekonomi sesungguhnya adalah praktek melumpuhkan rakyat dan bangsa?

Setelah dilantik 1 Oktober 2010, hal pertama yang saya sikapi adalah pembenahan ke dalam dan responsif terhadap kondisi luar. Untuk itu saya menata agenda dan rencana-rencana aksi pribadi, termasuk niat untuk memusatkan perhatian secara utuh pada tugas dan fungsi ke-dewananan yakni Legislasi, Anggaran dan Pengawasan; dan belajar untuk melayani melalui fungsi-fungsi itu. Target saya, dalam satu tahun pertama menjadi Anggota DPR RI saya harus telah memiliki *plat form anggota DPR* dengan corak

Pokok-Pokok Pikiran

saya sendiri. Karena itu saya belajar banyak hal dari para sejawat saya di Fraksi Gerindra, Komisi V, Badan Anggaran dan tak henti-hentinya menimba pengalaman dari setiap lingkungan di mana saya menjalankan fungsi-fungsi tersebut.

Sementara itu respon saya terhadap kondisi luar banyak dipengaruhi oleh kenyataan bahwa apa yang hendak diperjuangkan melalui Fraksi Partai Gerindra banyak bertolak belakang dengan realitas saat ini. Sebagai contoh, program 100 hari SBY-Boediono pada pandangan saya tak lebih dari ritual 5 tahunan yang telah menjadi tradisi akhir-akhir ini, demikian pula konsep neoliberal yang bagi saya belum saatnya digunakan di Indonesia karena akan menggilas rakyat dan memakmurkan kaum kapitalis; dan terakhir saya memandang bail out bank Century akan menjadi komoditas politik penguasa dan menorbankan kemaslahatan rakyat, bangsa dan negara. Berikut ini adalah pandangan singkat dalam setiap aspek tersebut dan telah saya serahkan untuk menjadi input bagi Fraksi Gerindra dalam menjalankan amanat pendukungnya untuk lima tahun ke depan.

100 hari: Bukan Sekadar Tradisi untuk Menyenangkan?

Dari segi visi, misi, dan strategi kebijakan pembangunan SBY-Boediono lima tahun, program kerja 100 hari akan menjadi batu pijakan selanjutnya. Karena itu, makna program kerja 100 hari bukan semata-mata tradisi dan upaya untuk menyenangkan serta sebagai upaya mengelola citra bahwa SBY-Boediono tetap konsisten dengan janji-janji kampanye dan yang lebih penting dan mendasar dari itu semua adalah apakah jalan pembangunan lima tahun selanjutnya seperti yang dilansir pada pidato tentang pembangunan daerah oleh SBY adalah untuk mempersiapkan arah kebijakan kabinet yang berorientasi membangun untuk semua bukan untuk golongan dan kelompok.

Dalam konteks itu, **Pembangunan untuk SEMUA** seperti yang telah disinggung oleh SBY haruslah ditunjang oleh struktur

Pokok-Pokok Pikiran

kabinet kerja yang professional, sementara itu, fakta menunjukkan susunan kabinet masih kental dengan warna kompromi politik, yaitu akomodasi politik pihak lawan agar pemerintahan menjadi kuat dan tidak diganggu di tengah jalan. Akankah ritme kerja, visi, dan misi presiden ini diikuti oleh para menteri mengingat mitos bahwa birokrasi kita masih buruk dengan temperamen ketradisionalannya serta perilaku-perilaku para pejabat yang konsumtif masih terus saja dilakukan? Disamping itu, konsep pembangunan untuk semua sebagai landasan dan pijakan pemerintah SBY-Boediono lima tahun mendatang tergantung pula dari kapasitas dan kemampuan birokrasi daerah dalam mengelola anggaran untuk publik dan pembangunan. Seperti sudah menjadi rahasia umum, struktur APBD masih tersedot oleh biaya-biaya birokrasi dan gaji, sementara untuk biaya pembangunan masih terlalu kecil.

Agenda National Summit: Untuk Elitis atau Rakyat

Ini suatu **PENDEKATAN BOEDIONO YANG BELUM BERUBAH**. Selalu dengan Summit. dulu juga pernah dengan Infrastruktur Summit dia pesimistis dapat mencapai apa yang diinginkan. Karena tidak ada target secara kuantitatif yang terukur. Kalau National Summit ini ingin berhasil maka kegiatan tersebut harus jelas apa yang dituju, target kuantitatifnya seperti apa, dan sejauh mana kemampuan pemerintah mengoreksi dan mengevaluasi setiap apa yang telah dihasilkan. Pengalaman national summit sebelumnya hanya seperti asap saja dan hanya ingin memperlihatkan pemerintah baru sedang serius menangani masalah-masalah di Indonesia dalam rangka membangun citra. Pertanyaan yang mengemuka selama perdebatan masa kampanye Pilpres 2009 adalah ke manakah arah ekonomi Indonesia akan diprioritaskan? Menjadi issue menarik dibicarakan saat national summit kali ini, seperti benturan antara **Konsep NEOLIBERAL dengan PROKERAKYATAN** dalam pembangunan Indonesia begitu

Pokok-Pokok Pikiran

mengemuka dan menonjol. Dari segi konsep pembangunan yang telah dilansir SBY, secara paradigmatik memang mengalami perubahan yang disebut sebagai “pembangunan untuk semua”. Pembangunan untuk semua dilakukan agar tercipta keserasian dan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan atau ***growth with equity***. Suatu upaya untuk mengoreksi konsep pembangunan trickle down effect yang selama ini terjadi. Masalahnya, bagaimana dengan kapasitas anggaran pemerintah (pusat dan daerah), apakah memungkinkan melakukan proses ***growth with equality*** tersebut secara bersamaan mengingat selama lima tahun terakhir ini pemerintah masih cenderung berorientasi pada pertumbuhan minus pemerataan. Pembangunan masih cenderung berorientasi kepada elite, bukan berciri populis. Inilah pesan dalam perdebatan selama ini antara neoliberal dengan ekonomi kerakyatan yang banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan. Jangan sampai hanya paradigma pembangunan yang berubah, tetapi pada sisi implementasinya mengalami jalan buntu dan tidak populis bagi rakyat, tetapi cenderung elitis.

Bank Century: Tantangan Awal Fraksi Gerindra yang dipercayakan sebagai Pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN). Peran Fraksi GERINDRA mestinya terdepan

Sebagai Pimpinan BAKN yang dipercayakan oleh lembaga DPR RI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendorong agar fraksi/komisi di DPR RI melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK tersebut, untuk itu hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR RI, harus mengungkapkan aliran dana *bailout* Bank Century dalam temuannya. Tidak hanya itu, motivasi sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menempatkan dana di bank tersebut juga harus diselidiki. Perilaku BUMN-BUMN besar yang menaruh dana di bank kecil seperti Century sudah cukup

Pokok-Pokok Pikiran

mengundang pertanyaan. Sepatutnyalah BPK memeriksa motivasi para BUMN tersebut.

Fraksi Gerindra akan fokus mengkaji temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meneliti aliran dana talangan Rp 6,7 triliun untuk Bank Century. Selain itu, juga mempelajari atas dasar apa dana talangan diberikan. Dengan fokus pemeriksaan seperti itu, dapat ditemukan siapa saja yang harus bertanggung jawab dalam aksi penyelamatan (bail-out) Bank Century—kini menjadi Bank Mutiara itu.***

Pokok Pikiran III

Tanggapan Atas Proposal Pembentukan Provinsi Flores

Wacana pemekaran wilayah provinsi NTT menjadi provinsi NTT dan Provinsi Flores sudah berlangsung lama. Ada yang mengatakannya bahwa perjuangan itu sebenarnya telah dimulai pada tahun 1959, hanya setahun setelah provinsi NTT lepas dari Sunda Kecil dan berdiri sendiri. Namun ada yang menyebutkan bahwa perjuangan memisahkan diri dari induknya, Flobamora, sesungguhnya dimulai pada awal tahun 2000, atau setahun pasca disahkannya UU 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada saat itu sebuah lembaga yang bernama Komite Perjuangan Pembentukan Propinsi Flores (KP3F), memulai sosialisasi di berbagai kalangan. Pihak pro-pembentukan provinsi Flores, yang pada umumnya terdiri dari para politisi atau mantan pejabat pemerintah membangun argumentasi bahwa pembentukan Propinsi Flores dilakukan dalam rangka efisiensi pelayanan kepada masyarakat.

”...Dengan membentuk propinsi sendiri, para pejabat di Flores tidak harus menghabiskan banyak waktu dan biaya untuk

Pokok-Pokok Pikiran

menghadiri kegiatan-kegiatan tingkat propinsi di Kupang. Mereka cukup menggunakan mobil untuk datang ke ibukota Propinsi Flores yang akan disepa-kati nantinya, biaya-biaya perjalanan akan lebih hemat. Hal ini sangat berbeda jauh ketika setiap pejabat dari Flores harus da-tang ke Kupang. Hal ini pun sangat ber-pengaruh terhadap jumlah kesempatan setiap pejabat berada di daerahnya un-tuk melayani kepentingan masyarakat...” (dari blog: Maum Flores).

Sedangkan pihak kontra, yang pada umumnya berasal dari kalangan masyarakat umum, termasuk mahasiswa menya-takan tidak tertarik dengan pemekaran, karena menurut mereka, pemekaran terbukti kurang berdampak pada kes-ejahteraan rakyat. “Malah tambah ruwet, bahkan sekarang ini sudah banyak tokoh yang ingin agar kabupaten hasil pemeka-ran dikembalikan saja ke kabupaten in-duk,” tandas beberapa aktivis NTT dalam diskusi di Surabaya beberapa waktu lalu .(Lambert Hurek, Blogspot)

Kalangan ini bahkan mensinyalir pemekaran kabupaten/provinsi ini adalah akal-akalan para politisi untuk membperluas ‘lapangan kerja untuk mereka (mereka sendiri)’ karena dengan terbentuknya provinsi baru maka akan ada lembaga dan anggota DPRD baru, Kepala dan pegawai dinas/badan/institusi baru, proyek proyek baru, dan seterusnya. bertambah. ”...Itu peluang emas untuk memasukkan kelu-arga dan kroni ke lingkaran elit daerah. Raja-raja kecil bisa dengan leluasa ‘un-juk kekayaan’ meski duitnya berasal dari APBD...” demikian salah satu sinyalemen peserta sebuah diskusi di Surabaya me-nanggapi pembentukan provinsi Flores tersebut. Meskipun, pasca kerusuhan Medan yang dipicu oleh desakan pem-bentukan provinsi Tapanuli Utara, Presi-den Susilo Bambang Yudhoyono menya-takan MORATORIUM, atau penghentian sementara pemekaran wilayah, tetapi “...nafsu berkuasa, nafsu memecah belah kabupaten, kota, provinsi tidak akan ada matinya. Akal bulus tetap jalan...: tandas peserta diskusi itu lagi.

Mengapa Berpisah dari NTT?

Bukankah, dengan alasan untuk mendekatkan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT, pemerintah NTT dalam 2-3 tahun terakhir ini gencar memperjuangkan peningkatan status NTT menjadi provinsi kepulauan? Dengan status tersebut, menurut pemerintah, NTT akan menerima perlakuan yang lebih adil dan proporsional dari pemerintah pusat, sebagaimana provinsi kepulauan Riau misalnya. Dalam aras pikir ini, mestinya segenap elemen masyarakat memusatkan perhatian dan memberikan dukungan penuh kepada pemerintah sehingga status provinsi kepulauan menjadi kenyataan. Karena itu perjuangan untuk menjadi provinsi kepulauan seharusnya menjadi momen penting bagi masyarakat NTT untuk masuk ke sebuah babak baru pembangunan di NTT yang semakin memperkuat kerjasama antar berbagai pra-nata sosial dari termasuk latar belakang suku, ras, golongan, agama, dan lain-lain. Maka kesamaan dan kesatuan visi dan misi semua elemen masyarakat NTT dalam perjuangan tersebut menjadi syarat mutlak. Karena itu wacana pembentukan provinsi Flores yang mulai menghangat kembali, bersamaan dengan perjuangan menjadi provinsi kepulauan seperti disebutkan di atas justru akan mengaburkan arah perjuangan itu sendiri, yang pada akhirnya merugikan NTT untuk kesekian kalinya.

Jangan Lupa Sejarah

Mengenai kesamaan dan kesatuan visi dan misi masyarakat NTT dalam konteks pembentukan sebuah provinsi ini, Dr. Ben Mboi dalam sebuah pertemuan pribadi dengan penulis di rumah beliau di Jakarta pada pertengahan Mei 2010 menandakan agar setiap orang NTT tidak lupa pada sejarah. Sambil bernostalgia beliau menuturkan, "...terlepas dari pro-kontra pembentukan provinsi Flores, saya mau mengingatkan kepada mereka semua agar ingat siapa pendiri NTT, dan apa visi misi mereka..." Bagi saya, kata-

Pokok-Pokok Pikiran

kata Dr. Ben ini menjadi bahan refleksi yang amat penting, dan bahkan seperti sebuah lecutan yang menggugah kesadaran akan luhurnya filosofi pembentukan sebuah provinsi. Beliau melanjutkan "...ada 5 orang yang menjadi penggagas utama berdirinya provinsi NTT pada tahun 1958, yaitu Frans Sales Lega, Stef Ndun, Ande Tule, N.D. Dilak, Parera Fernandes dan Pendeta Jacob Tobing untuk mengusung 3 visi sekaligus misi besar yaitu menguatkan kerjasama Katolik dan Protestan, mensejahterakan masyarakat NTT, dan menyiapkan orang NTT untuk menjadi pemimpin-pemimpin nasional...". Karena keluruhan visi misi itu pula, Dr. Ben bersumpah kepada mendiang El Tari untuk tidak memecah belah Flobamora dengan alasan apapun.

Karena itu, belajar dari sejarah, setiap upaya yang secara luhur menempatkan kepentingan rakyat banyak di atas segala-galanya, pasti akan menarik simpati luas dan dukungan yang kuat dari elemen-elemen penggagasnya. Maka, wacana pembentukan provinsi Flores, apabila ditempatkan dalam kerangka pikir ini masih akan melalui perjalanan panjang penuh onak dan duri karena jawaban atas pertanyaan pokok di atas masih harus terus dicari.***

Pokok Pikiran IV

RUU PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN UNTUK SIAPA ?

Dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia seperti diamanatkan oleh Pembukaan UUD RI 1945, negara memiliki tanggung jawab memenuhi kebutuhan rakyatnya antara lain melalui pembangunan perumahan dan permukiman yang layak, serta terjangkau di dalam lingkungan permukiman yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dalam konteks itu setelah menyimak substansi Undang-undang No. 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman, Fraksi Partai Gerindra memandang, Undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan semangat yang terkandung dalam UUD RI 1945; di mana prinsip-prinsip otonomi daerah, demokrasi, hak asasi dan hukum diprioritaskan untuk ditegakkan secara lebih sungguh, murni dan konsekuen dalam bingkai NKRI. Ketidaksesuaian itu antara lain tampak pada semakin menumpuknya permasalahan-permasalahan di bidang perumahan dan permukiman seperti besarnya *backlog* yang sampai dengan tahun 2010 telah mencapai angka 8 juta unit;

Pokok-Pokok Pikiran

lemahnya daya beli masyarakat yang berdampak pada meningkatnya **ketergantungan pada subsidi, minimnya dukungan perbankan; keterbatasan dukungan APBN**; kurangnya koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam menyiapkan infrastruktur pendukung serta berbelitnya jalur birokrasi terkait perijinan perumahan.

Berkaitan dengan lemahnya daya beli masyarakat, Data BPS 2008 mencatat rendahnya pendapatan perkapita nasional (sebesar US\$ 2.271,2 atau 21 juta perkapita). Fraksi Gerindra memandang, pendapatan sebesar itu tidak cukup untuk membiayai kepemilikan perumahan yang layak karena pendapatan tersebut masih harus dialokasikan untuk kebutuhan lainnya seperti sandang, pangan, transportasi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Kesulitan untuk memiliki perumahan yang layak diperparah lagi oleh tingginya jumlah pekerja sektor informal yang biasanya tidak memiliki pendapatan tetap dan yang memiliki pendapatan di bawah standar (UMR, UMP). Akibatnya ketergantungan masyarakat terhadap subsidi KPR dari pemerintah semakin meningkat dari tahun ke tahun sementara alokasi subsidi yang dianggarkan tidak cukup untuk menjawab permasalahan klasik tersebut. Sebagai contoh pada tahun 2009 pemerintah hanya menganggarkan 2.5 triliun dan pada tahun 2010 sebesar 3.95 triliun untuk subsidi pembangunan perumahan dan permukiman. Jumlah tersebut hanya sekitar 0,25% dari nilai APBN tahun bersangkutan; padahal idealnya alokasi untuk subsidi adalah 1% dari total nilai APBN setiap tahun.

Memperhatikan kondisi-kondisi riil seperti telah diuraikan di atas, Fraksi Partai Gerindra berharap RUU Perumahan dan Permukiman ini dapat menjadi *affirmative action* negara yang memberikan jaminan dan memprioritaskan pengadaan perumahan dan permukiman yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang sampai saat ini sulit memiliki perumahan layak huni akibat rendahnya daya beli terhadap

Pokok-Pokok Pikiran

perumahan dan permukiman yang disediakan oleh pengembang besar. Salah satu bentuk *affirmative action* ini adalah pemerintah membuat kebijakan dengan memberi kemudahan dan/atau bantuan kepada masyarakat berpenghasilan menengah (MBM) termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah layak huni. Kemudahan dan/atau bantuan itu dapat berupa pemberian program fasilitas likuiditas dalam bentuk pinjaman lunak kepada lembaga keuangan bank dengan tingkat suku bunga sangat lunak dan tenor yang disesuaikan dengan umur pinjaman. Program tersebut diharapkan dapat menurunkan tingkat suku bunga KPR, khususnya Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat (KPRSH) Bersubsidi. Di samping itu melalui *affirmative action* ini diharapkan akan terjadi efisiensi dan efektifitas dalam pembangunan perumahan serta permukiman, baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pelaksanaan *affirmative action* dilakukan secara terpadu baik sektor, pembiayaan, maupun pelaksanaannya, berdasarkan suatu program jangka menengah lima tahunan yang disusun secara transparan dengan mengikutsertakan berbagai pihak termasuk pemerintah, badan usaha, dan masyarakat dengan menacu pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas, Fraksi Gerindra berharap RUU Perumahan dan Permukiman ini dapat memberikan kepada pemerintah peluang yang semakin luas untuk menjamin:

- Tersedianya rencana pembangunan perumahan dan permukiman yang aspiratif dan akomodatif yang dapat menjadi acuan bersama oleh para pelaku dan penyelenggara pembangunan pembangunan perumahan dan permukiman yang dituangkan dalam suatu Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman;
- Tersedianya skenario pembangunan perumahan dan permukiman yang dapat terselenggara secara tertib dan terorganisasi, serta terbuka peluang bagi masyarakat untuk berperan serta di dalamnya;

Pokok-Pokok Pikiran

- Terakomodasinya kebutuhan akan perumahan dan permukiman yang kepastian hukumnya terjamin, terutama bagi kelompok MBR. Adanya kepastian hukum tersebut memungkinkan semakin besarnya peluang MBR untuk memiliki perumahan yang layak dan karena itu persoalan meluasnya daerah kumuh di perkotaan juga dapat dikendalikan.
- Terciptanya kondisi yang dapat mendorong peningkatan peran swasta dalam penyediaan rumah murah bagi MBR melalui skema pembiayaan kepemilikan rumah yang terjangkau.

Menurut pengamatan Fraksi Partai Gerindra, dalam upaya mendorong peran pemerintah untuk menjamin pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman seperti disebutkan di atas, Fraksi Gerindra mencatat hal-hal signifikan yang perlu dibahas lebih lanjut dalam usul perubahan terhadap RUU tentang Perumahan dan Permukiman ini antara lain:

- Rancangan Undang-undang ini hendaknya mengatur hak, kewajiban serta tanggung jawab pemerintah pada setiap tingkatan secara proporsional sehingga tidak sampai terjadi multitafsir yang berakibat pada tersendat-sendatnya program perumahan dan permukiman seperti yang dimaksud oleh RUU ini.
- Dalam RUU ini perlu secara tegas dinyatakan Departemen/ Kementerian/Lembaga yang menjadi leading sector di pembangunan perumahan dan permukiman.
- Berkaitan dengan hal pertanahan dan pembiayaan perumahan, Fraksi Gerindra memandang perlunya pasal-pasal yang secara jelas dan terukur mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah pada setiap tingkatan kewenangan dalam urusan pertanahan untuk program perumahan dan permukiman.
- Khusus mengenai kepemilikan rumah oleh orang asing dan investor asing, Fraksi Gerindra memandang perlunya pembahasan lebih mendalam termasuk mengenai hak,

Pokok-Pokok Pikiran

kewajiban dan tanggung jawab pemerintah serta para pemangku kepentingan lainnya; agar negara tidak terjebak dalam kepentingan segelintir orang.

- Sanksi terhadap pelanggaran atas undang-undang ini, harus memberikan efek jera terutama berkaitan dengan sanksi atas tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana kejahatan.

Selanjutnya dengan menimbang dan memperhatikan pokok-pokok pikiran tersebut di atas, maka Fraksi Partai Gerindra menyatakan menyetujui RUU Perumahan dan Permukiman menjadi Usul inisiatif DPR RI. Demikian pandangan Fraksi Partai Gerindra ini kami sampaikan, dan semoga RUU ini dapat sejalan dengan amanat konstitusi dan sesuai prinsip sebagai negara hukum.***

Pokok Pikiran V

Belajar Dari Austria Rumah Untuk Rakyat

Pada tanggal 28 Juli s/d 3 Agustus 2010 saya berada di Austria dan Turki dalam rangka belajar program perumahan rakyat di negeri tersebut. Setelah bertemu dengan parlemen Austria saya mendapat kesempatan untuk mengunjungi sebuah lembaga pemerintahan yang menyelenggarakan perumahan bagi rakyat miskin dan tunawisma di negara itu. Yang lebih membuat saya terkagum-kagum adalah kesungguhan pemerintah negara itu untuk menyediakan jaminan perumahan yang sangat layak bagi setiap warga negara yang dalam kondisi terdesak, dari kalangan yang tidak sanggup membayar sewa rumah, gelandangan, pecandu narkoba, korban ketidakharmonisan dalam rumah tangga, dan bahkan pencari suaka. Saya berangan-angan dan bertanya pada suatu ketika, apakah perumahan sejenis ini bisa dibangun di Indonesia?

HAUS LEO: *Perumahan yang Pro-Rakyat.*

HAUS LEO atau Rumah Leo, semacam rumah singgah di Indonesia. HAUS LEO adalah salah satu model perumahan yang

Pokok-Pokok Pikiran

dikembangkan dalam skema *Socially Supported Housing Facility* (SSHF). SSHF sendiri merupakan bagian dari program Public Housing di Austria. Namun tidak seperti rumah singgah di Indonesia yang benar-benar hanya untuk singgah dan lebih sering tidak kembali lagi, di HAUS LEO orang dapat tinggal seumur hidup dengan jaminan standar hidup layak yang disediakan oleh pemerintah. HAUS LEO disiapkan oleh pemerintah untuk rakyat Austria yang mengalami kesulitan atau keterbatasan baik secara ekonomi maupun sosial, misalnya tidak mampu memiliki rumah sendiri, tidak mampu menyewa, atau yang sedang mengalami persoalan sosial di tengah keluarga/rumah tangga, termasuk orang cacat, penganggur, pecandu narkoba dan dalam sistim yang sangat selektif warga negara asing yang menjadi pencari suaka di Austria dapat memanfaatkan fasilitas ini.

HAUS LEO dapat juga dipandang sebagai pusat rehabilitasi berbagai persoalan. Karena itu, meskipun negara mengizinkan warganya dengan kriteria di atas untuk menjadi penghuni seumur hidup, setiap penghuni boleh juga meninggalkan HAUS LEO kapan saja dan dapat kembali lagi sesewaktu tergantung dari kondisi orang/keluarga tersebut. Karena itu HHSF membuat rumah dengan model HAUS LEO tersebut senyaman mungkin.

Di HAUS LEO disediakan pelayanan pemulihan kehidupan/normalisasi kehidupan, pemulihan kondisi psikologis, dan kesehatan. Pelayanan ini diberikan oleh pekerja sosial sesuai dengan permasalahan yang dihadapi orang/keluarga yang tinggal di sana. Penghuni HAUS LEO mencakup anak-anak sampai orang lanjut usia. Pada saat saya mengunjungi salah satu HAUS LEO di Kota Wina, penghuni dengan usia termuda adalah 30 tahun dan yang tertua 90 tahun. HAUS LEO menampung penghuni laki-laki dan perempuan. Pada saat ini ada sekitar 12 rumah dengan konsep LEO yang dikelola oleh NGO dan menampung sekitar 700 orang. Lantas, mengapa Austria bisa membangun rumah gratis bagi rakyatnya?

Kebijakan Perumahan Rakyat di Austria: Pemerintah Memastikan Setiap Warga Negara Mendapat Haknya

Perumahan Rakyat atau Public Housing (PH) di Austria adalah sebuah lembaga sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sejak tahun 1980-an pemerintah Austria menyerahkan tanggung jawab perumahan di Austria kepada daerah provinsi atau, dalam istilah Austria, *Lander*. Meskipun demikian peran pemerintah federal tetap signifikan terutama untuk menggodok peraturan perundang-undangan dan penerimaan pajak.

Sesuai dengan tujuan pembentukannya PH mempunyai tugas utama antara lain untuk:

- mengurus orang yang membutuhkan bantuan, baik yang tinggal di rumah maupun di panti, termasuk bantuan untuk orang cacat.
- menyediakan rumah/penampungan bagi yang tidak memiliki rumah atau sedang menghadapi masalah social yang harus mereka selesaikan, termasuk penganggur/tidak mempunyai pekerjaan sampai mendapatkan pekerjaan, pendapatan yang minim sehingga tidak mampu memiliki/menyewa rumah, tidak ada keluarga atau tidak mempunyai hubungan keluarganya, dan masalah narkoba.

PH merupakan wujud dari tanggung jawab pemerintah terhadap keluarga yang tidak mampu secara ekonomi atau social, dengan menyediakan suasana yang nyaman agar penghuninya tidak sampai mengalami trauma tersebut di atas secara berkelanjutan. Yang tidak memiliki pendapatan, selain diberi tumpangan gratis, juga disediakan bantuan social, sedangkan yang memiliki pendapatan pas-pasan menyewa dengan tarif sangat murah. PH juga melayani para pencari suaka ke Austria, meskipun dengan persyaratan yang sangat ketat.

Pokok-Pokok Pikiran

Mengapa Austria Menjadi terbaik di Eropa pada bidang perumahan?

Sebagaimana negara-negara lain di manapun di dunia, Austria juga memiliki cita-cita luhur untuk mensejahterakan rakyatnya. Dan menurut saya, salah satu kelebihan negara ini dalam memperjuangkan cita-cita tersebut adalah keberhasilannya membangun negaranya dalam semangat kemitraan antara pemerintah dan rakyatnya. Pemerintah Austria telah menempuh perjalanan panjang untuk sampai pada model pengelolaan perumahan rakyatnya seperti saat ini.

Ternyata sejak abad 19 Austria sudah mulai menyusun rapi arsitektur perkotaan dan perumahannya. Didukung oleh 93 asosiasi perumahan, pemerintah menyediakan rumah bagi rakyat dengan pola *social partnership* dimana setiap warga negara berkewajiban untuk berperan serta dalam upaya penyediaan rumah yang layak bagi setiap orang karena rumah merupakan kebutuhan dasar dan hak asasi manusia yang mendasar. Tambahan lagi kebijakan perumahan tidak diserahkan kepada mekanisme pasar, melainkan tetap dalam intervensi pemerintah sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah untuk mensejahterakan rakyat.

Austria menganut penguasaan atas tanah dengan sistim hak milik. Peraturan mengenai kepemilikan tanah di Austria sangat ketat sehingga orang asing selain masyarakat Uni Eropa sangat sulit mendapatkan hak milik atas tanah. Meskipun masyarakat Uni Eropa bisa menyewa tanah, namun jangka waktu sewanyapun hanya satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi setiap tahun. Peraturan perundang-undangan pertanahan di Austria tidak mengijinkan orang asing untuk melakukan sewa tanah jangka panjang.

Dalam hal pembangunan perumahan dan penyediaan lahan hukum Austria memerintahkan agar pemerintah Austria memberikan kontribusi terhadap penyediaan lahan untuk

Pokok-Pokok Pikiran

kepentingan pembangunan perumahan sosial sehingga harga rumah terjangkau dan dapat diakses oleh seluruh masyarakatnya. Karena itu pemerintah melakukan pengawasan misalnya terhadap sistim perumahan sehingga ada kepastian saham keuntungan yang terbatas, sewa yang wajar, pemanfaatan asset yang efisien dan audit secara periodic. Mekanisme penyediaan dana untuk pembiayaan perumahan diatur dengan undang-undang dan jelas-jelas memperlihatkan keberpihakannya terhadap masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pemerintah melakukan promosi skema intervensi perumahan dalam bentuk subsidi yang bertujuan untuk memberikan modal investasi sehingga harga rumah terjangkau bagi seluruh kalangan masyarakat.

Subsidi diberikan melalui koperasi perumahan dengan sejumlah kemudahan seperti:

- Jangka waktunya panjang dan tingkat suku bunganya rendah dengan besar subsidi antara 30%-70% dari biaya konstruksi.
- Ada anuitas hibah/pinjaman baik dari pinjaman untuk biaya konstruksi maupun pinjaman lain dengan tujuan untuk mengurangi pembayaran dari hipotik.
- Tunjangan diberikan berdasarkan besarnya pendapatan dan ukuran rumah tangga. Meskipun demikian saat ini hanya ada 4% rumah tangga yang memanfaatkan tunjangan tersebut, dan hal ini adalah yang terendah di antara Negara-negara Eropa lainnya.
- Program pembelian rumah, tersedia bagi setiap individu sehingga siapapun dapat memiliki rumah dari jenis apapun.

Meskipun disediakan fasilitas subsidi, pemerintah melaporkan bahwa sejak 8 tahun lalu (2002) prosentase masyarakat yang memilih tinggal di rumah pribadi telah mencapai 48%, yang memilih tinggal di kondominium sebesar 18% dan menyewa tempat tinggal sebesar 29%.¹ Pada saat ini, seiring dengan semakin pesatnya pertumbuhan jumlah rumah sosial, komposisi

Pokok-Pokok Pikiran

saham perumahan di Austria memperlihatkan bahwa 53% rumah tangga hidup dalam rumah hak milik mereka sendiri, 11% di kondominium dan 42% di rumah keluarga tunggal.

Kampung *St. Vincent de Paul*: Haus Leo di Amerika?

Ketika belajar di Haus Leo saya teringat, di Amerika ada *St. Vincent de Paul Village* yang merupakan pusat rehabilitasi tunawisma terpadu dan terbesar di pesisir barat Amerika. Desa yang terletak di San Diego Amerika ini, sangat dikenal dengan sebutan *The Village* atau kampung, yang menjadi tempat tinggal permanen dan sementara ribuan tunawisma dan keluarganya dalam upaya mereka untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat yang berguna. Pusat ini menggunakan pendekatan “Tempat Serba Ada” (*One Stop Shopping*) yang dipraktekkan untuk membantu para tunawisma secara perseorangan maupun keluarga tunawisma. *St. Vincent de Paul Village* dimulai dari sebuah dapur sup pada awal tahun 1950-an dan berkembang menjadi pusat rehabilitasi tunawisma terpadu terbesar di pesisir barat Amerika.

The Village dipuji sebagai model panutan yang mengembangkan sistem “Bantuan Kepedulian yang Berkesinambungan.” Departemen Perumahan dan Pembangunan Perkotaan Amerika Serikat kemudian mengadopsi sistem ini pada tahun 1994, dengan memperlakukannya sebagai cetak biru, ditimbang dari komunitas mana saja yang mampu secara efektif bekerjasama sehingga menciptakan solusi jangka panjang untuk para tunawisma. Model bantuan kepedulian yang berkesinambungan tersebut berangkat dari ide bahwa harus ada bantuan yang memadai bagi para tunawisma. Usaha untuk menyelesaikan masalah tunawisma harus lebih dari bantuan sederhana pada satu kasus, tetapi lebih kepada jalan keluar yang terintegrasi pada seluruh titik perjalanan yang menjadikan seseorang tunawisma hingga keluar dari keberadaannya sebagai tunawisma. Karena itu Bantuan Kepedulian Yang

Pokok-Pokok Pikiran

Berkesinambungan melibatkan juga unsur-unsur lain seperti, program jangkauan keluar, perlindungan di dalam dan bantuan yang diberikan, tempat perlindungan darurat, rumah transisi, penyuluhan, dan jasa penanggulangan ketergantungan, pendidikan non formal dan program penyediaan rumah permanen dengan jasa pendukungnya.

Setiap orang yang datang untuk mendapatkan pertolongan di “*The Village*”, dianggap sebagai tamu/ klien. Lalu pendekatan dilakukan dengan menggunakan metode perorangan, dengan tujuan bahwa pertolongan yang diberikan pada individu ini sesuai dengan kebutuhannya. Sebagai contoh, orang-orang yang baru datang mendapatkan penyuluhan dari pengelola kasus yang menyarankan agar setiap orang mendapatkan jasa-jasa pelayanan yang berbeda seperti; pelatihan kejuruan, pengelolaan kasus jangka panjang, pelatihan keterampilan hidup, penyuluhan, kelas pengajaran bagi orang tua, penanggulangan ketergantungan, program ekstra kurikuler, les, dan latihan dasar kepemimpinan untuk anak-anak dan remaja. Tujuan utama bagi bantuan yang berkesinambungan ini adalah untuk mengakhiri lingkaran kompleks akan segala hal yang mengakibatkan seseorang menjadi tunawisma. Pendekatan ini terlihat efektif, bahkan bagi tamu-tamu yang telah dicap sebagai “tunawisma kronis.” Tidak heran, di kampung ini disediakan berbagai peluang peningkatan kapasitas yang dipersyaratkan untuk menjadi manusia seutuhnya, seperti Pendidikan Kejuruan untuk dewasa, pelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa kedua (*English as a Second Language*), pengelolaan anggaran belanja (*budgeting*), Kursus menulis, Kursus Keterampilan komputer, Penyuluhan karier, Program penempatan kerja, dan sebagainya. Penghuni yang telah terampil dalam aspek tertentu dapat mencari pekerjaan sesuai dengan bidangnya, kemudian boleh memutuskan untuk hidup mandiri, sebagai layaknya warga masyarakat Amerika lainnya.

Perumahan Kaum Papa di Australia: Keseriusan Pemerintah

Pokok-Pokok Pikiran

Australia ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Permasalahan kaum gelandangan juga menjadi pekerjaan rumah yang sangat pelik bagi negeri ini. Bedanya dengan Indonesia ialah kesungguhan negeri ini untuk berpihak kepada kaum papa.

Berdasarkan survei tahun 2001 dan 2006 sedikitnya ada 105,000 warga Australia adalah Tuna Wisma dan 18% diantaranya hidup serampangan di jalan, 44% lainnya tinggal mengungsi di tempat teman atau kerabat, 20% di rumah kontrakan dan sisanya di tempat panti sosial.

Penyebabnya macam-macam, antara lain angka sewa rumah yang tinggi yang mempengaruhi angka kemiskinan dan akhirnya berdampak terhadap menanjaknya angka Tuna Wisma. Penyebab lainnya adalah kekerasan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga/ keluarga sehingga banyak kaum remaja Australia terjebak hidup menggelandang. Saat ini lebih dari 39,000 remaja tercatat sebagai penerima santunan Tuna Wisma dari pemerintah Australia.

Namun, sejak tahun 1985 Pemerintah Australia mulai menyediakan jasa pelayanan untuk kaum Tuna Wisma melalui SAAP (*Support Assistance Accommodation Program*). Program ini menyediakan 1,300 titik penampungan sementara di seluruh negeri serta melakukan program-program lainnya seperti manajemen keuangan, pengelolaan tempat tinggal sementara dan jangka panjang, dan pelatihan-pelatihan untuk kaum Tuna Wisma. Pengelolaannya diserahkan kepada LSM-LSM lokal. Meski dinilai efektif, saat ini lembaga-lembaga tersebut mengalami krisis keuangan. Hal ini dikarenakan membengkaknya biaya operasional (akibat semakin banyaknya Tuna Wisma) sehingga mereka harus mengurangi angka tenaga kerja dan kehilangan pegawai yang berpengalaman. Akibatnya pelayanan yang disediakan semakin menurun. Kaum Tuna Wisma di sini pun mendapat santunan sewa rumah dari pemerintah yang besarnya bervariasi. Tapi biasanya tunjangan ini diberikan bagi mereka yang menggunakan

Pokok-Pokok Pikiran

50% pendapatannya untuk menyewa rumah. Pada akhir Desember 2008 lalu Perdana Menteri Kevin Rudd menyetujui Program Penanggulangan Tuna Wisma yang bertujuan mengurangi angka Tuna Wisma hingga 50% pada tahun 2020 dan menyediakan akomodasi bagi setiap gelandangan yang tidaur di jalan. Dana yang dialokasikan sebesar AU\$ 6 Milyar atau sama dengan Rp 52 Trilyun. Meskipun ekonomi Australia mengalami kemajuan, angka Tuna Wisma mengalami peningkatan hingga 16% sepanjang tahun 2001-2006. Mereka yang termasuk golongan ini biasanya wanita (beserta anaknya) dan remaja. Alokasi dana tersebut akan digunakan untuk menyediakan sarana perumahan murah dan tunjangan sewa rumah serta penyediaan akomodasi untuk mereka yang hidup di jalan. Diharapkan program ini dapat membantu 9,000 remaja bermasalah untuk tetap berada di lingkungan keluarganya, menghindari 2,250 keluarga terusir dari kontrakannya dan membantu 1,000 orang Tuna Daksa mendapat tempat tinggal yang layak.³

Program Perumahan Rakyat di Indonesia: Besar Pasak dari Tiang?

Bataviase bulan Juni 2010 menulis tentang kebijakan perumahan rakyat di Indonesia demikian “Meski setiap tahun ada kecenderungan meningkat, namun anggaran perumahan dianggap tidak realistis. Dibandingkan negara-negara berkembang lain di dunia, anggaran perumahan di Indonesia terbilang sangat minim. Pada tahun anggaran 2010 ini, pemerintah mengalokasikan dana sebesar 3,1 triliun rupiah. Jumlah itu untuk mengawal program pembangunan perumahan rakyat yang kini menghadapi problem kekurangan pasokan (.backlog) yang hampir menyentuh angka 8 juta unit. Itu artinya, anggaran perumahan nasional hanya sekitar 0,30 persen dibanding total anggaran pemasukan dan belanja negara (APBN)-Pe-rubahan 2010 yang ditetapkan sebesar 1126,1 triliun rupiah. Sementara di beberapa negara anggota ASEAN

Pokok-Pokok Pikiran

alokasi anggaran untuk perumahan sudah di atas dua persen. Thailand pada tahun 2009 mengalokasikan sekitar 3,20 persen dari total anggaran nasional untuk program pembangunan perumahan rakyat, sedangkan Singapura 2,74 persen, Afrika Selatan sebesar 3 persen, dan Zambia 6,04 persen.”⁴

Dalam kondisi demikian, saya berpendapat, wacana kepemilikan rumah bagi orang asing akan menjadi kontraproduktif dengan upaya pemerintah memenuhi kebutuhan perumahan bagi rakyatnya. Dipandang dari aspek manapun, masuknya orang asing dalam sektor-sektor strategis seperti perumahan ini tidak memberikan jaminan kesejahteraan bagi rakyat banyak. Austria, sebagai contoh meskipun telah mapan di bidang perumahan tetap menerapkan proteksi yang ketat bagi warga negaranya, padahal 53% rakyatnya sudah tinggal di rumahnya sendiri yang sudah lebih dari layak dalam ukuran Indonesia.

Kita mesti belajar banyak dari negara-negara yang berani mengambil resiko, mencoba terobosan baru dan tak henti-hentinya melakukan eksperimen untuk mendapatkan model kebijakan dan implementasi program perumahan yang sesuai dengan kebutuhan rakyatnya. Rendahnya anggaran perumahan memang menjadi salah satu ganjalan bagi program pembangunan hunian rakyat. Namun yang jauh lebih penting adalah kemauan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk berbenah dan bangkit dari stagnasi yang telah membelenggu sekian lama. Bila tidak demikian maka permasalahan perumahan di Indonesia, tidak ada bedanya dengan penyakit kronis. Tak berjalannya program perumahan secara baik berdampak pada bertambahnya angka backlog rumah. Jika pada 2004 angka kekurangan rumah hanya 4,8 juta unit, maka pada akhir 2009 bertambah menjadi 7,3 juta unit. Demikian pula luas daerah kumuh, bertambah dari 54 ribu hektare menjadi 57 hektare. Maka, tidak mengherankan apabila semakin banyak penduduk miskin yang tinggal di kolong jembatan, emperan toko, bantaran sungai, dan pinggiran rel kereta api, seperti ditengarai

Pokok-Pokok Pikiran

oleh Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW), Ali Trangganda. Katanya “Warga yang tidak memiliki rumah angkanya mencapai lebih dari 35 juta orang,”⁵

Akhirnya, anggaran memang bukan satu-satunya variabel penentu kebijakan program perumahan di Indonesia, namun dari titik itu kita bisa menetapkan prioritas. Belanda, contohnya, juga mengalami persoalan penyediaan perumahan bagi masyarakatnya karena dari 16,4 juta jiwa di Belanda hanya sekitar 50%nya yang memiliki rumah, sisanya tidak mampu membeli rumah karena itu pemerintah Belanda memiliki kebijakan untuk memberikan subsidi, sehingga terdapat sekitar 42,25% warganya tinggal di rumah sewa dengan rata-rata harga sewa itu sekitar 421 euro perbulan.

Dan pelajaran penting yang bisa didapat dari Belanda adalah formula trisula yakni keterjangkauan, ketersediaan dan kualitas sehingga meskipun pelan, namun dengan strategi ini Belanda dapat memenuhi kebutuhan perumahan bagi warganya.

Penutup

Andaikata sinyalemen IPW di atas benar, mestinya Indonesia adalah negara yang paling kecil tantangannya dalam hal pemenuhan kebutuhan perumahan bagi warga negaranya. Coba bandingkan, negeri ini ‘hanya’ bermasalah dengan 35 juta atau mendekati 15% dari sekitar 240 juta warganya, sementara Austria berhasil mengeluarkan lebih dari 40% warganya dari kesulitan perumahan, dan Belanda sekitar 50%. Lantas di mana kebuntuannya?

Bagi DPR RI pertanyaan ini relevan dengan sejauh mana lembaga ini menghasilkan produk kebijakan/peraturan perundang-undangan bidang perumahan yang pro rakyat? Apakah sudah saatnya sektor strategis ini dilempar ke mekanisme pasar yang nyata-nyata telah semakin menjauhkan rakyat dari cita-cita menjadi sejahtera? DPR RI memiliki fungsi yang memberikan peluang sangat besar untuk turut menegaskan ke arah mana

Pokok-Pokok Pikiran

program perumahan dan pemukiman di negeri akan dibawa. Akhirnya, kalau Austria memiliki kebanggaan akan Haus Leo, Amerika dengan St. Vincent de Paul Village, Belanda dengan paradigma trisula, Australia ada SAAP... lantas apa yang Indonesia bisa? ***

Pokok Pikiran VI

Pro Kontra Kepemilikan Rumah Bagi WNA di Indonesia

Tidak dapat dipungkiri, saat ini keberadaan orang asing (WNA) di Indonesia makin lama makin meningkat sehubungan dengan adanya era globalisasi. Orang asing masuk ke negeri ini dengan berbagai keperluan seperti menjadi tenaga kerja, kawin dengan pribumi, tugas belajar, ingin menikmati hari tua di negara ini dan sebagainya. Berdasarkan data kementerian tenaga kerja hingga akhir tahun 2009 jumlah tenaga kerja asing mencapai 59.577 orang. Jumlah terbanyak berasal dari China yang mencapai 11.458 orang, Jepang 7.135 orang, Korea Selatan 4.437 orang, Malaysia 3.688 orang, Australia 3.491 orang, Amerika Serikat 3.307 orang, Inggris 2.851 orang, Filipina 2.675 orang, dan negara lainnya 12.520 orang. Sementara itu ada sekitar 10.000 mahasiswa asing yang saat ini sedang belajar di perguruan tinggi di Indonesia (<http://bataviase.co.id/node/387485>).

Sudah barang tentu mereka semua membutuhkan tempat tinggal disini untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Selama ini pemerintah telah mengizinkan WNA yang berkedudukan di Indonesia untuk memiliki rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan hak pakai (HP) atas tanah negara, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Soal kepemilikan rumah bagi orang asing ini, dibahas juga dalam RUU Perumahan dan Pemukiman (RUU PERKIM). Salah satu pasal yang mengemuka adalah pasal 48 (1). Sesuai dengan draft awal RUU ini, pasal 48 (1) berbunyi : **Orang asing dapat menghuni atau menempati rumah dengan cara sewa berdasarkan perjanjian tertulis dengan pemegang hak atas tanah di atas.** Bunyi pasal ini kemudian di usulkan perubahannya oleh Pemerintah sehingga berbunyi : **Orang asing dapat menghuni atau menempati rumah dengan cara sewa atau memiliki berdasarkan perjanjian tertulis dengan pemegang hak atas tanah diatas.** Penambahan kata “ memiliki” ini meskipun hanya satu kata namun menimbulkan konsekuensi yang signifikan.

Oleh karena itu hendaknya pembahasan mengenai pasal ini harus dikembalikan kepada semangat yang ada pada Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pasal 9 UUPA menyatakan hanya warga negara Indonesia sajalah yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang udara Indonesia. Dalam penjelasannya dikatakan hanya Warga Negara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Hak milik kepada orang asing dilarang (Pasal 26 ayat 2 UUPA), dan pelanggaran terhadap pasal ini mengandung sanksi “Batal Demi Hukum.” Namun demikian UUPA tidak menutup sama sekali kesempatan warga negara asing dan badan hukum asing untuk mempunyai hak atas tanah di Indonesia. Warga negara asing dapat mempunyai hak atas tanah di Indonesia, tetapi terbatas, yakni

hanya boleh dengan status hak pakai. Sehingga dari prinsip nasionalitas ini, semakin jelas kepentingan warga negara Indonesia diatas segala-galanya baik dari segi ekonomi, sosial, politis dan malahan dari sudut Hankamnas. Dalam perkembangan selanjutnya, soal kepemilikan rumah bagi orang asing itu akhir-akhir ini kembali menjadi pembicaraan masyarakat luas. Ada sebagian kelompok masyarakat yang memandang bahwa sudah satina Indonesia membuka diri terhadap dunia luar dengan memberikan peluang bagi WNA untuk memiliki rumah di negara ini. Namun sebagian masyarakat yang lain memandang bahwa belum saatnya dan tidak seharusnya WNA memiliki hak memiliki rumah di negara ini.

Alhasil hinggá saat ini telah terjadi pro -kontra kepemilikan rumah bagi WNA di Indonesia. Mereka ada yang memandang bahwa dibukanya kran kepemilikan rumah bagi WNA merupakan hal yang positif, namun banyak juga yang menilai negatif. Jika kita identifikasi lebih jauh, masing-masing kelompok mempunyai argumen masing-masing.

Alasan mereka yang pro pada umumnya memandang bahwa kepemilikan asing akan membuka peluang investasi di bidang properti. Karena dengan dibolehkannya WNA memiliki properti di Indonesia berpeluang memberikan sumbangan positif terhadap *foreign direct investment* (FDI). Setidaknya US\$ 2-3 miliar atau sekitar Rp 18,2-27,3 triliun akan masuk ke Indonesia. Selain itu, diperbolehkannya WNA membeli properti dengan status HGB atau hak milik, maka akan menimbulkan **multiplier effect** dimana perekonomian kita akan segera terbantu untuk tumbuh pesat dan akhirnya bisa membantu mensejahterakan penduduk Indonesia lainnya. Dampak lain adalah terjadinya proses percepatan pembelian dan pengisian stok properti yang signifikan oleh orang asing yang akan mempercepat proses penjualan stok dan

penghunian properti. Bagi pemerintah, kepemilikan WNA atas rumah disini juga menguntungkan karena akan menjadi sumber pemasukan dari pajak bagi pemerintah, dengan melakukan penerapan tingkat pajak tertentu atas properti yang dibeli oleh orang asing. Bisa dijadikan sumber tambahan dana subsidi untuk pembangunan rusunami bagi masyarakat menengah bawah dengan mengalokasikan secara khusus dari pajak tadi. Kemudian akan terjadi peningkatan *supply* oleh pengembang karena terjadi peningkatan *demand*, yang berarti membuka lapangan kerja dan menaikkan pendapatan masyarakat serta bergulirnya perekonomian. Dari sisi belanja, dengan pengeluaran rata-rata Rp25 juta per bulan maka terdapat tambahan konsumsi sebesar Rp300 juta per tahun dari 1 orang asing yang tinggal di Indonesia saja. Ini memungkinkan terjadinya efek bergulir pada sektor ekonomi lain. Selain itu bisa menambah cadangan dana kredit di bank, dengan membuat persyaratan misalnya mengharuskan calon pembeli untuk mendeposito uang dalam jumlah tertentu di bank nasional. (sebagaimana yang di praktekkan di Malaysia melalui Program Second Home Malaysia dimana lewat program itu WNA diharuskan menyetor RM 100.000 untuk *single* dan RM 150.000 untuk pasangan di Bank Nasional).

Diatas tadi adalah alasan-alasan bagi mereka yang pro kepemilikan WNA atas rumah di negara ini. Lalu bagaimanakah alasan bagi mereka yang kontrak kepemilikan WNA ?

Kepemilikan oleh WNA dikhawatirkan hanya akan dijadikan peluang untuk kepentingan bisnis jangka pendek, kepemilikan lahan strategis, atau hanya sebagai bentuk spekulatif untuk menaikkan harga tanah/bangunan di daerah tertentu yang akan dibangun. Selain itu, dibukanya kran kepemilikan rumah bagi WNA akan mendorong terjadinya *boom property* sehingga akan terjadi

percepatan pembangunan rumah di daerah-daerah tertentu seperti pusat-pusat pertumbuhan di Jakarta. Keterbatasan lahan akan menyebabkan terjadinya penggusuran masyarakat miskin atas penggunaan tanah, yang kemudian akan didirikan apartemen dan mall yang kepemilikannya lebih banyak dikuasai oleh WNA. Pada hal perkembangan kota yang pro MBR mestinya mampu mengakomodasi kepentingan mereka dan bukan malah menyingkirkannya. Selain soal penggusuran, perluasan pembangunan rumah elite bagi WNA juga akan mengancam daerah-daerah yang selama ini menjadi penyangga lingkungan seperti daerah resapan air dan kawasan konservasi lainnya. Dengan kata lain akan mengacaukan tata ruang yang telah dikembangkan dengan pertimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Kepemilikan rumah oleh WNA juga akan memicu terjadinya ketidakadilan dengan pertimbangan bisnis semata. Akan semakin sedikit pengembang yang peduli dengan pembangunan rumah untuk menengah kebawah (MBR), karena membangun rumah untuk konsumsi WNA akan lebih menguntungkan dan menjanjikan bagi pengembang ketimbang membangun MBR. Meskipun misalnya akan ada peraturan yang mengatur soal keharusan pengembang memprioritaskan rumah bagi MBR. Bukankah selama ini kontrol pemerintah dan penegakan hukum sangat lemah terutama pembelaan kepada kaum miskin ?. Dampak lain kepemilikan WNA adalah akan menaikkan harga properti di Indonesia dimana kenaikan harga properti ini tentu akan semakin menyulitkan bagi MBR untuk dapat memiliki rumah yang layak huni.

Soal tanah merupakan ibu dari kedaulatan suatu negara, tak ubahnya darah bagi tubuh manusia sehingga ia tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Kalau simbol kedaulatan ini dimiliki juga oleh orang asing maka habislah makna kedaulatan

itu. Pemberian hak atas tanah kepada pihak asing akan menghancurkan kewibawaan bangsa dan negara. Jangan sampai kasus pencaplokan kedaulatan negara seperti yang terjadi di Palestina oleh Israel terjadi disini. Sebagaimana diketahui setiap tahun wilayah Palestina terus menyusut oleh program perluasan pemukiman Pemerintah Israel, selain itu modus operasinya adalah melalui pembelian rumah-rumah milik rakyat Palestina oleh warga Israel.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dibukanya peluang WNA untuk memiliki rumah di Indonesia menunjukkan adanya keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan asing ketimbang memikirkan kebutuhan rumah bagi MBR. Klaim bahwa diperbolehkannya WNA membeli properti dengan status HGB atau hak milik, akan menimbulkan **multiplier effect**, agaknya sulit untuk dibuktikan sejauhmana dampaknya bagi MBR? kenyataannya hanya dinikmati oleh golongan elit tertentu saja sementara kalangan bawah hanya bisa melongo menyaksikannya. Selama ini sudah banyak aspek kekayaan negara yang telah tergadaikan ke pihak asing seperti kekayaan alam : tambang, kelautan, perikanan, pertanian dan sebagainya. Belum lagi soal bank, BUMN dan lain-lain yang telah dikuasai asing. Jangan sampai aspek vital soal tanah pada akhirnya nanti juga akan jatuh kepelukan pihak asing lewat kepemilikan rumah. Karenanya, diloloskannya pasal tentang kepemilikan rumah bagi WNA bisa merupakan pintu masuk strategis bagi asing untuk lebih mencengkeram kekuasaannya di negara ini lewat kebijakan yang dilegalkan negara. Ditengah control Pemerintah yang sangat lemah dibidang penegakan hukum. Buat apa devisa negara masuk lewat kepemilikan rumah oleh WNA kalau tergadai kedaulatan negara ?

Untuk itulah dalam rangka pembahasan RUU PERKIM, kita harus senantiasa waspada untuk mencermati bunyi setiap pasal agar tidak ada peluang bagi asing untuk menguasai tanah tumpah darah ini. Dengan kata lain, pasal-pasal RUU PERKIM perlu diwaspadai sebagai bagian dari RUU yang selama ini dicurigai sarat kepentingan asing sebagaimana banyak dilansir media akhir-akhir ini untuk menjajah Indonesia secara halus tanpa kita menyadarinya. Karena saat ini beberapa UU yang telah disahkan oleh DPR disinyalir sarat dengan kepentingan asing. Sebagai langkah kewaspadaan, ada orang-orang asing yang di duga kuat menjadi operator pembuatan undang-undang yang "bergentayangan" di berbagai departemen, antara lain:

- (i) Departemen Keuangan: Arthur J. Mann dan Burden B. Stephen V. Marks (ahli perpajakan);
- (ii) Bank Indonesia: Thomas A. Timberg penasehat bidang skala kecil dan Susan L Baker konsultan bidang Konstrukturisasi Perbankan;
- (iii) Deperindag: Etephen L Magiera ahli Perdagangan Internasional dan Gary Goodpaster ahli desentralisasi, internal carriers to trade and local discriminatory action;
- (iv) Kementerian Usaha Kecil dan Menengah Koperasi: Robert C Rice ahli small and medium enterprice;
- (v) Kementerian Kominfo: Harry F Darby ahli regulasi komunikasi;
- (vi) Departemen Perhubungan: Richard Belenfeld dan Don Frizh konsultan PEG bidang pelayaran dan pelabuhan; dan
- (vii) Departemen Hukum dan HAM: Paul H Brietzke legal advisor.

Apakah ada pihak asing yang bermain di balik perumusan RUU PERKIM ini ? agaknya perlu penelitian lebih lanjut.

Dalam bentuk matrik, alasan mereka yang pro dan kontra kepemilikan WNA dapat diidentifikasi sebagai berikut :

ALASAN YANG PRO KEPEMILIKAN ASING	ALASAN MEREKA YANG KONTRA KEPEMILIKAN ASING
<p>Akan membuka peluang investasi di bidang properti. Karena dengan dibolehkannya WNA memiliki properti di Indonesia berpeluang memberikan sumbangan positif terhadap <i>foreign direct investment</i> (FDI). Setidaknya US\$ 2-3 miliar atau sekitar Rp 18,2-27,3 triliun akan masuk ke Indonesia.</p>	<p>Kepemilikan oleh WNA dikhawatirkan hanya untuk kepentingan bisnis jangka pendek, kepemilikan lahan strategis, atau hanya sebagai bentuk spekulatif untuk menaikkan harga tanah/bangunan di daerah tertentu</p>
<p>Dengan diperbolehkannya orang asing beli properti dengan status HGB atau hak milik, maka akan menimbulkan multiplier effect dimana perekonomian kita akan segera terbantu untuk tumbuh pesat dan akhirnya bisa membantu mensejahterakan penduduk Indonesia lainnya.</p>	<p>Dibukanya kran kepemilikan rumah bagi WNA akan mendorong terjadinya <i>boom property</i> sehingga akan terjadi percepatan pembangunan rumah di daerah-daerah tertentu seperti pusat-pusat pertumbuhan di Jakarta. Keterbatasan lahan akan menyebabkan terjadinya penggusuran masyarakat miskin atas penggunaan tanah, yang kemudian akan didirikan apartemen dan mal yang kepemilikan yang lebih banyak dikuasai oleh WNA. Pada hal perkembangan kota yang pro MBR mestinya mampu mengakomodasi</p>

ALASAN YANG PRO KEPEMILIKAN ASING	ALASAN MEREKA YANG KONTRA KEPEMILIKAN ASING
	kepentingan mereka dan bukan malah menyingkirkannya. Selain itu mengancam daerah-daerah yang selama ini menjadi penyangga lingkungan seperti daerah resapan air, kawasan konservasi dan lain-lain. Dengan kata lain akan mengacaukan tata ruang yang telah dikembangkan berdasarkan pertimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Akan terjadi pembelian dan pengisian stok properti yang signifikan oleh orang asing yang akan mempercepat proses penjualan stok dan penghunian properti.	Akan semakin sedikit pengembang yang peduli dengan pembangunan rumah untuk menengah kebawah (MBR) , karena membangun rumah untuk konsumsi WNA akan lebih menguntungkan dan menjanjikan bagi pengembang ketimbang membangun MBR. Meskipun misalnya akan ada peraturan yang mengatur soal keharusan pengembang memprioritaskan rumah bagi MBR.
Menjadi pemasukan dari pajak bagi pemerintah, dengan melakukan penerapan tingkat	Akan menaikkan harga properti di Indonesia dimana kenaikan harga properti ini tentu akan semakin

ALASAN YANG PRO KEPEMILIKAN ASING	ALASAN MEREKA YANG KONTRA KEPEMILIKAN ASING
pajak tertentu atas properti yang dibeli oleh orang asing.	menyulitkan bagi MBR untuk dapat memiliki rumah yang layak huni
Bisa dijadikan sumber tambahan dana subsidi untuk pembangunan rusunami bagi masyarakat menengah bawah dengan mengalokasikan secara khusus dari pajak tadi.	Soal tanah merupakan ibu dari kedaulatan suatu negara, tak ubahnya darah bagi tubuh manusia sehingga ia tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Kalau simbol kedaulatan ini dimiliki juga oleh orang asing maka habislah makna kedaulatan kita. Pemberian hak atas tanah kepada pihak asing akan menghancurkan kewibawaan bangsa dan negara. Jangan sampai kasus pencaplokan kedaulatan negara seperti yang terjadi di Palestina oleh Israel terjadi disini. Sebagaimana diketahui setiap tahun wilayah Palestina terus menyusut oleh proses program perluasan oleh Pemerintah Israel selain itu lewat lewat pembelian rumah-rumah milik rakyat Palestina.
Adanya peningkatan <i>supply</i> oleh pengembang karena terjadi peningkatan <i>demand</i> , yang	Dibukanya peluang WNA untuk memiliki rumah di Indonesia menunjukkan adanya

ALASAN YANG PRO KEPEMILIKAN ASING	ALASAN MEREKA YANG KONTRA KEPEMILIKAN ASING
berarti membuka lapangan kerja dan menaikkan pendapatan masyarakat serta bergulirnya perekonomian.	keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan asing ketimbang memikirkan kebutuhan rumah bagi MBR
Dari sisi belanja, dengan pengeluaran rata-rata Rp25 juta per bulan maka terdapat tambahan konsumsi sebesar Rp300 juta per tahun dari 1 orang asing yang tinggal di Indonesia saja. Ini memungkinkan terjadinya efek bergulir pada sektor ekonomi lain.	Klaim bahwa diperbolehkannya WNA membeli properti dengan status HGB atau hak milik, maka akan menimbulkan multiplier effect , agaknya sulit untuk dibuktikan sejauhmana dampaknya bagi MBR? kenyataannya hanya dinikmati oleh golongan elit tertentu saja
Menambah cadangan dana kredit di bank, dengan membuat persyaratan misalnya mengharuskan calon pembeli untuk mendeposito uang dalam jumlah tertentu di bank nasional. (Program Second Home Malaysia mengharuskan RM 100.000 untuk <i>single</i> dan RM 150.000 untuk pasangan di Bank Nasional).	Selama ini sudah banyak aspek kekayaan negara yang telah tergadaikan ke pihak asing seperti kekayaan alam : tambang, kelautan, perikanan, pertanian dan sebagainya. Belum lagi soal bank, BUMN dan lain-lain yang telah dikuasai asing. Jangan sampai aspek vital soal tanah pada akhirnya nanti juga akan dikuasai oleh pihak asing lewat kepemilikan rumah.
Potensi penambahan jumlah turis dari kunjungan keluarga	Diloloskannya pasal tentang kepemilikan rumah bagi WNA bisa

ALASAN YANG PRO KEPEMILIKAN ASING	ALASAN MEREKA YANG KONTRA KEPEMILIKAN ASING
<p>dan relasi pemilik properti tersebut, dan mereka bisa "dimanfaatkan" untuk mempromosikan secara langsung tentang situasi riil di sini.</p>	<p>merupakan pintu masuk strategis bagi asing untuk lebih mencengkeram kekuasaannya di negara ini lewat kebijakan yang dilegalkan negara. Ditengah control Pemerintah yang sangat lemah dibidang penegakan hukum.</p>
	<p>Pasal-pasal RUU PERKIM perlu diwaspadai sebagai bagian dari RUU yang selama ini dicurigai sarat kepentingan asing sebagaimana banyak dilansir media akhir-akhir ini untuk menjajah Indonesia secara halus tanpa kita menyadarinya. Karena saat ini beberapa UU yang telah disahkan oleh DPR sarat dengan kepentingan asing. Sebagai langkah kewaspadaan, ada orang-orang asing yang di duga kuat menjadi operator pembuatan undang-undang yang "bergentayangan" di berbagai departemen, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Departemen Keuangan: Arthur J. Mann dan Burden B. Stephen V. Marks (ahli perpajakan);

ALASAN YANG PRO KEPEMILIKAN ASING	ALASAN MEREKA YANG KONTRA KEPEMILIKAN ASING
	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="895 625 1281 785">(ii) Bank Indonesia: Thomas A. Timberg penasehat bidang skala kecil dan Susan L Baker konsultan bidang Konstrukturisasi Perbankan; <li data-bbox="895 793 1281 1016">(iii) Deperindag: Etephen L Magiera ahli Perdagangan Internasional dan Gary Goodpaster ahli desentralisasi, internal carriers to trade and local discriminatory action; <li data-bbox="895 1024 1281 1150">(iv) Kementerian Usaha Kecil dan Menengah Koperasi: Robert C Rice ahli small and medium enterprice; <li data-bbox="895 1159 1281 1255">(v) Kementerian Kominfo: Harry F Darby ahli regulasi komunikasi; <li data-bbox="895 1264 1281 1415">(vi) Departemen Perhubungan: Richard Belenfeld dan Don Frizh konsultan PEG bidang pelayaran dan pelabuhan; dan <li data-bbox="895 1423 1281 1520">(vii) Departemen Hukum dan HAM: Paul H Brietzke legal advisor.

Pokok-Pokok Pikiran

ALASAN YANG PRO KEPEMILIKAN ASING	ALASAN MEREKA YANG KONTRA KEPEMILIKAN ASING
	Klaim bahwa kepemilikan WNA atas rumah disini bisa menambah cadangan dana kredit di bank, juga merupakan suatu alasan yang menyesatkan. Karena justru dana cadangan masyarakat yang ada di bank bisa tersedot untuk ikut mensubsidi pembangunan rumah bagi WNA. Bukankah pejabat kita cukup ahli menyulap data untuk kepentingan jangka pendek yang akhirnya merugikan kaum papa ?

Prihatin: Indonesia Telah Di Kepung Kepemilikan Asing

Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa dalam pembahasan draft RUU PERKIM, semangat nasionalisme harus digelorakan kembali. Ini bukan soal nasionalisme sempit sebagaimana yang biasa mereka sampaikan ketika kita membela kedaulatan negara, tapi benar-benar perjuangan untuk meningkatkan kewaspadaan Nasional guna mempertahankan kedaulatan negara ini. **“Jangan kita biarkan orang asing menjadi tuan tanah di Indonesia”**.

Sebab orang asing saja peduli dengan semangat Nasionalisme itu. Tapi kenapa kita malah mengabaikannya ?. Contohnya Indonesianis dari Studi Asia Universitas Sydney Australia, Max Lane menyayangkan lemahnya rasa nasionalisme bangsa Indonesia meski sudah berusia 62 tahun dengan semakin dikuasainya seluruh aset Indonesia oleh asing. “Indonesia belum hilang, tetapi hanya digelapkan pihak tertentu,” kata Max Lane dalam bedah buku Mencari Indonesia: Demografi-Politik Pasca Soeharto ditulis Riwanto Tirtosudarmo peneliti senior dari Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, LIPI di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Menurut dia, pihak-pihak tertentu di

Pokok-Pokok Pikiran

Indonesia begitu lama menggelapkan dengan menjual berbagai aset kepada asing untuk kepentingannya sendiri, sehingga rakyat, apa lagi lapisan terbawah hampir tak punya apa-apa lagi.

“Di Indonesia sekarang bukan saja persoalan primordialisme jadi masalah, kota-kota Indonesia sekarang ini tumbuh pesat mal-mal menjual merk, orang merasa tidak mengglobal kalau misalnya tak minum kopi Starbucks, padahal kopinya sama saja,” katanya.

Presiden pertama Republik Indonesia Ir Soekarno pernah mengatakan bahwa kekayaan Indonesia tidak akan diserahkan kepada pihak asing. Ia lebih memilih untuk menunggu putra-putri terbaik republik ini untuk mengelola sumber-sumber itu. Pernyataan Soekarno itu dibuktikan dengan menolak proposal perusahaan asing yang ingin mengeksploitasi sumber alam Indonesia. Namun, ketika Soekarno terguling dari tampuk kekuasaan penggantinya Soeharto mulai membuka investasi asing seluas-luasnya. Tujuannya untuk mempercepat proses pembangunan. Walhasil banyak sumber alam dan aset negara diserahkan ke asing.

Sejak tahun 1969 sampai saat ini tercatat 80 persen sumber daya alam dan aset Indonesia telah dikuasai asing. Sekitar 70 persen sumber daya alam dan aset penting itu dikuasai oleh Amerika Serikat. Penjualan aset dan penguasaan sumber daya alam yang penting itu terus berlangsung selepas Soeharto lengser. Tahun 2002, misalnya, PT Indosat dijual ke Singapura Technologies dan Telemedia (STT) seharga 5,62 triliun. Kemudian 6 Juni 2008 Indosat dijual oleh STT ke Qatar Telecommunication (Qtel) seharga US\$ 1,8 miliar atau Rp 16,740 triliun dengan kurs 9.300/US\$. Itu artinya Singapura meraup untung 11,678 triliun. Lalu siapa yang dirugikan? Jelas Indonesia. Berapa triliun yang harus dikeluarkan kalau negara ini mau beli lagi. Alasan tim ekonomi pemerintah dan para pendukung divestasi Indosat saat itu adalah untuk menciptakan ‘fair competition’ di bidang telekomunikasi. Agar

terbina perkembangan bisnis telekomunikasi yang terlepas dari jerat monopoli negara dan pemerintah demi terwujudnya pasar yang efektif dan efisien. Apakah benar demi fair competition. Sejauh yang diketahui publik, STT bersama Singapore Telecommunication (SingTel) adalah anak perusahaan yang bernaung di bawah perusahaan milik pemerintah Singapura yakni Temasek Holding (Pte) Ltd. Lalu, dengan penetapan STT sebagai pemenang tender divestasi Indosat menjadikan perusahaan tersebut menguasai dan mengontrol bisnis selular Satelindo dan IM3. Kemudian SingTel sebagai anak Temasek yang lain telah menguasai 35 persen saham penyelenggara selular Telkomsel. Dengan demikian, mayoritas industri selular Indonesia ketika itu dikuasai Temasek Holding. Artinya Singapura telah memonopoli bisnis selular di Indonesia. Dengan demikian alasan fair competition kelihatannya hanya drama saja. Tampaknya ada kepentingan segelintir golongan yang ingin mendapat keuntungan. Tentu saja yang dirugikan lagi-lagi adalah rakyat bangsa ini.

Sejak itu di udara kita tak lagi berdaulat. Satelit Palapa dan Indosat otomatis dikuasai asing. Lewat penguasaan udara itu kita praktis sudah dijajah karena hampir semua pembicaraan telepon, faks, pengiriman data, gambar harus melalui satelit yang sudah dikuasai asing. Dari sisi keamanan negara tentu saja bangsa ini tak lagi memiliki kemampuan pengamanan teritorial di bidang telekomunikasi. Ini tentu saja memengaruhi kinerja pengamanan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Jauh sebelum itu keterlibatan asing di republik ini sudah sampai di ujung timur negeri ini. Adalah Pegunungan Grasberg di Papua yang menjadi sasaran keserakahan multinasional corporation. Di sana tanah dan airnya tak lagi bisa dinikmati anak bangsa. Perusahaan pertambangan emas, perak, dan tembaga milik Freeport McMoran asal Amerika sudah bercokol hampir 32 tahun. Mengeruk sedalam-dalamnya hasil bumi yang bisa dikeruk yang kemudian meninggalkan ratusan kawah dan tanah tandus. Menurut company profile-nya, pada tahun 2002

Freeport telah mencapai rekor volume penjualan tembaga sebesar 1,5 juta poud net; 2,3 juta ons emas, dan mengapalkan rata-rata 2,8 juta metrik ton per tahun. Tapi, company profile tersebut tidak menjelaskan hasil tambang lain, seperti uranium, yang juga terkandung di dalam tanah masyarakat Papua itu. Selain itu, tanah Minahasa juga sudah dikuasai PT Newmont. Penggalan hasil tambang emas di Buyat itu hanya meninggalkan berbagai penyakit pada penduduk kampung. Bahkan, Newmont juga sudah mulai mengelola tanah-tanah pertambangan di Sumatera Utara lewat anak perusahaannya, PT Newmont Pacific Nusantara. Newmont juga ada di Desa Tatebal, Kawasan Bukit Elang Nusa Tenggara Barat. Namun, apa manfaatnya keberadaan berbagai perusahaan tambang tersebut bagi rakyat bangsa ini. Sudah hampir 40 tahun umur industri pertambangan mineral di negeri ini, mereka telah gagal membuktikan “mitos”-nya menjadi penopang perekonomian Indonesia. Apalagi mensejahterakan rakyat berdaulat bangsa ini.

Kontribusi sektor ini hanya 1,3 - 2,3 triliun terhadap APBN dalam 4 tahun terakhir. Lebih kecil dari sektor kehutanan. Nilai tambahnya juga rendah karena bahan tambang diekspor dalam bentuk bahan mentah, ditambah rendahnya penyerapan tenaga kerja massal di tingkat lokal. Sektor ini juga gagal menunjukkan tanggung jawabnya terhadap kerusakan lingkungan, pelanggaran HAM, dan penyelesaian konflik dengan penduduk lokal di lokasi-lokasi pertambangan.

Kekuasaan korporasi telah melampaui kemampuan negara mengontrol mereka. Sementara pemerintah lebih sibuk mengeluarkan perizinan tambang baru dan mengutip hasil rentenya. Di sektor perminyakan, perusahaan minyak asal Amerika Exxon Mobil sudah mengambil alih pengelolaan tambang minyak di Blok Cepu. Pengambilalihan kekayaan sumber daya alam milik rakyat bangsa ini oleh pihak asing tidak berhenti sampai di situ. Privatisasi kemudian menjadi tren baru. Melalui undang-undang yang disahkan DPR kaki tangan kekuatan ekonomi neoliberal dan

kapitalis internasional bisa langsung terjun bebas ke dalam sumber-sumber penting milik rakyat bangsa ini yang seharusnya dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tidak hanya itu. Pemerintahan SBY-JK di awal tahun 2008 sudah melepas 44 BUMN ke pasar saham. Menurut Menteri BUMN Sofyan Djalil alasan privatisasi itu untuk menutup defisit anggaran APBN dan untuk merestrukturisasi badan usaha milik negara. Inilah pertama kalinya dalam sejarah Indonesia terjadi penjualan aset negara secara besar-besaran. Tak salah bila banyak pihak mengatakan tahun 2008 sebagai ledakan privatisasi. Dua alasan yang disampaikan Sofyan Djalil itu tidak jauh beda maknanya dengan pendahulunya. Yang terjadi sebenarnya administratif negara ini malas mikir dan bekerja. Mereka sudah terbiasa mencari keuntungan secara cepat yaitu dari rente. Budayawan Seno Gumira Adjidarma melihat budaya ketergantungan terhadap asing itu sudah dimulai sejak zaman raja Jawa. Mereka itu, sebetulnya, tidak memiliki kemampuan untuk bekerja. Dengan kata lain para raja atau priyayi memiliki mental bersenang-senang. Tidak mau menderita dan malas bekerja. Andalan mereka adalah ngutang kepada pihak asing. Imbalannya para raja itu akan memberikan sesuatu yang pihak asing itu inginkan. Mereka itu dinamakan Seno sebagai kaum borjuis Indonesia. Malangnya, kaum borjuis ini tidak seperti borjuis di Perancis yang hidup di atas modal yang menikmati kehidupan mewah berdasarkan hasil perdagangan (merkantilis). Privatisasi pada tataran tertentu merupakan penerimaan terhadap konsep-konsep kapitalisme gaya baru dalam bungkus neoliberalisme. Dalam perspektif ini privatisasi akan membawa dampak sangat negatif karena dalam jangka panjang akan mengalihkan aset nasional yang menguntungkan pihak asing dengan harga murah sesuai dengan skenario yang dirancang oleh mereka. Indonesia akan terperangkap dalam jerat perdagangan bebas yang semakin meminggirkan

kemampuan ekonomi rakyat sehingga jangka panjang privatisasi hanya akan menciptakan bangsa kuli di negeri sendiri.

Jebakan Neoliberal

Arus globalisasi yang didukung kuat neo-kapitalisme dan neo-liberalisme, menyebabkan kita sebagai bangsa menjadi limbung dan nyaris tak lagi memiliki ideologi dan identitas kebangsaan. Kita hanya sekedar menjadi pasar dari produk multinational corporation. Di lain pihak telah pula menjadi bangsa yang ketagihan dan menderita ketergantungan utang. Martabat bangsa tak lagi menjadi kebanggaan. Bangsa ini semakin terjebak dalam kubangan sistem ekonomi neoliberal. Akibatnya hak-hak dasar warga negara telah dijadikan komoditas dagang. Bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya yang menurut Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 dikuasai negara dan digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Semakin tidak jelas hubungannya dengan kesejahteraan rakyat. Negara dikendalikan oleh lembaga-lembaga keuangan internasional dan perusahaan-perusahaan multinasional. Mayoritas rakyat bangsa ini terdzolimi, dieksploitasi, demi memenuhi kepentingan ekonomi sekelompok pemilik modal dan berkuasa. Ada kecenderungan yang mencemaskan perasaan kita sebagai pemilik sah negeri ini. Semakin hilangnya kedaulatan nasional dalam berbagai aspek. Banyak pihak tidak mengetahui dan menyadari bahwa ketika tahun 1998 reformasi bergulir muncul banyak figur elit politik penumpang gelap gerbong kaum reformis alias elit politik reformis gadungan sekaligus menjadi komprador kekuatan asing untuk mengendalikan negeri ini secara invisible dan total. Dengan isu globalisasi, HAM, demokratisasi, dan lingkungan hidup, kekuatan asing terutama negara-negara kapitalis sebagai pemenang perang dingin memulai memainkan skenario neo-imperialisme, neo-kolonialisme, neo-kapitalisme, dan neo-liberalisme sebagai bentuk baru penjajahan di dunia. Semua negara terutama negara dunia

ketiga termasuk Indonesia menjadi target dengan strategi, taktik, teknik, serta metoda yang lebih muktahir termasuk membangun jaringan dengan komprador di dalam negeri yang terdiri dari para elit politik reformis gadungan. Kecenderungan situasi global dan nasional memperlihatkan bagaimana kerasnya kekuatan neo-kolonialisme, neo-kapitalisme, dan neo-liberalisme berusaha mencengkeram negeri ini. Serta, bagaimana peranan para elit politik reformis gadungan sebagai komprador membantu dan mengakomodir konsepsi penjajahan baru tersebut. Dalam proses memaksakan konsepsi dan kehendak tersebut kekuatan asing ini menggunakan metode invansi dan subversi. Invansi telah dilaksanakan ke Afganistan dan Irak meskipun banyak ditentang oleh dunia Internasional. Bahkan, invansi berikutnya sedang dirancang untuk Iran dan Korea Utara. Metode subversi dilakukan dengan cara tekanan ekonomi, HAM, lingkungan hidup, melalui berbagai LSM atau NGO (Non Governmental Organization) serta MNC (Multi National Corporation).

Ada pun orang-orang asing yang menjadi operator pembuatan undang-undang yang "bergentayangan" di berbagai departemen, antara lain:

- Departemen Keuangan: Arthur J. Mann dan Burden B. Stephen V. Marks (ahli perpajakan);
- Bank Indonesia: Thomas A. Timberg penasehat bidang skala kecil dan Susan L Baker konsultan bidang Konstrukturisasi Perbankan;
- Deperindag: Etephen L Magiera ahli Perdagangan Internasional dan Gary Goodpaster ahli desentralisasi, internal carriers to trade and local discriminatory action;
- Kementerian Usaha Kecil dan Menengah Koperasi: Robert C Rice ahli small and medium enterprice;
- Kementerian Kominfo: Harry F Darby ahli regulasi komunikasi;
- Departemen Perhubungan: Richard Belenfeld dan Don Frizh konsultan PEG bidang pelayaran dan pelabuhan; dan
- Departemen Hukum dan HAM: Paul H Brietzke legal advisor.

Pokok-Pokok Pikiran

Hasil yang telah dicapai jaringan subversi asing dalam produk undang-undang di Indonesia adalah:

- (1) Produk Hukum Yang Dihasilkan oleh Ellips Project :
- a) UU No 5 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 - b) UU No 14 Tahun 2001 Tentang Paten.
 - c) UU No 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
 - d) UU No 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
 - e) UU No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
 - f) UU No 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
 - g) UU No 19 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.
 - h) UU No 18 Tahun 2003 Tentang hak Advokat.
 - i) UU No 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas RUU Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - j) Draf akademik yang disiapkan adalah: RUU Rahasia Negara, RUU Perintah Transfer Dana, dan RUU Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (2) Produk Hukum Yang Dihasilkan oleh PEG (Partnership for Economic Growth):
- a) UU No 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.
 - b) UU No 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - c) UU No 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
 - d) UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 - e) UU No 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 6 Tahun 1993 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
 - f) UU No 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
 - g) UU No 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.
 - h) UU No 25 Tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004.
 - i) UU No 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

Pokok-Pokok Pikiran

- j) UU No 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan.
 - k) UU No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
 - l) UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
 - m) UU No 27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi.
 - n) UU No 3 Tahun 2004 Perubahan Atas UU No 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
 - o) UU No 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.
 - p) UU No 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang.
 - q) UU No 32 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Pemerintah Daerah.
 - r) UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Produk Hukum yang Dihasilkan oleh ACIL ILO (American for International Labour Solidarity ILO) :
- a) UU No 22 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
 - b) UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
 - c) UU No 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- (4) Produk Hukum Yang Dihasilkan oleh PGR (Partnership for Government Reform):
- a) UU No 26 Tentang Pengadilan HAM.
 - b) UU No 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik.
 - c) UU No 37 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan.
 - d) UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - e) UU No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif.

Pokok-Pokok Pikiran

- f) UU No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- g) UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- h) UU No 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.
- i) UU No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- j) UU No 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik.
- k) UU No 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden.
- l) UU No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- m) UU No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- n) UU No 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- o) UU No 8 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
- p) UU No 9 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- q) UU No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- r) UU No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

Beberapa fakta yang diungkapkan di atas telah cukup memberikan gambaran bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 secara faktual tidak lagi berdaulat. Namun, telah masuk dalam perangkap kekuatan subversi asing dengan bantuan para komprador di dalam negeri. Intinya, buah dari reformasi adalah telah menyeret bangsa ini ke arah liberalisasi besar-besaran dalam segala aspek. Itu tergambar dari berbagai produk perundang-undangan yang dihasilkan sebagaimana telah diuraikan di atas. Tak terbantahkan. Dari sekian banyak perundang-undangan tersebut tidak ada satu pun yang berorientasi atau menjamin kesejahteraan dan hak-hak dasar rakyat bangsa ini.

Pokok-Pokok Pikiran

Rakyat bangsa ini terancam hidup dalam kemiskinan massal. Mengapa? Karena seperti telah diungkapkan di atas bangsa dan negara ini semakin dalam terjerat dalam perangkap kekuatan subversi asing. Sekarang ini modal kapitalis asing bebas bergerak hingga ke pelosok desa di negeri ini —sistem perekonomian nasional tak lain merupakan subsistem perekonomian global kapitalistik. World Bank, IMF, dan WTO menjadi agen neo-imperialisme yang “menjerat” batang leher ekonomi rakyat. Utang Indonesia semakin besar. Kewajiban membayar bunga dan cicilan utang makin besar juga. Lantas apa yang tersisa lagi untuk membangun ekonomi rakyat. Jelas tidak ada. Kapitalisme yang tumbuh di negeri ini jelas telah memiskinkan rakyat. Patokan harga BBM dirancang sangat tinggi. Tak heran pemerintah terus menerus berupaya menaikkan harga BBM. Akibatnya mayoritas rakyat bangsa ini terkena dampaknya karena harga-harga bahan pokok semakin melampung tak terjangkau oleh isi saku kusen mereka yang pada gilirannya asap dapur mereka pun jarang mengebul. Bahkan, kapitalisme telah masuk pada sektor pengecer (retailer), Super Mall atau Super Market, seperti Carefour, Giant, Hypermark, dan lain-lain berdiri dengan megahnya. Mulai dari Ibu Kota negara hingga kabupaten di negeri ini yang telah menyebabkan pasar-pasar tradisional mati secara perlahan. Lalu, apalagi yang dapat diecer oleh rakyat bangsa ini. Jika tahu dan tempe pun dapat dibeli di berbagai super market ber AC tersebut. Mengapa semua itu bisa terjadi? Proses-proses penghancuran sumber-sumber kehidupan rakyat ini telah mengakibatkan terjadinya krisis yang tidak terpulihkan. Krisis ekonomi semakin tak terpulihkan karena semua kekayaan rakyat bangsa ini dikuasai oleh segelintir elit politik dan pemilik modal. Pemilik-pemilik modal internasional telah menekan elit pemerintahan supaya memperoleh kemudahan-kemudahan akses dan penguasaan sumber-sumber kemakmuran rakyat, aset negara (BUMN), keringanan pajak, dan lain-lain.

Pokok-Pokok Pikiran

Perekonomian nasional telah menghamba pada sistem kapitalisme global. Senyatanya hal itu terlihat sejak era reformasi ini dengan berbagai produk perundang-undangan seperti telah diuraikan di atas. Terutama perundang-undangan yang memberi akses seluas-luasnya bagi kepentingan pemilik modal dalam dan luar negeri atas sumber-sumber kemakmuran rakyat. Seperti misalnya tergambar dalam UU Penanaman Modal, UU Sumber Daya Air, UU Migas, UU Ketenagalistrikan, UU Perkebunan, dan Perpu No 1 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan UU BHP. Bahkan, krisis sosial budaya terjadi karena proyek-proyek pembangunan dan perluasan investasi telah meluluhlantakkan basis sosial dan kebudayaan rakyat di seluruh penjuru negeri ini. Konflik sosial antara rakyat dan negara, rakyat dan pemodal, juga rakyat dan rakyat semakin marak belakangan ini. Ambruknya sistem kebudayaan rakyat menjadikan rakyat tak mampu melakukan reproduksi sosial bagi keberlanjutan generasi mendatang. Sementara itu, krisis ekologi terjadi karena negara, pemodal, dan sistem pengetahuan dan teknologi telah mereduksi alam menjadi obyek komoditi yang bisa direkayasa dan dieksploitasi untuk memperoleh keuntungan ekonomi secara instan. Ekspansi sistem monokultur, eksploitasi hutan, industri pertambangan telah mengganggu dan menghancurkan fungsi-fungsi ekologi dan keseimbangan alam. Privatisasi kekayaan alam hanya dipersembahkan semata-mata untuk mengejar keuntungan pemilik modal. Bahkan, dengan alasan konservasi sekali pun telah menjauhkan akses dan kontrol rakyat pada sumber-sumber kemakmuran. Pada gilirannya berbagai bencana lingkungan seperti kebakaran hutan dan lahan, banjir, kekeringan, pencemaran, dan krisis air telah menjadi bencana yang harus diderita dan ditanggung oleh rakyat bangsa ini dari tahun ke tahun. Sumber daya alam kita yang terkuras habis secara brutal dan serakah hanya dinikmati oleh segelintir orang pemilik modal.

Pokok-Pokok Pikiran

Tetapi, harus dibayar mahal oleh sebagian rakyat bangsa ini. Butuh Perubahan Fundamental Singkatnya, bahwa krisis politik, krisis ekonomi, krisis sosial budaya, dan krisis ekologi ini, tak terbantahkan karena telah terjadi erosi nilai kedaulatan dan keadilan yang kemudian bertemu dalam erosi kesejahteraan. Erosi kedaulatan ini nampak dalam fenomena semakin sirnanya hak menentukan nasib sendiri, baik di tataran negara bangsa maupun di tataran satuan-satuan politik yang lebih kecil. Yang terkecil di antaranya adalah tataran desa, bahkan keluarga. Sedangkan erosi keadilan adalah narasi tentang ketimpangan distribusi manfaat dari tanah, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Baik intra maupun trans-generasi. Kemiskinan kemudian menjadi indikator terjadinya erosi kedaulatan dan keadilan. Kemiskinan ini terjadi akibat merosotnya tingkat kesejahteraan rakyat serta ketahanan dan keberlanjutan kehidupan rakyat. Sehingga kemiskinan kemudian dapat dipahami sebagai hilangnya potensi ketahanan dan keberlanjutan fisik serta potensi ketahanan dan keberlanjutan sosial atau keduanya dapat disatukan sebagai hilangnya ketahanan dan keberlanjutan lingkungan hidup. Tampaknya perahu yang bernama Republik Indonesia ini akan karam bila tidak cepat-cepat diselamatkan. Untuk menyelamatkan negeri ini hanya bisa dilakukan dengan political will yang kuat dari kepemimpinan nasional. Artinya, pemimpin yang terpilih harus berani mengubah seluruh kebijakan dalam sektor ekonomi. Semua kontrak-kontrak dan UU yang berbau neoliberal menguntungkan pihak asing harus direvisi. Singkatnya, kita butuh perubahan yang fundamental. Bukan hanya janji dan citra. Perubahan yang perlu dilakukan adalah agar terjadi perubahan dari sejarah kebangkitan elit menjadi awal dari sejarah kebangkitan rakyat berdaulat dan awal dari kejayaan Indonesia Raya. ***

Pokok Pikiran VII

Pengelolaan DAS Benenain

Berangkat Dari Pemahaman & Komitmen Bersama

Sejumlah model Tata pemerintahan yang baik yang diintrodusir oleh berbagai mitra pemerintah RI dari external agencies dan marak dikembangkan pada 1 dekade terakhir ini, saat ini sedang mendapat sorotan tajam dan kritik yang luas dari berbagai elemen dan pemangku kepentingan. Mengapa usulan program pembangunan yang berasal dari bawah selalu kalah bersaing dengan gagasan-gagasan dari atas? Ke mana perginya hasil musrenbang desa dan kecamatan? Mengapa usulan para petani, nelayan, kaum buruh dan perempuan selalu sulit masuk dalam daftar menu para pengambil keputusan? Untuk apa penyelenggara negara mengusung *adagium* demokrasi dalam format partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan kesetaraan gender? Pertanyaan gugatan seperti di atas, semakin santer diajukan di mana-mana, baik dalam forum-forum formal seperti hari ini maupun yang informal seperti di rumah tangga misalnya.

Pertanyaan seperti tadi, mungkin tidak akan diajukan kalau kita benar-benar konsisten membangun dan menjunjung tinggi

Pokok-Pokok Pikiran

kesepahaman dan komitmen bersama seperti yang coba di-refresh kembali dalam forum ini. Sebuah kerjasama, apapun tujuan dan sasarannya akan mandul apabila para pihak tidak setia menjaga kesepahaman dan komitmen bersama. Dalil inilah yang seringkali terabaikan oleh para pihak selama ini sehingga *adagium* demokrasi tersebut hanya terdengar seperti pemeo dan menjadi *utopia* bagi kebanyakan orang dari kalangan orang-orang kebanyakan.

Hanya dalam aras pemikiran dan tindakan yang *dirahmati* oleh semangat kesepahaman dan komitmen bersama itulah setiap upaya yang akan dilakukan dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik, membantu perubahan dan penyelesaian kerangka kerja desentralisasi, pengembangan kebijakan dan instrument fiscal desentralisasi, dan reformasi pelayanan publik dapat menemui maknanya. Maka peluang kerjasama antar daerah (KAD) untuk meningkatkan efektifitas implementasi penilaian kinerja yang berfokus pada hasil (participatory outcome-focus performance based assesment) dalam perspektif gender, SPM dan MDG; memperkuat desentralisasi dan tatakelola pemerintahan yang baik, reformasi birokrasi dan agenda khusus arah kebijakan pembangunan kewilayahaan dan daerah Rawan bencana; menerapkan strategy pengembangan ekonomi masyarakat berbasis daerah aliran sungai (DAS), yang saya pandang menjadi *ultimate goal* dari skema kerjasama ini akan bersinergi positif.

Dalam konstruksi kesepahaman dan komitmen bersama ini pula setiap elemen masyarakat selayaknya mendapat peluang seluas-luasnya untuk berkontribusi secara optimal sesuai dengan peran, tanggung jawab dan kapasitas masing-masing. Atas dasar itu, saya dalam kapasitas sebagai pribadi maupun anggota DPR-RI terpanggil untuk mendukung setiap upaya kolaborasi antara para pihak (masyarakat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, LSM, external agencies termasuk badan-badan PBB,

badan kerjasama unilateral dan bilateral) yang sedang berupaya memperkuat desentralisasi dalam iklim pemerintahan yang baik di provinsi maupun kabupaten/kota di NTT. Bagaimana dan dalam bentuk apa dukungan itu, akan dibahas lebih lanjut dalam forum dan mekanisme yang tersedia untuk itu, misalnya **dalam forum musrenbang provinsi untuk 2011, yang akan dilaksanakan segera, untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah 2011. Dengan demikian pemerintah sudah dapat memasukkan usulan kegiatan yang terkait dengan agenda khusus kebijakan pembangunan wilayah rawan bencana dan pengembangan ekonomi masyarakat berbasis DAS (Benanain). Kedua isu ini diharapkan dapat menjadi laboratorium pembelajaran bagi forum KAD dan semua pihak yang berniat memperkuat desentralisasi dalam semangat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.**

Lebih lanjut, pada tataran operasional, yang sangat penting untuk diperhatikan adalah bagaimana merumuskan program-program yang dapat memecahkan isu-isu di atas, sekaligus membawa manfaat pada masyarakat yang langsung terkena dampak program dimaksud. Katakanlah, dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakat berbasis DAS Benanain, program dan kegiatan seperti apa yang mau dirumuskan oleh pemerintah bersama forum KAD, manfaat apa yang akan didapat oleh para pihak/stakeholder dan apa yang didapat oleh masyarakat sepanjang DAS dari TTS, TTU dan Belu. Kapan dan bagaimana program/kegiatan-kegiatan tersebut dimasukkan/diusulkan ke dalam mekanisme perancangan dan penganggaran nasional. Bila semua telah jelas, apa yang dapat dilakukan oleh seluruh stakeholder (termasuk anggota DPR di semua level, dari daerah sampai ke pusat) dalam rangka mengawal proses perencanaan sampai dengan penganggarnya? Semua ini menjadi catatan kritis yang membutuhkan pemahaman dan komitmen bersama semua kita yang terlibat dalam forum ini.

Pokok-Pokok Pikiran

Saya sendiri memiliki sejumlah catatan kritis untuk kita renungkan, antara lain; (1) strategi seperti apa yang hendak dibangun oleh Forum KAD, agar kita sampai pada isu yang sama dengan isu masyarakat, dengan kata lain apakah ekonomi berbasis DAS adalah isu masyarakat? (2) Bagaimana Forum KAD menempatkan unsur masyarakat, dan apa posisi mereka dalam analisis isu pengembangan ekonomi berbasis DAS? (3) Bagaimana kita mendistribusi peran dan tanggung jawab di antara semua stakeholder Forum KAD, sehingga masing-masing tahu persis siapa melakukan apa dan bagaimana caranya? (4) Bagaimana program/kegiatan diimplementasi dan dimonitor, siapa yang akan melakukannya? (5) Apa dan Bagaimana program/kegiatan dievaluasi, kapan umpan balik dilakukan, dan untuk tujuan apa? Dalam semangat membangun kesepahaman dan komitmen bersama ini, saya yakin kita dapat menemukan pesan-pesan kunci dari catatan-catatan di atas dan pada saatnya masyarakat sepanjang DAS Benanain akan menyimpulkan "*kamilah yang telah melakukannya*".

Demikian beberapa pokok pikiran yang dapat saya *sharingkan* di Forum KAD ini, selamat melaksanakan Workshop.***

Pokok Pikiran VIII

DAS Benenain

Sudahkah Menjadi Isu dan Aksi Bersama?

Ada yang menarik dari workshop sebelumnya, yakni ditemukan bahwa prakasa membangun pemahaman bersama untuk mengelola issue DAS Benenain telah dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali yakni:

- Pada tahun 2003 ada MOU antar 4 Bupati sederatan Timor untuk bekerja sama mengelola DAS Benenain-Noelmina tetapi tidak pernah diimplementasikan.
- Pada tahun 2007 ada perjanjian kerjasama antara kabupaten dan sektor serta stakeholder lain, yaitu deklarasi Buat, TTS, guna menangani permasalahan DAS Benenain-Noelmina, akan tetapi kembali mengalami nasib yang sama, yaitu minimnya upaya mengimplemetasikannya.
- Pada tahun 2008 ditetapkan Perda NTT No. 5/2008 tentang Pengelolaan DAS terpadu yang mewajibkan kerjasama lintas wilayah dan sektoral dalam penanganan semua DAS yang bersifat lintas kabupaten di NTT secara terpadu.

Permasalahan pokok yang mengemuka di sini adalah kendornya upaya mengimplementasi prakarsa-prakarsa, termasuk

Pokok-Pokok Pikiran

MOU dan perjanjian kerjasama yang disebut di atas. Meskipun Perda No. 5/2008 telah disahkan 2 tahun lalu, pertanyaan tentang sejauh mana implementasi PERDA tersebut tampaknya masih relevan untuk diajukan. Sekarang kita sesungguhnya sedang *merefresh* upaya yang pernah dilakukan sebelumnya. Dan pada Pertanyaannya penyanggahnyapun masih relevan, atah bahkan muncul kesangsian, jangan-jangan hasilnya juga seperti yang sudah-sudah.

Isu Bersama

Apakah DAS Benenain adalah isu bersama semua stakeholder seperti yang telah kita inventarisasi? Atau apakah DAS Benenanin telah sungguh-sungguh menjadi perhatian serius hampir semua sektor kemakmuran dan penyedia sarana dan prasarana publik termasuk banyak LSM dan masyarakat di kawasan DAS itu sendiri? Andaikata jawaban pertanyaan ini adalah ya, lantas mengapa kerjasama antar stakeholder tersebut masih sangat lemah dan menimbulkan kesan yang sangat kuat terjadinya egosektoral dan bertentangan dengan sifat “externalities” DAS yang selalu lintas wilayah administrasi, sektor dan keilmuan, seperti yang digaris bawahi oleh Dr. Mikhael?

Pertanyaan-pertanyaan ini yang, menurut hemat saya, diharapkan terjawab secara proporsional oleh setiap stakeholder sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Hasilnya akan menolong setiap stakeholder untuk mengidentifikasi perilaku negatif yang mungkin telah menimbulkan persoalan kronis terhadap pengelolaan DAS Benenain tersebut. Dan apabila persoalan itu terpecahkan, manfaat apa yang masing-masing stakeholder peroleh? Dari sinilah kita berharap akan muncul upaya proaktif dalam hal distribusi peran secara lebih berimbang baik bagi pemerintah, akademisi, LSM maupun masyarakat DAS itu sendiri dan dengan demikian, cita-cita kita akan terwujudnya perencanaan terpadu antar stakeholder guna memastikan

Pokok-Pokok Pikiran

terjadinya situasi one river one plan one integrated management; upaya peningkatan kapasitas semua stakeholder di DAS Benenain sebagai pelaku aktif pengelolaan DAS Benenain yang bersifat lintas otoritas dan keilmuan; penataan kembali berbagai sarana dan prasarana yang tepat guna secara kewilayahan; dan suatu Standard Pelayanan Minimal sebagai acuan dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang berkualitas dan berkeadilan di daerah hulu, tengah dan hilir dapat lebih realistis.

Pertanyaan atau lebih tepatnya gugatan lainnya adalah sebagai berikut :

- Apakah yang berbeda dari workshop sebelumnya?
- Apakah telah terjadi distribusi peran dan tanggung jawab yang proporsional di antara stakeholder?
- Apakah masing-masing stakeholder telah melaksanakan perannya tersebut?
- Apa progressnya?
- Apakah progress tersebut telah sesuai dengan rencana atau harapan bersama atau setidaknya masing-masing stakeholder? Bila belum mengapa?

Bila benar kita semua peduli pada issue pengelolaan DAS Benenain, manfaat apakah yang masing-masing stakeholder peroleh apabila issue itu terpecahkan?

Aksi Bersama

Azas manfaat masih menjadi faktor dominan yang mendorong setiap orang, apakah individu maupun kelompok mau mengambil inisiatif untuk bertindak. Karena itu dengan mengedepankan manfaat-manfaat yang diperoleh dari terpecahkannya issue pengelolaan DAS Benenain tersebut, kita berharap pemerintah baik eksekutif maupun legislatif, kaum cendekiawan/akademisi, LSM dan masyarakat DAS sendiri akan tergerak untuk secara sadar mengambil peran dan kemudian menjalankannya dengan loyalitas yang tinggi.

Pokok-Pokok Pikiran

Berangkat dari sejumlah data dan informasi yang dihimpun dari sejumlah referensi maupun dari lokakarya terakhir ditemukan bahwa:

- Ekosistem DAS (kondisi lahan yang kritis), dari 384,330 ha ternyata ada 275,138 tergolong kritis dan 8.918 tergolong sangat kritis.
- Penutupan lahan di hutan DAS ditemukan hanya tersisa 11%, padahal syarat UU 41/1999 seharusnya sekurang-kurangnya 38%.
- Ekonomi masyarakat, PDRB Belu 6,33%; TTU 5,32%, TTS 6,21%.

Pertanyaannya, apakah data-data tersebut menggambarkan fakta dan realita sesungguhnya pada saat ini? Lantas, apakah 2 buah issue yang diangkat pada workshop sebelumnya benar-benar telah menjadi issue bersama semua stakeholder DAS Benenain? Pertanyaan terakhir inilah yang patut kita renungkan kembali kalau kita ingin menggalang partisipasi aktif seluruh stakeholder dalam memecahkan issue yang sudah kita identifikasi tersebut. Berkaitan dengan upaya itu, terlampir kami sertakan sebuah model pengelolaan DAS Terpadu yang diharapkan dapat menjadi sumbangan untuk merangsang forum ini guna menemukan platform yang paling sesuai dengan situasi dan kondisi kita di Timor ini.***

Pokok Pikiran IX

Sekitar Pro Kontra Rencana Pembangunan Gedung DPR RI

Wacana pembangunan Gedung DPR RI yang baru sebagai pengganti Gedung Nusantara I yang akhir-akhir ini menghangat sebenarnya berawal pada bulan Oktober tahun 2008 ketika Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) menyusun Term of Reference (Kerangka Acuan-TOR) Grand Design Kawasan DPR RI, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Setjen DPR dengan melakukan lelang untuk menentukan :

- Konsultan Review Master Plan, AMDAL, dan Audit Struktur Gedung Nusantara yang menghasilkan Blok Plan Kawasan DPR/MPR RI per Oktober 2008;
- Konsultan Perencanaan dan Manajemen Konstruksi.

Pembuatan TOR dan penunjukan konsultan tersebut didasari alasan untuk merespon penambahan jumlah anggota Dewan dari tahun ke tahun, yang memperlihatkan bahwa Gedung Nusantara I sudah tidak dapat menampung aktifitas anggota DPR

Pokok-Pokok Pikiran

RI; kondisi gedung yang sekarang (dengan luas ruangan 32m² untuk masing-masing anggota Dewan dan 3 stafnya) dipandang tidak optimal untuk kinerja dewan.

Sebagai tindak lanjutnya maka pada tanggal 2 Februari 2009 PT Virama Karya (Konsultan yang memenangkan tender pembuatan Masterplan, AMDAL dan Audit Struktur) memaparkan Blok Plan Kawasan MPR/DPR RI pada Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi serta Pimpinan BURT di mana Rapat meminta agar Konsep Blok Plan tersebut disempurnakan. Sementara itu PT. Yodya Karya (Konsultan Perencana terpilih) dan PT Citra Jasa (Manajemen Konstruksi) berhasil mendesain konsep gedung baru dengan perhitungan berdasarkan kebutuhan dari 540 orang anggota dewan di mana ruang kerja anggota diperluas menjadi 64m² yang menampung 1 anggota DPR, 1 sekretaris dan 2 tenaga ahli. Kedua konsultan tersebut menyimpulkan bahwa dibutuhkan sebuah bangunan 27 lantai dengan total luas 120.000m².

Selanjutnya, pada tanggal 18 Mei 2009 diadakan RDP antara Steering Committee Penataan Ulang dengan IAI, INKINDO dan PT Yodya Karya. Meskipun sejauh ini alasan penataan ulang itu tidak jelas, rapat itu berakhir dengan mengusulkan agar diselenggarakan lokakarya guna menghimpun masukan terhadap Blok Plan Komplek Gedung DPR/DPD/MPR RI, dan pada tanggal 24-25 Juni 2009 lokakaryapun dilaksanakan dan berhasil menyempurnakan Master Plan yang kemudian disampaikan ke BURT.

Setelah pelantikan anggota DPR masa bakti 2009-2014 dilaksanakan, berkembang wacana yang menghendaki agar anggota DPR RI didampingi 5 tenaga ahli dan ruang kerja anggota DPR RI dilengkapi dengan sejumlah ruang pendukung seperti ruang rapat, kamar istirahat, KM/WC, dan ruang tamu. Berdasarkan wacana tersebut maka luas ruang kerja yang ideal untuk setiap anggota DPR RI menjadi 120m² dan total luas bangunan yang

Pokok-Pokok Pikiran

menurut rencana awal 120m² dengan 27 lantai menjadi 161.000m² dengan jumlah 36 lantai dan untuk membangunnya dibutuhkan biaya 1.6-1.8 triliun.[1]

Pada 30 April 2010, Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso, yang diwawancarai oleh Detiknews menyebutkan bahwa menurut data yang dia peroleh dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Gedung DPR, khususnya Nusantara 1, agak miring dan ini berbahaya untuk keamanan.[2] Kemiringan ini dikaitkan dengan kejadian gempa bumi pada tanggal 2 September 2009. Dia juga menegaskan bahwa hasil penelitian Kementerian PU tersebut sudah dibahas bersama oleh pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi dan Sekjen DPR RI, dan kesimpulannya adalah “demi keamanan dan rasa nyaman wakil rakyat, maka perlu segera diambil langkah sementara berupa renovasi dan persiapan membangun gedung baru. Diungkapkan pula bahwa sampai dengan rencana pembangunan sudah pada tahap desain, dengan mengambil lokasi di lingkungan kantor DPR RI itu juga.

Pada tanggal 3 Mei 2010 Kementerian PU meluruskan pemberitaan media masa yang menyebutkan bahwa Gedung Nusantara I DPR mengalami kemiringan 7 derajat. Dijelaskan bahwa Kementerian PU telah melakukan audit konstruksi atas permintaan dari DPR RI melalui surat permohonan No. HR.01/73/IX/2009, tanggal 15 September 2009 perihal Bantuan Audit Struktur Gedung DPR Pasca Gempa. Audit konstruksi sendiri telag dilakukan pada tanggal 2-4 Oktober 2009 dan dilaporkan secara resmi kepada DPR seminggu kemudian. Ada 7 rekomendasi hasil audit dan salah satunya adalah mengusulkan perbaikan teknis biasa dan tidak ada usulan merenovasi gedung secara total.[3]

Meskipun demikian, sejak saat itu pula media masa mulai menghubungkan kasus kemiringan Gedung Nusantara I itu dengan semakin kuatnya rencana pembangunan gedung tersebut. Bahkan diberitakan di berbagai media masa cetak maupun elektronik, kemiringan Gedung Nusantara I telah mencapai 7 derajat, dan

Pokok-Pokok Pikiran

hal itu ternyata menimbulkan polemik yang luas di tengah masyarakat.

Pada tanggal 30 Agustus 2010 bertepatan dengan HUT DPR RI yang ke 65, Ketua DPR RI mengumumkan bahwa bahwa Gedung Baru DPR RI akan segera dibangun, dan untuk itu pimpinan DPR berusaha agar melakukan penekanan terhadap biaya sehingga biaya lebih sedikit dari perkiraan semula. Meskipun demikian pernyataan Ketua DPR RI tersebut ternyata tidak meredakan polemik yang telanjur meluas.

Pelajaran Bagi DPR

1. Jalankan amanat rakyat dengan konsekuen.

Seyogyanya niat untuk membangun gedung DPR baru dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja anggota DPR RI dapat diterima. Persoalannya terletak pada komunikasi yang kurang intensif dan kurang efektif antara DPR sebagai wakil rakyat dan rakyat sebagai pemberi mandat, sehingga baik anggota DPR maupun rakyat yang diwakilinya tidak tahu persis di mana substansi dan esensi kebutuhan masing-masing dalam aspek pembangunan tersebut. Karena itu demokrasi kerakyatan harus menjadi instrumen utama dalam setiap proses pengambilan keputusan sesederhana apapun, apalagi menyangkut alokasi anggaran yang mencederai rasa keadilan rakyat.

2. Membangun karena kebutuhan.

Perhitungan teknis yang menghasilkan kesimpulan bahwa ruang kerja anggota DPR RI seluas 32m² saat ini, di mana seorang anggota DPR RI dan 3 stafnya bekerja, diakui memang telah melampaui kapasitas/daya tampung. Apalagi di ruang yang sama pula anggota harus melayani tamu dari berbagai latar belakang. Dalam aras pikir ini, tersedianya ruangan kerja dengan kapasitas yang memadai memang menjadi kebutuhan. Meskipun demikian

Pokok-Pokok Pikiran

desainnya harus tetap dalam konteks ruang kerja seorang wakil rakyat, yang perlu dibedakan dari desain kamar hotel atau tempat hiburan.

3. Perencanaan dan Pembangunan dengan Visi ke depan: Tidak Korbankan Rakyat

Alternatif desain seperti dalam simulasi yang banyak diberitakan media masa belakangan ini lebih tepat untuk mengantisipasi perubahan pada 5—20 tahun mendatang, sehingga pembangunan nantinya tidak terkesan bongkar pasang. Dan untuk itu DPR RI harus memiliki perencanaan yang matang, holistik dan integratif. Dengan demikian, penolakan, penundaan atau usulan pembatalan yang nyaring disuarakan berbagai elemen masyarakat dapat ditempatkan dalam konteks partisipasi masyarakat untuk menghasilkan perencanaan yang lebih baik daripada saat ini.

4. Transparansi dan Akuntabilitas.

DPR RI sekarang sedang diuji komitmen dan konsistensi keberpihakannya pada konstituennya masing-masing. Keputusan yang bijak dalam kemelut pembangunan gedung DPR baru ini akan menjadi sebuah prestasi, sementara, apabila terus melangkah dalam ketidakterbukaan akan menjadi angka merah yang menimbulkan trauma berkepanjangan dan mencederai akuntabilitas relasi DPR RI dengan rakyat dan konstituennya.

Refleksi pribadi ini, ke depan akan menjadi panduan untuk menjalankan peran dan tanggung jawab saya secara lebih berperspektif rakyat. ***

Pokok Pikiran X

Frans Seda

Pahlawan Nasional

Judul tulisan ini sempat menjadi “*breaking news*” di banyak media elektronik dan media cetak di Tanah Air bertepatan dengan meninggalnya dua tokoh nasional kita secara beriringan di akhir penghujung tahun 2009, yaitu mantan Presiden Republik Indonesia ke-4 KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 30 Desember 2009 dan mantan Menteri dan Penasehat Presiden di bidang ekonomi Frans Seda pada tanggal 31 Desember 2009. Kedua tokoh nasional ini telah pergi untuk selama-lamanya dengan meninggalkan begitu banyak jasa dan nama besar sesuai ungkapan umum: “Harimau mati meninggalkan belang dan manusia mati meninggalkan nama”. Akibatnya, tidak begitu mengherankan jika begitu banyak kalangan masyarakat di Indonesia telah mengusulkan agar kedua tokoh ini bersama mantan Presiden Republik Indonesia ke-2 Soeharto dianugerahi gelar Pahlawan Nasional, karena mereka telah berbuat banyak untuk bangsa dan negeri tercinta ini. Penulis dan beberapa tokoh politik asal NTT di Jakarta maupun di NTT telah menyatakan

Pokok-Pokok Pikiran

dukungan agar Frans Seda diusulkan menjadi pahlawan nasional. Penulis khususnya telah tegaskan bahwa “Bapak Frans Seda layak diajukan sebagai pahlawan nasional karena telah mengabdikan tiga era, yakni orde lama, orde baru dan orde reformasi sampai akhirnya hayat dan berdampak luas secara nasional” (*Pos Kupang*, 6 Januari 2001: 1). Namun hingga kini pernyataan dukungan kami belum membuahkan hasil, sehingga penulis mencoba mengangkat pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang: “Gelara, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan” (UU GTJTK) yang telah diundangkan pada tanggal 18 Juni 2009. Tulisan ini tidak menyorot lebih mendalam tentang karier Frans Seda, karena akan banyak dibicarakan di seminar yang akan dilaksanakan nanti oleh Pemerintah Daerah NTT, sehingga yang dibahas disini hanya merupakan bentuk “sosialisasi” dari batang tubuh UU GTJTK yang terdiri dari XII Bab dan 44 Pasal “agar setiap orang mengetahuinya” (Pasal 44).

Pengertian-pengertian GTJTK

Dalam Bab I Ketentuan Umum dari Pasal 1 UU GTJTK telah mendefinisikan 17 buah pengertian yang digunakan dalam UU ini. Lima diantara semuanya yang terurut untuk diketahui, meliputi: (1) Gelar adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, darmabakti, dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara; (2) Tanda Jasa adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara; (3) Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara; (4) Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga

Pokok-Pokok Pikiran

negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia; dan (5) Dewan GTJTK adalah dewan yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Terkait pengusulan pemberian gelar Pahlawan Nasional dari berbagai kalangan masyarakat di Indonesia kepada Gus Dus, Frans Seda dan/atau Soeharto akan dinilai oleh dewan ini yang keanggotaannya sesuai yang diatur dalam Pasal 15 UU GTJTK, terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota yang berasal dari unsur: (a) akademisi sebanyak 2 (dua) orang; (b) militer dan/atau berlatar belakang militer sebanyak 2 (dua) orang; dan (c) tokoh masyarakat yang pernah mendapat Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan sebanyak 3 (tiga) orang.

Tata cara pengajuan dan tujuan GTJTK

Tata cara pengajuan GTJTK telah diatur dengan jelas juga dalam Pasal 30 ayat 1 – 3 dan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (ayat 4). Pemahaman dari ketentuan yang diatur dalam pasal ini bahwa pengajuan GTJTK bertolak dari daerah yang didukung oleh tokoh-tokoh masyarakat, Kepala Daerah Bupati. Walikota serta Gubernur selanjutnya diseminarkan. Pengajuan ini berjalan secara hirarki dan berjenjang dan akan diverifikasi oleh Dewan GTJTK (Pasal 31 ayat 1 – 3). Usulan dari daerah ini tidak langsung diterima, tetapi bisa saja di tolak. Khusus Frans Seda sesuai berita di media massa tersebut di atas, sudah ada banyak dukungan yang telah dilontarkan oleh banyak tokoh politik di Jakarta maupun di NTT termasuk penulis yang menginginkan agar Pemerintah Daerah NTT segera

Pokok-Pokok Pikiran

menyelenggarakan seminar tentang karier Frans Seda untuk selanjutnya segera diusulkan ke Kementerian Sosial guna diproses dan ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada setiap memperingati Hari Pahlawan tanggal 10 November jika usulan Pemerintah Provinsi NTT tidak ditolak oleh Dewan GTJTK (Pasal 31 ayat 1 – 3). Dewan ini selain bertugas untuk memberi pertimbangan kepada Presiden mengenai usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional (Pasal 1 ayat 9), tetapi juga pencabutan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Pasal 35 – 36). Sedangkan, Pasal 3 ayat 1 – 3 UU GTJTK telah menyatakan tujuan pemberian GTJTK: (a) menghargai jasa setiap orang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi yang telah mendarmabaktikan diri dan berjasa besar dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara; (b) menumbuhkembangkan semangat kepahlawanan, kepatriotan, dan kejuangan setiap orang untuk kemajuan dan kejayaan bangsa dan negara; dan (c) menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap orang dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara. Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan penyerahan berbagai bintang jasa kepada setiap penerima GTJTK dilakukan oleh Presiden menjelang peringatan Hari Pahlawan 10 November.

Dalam UU ini diatur juga bahwa setiap penerima GTJTK memiliki hak (Pasal 33) dan kewajiban (Pasal 34) serta pencabutan GTJTK (Pasal 35) jika tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 huruf (b) memiliki integritas moral dan keteladanan; (e) setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara; dan (f) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Penutup

Sesuai ketentuan dalam Pasal 43 UU GTJTK bahwa berlakunya UU ini yang telah diundangkan pada tanggal 18 Juni

Pokok-Pokok Pikiran

2009, dengan sendiri telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi 17 UU tentang GTJTK di Indonesia. Perampingan UU ini berdampak pula pada penyeragaman penyebutan gelar “Pahlawan” di masa lalu yang beragam seperti Pahlawan Kemerdekaan Nasional, Pahlawan Proklamator, Pahlawan Revolusi dan Tokoh Nasional. Keragaman sebutan terhadap berbagai gelar “Pahlawan” di Indonesia telah diterbitkan dalam buku : “Daftar Warga Negara RI Yang Menerima Anugerah Pahlawan” yang diterbitkan oleh Sekretariat Militer Presiden Biro Tanda Jasa/ Kehormatan (2004). Akibatnya, pemberian GTJTK untuk masa yang akan datang di Indonesia hanya satu macam saja berupa Pahlawan Nasional yang dapat disertai dengan pemberian Tanda Jasa berupa Medali: (a) Medali Kepeloporan; (b) Medali Kejayaan; dan (c) Medali Perdamaian (Pasal 5) dan/atau Tanda Kehormatan berupa: (a) Bintang; (b) Satyalancana; dan (c) Samkaryanugraha (Pasal 6). Selain hanya satu gelar Pahlawan Nasional (Pasal 4 ayat 1 – 2), terdapat juga begitu banyak Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang akan diberikan oleh Presiden kepada orang-orang sipil maupun militer di Indonesia telah diatur dalam UU GTJTK Bab III Pasal 4 – 14, sehingga terbuka peluang bagi setiap warga negara Indonesia yang telah berjasa luar biasa dan mengharumkan nama bangsa dan negara untuk diusulkan. Seluruh rakyat NTT mendukung penuh langkah Pemerintah Provinsi NTT untuk segera menyelenggarakan seminar guna mengajukan Frans Seda sebagai Pahlawan Nasional mengikuti tata cara pengajuan GTJTK yang telah diatur dengan jelas dalam Pasal 30 ayat 1 – 3.***

ferdi hayong Ini Baru Wakil Rakyat



SENIN, 21 DESEMBER 2009 | 11:43 WIB

Apa yang diungkapkan keduanya bukan karena yang hadir adalah anggota DPR RI, melainkan karena dari apa yang dirasakan selama ini bahwa tidak semua anggota Dewan, baik tingkat kabupaten, propinsi maupun pusat datang dan bermalam dengan rakyat.

Ir. Fary Dj Francis

"Kami bangga dengan Pak Fary sebagai anggota DPR RI. Meski baru dipilih beberapa bulan lalu, tapi sudah datang lihat dan tidur bersama kami masyarakat. Pak Fary tidak mau tidur di hotel, tapi mau bergabung dengan masyarakat untuk ikut menderita bersama rakyat. Ini baru wakil rakyat. Terus terang, selama ini anggota Dewan yang datang bertemu kami baru Pak Fary, sementara anggota Dewan dari kabupaten ataupun propinsi belum pernah datang lihat kami setelah mereka terpilih," kata Kades Lakekun Barat, Martinus Luan.

Menurut Martinus, Fary Francis bukan orang baru bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Kobalima. Sebelum menjabat sebagai anggota DPR RI, yang bersangkutan sudah sering masuk-keluar kampung, memberikan pendampingan dan pembinaan tentang Musrenbang dan Musrenbang. Kebiasaan sebagai aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melekat selama ini terus berpengaruh hingga menjadi anggota DPR RI.

"Mungkin karena dulu Pak Fary sudah tidur bersama rakyat, makanya saat menjadi anggota DPR RI juga dia tidak mau tinggal di hotel mewah. Saya sangat yakin wakil rakyat seperti inilah yang betul-betul mau memperjuangkan aspirasi rakyat. Warga di Kobalima saat pemilihan tidak salah pilih figur Pak Fary," kata Martinus bersemangat.

Hal yang sama juga diakui Camat Rinhat, Anselmus Nahak, saat Fary berdialog dengan warga di Desa Wekmidar. Saat itu, Camat Anselmus menyatakan kebanggaannya terhadap figur Fary Francis yang rela datang dan bermalam di kampung-kampung. Selama ini, katanya, jarang anggota Dewan yang tidur bersama rakyat.

"Anggota DPR RI yang sering datang ke kampung-kampung yang saya lihat selain Pak Fary, juga mantan anggota DPR RI dari Partai Golkar, Martin Bria Seran. Beliau selalu datang ketemu rakyat sama seperti Pak Fary. Makanya, warga di Rinhat sangat bangga dengan kehadiran Pak Fary. Ke depan apa yang dilakukannya akan berkelanjutan," kata Anselmus.

Kepada warga Fary Francis menyampaikan bahwa kehadirannya di tengah warga karena keterpanggilan untuk melihat dan merasakan sendiri apa yang dialami rakyat. Dirinya tidak mau hanya sebatas mendengar laporan di atas kertas tanpa melihat kondisi riil. Apalagi dirinya berada di Komisi V yang bidang kerjanya bersentuhan langsung dengan kondisi riil masyarakat.

"Saya tidak terlalu suka dengan acara protokol. Saya lebih suka santai-santai datang bertemu dengan rakyat, makan apa adanya bersama rakyat. Dari rakyat saya bisa menggali banyak permasalahan yang bisa saya perjuangkan di tingkat pusat. Saya tidak akan berubah dan akan tetap seperti dulu, bertemu rakyat, makan minum apa adanya bersama rakyat," kata Fary.

Fary menambahkan, dalam masa reses selama 10 hari ini, dirinya akan memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk menjangkau aspirasi secara langsung dari masyarakat. Selain dirinya datang menyampaikan ucapan terima kasih kepada warga pemilih, ia juga berupaya melihat kondisi infrastruktur di wilayah perbatasan RI-RDTL dan daerah tertinggal.

"Untuk warga Belu tidak asing lagi bagi saya. Saya sudah cukup lama bersama masyarakat Belu dalam program pendampingan desa siaga, juga menjadi pembicara dalam kegiatan Musrenbangdes, musrenbangdes. Jadi istilahnya saya datang ketemu keluarga," kata Fary.

Disaksikan *Pos Kupang*, dalam kunjungan kerja ke Belu, Fary didampingi asisten pribadi, Ibu Susan, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PU Belu, Drs. Ludovikus Manu, dan Kabid Perbatasan dan Daerah Tertinggal pada Bappeda Belu, Vinsensius Moruk.

Saat berkunjung ke Makir, Kecamatan Lamaknen, Fary berdialog dengan warga dan bermalam di desa itu. Fary dan rombongan juga mengunjungi warga di Desa Teun, Kecamatan Raimanuk, warga di Desa Lakekun Barat, Kecamatan Kobalima, warga di Umatoos, Kecamatan Malaka Barat, warga di Wekmidar, Kecamatan Rinhat dan bermalam di desa ini. Fary juga bertemu dengan warga di Desa As Manlea, berdialog dengan warga, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan aparat desa setempat. (yon)

Recent Activity

Login You need to be logged into Facebook to see your friends' activity

<http://www.pos-kupang.com/read/artikel/53794/pkminggu/tamukita/2010/10/11/melchias-markus-mekeng-bap>
15 people shared this.

<http://www.pos-kupang.com/read/artikel/5399/kupangnews/111%20Kembali%20Pertanyakan%20Pencem>
2 people shared this.

<http://www.pos-kupang.com/read/artikel/53775/bupati-nagekeo-rinta-fak-bisa-dundur>



ARTIKEL LAINNYA

SENIN, 18 OKTOBER 2010 | 12:10 WIB
Media Massa Kurang Peduli Anggaran

SENIN, 18 OKTOBER 2010 | 12:01 WIB
NTT Harus Jadi Tuan Rumah yang Baik

SENIN, 18 OKTOBER 2010 | 11:24 WIB
Menuju Persalinan Selamat (3)

SENIN, 18 OKTOBER 2010 | 11:15 WIB
KPUD TTU Tetap Gelar Pleno

SENIN, 18 OKTOBER 2010 | 11:04 WIB
Jadi Bupati Sabu Butuh 11 Ribu Suara

Pemerintah Diminta Jelaskan Penyimpangan APBN Rp27,4 Triliun

Selasa, 20 Juli 2010 12:37 WIB | Ekonomi & Bisnis | Makro | Dibaca 534 kali



Jakarta (ANTARA News) - Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) meminta pemerintah memberi penjelasan atas penggunaan anggaran sebesar Rp27,4 triliun yang tidak sesuai dengan peruntukan.

"Kami ingin pemerintah memberikan penjelasan sejelas-jelasnya untuk anggaran sebesar Rp27,4 triliun yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya," kata Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Fary Djemi Francis, dalam rapat paripurna tentang RUU Pertanggungjawaban APBN 2009 di Jakarta, Selasa.

Selain itu, pihaknya juga mengusulkan agar hasil pemeriksaan BPK yang menemukan masih adanya kementerian dan lembaga yang masih mendapatkan opini "disclaimer" dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

"Kami usulkan agar ada pemeriksaan lebih lanjut terkait hasil pemeriksaan BPK serta aspek kepatuhan pelaksanaan anggaran 2009," ujarnya.

Senada dengan Fary, Juru Bicara Fraksi Partai Hanura, Muhtar Amma juga meminta penjelasan atas temuan BPK bahwa ada Rp27 triliun anggaran yang tidak sesuai peruntukannya.

Hal itu menunjukkan sikap pemerintah yang tidak tertib dan konsisten dalam penggunaan anggaran. Meski demikian, Muhtar menyatakan apresiasinya terhadap perbaikan opini LKPP menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada sebagian besar dari 79 lembaga dan kementerian dari yang sebelumnya "disclaimer".

"Pencapaian atas perbaikan itu tidak seharusnya membuat puas diri. Masih ada delapan instansi yang disclaimer seperti MA, Kemenlu, Kemenkes, Kemen-LH, BPN, KPU dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kami prihatin atas itu," tambahnya.

Muhtar menekankan penanganan atas adanya perbedaan catatan penerimaan pajak dan kas negara yang berpotensi merugikan negara.

Ia menyebutkan terdapat transaksi senilai Rp1,08 triliun sebagai penerimaan negara yang tidak tercatat di Ditjen Pajak, sementara itu ada pula transaksi senilai Rp1,21 triliun yang dicatat Ditjen Pajak namun tidak tercantum dalam buku kas negara.

"Itu terjadi karena tidak ada harmonisasi dan itu berpotensi merugikan negara. Seharusnya ada rekonsiliasi keuangan untuk mengetahui penerimaan negara. Itu bisa mengurangi kerugian negara," jelasnya.

Juru Bicara, Fraksi Partai Golkar Yoris Raweyai menegaskan politik penggunaan anggaran harus bisa mengaitkan semua bentuk pengeluaran uang terhadap kesejahteraan rakyat.

"Golkar berpandangan bahwa dari sisi indikator ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi belum mampu menciptakan pertumbuhan yang berkeadilan karena sektor riil lesu dan adanya PHK di sektor TPT," ujarnya.

Yoris menambahkan meski Golkar juga memberikan catatan perbaikan kepada pemerintah, namun Golkar tetap mengapresiasi opini WDP yang diperoleh pemerintah dari BPK.

"Tahun berikutnya diharapkan lebih baik dan kekurangan yang ada dapat diatasi," ujarnya. (E014)

COPYRIGHT © 2010

Ikuti berita terkini di handphone anda <http://m.antaranews.com>
Simpan dan akses berita ini dari HP anda dengan kode QR dibawah ini.

Kosongkan lemari anda, Bikin barang jadi uang



berniaga.com
Luar Biasa Murah-bekas

Top Stories

- Pemerintah Alokasikan Rp3 Triliun Untuk Pangan 2011
- Jepang Berikan Komitmen Kembangkan KEK Indonesia
- Ribuan Truk Masih Menumpuk di Pelabuhan Merak
- Sungai Barito Surut Kapal dan Tongkang Terperangkap
- PLN Riau Sewa Pembangkit Antisipasi Pemadaman Listrik

Terkini Terpopuler Terheboh

- Hatta: Cadangan Bulog Minimum 2 Juta Ton
- MK: Tidak Ada Gelombang Aksi Besar-besaran
- 10 Calon Pahlawan Nasional Dibahas
- Israel Undang Penumpang "Flotilla" Turki
- Golkar: Presiden Sebaiknya Rombak Kabinet

replay

Kami membantu untuk mendukung masa depan Indonesia.

Terus belajar, terus mempejar! 

ExxonMobil
Menghadapi tantangan energi dunia™

| Fajar Online | Metro News | Nasional |

RABU, 17 FEBRUARI 2010 | 10:35 WITA | 567 HITS



Meneg LH: Laut Timor Tercemar



JAKARTA -- Hasil analisa laboratorium Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terhadap sampel air laut di laut Timor yang tercemar akibat tumpahan minyak dari ledakan pipa gas di zona Montara, Australia Utara, tanggal 21 Agustus 2009 lalu, membuktikan bahwa laut Timor positif tercemar.

"Kita (KLH, Red) sudah selesai menganalisis bukti-bukti pencemaran di laut, dan datanya sudah kita kumpulkan dan diserahkan ke Menhub sebagai Ketua Tim Nasional (Penanggulangan Pencemaran

di Laut Timor, Red)," ungkap Menteri Negara Lingkungan Hidup (Meneg LH) Gusti Muhammad Hatta saat ditanyai Timor Express disela-sela rehat rapat dengan pendapat Komisi V DPR RI dengan Meneg LH, Menteri PU, Mendagri, Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Banten di ruang Rapat Komisi V DPR RI, Senayan-Jakarta, Senin 15 Februari 2009. Gusti ditanyai mengenai sejauh mana penanganan/kajian terhadap pencemaran Laut Timor yang dilakukan di laboratorium KLH.

Gusti Muhammad Hatta dimintai penjelasannya karena sebelumnya Menhub Freddy Numberi dan Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Kemenhub, Sunaryo yang ditanyai Timor Express tiga pekan lalu mengatakan Timnas Penanggulangan Pencemaran di Laut Timor sedang bekerja melakukan kajian/analisa terhadap bukti-bukti pencemaran laut itu.

Menurut Hatta, Laut Timor terbukti tercemar sesuai hasil analisa KLH, karena itu pihaknya hanya menunggu agenda pertemuan bersama antar departemen terkait (interdep) untuk mengajukan protes maupun tuntutan ganti rugi terhadap pemerintah Australia atau perusahaan pengeboran minyak itu. "Hasilnya sudah kita serahkan, tinggal menunggu waktu untuk melakukan pertemuan bersama membahas pengajuan protes dan tuntutan ganti rugi ke Australia," kata Gusti.

Saat disinggung mengenai sejauh mana tingkat pencemaran di Laut Timor, Gusti Hatta mengatakan, angka persisnya tak dia ingat, namun batasan tercemar sudah melewati ambang batasnya, sehingga pihaknya berkesimpulan bahwa laut Timor dan sekitarnya positif tercemar. "Kita kan melakukan pengukuran, jika melewati ambang batas yang ditentukan, ya kalau melewati itu ya jelas tercemar. Apalagi masyarakat sudah merasakan langsung dampak pencemaran itu, seperti adanya ikan-ikan yang mati, atau rumput laut mereka yang mati. Itu salah satu buktinya. Kalau yang dilakukan KLH kan melihat dari segi unsur kimianya untuk memperkuat bukti pencemaran itu. Jadi jelas Laut Timor tercemar," tandas Gusti Hatta.

Dua anggota Komisi V DPR RI, yakni Fary Francis dan Saleh Husin yang selama ini ngotot meminta penjelasan penanganan laut Timor, terhadap Menteri Perhubungan, Freddy Numberi, kemarin mendapat jawaban pasti dari Meneg LH, Gusti Muhammad Hatta.

Kepada Meneg LG, Fary Francis mempertanyakan mengapa proses penanganannya berlarut seperti ini? Jangan sampai kita (Indonesia, Red) terlalu tunduk terhadap Australia sehingga menganggap masalah pencemaran ini biasa-biasa saja? Mendapat pertanyaan seperti ini, Meneg LH hanya tersenyum sambil berkata, "Terung terang, selama ini saya yang selalu ngotot terhadap pencemaran itu. Kalau benar terbukti ada pencemaran, mengapa kita harus ditutup-tutupi? Karena sudah ada hasilnya, kita berharap segera ada pertemuan antar lembaga terkait untuk menindaklanjutinya segera."

Mendapat jawaban ini Fary mengatakan pihaknya sebagai legislator tetap mendukung upaya yang dilakukan pemerintah agar masyarakat sekitar tidak terkena dampak langsungnya sekarang dan akan datang. Hal yang sama juga diungkapkan legislator asal NTT lainnya, Saleh Husin. Saat RDP dilanjutkan, secara khusus Saleh mempertanyakan ini kepada Meneg LH dan meminta Meneg LH untuk menindaklanjutinya bersama lembaga terkait sehingga masyarakat NTT, khususnya yang berada di pulau Timor dan sekitarnya tidak terkena dampaknya kemudian hari. (alnffmc)



Banner Iklan
300 x 100

Banner Iklan
300 x 100

BACA JUGA

- 09:51 [Golkar Tolak Reshuffle](#)
- 23:43 [Soetomo Resmi Bupati Soppeng](#)
- 01:59 [Aktivis Minta Timor Jauhi ...](#)
- 01:52 [Lagi, Tiga Putra Sulsel ...](#)
- 01:13 [KKSS Kumpulkan Bantuan untuk ...](#)
- 17:21 [Bus Rombongan Komisi II ...](#)
- 17:05 [Akbar Faisal Kecelakaan di ...](#)
- 01:52 [Ujian Kapolri Cuma Formalitas](#)
- 01:09 [FSU Sebut Ada Unsur ...](#)
- 01:07 [Menkum HAM Bantah Intervensi ...](#)
- 00:59 [Kepala Daerah Baru Wajib ...](#)
- 00:22 [40 Legislator Keciprat Dana ...](#)
- 00:19 [Sepakat Perangi Pembalakan Liar](#)
- 00:17 [Politikus Muda Berkumpul di ...](#)
- 15:02 [Candoleng-doleng Bergoyang Lagi di ...](#)

Search

■ **Headline,**
Ekonomi,
Perdagangan,
Perbankan

■ **Nasional,**
Hukum,
Politik,
Pendidikan

■ **Industri,**
Teknologi,
Otomotif

■ **Internasional**

■ **Kesehatan,**
Olahraga,
Lingkungan

■ **Jasa,**
Hiburan,
Ragam, Opini



[Home](#) [Kategori](#) [Sumber Berita](#) [About Bataviase](#)

[Home](#)

Meraih Asa lewat Rumah Rakyat

08 Feb 2010

[Media Indonesia](#) [Politik](#)

IRGAHAYU HUT ke-2 Gerindra, 16 Februari 2010. Di Kupang, NTT dilakukan perayaan sederhana sekaligus peluncuran media komunikasi/ jejaring Rumah Rakyat Indonesia Raya. Jejaring ini dapat melakukan komunikasi melalui Kotak Pos 555, SMS 081259333555, email r2ir.ntt@gmail.com, facebook Rumah Rakyat Indonesia Raya, website www.fary-francis.com. Selanjutnya info lengkap dapat diakses ke FB. Salam Indonesia Raya. Demikian pengantar dalam halaman muka grup Facebook Partai Gerindra NTT. Pencetus gagasan jejaring komunikasi adalah anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Fary Djemy Francis dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT) II. Rumah rakyat itu dicanangkan bertepatan dengan ulang tahun ke-2 Partai Gerindra, Sabtu (6/2). Gagasan itu muncul setelah pada masa reses DPR periode 2009-2014 pertama, Desember 2009-januari 2010, ia tidak berhasil menemui seluruh konstituennya di desa-desa Kabupaten Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, dan Belu.

Bagi anggota Komisi V DPR tersebut, antusiasme masyarakat NTT khusus Pulau Timor untuk saling berba;; rasa mengenai kesuksesan dan kegagalan pelayanan publik sangat besar. Terbukti di setiap pertemuan, warga yang hadir mencapai ratusan orang. Sayangnya, dalam setiap pertemuan tidak pernah berlangsung lama. Karena itu, Fary meninggalkan nomor telepon seluler (ponsel) untuk dihubungi konstituen setiap saat, nomor kotak pos, laman Facebook, dan laman pribadinya.

Benar saja, setiap hari selalu ada. pesan dari konstituen yang masuk ke ponselnya. Namun, sayangnya belum banyak yang mengakses rumah aspirasi itu. Kemarin, isi laman itu mengajak masyarakat lintas agama di NTT berdoa dalam rangka 40 hari wafatnya mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

"Alasan kami merintis wadah tersebut, hubungan antara rakyat dan parlemen masih banyak hambatan, terutama soal akses rakyat dalam menyampaikan aspirasi," kata Fary. Selain itu, masih terbatasnya mekanisme dan ruang untuk membangun hubungan antara rakyat dan parlemen, akses di parlemen selama ini hanya terbuka saat rapat dengar pendapat.

Dengan wadah itu, Far)- berharap dapat menembus kebuntuan komunikasi politik antara rakyat atau konstituen dan parlemen, sekaligus sebagai wahana penguatan akses publik dan penghargaan bagi konstituen. "Wadah ini kami arahkan jadi wahana pendidikan politik untuk mendukung tercapainya era politik transaksional positif dan bukannya materi," kata mantan dosen Universitas Timor ini. (Pake Amalo/P-2)

Inu

ekc



Depan Sekilas NTT Pemerintahan Kemasyarakatan Sektor Info Kab/Kota Pariwisata Infrastruktur Serba/

Terima Kasih Atas Kunjungan Anda

Admin :
Not online

WEBMAIL
www.email.nttprov.go.id

Buku tamu

AGENDA HARIAN
Pl Semen Kupang, Acara ini dihadiri oleh Deputy Bidang Ekonomi Wapres, Deputi Pertamina, Dirjen Pertanian dan Peternakan, Departemen Kesehatan sedangkan dari Pemerintah Nusa Tenggara Timur, Bapak Gubernur didampingi oleh Kadis Pertanian
[Agenda Lain]

TRANSPORTASI
Info Transportasi
Informasi Penerbangan dan transportasi Laut

DETAIL BERITA ...

Post by RIM

DPR PERJUANGKAN PERHUBUNGAN DI NTT

(Selasa, 27 Oktober 2009), Demikian dikatakan anggota DPR RI dari NTT, Ir. Fary Dj Francis, kepada Pos Kupang di Kupang, Senin (26/10/09). Perhatian dari Pemerintah Pusat terhadap masalah Perhubungan di NTT, kata Fary, penting karena NTT merupakan daerah tertinggal yang perlu menjadi skala prioritas untuk pembangunan lima tahun ke depan. ...

KUPANG/WWW.NTTPROV.GO.ID >
Demikian dikatakan anggota DPR RI dari NTT, Ir. Fary Dj Francis, kepada Pos Kupang di Kupang, Senin (26/10/09). Perhatian dari Pemerintah Pusat terhadap masalah Perhubungan di NTT, kata Fary, penting karena NTT merupakan daerah tertinggal yang perlu menjadi skala prioritas untuk pembangunan lima tahun ke depan.

Di DPR RI, Fary yang berasal dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) ini, masuk dalam komisi V yang membidangi perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan daerah tertinggal, telekomunikasi, BMG dan SAR.

Menurut Fary, masalah perhubungan di NTT bukan sekedar penambahan armada baik laut maupun udara, tapi bagaimana semua komponen masyarakat menjaga dan memelihara aset perhubungan, baik aset yang dimiliki daerah maupun aset milik pihak ketiga yang dimanfaatkan melalui Kerja Sama Operasional (KSO).

Di NTT, Kata Fary, ada daerah yang pemerintahnya sudah membeli kapal tapi pemeliharaannya tidak dipikirkan, apalagi kapal yang dibeli barang bekas. Jika ada niat Pemerintah Provinsi melakukan KSO dengan maskapai penerbangan untuk mengatasi masalah transportasi udara, maka Pemprov harus memberikan kemudahan.

"Kita perjuangkan agar Pemerintah Pusat memberi perhatian untuk NTT. Kebetulan saya masuk dalam komisi yang membidangi perhubungan, daerah tertinggal dan daerah bencana. Jadi isu ini yang akan dikemas supaya ada perhatian lebih soal perhubungan di NTT. Persoalan perhubungan di daerah tertinggal sudah menjadi tekad pemerintah lima tahun kedepan," kata Fary.

Soal KSO, kata Fary, boleh-boleh saja, tapi jangan sampai pihak ketiga melarikan diri. KSO itu sebenarnya ada tapi tidak dipelihara sehingga lambat laun pihak ketiga mundur. Fary mengatakan, kebetulan Menteri Perhubungan RI Fredy Numberi, berasal dari Indonesia Timur, sehingga dirinya akan melakukan pendekatan agar memberikan perhatian lebih ke NTT.

"Saya yakin Pak Fredy tahu benar kondisi riil kawasan Indonesia Timur, apalagi NTT yang terdiri dari pulau-pulau," kata aktivis LSM ini.

Sumber : Pos Kupang

(RIM)

Sekitar Ki Gubernur Pr

berita yang mengandung ilmu tentang pemerintahan

PENGADUAN

Silahkan menyampaikan aduan/sara
[Daftar Aduan]

11:3
NO

PUBLIKASI

Anda menyaran, sumbu pikiran buku ini
buku.tahun@ntt
Terima

Cari Berita:

Cari

EKONOMI BISNIS

KAMIS, 29 APR 2010, | 215

25 Mei, KM Awu Singgahi Sabu

JAKARTA, Timex- Perjuangan tiga legislator NTT yang duduk di Komisi V DPR RI, yakni Fary Dj Francis, Yoseph Nai Soi, dan Saleh Husin yang getol memperjuangkan harapan dan keinginan masyarakat Sabu Raijua dengan menghadirkan kapal Pelni ke Sabu, membuahkan hasil. Ini dibuktikan dengan disetujuinya penambahan trayek kapal motor oleh direksi PT. Pelni, yakni KM Awu, yang dijadwalkan menyinggahi pelabuhan Sabu, pada 25 Mei 2010 mendatang. Fary Francis, kepada Timor Express di Jakarta, Rabu (28/4), mengatakan, disetujuinya pelayaran kapal Pelni ke Sabu ini, merupakan jawaban PT. Pelni terhadap perjuangan mereka yang duduk di komisi perhubungan, pekerjaan umum dan percepatan pembangunan daerah terpencil, tertinggal dan terluar atau daerah perbatasan, saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan dirut PT. Pelni, belum lama ini.

"Jadi, saat RDP dengan direksi PT. Pelni beberapa waktu lalu, kami mencoba menjawab keinginan masyarakat di pulau Sabu yang sering mengalami kendala transportasi, khususnya pada musim-musim tertentu, dimana akibat cuaca buruk, kapal-kapal ASDP tak bisa menyeberang ke Sabu," jelas Fary.

Menurut Fary, dengan disetujuinya jalur pelayaran KM Awu menyinggahi pulau Sabu, maka ini menjadi jawaban dan juga sebagai antisipasi kendala transportasi laut ke pulau Sabu yang sering dialami masyarakat. Apalagi, dibutuhkan kapal yang lebih besar untuk melayani arus barang maupun penumpang dari dan ke pulau Sabu.

Fary menambahkan, disetujuinya pelayaran KM Awu ke pulau Sabu tanggal 25 Mei 2010 mendatang, diputuskan saat mereka bertemu dengan Dirut PT. Pelni, Jussabella Sahea, yang dihadiri Penjabat Bupati Sabu Raijua, Thobias Uly dan pimpinan SKPD, yakni kepala Beppeda dan kadishub dan pariwisata Sabu Raijua, di Kantor PT. Pelni, di Jl. Gajah Mada, Jakarta Pusat, Selasa (27/4).

"Setelah dirut PT. Pelni memutuskan pelayaran KM Awu itu, kami langsung mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan rencana pelayaran, penganggaran dan lain sebagainya, termasuk izin trayek. Khusus izin trayek, masih menjadi PR bagi saya, Pak Saleh dan Pak Yoseph untuk memperjuangkan ke Kementerian Perhubungan, agar jadinya tak berubah dari apa yang sudah diputuskan," kata Fary.

Hadirnya KM Awu melintasi Sabu, tidak saja mendukung sektor ekonomi masyarakat, tapi juga dalam rangka meningkatkan pembangunan pariwisata di pulau yang dikelilingi Laut Sawu dan Samudera Hindia itu. "Hadirnya KM Awu di Sabu, juga diyakini ikut mendukung sektor pariwisata setempat, karena ada beberapa obyek wisata menarik yang bisa dikembangkan untuk menarik minat wisatawan," jelas Fary.

Saleh Husin menambahkan, apa yang mereka buat semata-mata mewujudkan harapan dan keinginan rakyat NTT, khususnya yang ada di NTT. Menurut Saleh, dengan akan berlayarnya KM Awu ke Sabu, dapat dikatakan hadiah terindah bagi pemerintah dan masyarakat Sabu, tepat sehari sebelum perayaan HUT pertama Kabupaten Sabu Raijua yang resmi berpisah dari induknya Kabupaten Kupang, tanggal 26 Mei 2009 lalu.

Saleh mengatakan, dengan disetujuinya pelayaran ke Sabu, berarti ada tambahan trayek untuk rute pelayaran di NTT. "Kami berharap, ini diterima dan disyukuri masyarakat NTT, khususnya yang ada di Sabu, yang selalu merindukan alat transportasi laut yang rutin dan lancar," kata Saleh.

Sementara itu, Dirut PT. Pelni, Jussabella Sahea mengatakan, tugas Pelni sebagaimana visinya, adalah menjadi jembatan bagi nusantara terutama daerah-daerah di perbatasan atau pulau terluar maupun daerah kepulauan. "Saat ini, kapal Pelni telah singgahi di 92 pelabuhan di seluruh Indonesia. Semuanya berangkat dari niat PT. Pelni untuk terus memberikan pelayanan terbaik, termasuk mengawal pulau-pulau terluar Indonesia," pungkas Jussabella. (ah/fmc)

RUBRIK BERITA

+ Nasional

+ Internasional

+ Sport

+ Kupang Metro

+ Dunia Wanita

+ Hiburan

+ Pendidikan

+ Pemilu 2009

+ Rakyat Surosa

+ Rakyat Flores

+ Rakyat Timor

OPINI

Sabu: Small is Beautiful

Oleh: Frits O Fanggidae
 Dosen FE UKAW Kupang

+ Index

Dr. Klenik

+ Panwaslu Temukan Perbedaan Surat Suara

- Artinya, KPU Harus Bertanggungjawab

+ Wagub Pimpin Pengusaha NTT ke China

- Asal untuk Belajar Bukan Melancong

+ Lima Penderita HIV/AIDS Meninggal

- Peringatan Bagi Kita Semua



Cari Berita:

RUBRIK BERITA

- + Nasional
- + Internasional
- + Sport
- + Kupang Metro
- + Ekonomi Bisnis
- + Dunia Wanita
- + Hiburan
- + Pendidikan
- + Pemilu 2009
- + Rakyat Surosa
- + Rakyat Flores
- + Rakyat Timor

OPINI

Sabu: Small is Beautiful
Oleh: Frits O Fanggaldae <-br
Dosen FE UKAW Kupang
[+ Index](#)

Dr. Klenik

- + **Panwaslu Temukan Perbedaan Surat Suara**
- *Artinya, KPU Harus Bertanggungjawab*
- + **Wagub Pimpin Pengusaha NTT ke China**
- *Asal untuk Belajar Bukan Melancong*
- + **Lima Penderita HIV/AIDS Meninggal**
- *Peringatan Bagi Kita Semua*

NASIONAL

SELASA, 19 JAN 2010, | 136

Penanganan Pencemaran Laut Timor

DPR RI Pertanyakan Menhub

AKARTA, Timex—Belum adanya kejelasan penanganan pencemaran laut Timor akibat tumpahan minyak dari ledakan pipa gas di zona Montara, Australia Utara, 21 Agustus 2009 lalu membuat Komisi V DPR RI membidangi masalah perhubungan gerah.

JKarena itu, dalam rapat kerja (raker) Komisi V DPR dengan Menteri Perhubungan (Menhub) dan jajarannya pekan ini, masalah penanganan pencemaran Laut Timor ini akan dipertanyakan. Dua dari tiga legislator asal NTT yang duduk di Komisi V, yakni Saleh Husin dan Fary Francis yang dihubungi secara terpisah Minggu (16/1) membenarkan hal tersebut.

"Ia benar, masalah itu (pencemaran Laut Timor Red) akan kita pertanyakan saat raker dengan Menhub nanti pekan depan (minggu ini, Red). Kita akan pertanyakan karena Menhub sebagai Ketua Tim Nasional (Timnas) penanggulangan pencemaran laut Timor sebelumnya sudah berjanji akan menyampaikan hasilnya (kajian pencemaran) ke Komisi V," ungkap anggota Komisi V DPR, Saleh Husin saat dihubungi Timor Express, Minggu (16/1).

Menurut Saleh, Menhub Freddy Numberi akan ditanyakan sejauh mana hasil kajian terhadap pencemaran laut Timor yang dilaksanakannya sejak akhir 2009 lalu. Hal yang sama juga diungkapkan Fary Francis. Legislator asal Fraksi Gerindra ini mengatakan, Komisi V akan meminta Menhub untuk menjelaskan secara detail hasil kajian terhadap pencemaran laut Timor yang dilakukan timnya di lapangan.

Fary mengatakan, hal ini penting mengingat sebagai anggota Komisi V dan juga wakil rakyat asal NTT tak ingin dampak akibat pencemaran laut Timor itu mengganggu kehidupan rakyat NTT, terutama para nelayan maupun petani rumput laut dan lain sebagainya yang bergantung terhadap hasil laut, khususnya di laut Timor dan sekitarnya.

Sekedar diketahui, pernyataan dua legislator Komisi V ini secara langsung merupakan bentuk penegasan untuk menagih hutang atas janji yang pernah diungkapkan Menhub Freddy Numberi saat raker Komisi V dengan jajaran Kementerian Perhubungan pada Selasa, 17 November 2009 lalu. Seperti yang diikuti dalam rapat tersebut, tiga legislator asal NTT, masing-masing Saleh Husin, Fary Francis, Yosep Nae Soi dengan tegas meminta Menhub Freddy Numberi untuk menindaklanjuti masalah pencemaran laut Timor sebagai akibat yang ditimbulkan oleh ledakan minyak di ladang Montara, West Atlas.

Menyikapi pernyataan tiga legislator itu, Menhub Freddy Numberi dalam kesempatan raker tersebut, meminta kepada Komisi V DPR untuk memberi kepercayaan penuh dan waktu kepada Kementerian Perhubungan untuk menyelesaikan masalah ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Negara Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta saat deklarasi kaukus lingkungan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota se Provinsi NTB di Mataram, tanggal 30 Desember 2009 lalu menandakan, Indonesia akan menuntut ganti rugi kepada pemerintah Australia terkait pencemaran minyak mentah yang meluas hingga kawasan perairan timur Indonesia.

Menurutnya, pencemaran itu sudah memasuki kawasan timur perairan Indonesia dan dinilai dapat merusak ekosistem laut yang ada di wilayah tersebut. "Kami sudah menghubungi Menteri Lingkungan Hidup Australia untuk mencegah agar limbah tidak meluas ke perairan Indonesia. Kami juga sudah mengirim tim yang terdiri dari ahli pencemaran lingkungan dan ahli hukum untuk meneliti dampak pencemaran minyak tersebut," kata Muhammad Hatta.

Hatta mengatakan, pencemaran itu harus segera dituntaskan mengingat pentingnya perairan itu bagi masyarakat terutama nelayan yang bermukim di wilayah tersebut. Karena itu, selain meminta ganti rugi dalam bentuk uang, pemerintah Indonesia juga akan menuntut agar Australia memperbaiki laut yang tercemar minyak. "Kita tetap bersikap tegas dan berhak atas itu. Wilayah laut kita dicemari kok dan kita terus berusaha untuk itu," ujarnya. (aln/fmc)

Search

Headline,
Ekonomi,
Perdagangan,
Perbankan

Nasional,
Hukum,
Politik,
Pendidikan

Industri,
Teknologi,
Otomotif

Internasional

Kesehatan,
Olahraga,
Lingkungan

Jasa,
Hiburan,
Ragam,
Opini



[Home](#) [Kategori](#) [Sumber Berita](#) [About Bataviase](#)

[Home](#)

Fa.ry DJ Francis, Anggota Komisi V DPR

24 Feb 2010

[Politik](#) [Rakyat Merdeka](#)

"Perlu Dievaluasi Dong..."

PERSOALAN dasar dari Kementerian Perhubungan (Ke-menhub) adalah tidak adanya indikator pencapaian dari grand-strategi dalam pembangunan transportasinya di Indonesia. Demikian disampaikan anggota Komisi V DPR, Fary Dj Francis, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin. Dikatakan, dalam 100 hari Kemenhub hanya memfokuskan untuk menyelesaikan blue print dan grandstrategi transportasi untuk lima tahun ke depan. Tujuannya .memang bagus agar pembangunan menjadi jelas dan proses kegiatan alur barang dapat berjalan dengan maksimal. Namun, sampai sekarang belum ada indikator keberhasilan.

Kemenhub, lanjut politisi Partai Gerindra itu, dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) harus sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan transportasi massal serta melibatkan daerah-daerah. "Klaim Kemenhub sudah berhasil menyelesaikan RPJMmenimbulkan pertanyaan. Soalnya, RPJM lima tahun lalu saja nggak selesai," katanya. Dikatakan, selama kunjungan kerja ke daerah, pihaknya menemukan bahwa banyak yang belum paham RPJM. "Ini artinya kurang sosialisasi deh," ucapnya.

Dia juga menyayangkan proyek Bandara Internasional Kuala Namu tidak kunjung usai dan tertunda-tunda. Padahal bandara itu sangat dibutuhkan masyarakat Sumatera. "Saya kira perlu dievaluasi dong dan diselesaikan," ujarnya.

Sementara anggota Komisi V DPR lainnya, Saleh Husin mendesak Kemenhub untuk melakukan evaluasi pembangunana Bandara Internasional Kuala Namu, Sumatera Utara.

Temyata lokasi bandara itu adalah rawa yang terdapat aliran air di bawah tanah. Itu kan jelas bisa membahayakan penerbangan. Akhimya dilakukan penimbunan, sehingga biaya membengkak. Inilah bukti kalau perencanaan tidak matang," katanya. DIT

— Editor terkait —



Main Menu

- Home
- Head Line News
- Web Links

Berita Utama

- Budaya
- Ekonomi
- Kriminal
- Nasional
- Pariwisata
- Pendidikan
- Politik
- Olahraga
- lain-lain
- Teknologi
- Cyber D U C K

Pengumuman



PENGUMUMAN

HASIL PENDATAAN TENAGA HONORER LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR SESUAI SURAT EDARAN MENPAN NOMOR 5 TAHUN 2010

Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Jadi Target Perjuangan

Ditulis oleh Hans

Tuesday, 08 December 2009 10:29

Kupang, NTT Online - Anggota Komisi V DPR RI, Fary Dj Francis, mengatakan, pembangunan infrastruktur pedesaan, infrastruktur rakyat dan pertanian di Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi target perjuangan jangka pendek lima tahun ke depan.

"Guna mewujudkan target tersebut, masa reses ini telah dijadwalkan untuk bertemu dengan mitra kerja seperti pemerintah (Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, BMKG) dan LSM serta organisasi lainnya," katanya di Kupang, Senin.

Menurut dia, karakteristik wilayah NTT yang terdiri dari pulau besar dan kecil dihuni 4,6 juta 21 kabupaten/kota, 285 kecamatan dan 2.836 desa/kelurahan dan selama ini terisolasi secara fisik, ekonomi dan sosial perlu mendapat perhatian. Karena itu, pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada masyarakat desa dan petani merupakan kebutuhan yang mendesak.

Anggota Fraksi Partai Gerindra ini, lebih lanjut mengatakan, telah mendapat data dari Dinas PU NTT terkait panjang jalan nasional di NTT sekitar 1.273,00 KM yang terdiri dari 110 ruas jalan dengan kondisi baik sepanjang 1.036,99 km, kondisi sedang 227,05 KM dan kondisi rusak sepanjang 29,63 KM.

Demikian pula, panjang jalan provinsi sekitar 2.939,86 KM yang terdiri dari 130 ruas jalan dengan kondisi baik sepanjang 1.036,99 KM, kondisi sedang sepanjang 422,10 KM dan kondisi rusak sepanjang 1.477,91 KM.

Sedangkan jalan kabupaten sepanjang 12.866,81 KM dalam kondisi parah sehingga perlu mendapat perhatian.

"Kesempatan reses ini akan meluangkan waktu untuk melihat dari dekat persoalan-persoalan infrastruktur jalan, terutama yang menghubungkan desa yang satu dengan lain, demikian pula kecamatan satu dengan lain dan seterusnya," katanya.

Mantan aktivitas LSM ini mengaku mengenal investigasi persoalan kebutuhan masyarakat terkait dengan infrastruktur dan lainnya yang mejadi tugas komisi sudah menjadi hal biasa untuk diperjuangkan, terutama ketika duduk sebagai wakil rakyat di senayan.

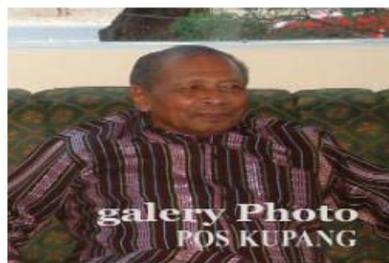
Ia mengatakan, salah satu mitra yang akan ditemui juga adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) karena berkaitan dengan musim tanam saat ini dan sejauhmana antisipasi terhadap ancaman el nino ke depan.

"Saya membaca di media, ancaman el nino di NTT mulai melemah, tetapi perlu juga diketahui sejauhmana pengaruhnya terhadap musim tanam saat ini," katanya.

Fary berprinsip masa reses merupakan kesempatan kembali ke rumah daerah pemilihan, karena itu sebagai awal dari reses setelah dilantik pada Agustus lalu, akan berusaha mendapat informasi terkini bidang-bidang yang terkait dengan tugas Komisi V DPR. beritadaerah.com

Tim PK

Frans Seda Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional



Drs. Frans Seda

POS KUPANG/CHA

RABU, 6 JANUARI 2010 | 10:35 WIB

Wagub yang dihubungi pertelepon, Selasa (5/1/2010) semalam mengatakan dirinya sudah mendapat masukan dari beberapa tokoh masyarakat NTT dan beberapa bupati untuk berjuang bersama agar almarhum Frans Seda mendapat penghormatan dengan gelar pahlawan nasional. Pengabdian dan kontribusi beliau bagi pembangunan nasional semasa menjabat beberapa menteri di era Orde Lama dan Orde Baru sangat pantas untuk dianugerahi pahlawan nasional.

Selain pengabdian di bidang pemerintahan, kata wagub, almarhum juga sebagai tokoh pemersatu kerukunan hidup beragama bagi bangsa ini. Karena itu, wajar masyarakat NTT dan pemerintah serta komponen lainnya memperjuangkan agar presiden menganugerahi jasa pahlawan nasional bagi Frans Seda.

Dukungan yang sama dilontarkan Bupati Sikka, Drs. Sosimus Mitang, Bupati Sumba Timur, Drs. Gidion Mbilijora, Bupati Sumba Tengah, Drs. Umbu Sappi Pateduk, anggota DPR RI, Ir. Fary Francis, anggota DPD RI, Ir. Sarah Lery Mboeik dan Ir. Eman Babu Eha, anggota DPRD Kota Kupang, Niko Frans, S.Ip dan Epi Seran serta anggota DPRD Sikka, Siflan Angi yang dihubungi terpisah, Selasa (5/1/2010).

Bupati Sikka, Drs.Sosimus Mitang mengatakan, pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sikka sangat mendukung jika almarhum Frans Seda dinugerahi gelar pahlawan nasional. "Kalau kriterianya memungkinkan dan Frans Seda bisa jadi pahlawan nasional, kita dukung. Kita perlu siapkan data dan dokumen untuk diusulkan agar beliau bisa jadi pahlawan nasional. Pemerintah dan masyarakat Sikka telah memberikan penghargaan atas jasa Frans Seda dengan menggantikan nama Bandara Waioti menjadi Bandara Frans Seda. Besok (Hari ini, Red), kalau sudah ada persetujuan DPRD Sikka, saya akan sampaikan kepada Gubernur NTT dan Menteri Perhubungan agar nama bandara secepatnya diganti menjadi Bandara Frans Seda. Kalau mengenai pahlawan nasional, jika kriterianya memungkinkan kita dukung. Tetapi perlu kita siapkan data," kata Mitang saat ditemui di Hotel Benggoan III Maumere, Selasa (5/1/2010) sore.

Bupati Mitang menegaskan, penghargaan masyarakat dan pemerintah kepada jasa Frans Seda telah diberikan karena Frans Seda telah memberikan andil bagi kemajuan Sikka pada masa ia menjabat Menteri Perhubungan RI.

Siflan Angi, Penasehat Forum Muda Lio yang juga anggota DPRD Sikka, menegaskan, Frans Seda layak dan pantas diusulkan menjadi pahlawan nasional. Di masanya beliau banyak berjasa membangun dan membuat perubahan di RI. "Di masanya juga Frans Seda telah menjadi tokoh pembebasan Papua Barat. Saya meminta pemerintah memberikan penghargaan guna mengenang jasa beliau sebagai pahlawan nasional," kata Siflan di Maumere, Selasa (5/1/2010) sore.

Bupati Sumba Timur, Gidion Mbiljora mengatakan, almarhum telah berbuat untuk Indonesia disaat negara menghadapi masa sulit sebagai Menteri Keuangan. Dia mengemban tugas berat karena saat itu nilai rupiah anjlok dan keuangan negara betul- betul tak berdaya. Di saat orang lain enggan menjabatnya, beliau menerima dan menunjukkan kemampuan menyelamatkan negara yang dilanda krisis berat saat itu.

"Saat memimpin acara tutup tahun 2009, saya sudah sampaikan kepada masyarakat Sumba Timur bahwa jasa almarhum cukup besar sehingga pantas dianugerahi pahlawan nasional. Itu saya sampaikan saat mengheningkan cipta khusus bagi almarhum Gus Dur dan almarhum Frans Seda," kata Gidion.

Bupati Sumba Tengah, Umu Sappi Pateduk juga mendukung agar almarhum dianugerahi pahlawan nasional. Dia mengenang almarhum yang adalah teman ayahnya sebagai orang yang gigih memperjuangkan nasib bangsa, peduli terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat dengan ekonomi kerakyatan dan tokoh kerukunan hidup umat beragama yang merekatkan keutuhan NKRI.

Menurut Pateduk, almarhum bersama almarhum ayahnya Umu Remu Samapaty, almarhum El Tari, almarhum Lorens Say, almarhum Herman Fernandez membela kemerdekaan saat berada di Yogyakarta. Almarhum Frans Seda, demikian Pateduk, sangat layak dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh negara. Misi diplomasi Irian Barat kembali ke pangkuan Indonesia (1961) berkat jasa Frans Seda.

Eman Babu Eha (anggota DPD RI) menyatakan Frans Seda sangat layak mendapatkan gelar pahlawan nasional dari pemerintah RI. Babu Eha mendesak Pemerintah Propinsi NTT segera memroses usulan tersebut sehingga secepatnya Frans Seda mendapat gelar pahlawan.

Anggota DPR RI, Fary Francis menyatakan, Frans Seda memenuhi kriteria diajukan sebagai pahlawan nasional karena telah melahirkan pemikiran besar untuk pembangunan nasional yang mendatangkan manfaat bagi masyarakat banyak. Perjuangannya berlangsung sepanjang hidupnya, pengabdianya jangkauannya luas dan berdampak nasional, tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang merusak nilai perjuangan.

"Bapak Frans Seda layak diajukan sebagai pahlawan nasional karena telah mengabdikan tiga era, yakni orde lama, orde baru dan orde reformasi sampai akhir hayat dan berdampak luas secara nasional," kata Fary.

Fary mengaku akan menyuarakan aspirasi masyarakat NTT di DPR RI untuk ditindaklanjuti pemerintah. Dia mengharapkan DPD asal NTT, juga menyalurkan aspirasi itu agar simpul-simpul perjuangan menjadi kuat dan didengar secara nasional. Anggota DPD RI, Ir. Sarah Lery Mboeik juga mendukung agar Frans Seda dinobatkan menjadi pahlawan nasional. "Pada dasarnya saya setuju. Kalau dilihat dari prasyarat sebagai pahlawan, maka Pak Frans Seda telah memenuhi semua itu. Banyak hal yang telah beliau buat demi kepentingan bangsa ini," kata Lery.

Anggota DPRD Kota Kupang, Niko Frans mengatakan, Frans Seda telah berkiprah di tiga dekade. Dia juga berjuang mempertahankan kemerdekaan, salah satu wujud andilnya dalam pembebasan Irian Barat.

Lanjut Niko Frans, kiprahnya sebagai menteri di masa Orde Lama dan Orde Baru cukup bagus, tanpa cacat. "Saya sepakat karena beliau tanpa cacat. Beliau memenuhi syarat menjadi tokoh yang dapat diteladani sehingga layak dipertimbangkan mendapat gelar pahlawan nasional," kata Niko Frans.

Pendapat yang sama dikemukakan Epi Seran, anggota DPRD Kota Kupang. Epi Seran mendukung Frans Seda dianugerahi pahlawan nasional dan mengusulkan Walikota Kupang, memberikan nama jalan dari Bandara El Tari menjadi Jalan Frans Seda, sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap jasa-jasa beliau. **(gem/ris)**

 **NASIONAL**

SELASA, 28 SEP 2010, | 155

Gubernur NTT Ajak Bupati/Walikota Lobi DPR

Perjuangkan Anggaran Bangun NTT



JAKARTA, Timex--Gubernur NTT, Frans Lebu Raya mengajak sejumlah bupati/wakil bupati dan walikota ke Jakarta. Kehadiran para kepala wilayah ke ibukota negara RI ini dalam rangka mengikuti pertemuan dengan para wakil rakyat asal NTT yang duduk sebagai anggota DPR RI dan DPD RI di Senayan, Jakarta.

Tujuannya, selain meningkatkan hubungan komunikasi antar Pemerintah NTT dengan para wakil rakyat, juga dalam rangka melakukan lobi atau semacam perhatian lebih

para wakil rakyat asal NTT untuk memperjuangkan anggaran untuk mendukung berbagai sektor pembangunan di NTT. Dan pertemuan itu berlangsung tadi malam (27/9) di ruang Sasono Mulyo, Le Meridien Hotel, Jakarta.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Walikota Kupang, Bupati TTS, Bupati Belu, Bupati Lembata, Penjabat Bupati Flotim, Bupati Rote Ndao, Bupati Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Bupati Nagekeo, Bupati Manggarai Timur, dan Wakil Bupati Ngada. Sementara dari 13 Anggota DPR RI asal NTT, yang hadir tadi malam adalah Setya Novanto, Yoseph Nai Soi, Charles Mesang, Jefri Riwu Kore, Fary Francis, Honing Sani, dan Saleh Husin, serta tiga dari empat anggota DPD RI, yakni Emanuel Babu Eha, Sarah Lery Mboeik dan Carolina Nubatonis-Condo.

Dalam pertemuan itu, lebih awal Gubernur NTT, Frans Lebu Raya memaparkan secara umum gambaran NTT terkait dengan program-program pemerintah NTT, termasuk didalamnya upaya mewujudkan empat tekad Pemprov NTT, yakni menjadikan NTT sebagai provinsi jagung, provinsi ternak, provinsi koperasi dan provinsi cendana. "Kita punya empat tekad untuk NTT, hanya saja upaya untuk mewujudkan hal tersebut terkendala oleh terbatasnya dana.

Karena itulah, kita sangat mengharapkan dukungan dari bapak/ibu anggota dewan asal NTT agar dapat memberi dukungan dengan perjuangan anggaran di DPR," ungkap Frans Lebu Raya tadi malam.

Menurut Frans, jika berharap pada Dana Alokasi Umum (DAU) yang ada, upaya untuk mewujudkan pembangunan dan menjadikan masyarakat NTT menjadi lebih sejahtera masih sangat kurang.

Frans memberi contoh, APBD NTT tahun ini yang sebesar Rp 1 triliun, dinilai belum cukup untuk mewujudkan program-program atau tekad tersebut. "Karena itulah, kami minta agar bapak/ibu anggota DPR/DPD RI asal NTT kiranya dapat memperjuangkan tambahan anggaran bagi pemerintah daerah melalui program-program di kementerian/lembaga," pinta Frans Lebu Raya.

Menyikapi itu, Setya Novanto yang juga adalah Ketua Fraksi Golkar DPR RI mengatakan bahwa, saat ini di DPR sedang dalam proses pembahasan anggaran tahun 2011, karena itu, dia meminta agar gubernur dan seluruh bupati/walikota se NTT gencar dalam melakukan lobi ke pusat, selain ke DPR juga bisa ke kementerian/lembaga. "Soal DAU kurang, sekarang kita minta agar para bupati/walikota gencar lakukan lobi ke pusat.

Mungkin bisa intensifkan komunikasi dengan anggota DPR/DPD RI asal NTT. Komunikasi ini penting, karena daerah yang lain juga intens melakukan lobi. Nah, kalau kita tidak gencarkan lobi atau komunikasi, pasti daerah lain yang dapat lebih," kata legislator Komisi III DPR RI ini.

Novanto juga mengingatkan kepada para bupati/walikota dan gubernur agar dalam melakukan lobi harus mengedepankan kekompakan, termasuk menjalin hubungan yang intens dengan para wakil rakyat asal NTT.

Hal yang sama juga diungkapkan legislator Fraksi Partai Demokrat, Jefri Riwu Kore. Menurutnya, selama ini banyak program yang sebenarnya bisa diberikan ke NTT, hanya saja, pihaknya mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan para kepala wilayah. "Jujur saja, kita sangat kesulitan dalam berkomunikasi. Misalnya saja ada program pengembangan kebudayaan yang mungkin bisa cocok kita berikan ke Alor, namun karena kesulitan komunikasi, siapa yang harus dihubungi, terpaksa semuanya lewat begitu saja," ungkap Jefri yang duduk di Komisi X DPR RI ini.

Honing Sani (Fraksi PDI Perjuangan) pun senada dengan Novanto dan Jefri. Menurutnya, kesulitan komunikasi dengan para bupati/walikota membuat banyak program yang mestinya cocok untuk daerah, tak bisa terserap ke sana. "Baru-baru ini ada program rumah kompos dan pemberian kapal nelayan, karena kita kesulitan komunikasi terpaksa bingung mau diberikan ke mana.

Namun supaya kesempatan itu tidak hilang, dua kapal itu, kita putuskan diberikan ke Ende dan Flores Timur, sedangkan program rumah kompos termasuk pemberian ternak sapi lengkap dengan kandang dan pengolahan limbah ternak diberikan untuk tiga kabupaten di Flores yakni di Lembata, Manggarai Timur dan Ende," jelas Honing.

Honing yang duduk di Komisi IV DPR RI meminta kepada gubernur dan para bupati/walikota agar dapat saling bertukar nomor kontak sehingga ada program kementerian/lembaga atau hal-hal yang bisa diberikan kepada daerah, bisa ada hubungan komunikasi yang terjadi. Hal yang tak jauh beda juga disampaikan Joseph Nai Soi, Saleh Husin, Sarah Lery Mboeik dan Carolina Nubatonis.

Sarah Lery Mboeik misalnya menyoroti soal tidak adilnya mekanisme perhitungan DAU yang lebih banyak merugikan daerah. Menurut Lery, DAU yang dialokasikan untuk daerah ternyata lebih banyak untuk belanja aparatur, sementara yang diharapkan DAU itu lebih diutamakan kepada belanja publik ternyata masih jauh dari harapan.

"Karena itu, tidak bermaksud memprovokasi, namun kalau dapat, teman-teman anggota DPR RI asal NTT yang duduk di Badan Anggaran supaya mewujudkan memanfaatkan kepercayaan yang ada untuk memperjuangkan anggaran bagi NTT," tantang anggota Komite IV DPD RI ini. Lery juga meminta agar teman-teman di DPR RI juga ikut membantu agar perhitungan DAU itu tidak saja dengan melihat jumlah penduduk dan luas daratan, namun juga menghitung luas lautannya karena sebagian besar wilayah NTT adalah lautan.

Lery dalam kesempatan itu juga meminta agar pertemuan pemerintah daerah dengan para wakil rakyat di Senayan dilembagakan agar dilakukan secara rutin, tidak hanya untuk waktu-waktu tertentu saja. "Kalau bisa pertemuan ini kita lembagakan dan dijadwalkan secara rutin sehingga perjuangan membangun NTT tetap intens dilakukan," kata Lery.

Menyambut usul ini, Gubernur NTT, Frans Lebu Raya langsung meminta persetujuan para wakil rakyat, dan disetujui akan dilakukan tiga kali dalam setahun, yakni antara bulan April atau Mei, Agustus dan Oktober.

Beberapa Bupati yang hadir, misalnya Bupati Belu, Joachim Lopez dan Bupati Rote Ndao, Lens Haning mengaku senang dengan kesediaan para wakil rakyat tersebut, karena itu, mereka berjanji akan meningkatkan komunikasi sehingga apa yang bisa dibawa ke daerahnya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat bisa terwujud ke depan. (aln/fmc)

Umum | BERITA UTAMA UMUM



Resize Huruf :

DPR Sarankan Moratorium Utang



Rabu, 21 Juli 2010

Pengelolaan APBN , Obligasi Negara Mengompensasi Penurunan Pinjaman Asing

JAKARTA – DPR menyarankan pemerintah agar mengambil opsi moratorium atau penghentian sementara penarikan utang baru dan pembayaran utang luar negeri untuk meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tiap tahun.

Pasalinya, saat ini, porsi pembayaran utang dinilai sudah tinggi sehingga mengurangi kapasitas anggaran untuk kesejahteraan rakyat. Anggota Komisi XI DPR Andi Rahmat mengatakan nilai utang pemerintah saat ini memang

terus meningkat sehingga membebani anggaran negara.

"Pembayaran utang, baik bunga maupun cicilan pokok, membebani APBN secara signifikan sehingga harus dievaluasi," tegas dia di Jakarta, Selasa (20/7). Khusus untuk utang luar negeri, lanjut dia, pemerintah mungkin bisa menempuh langkah moratorium untuk mengurangi beban APBN.

"Ops moratorium bisa ditempuh pemerintah," tegas Andi. Sampai Juni 2010, utang berdenominasi nonrupiah setara dengan 80,8 miliar dollar AS atau 45,49 persen dari total utang pemerintah sebesar 1.612,85 triliun rupiah atau sekitar 177,57 miliar dollar AS.

Total utang itu meningkat dibandingkan posisi akhir 2009 yang sebesar 1.590,66 triliun rupiah (169,22 miliar dollar AS). Menurut Andi, salah satu pertimbangan lain dilakukannya moratorium yakni melihat situasi global.

Krisis utang yang melanda sejumlah negara di Eropa berpotensi berimbas ke Tanah Air sehingga hal ini perlu diantisipasi. "Kita berharap moratorium dapat dimulai tahun 2011, dan saya rasa itu tidak akan memberikan sinyal yang negatif karena pasar bisa memahami itu," kata dia.

Andi menilai selama moratorium, pemerintah tidak perlu khawatir akan kekurangan pembiayaan karena kondisi APBN masih cukup stabil. Defisit pun tetap dapat dipertahankan dalam posisi di bawah 1,7 persen dari produk domestik bruto (PDB).

"Kita akan lihat nanti seberapa besar sisa pembiayaan di 2011," katanya. Tidak hanya moratorium utang luar negeri, Andi juga mengharapkan pemerintah mengendalikan penerbitan surat berharga negara (SBN) sehingga penerbitan pada tahun berjalan tidak lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Usulan moratorium juga disampaikan anggota Badan Anggaran DPR, Fary Djemi Francis, pada rapat paripurna. Fary pun menilai pemerintah belum menerapkan kebijakan untuk mengurangi kebergantungan terhadap utang.

Ini terlihat dari penarikan utang yang melebihi defisit anggaran. "Kondisi saat ini hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu anggaran masih menerapkan defisit.

Namun, pembiayaan melonjak melampaui defisit," kata dia. Fary mencontohkan pengalaman APBN 2009 dengan defisit 87,2 triliun rupiah sementara pembiayaan yang terkumpul mencapai 125,2 triliun rupiah.

Oleh karena itu, lanjut dia, kebijakan fiskal yang menerapkan anggaran defisit harus dikoreksi. Menurut Fary, seharusnya anggaran negara diprioritaskan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat, bukan lebih banyak terserap untuk membayar utang.

Menanggapi usulan itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Agus DW Martowardojo menyatakan pemerintah belum memikirkan opsi moratorium utang luar negeri. "Kami harus cek kembali untuk kemungkinan tersebut."

Kalau seandainya ada usulan moratorium, mungkin maksudnya adalah pinjaman luar negeri yang dikelola dengan jumlah yang terus menurun," jelas dia. Untuk meringankan beban utang luar negeri, menurut Agus, pemerintah telah melakukan langkah penukaran utang dengan pelaksanaan program tertentu (debt swap).

"Sudah ada kesepakatan dengan Pemerintah Jerman, dan sekarang akan dilakukan dengan Australia. Jadi, ada aktivitas yang mungkin akan lebih baik dan bermanfaat, dan kemungkinan itu akan selalu kami pelajari," kata dia.

Ganti Sumber Pada Senin (19/7), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar sumber pembiayaan APBN yang berasal dari utang luar negeri dikurangi. Pemerintah sebaiknya memilih pembiayaan dari hibah atau pembiayaan yang berasal dari mekanisme debt swap.

Menkeu menjelaskan pada lima tahun terakhir pinjaman luar negeri secara neto terus menurun. Pada 2010, pinjaman luar negeri neto sebesar 0,2 triliun rupiah, turun dibandingkan 2009 yang sebesar 11,1 triliun rupiah.

"Artinya pinjaman yang ditarik dibandingkan dengan pinjaman yang dilunasi lebih banyak yang dilunasi. Ke depan, pola seperti itu akan terus dipertahankan," kata Agus, Selasa. Meskipun pinjaman luar negeri tetap ditarik, lanjut Menkeu, harus dengan syarat yang mudah.

"Bunganya murah, jangka waktunya panjang, dan tidak ada persyaratanpersyaratan yang memberatkan Indonesia, khususnya untuk melaksanakan pembangunan dan melakukan politik bebas aktif," kata dia.

Pengamat ekonomi Econit Hendri Saporini mengatakan pinjaman luar negeri secara nominal memang terus berkurang. Akan tetapi, jumlah utang yang terus meningkat menunjukkan pemerintah hanya mengganti sumber utang dari dalam negeri yaitu penerbitan obligasi negara.

Dalam lima tahun terakhir, lanjut Hendri, pinjaman dalam negeri terus meningkat. Pada 2004 penerbitan obligasi negara adalah 662 triliun rupiah kemudian meningkat menjadi 920 triliun rupiah pada 2009 dan telah menembus 1.000 triliun rupiah pada 2010.

"Oleh karena itu, jangan lupakan pinjaman dalam negeri, yaitu penerbitan obligasi. Selama ini, yield (imbal hasil) obligasi relatif tinggi, dan membebani anggaran negara," tegas Hendri.

Meski belakangan ini yield dalam tren menurun, lanjut dia, angkanya masih ada yang dua digit atau cukup besar. Obligasi negara, menurut Hendri, juga banyak dimiliki asing.

Saat ini, sekitar 26 persen obligasi negara dimiliki oleh investor asing. "Jadi obligasi bukan berarti tidak bergantung kepada asing. Obligasi juga cukup banyak dimiliki oleh asing," kata dia.
aji/WP

Irigasi NTT Mesti Berbasis Daerah Kering

POS KUPANG Rabu, 9 Desember 2009 | 19:14 WIB

Demikian salah satu harapan yang dititipkan Ir. Piet Djami Rebo kepada anggota Komisi V DPR RI, Fary Dj. Francis, dalam diskusi informal Forum Academia NTT (FAN) di Gedung PWI NTT, Selasa (8/12/2009). Francis memanfaatkan masa reses hingga tanggal 4 Januari 2010 untuk menjaring, berdiskusi dan bertemu langsung dengan konstituennya guna menemukan dan merancang agenda dan program yang bisa disuarakan di DPR RI.

Diskusi FAN, Selasa, dihadiri belasan anggota berikut sejumlah mahasiswa. Selain Djami Rebo, mantan anggota DPRD NTT, Pius Rengka, juga menyumbangkan beberapa gagasan untuk diperjuangkan Francis di Senayan.

Djami Rebo mengatakan, selain infrastruktur jalan raya di NTT yang terus diperjuangkan, pembangunan irigasi juga mesti lebih keras lagi disuarakan di pusat. Mantan Kadis Kimpraswil NTT ini menyambut baik niat baik Francis menjaring dan mengumpulkan masukan di sektor infrastruktur untuk diperjuangkan di tingkat pusat.

Djami Rebo mengatakan, selama ini pembangunan irigasi di NTT masih dengan paradigma daerah basah, bukan kering. "Tolong perjuangkan agar ada perubahan paradigma membangun irigasi di NTT. Jangan paradigmanya lahan basah seperti di Jawa, tetapi lahan kering," pinta Djami Rebo kepada Francis.

Pembangunan irigasi juga disentil anggota FAN dalam diskusi

karena merupakan sarana yang sangat vital bagi masyarakat di daerah persawahan. Kerap kali juga terjadi, warga lokal tidak dilibatkan dalam merancang pembangunan irigasi. Tak heran, di sejumlah areal persawahan, ada irigasi tetapi lahan persawahan tidak kebagian air.

Ramaikan Laut Sawu

Selain masalah air/irigasi, infrastruktur lain yang mesti diperjuangkan di pusat adalah perhubungan laut. Menurut Pius Rengka, untuk konteks NTT membenahi dan meningkatkan sektor perhubungan laut justru menjadi agenda yang jauh lebih urgen.

Pius tidak setuju dengan wacana dan harapan agar Pemda NTT membeli pesawat sendiri untuk membantu kelancaran mobilitas manusia di NTT. "Menurut saya, yang paling penting dan sesuai dengan kapasitas rakyat NTT adalah angkutan laut. Karena itu ramaikan Laut Sawu dengan kapal feri. Itu jauh lebih penting dan sesuai dengan kapasitas rakyat NTT, bukan beli pesawat," kata Pius.

Fary Francis menyambut baik semua masukan yang disuarakan. Dia berharap sebagai wakil rakyat NTT di DPR RI lima tahun ke depan, dia bisa berbuat sesuatu yang berguna bagi masyarakat NTT. "Saya tidak mau muluk-muluk, tetapi coba melakukan sesuatu yang berguna hari demi hari, seperti diskusi hari ini. Saya tidak mau berpikir untuk rakyat, tetapi berpikir sebagai rakyat," kata Francis yang telah lama malang melintang di dunia LSM ini. (len)



Cari Berita:

RUBRIK BERITA

- + Nasional
- + Internasional
- + Sport
- + Kupang Metro
- + Ekonomi Bisnis
- + Dunia Wanita
- + Hiburan
- + Pendidikan
- + Pemilu 2009
- + Rakyat Surosa
- + Rakyat Flores
- + Rakyat Timor

OPINI

Bahaya Krisis Demokrasi
Oleh: Lasarus Jehamat

Penulis, dosen Sosiologi Fisip
Undana

[+ Index](#)

Dr. Klenik

- + **China Keluhkan Aturan di Indonesia**
 - *Belum Lagi Upeti dan Wajib Setor*
- + **Pengusaha Korea Masuk Rutan**
 - *Kapan Kadistamben Menyusul*
- + **Gubernur Beri Apresiasi Jasa Raharja**
 - *Conth Bagi Perusahaan Yang Lain*

NASIONAL

SENIN, 31 MAY 2010, | 124

Rp 2 T Diduga Disalahgunakan

JAKARTA--Lembaga pemerhati keuangan, Indonesia Budget Center (IBC) menemukan adanya dugaan penyalahgunaan keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTT untuk kurun waktu 2005-2009.

Selama rentang waktu empat tahun tersebut, IBC menemukan dugaan penyalahgunaan keuangan daerah senilai Rp 2,06 triliun. Data IBC ini berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Tingginya angka penyimpangan keuangan di Pemrov NTT membuat hati Fary Dj. Francis, legislator NTT yang duduk di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI miris. Kemirisan Fary ini dia ungkapkan saat ditemui Timor Express di ruang kerjanya, Lantai 17 Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan-Jakarta pekan lalu. Fary mengatakan, NTT sebagai daerah yang masih membangun sangat membutuhkan banyak anggaran, terutama untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Tapi kalau dana yang ada masih saja terus disalahgunakan, NTT akan menjadi daerah yang tertinggal.

Fary menyebutkan, sejak dirinya menjadi legislator dan duduk sebagai salah satu anggota Banggar, dia melakukan analisa terhadap penerimaan dana perimbangan daerah yang ditransfer untuk NTT, dimana setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, dari Rp 6,1 triliun pada tahun 2006, dan pada tahun 2010 naik menjadi Rp 12,21 triliun.

"Ini artinya ada peningkatan 100 persen lebih," jelasnya. Menurut Fary, dari total dana yang ditransfer ke daerah tersebut, laporan yang dia peroleh daya serap terhadap dana-dana itu tak lebih dari 70 persen. Dengan demikian, ada 30 persen dana yang tak bisa digunakan atau harus dijadikan sebagai dana sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa).

"Hasil analisis kami di badan anggaran, dana-dana yang tak terserap itu kebanyakan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Yang bisa diserap hanyalah dana-dana yang bersifat rutin. Sudah begitu, dari 70 persen yang bisa diserap itu, ditemukan juga banyak yang bocor. Ini membuat kami cukup menyesalkan. Kok dananya sudah terbatas, serapannya juga tak maksimal, kok masih bocor kemana-mana," ungkap Fary.

Terkait dengan hal ini, Fary mengatakan bahwa sebagai legislator, dia akan memaksimalkan perannya untuk ikut mengawasi, disamping mendorong lembaga penegakan hukum untuk terus menyikapi berbagai permasalahan di daerah, terutama menyangkut penyimpangan-penyimpangan terhadap keuangan negara.

Sebagaimana diberitakan Roy Salam, pimpinan IBC, dalam diskusi bertajuk "Ironi Daerah Miskin Dengan Korupsi Tinggi" yang dilaksanakan Indonesian Corruption Watch (ICW) belum lama ini di Jakarta disebutkan bahwa berdasarkan catatan BPK pada hasil audit APBD NTT tahun 2009 atas 20 dari 22 entitas se-NTT terungkap bahwa, dari 20 LKPD TA 2008 menunjukkan 19 dengan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dan satu dengan opini tidak memberikan pendapat (TMP). Hal tersebut, kata Roy, sedikit mengalami kemajuan dalam hal pencatatan/akuntansi APBD dibanding tahun sebelumnya.

Sedangkan catatan hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa sampai dengan akhir semester II TA 2009 terdapat 1.804 temuan pemeriksaan dengan sebanyak 3.305 rekomendasi sebesar Rp 5,29 triliun. Sebanyak 1.568 rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan nilai Rp 2,98 triliun.

Dan sebanyak 437 rekomendasi sebesar Rp 252,93 miliar sedang dalam proses tindak lanjut. Sedangkan sisanya sebanyak 1.300 rekomendasi sebesar Rp 2,06 triliun belum ditindaklanjuti. Adapun mengenai jumlah kasus dan nilai kerugian di lingkungan Pemda dan BUMD, sampai dengan akhir semester II tahun 2009, sebut Roy, terdapat 392 kasus kerugian senilai Rp 76,45 miliar. Yang telah diselesaikan sebanyak 112 kasus dengan adanya pengembalian ke kas negara Rp 18,40 miliar.

Sehingga masih terdapat 280 kasus kerugian dengan nilai Rp 58,08 miliar yang belum diselesaikan. Terkait semua temuan itu, Roy menekankan sejumlah hal. Antara lain, perlunya mengupayakan pengelolaan yang transparan mengenai sumber penerimaan daerah yang berasal dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Mendorong kebijakan alokasi APBD yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat NTT dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Perlunya memaksimalkan peran dan fungsi aparat/birokrasi dalam mengupayakan fungsi pelayanan yang bertanggungjawab, serta mengupayakan peningkatan alokasi belanja di sektor pelayanan dasar. (ah/fmc)

Jangan saudara-saudara kecewakan dan sakiti hati rakyat, karena sudah terlalu lama rakyat kita hidup dalam kondisi serba terbatas. Karena itu jadilah teman bagi rakyat dan teruslah bersama rakyat, berjuang untuk menjadi manusia Indonesia yang bermartabat di negeri sendiri.

Prabowo Subianto

Ketua Dewan Pembina Partai GERINDRA

Fary Francis, saya kenal berasal dari latar belakang penggiat LSM. Karena itu ketenangannya dalam menyimak informasi dari mitra terkait, responnya yang santun terhadap rencana maupun rekomendasi pemecahan masalah dalam bidang tertentu baik ketika berhadapan dengan mitra kerja maupun di tengah-tengah pembahasan dengan para sejawat Komisi V telah turut menciptakan atmosfer yang menumbuhkan semangat kekompakan dan persaudaraan dalam perjuangan membela kepentingan rakyat.

Dra. Yasti Soepredjo Mokoagow

Ketua Komisi V DPR RI

Fary Francis bukan orang baru bagi masyarakat Kobalima Belu NTT. Sebelum menjadi anggota DPR RI, yang bersangkutan sudah sering masuk keluar kampung bersama masyarakat. Untuk itu, tidaklah mengherankan kalau habitat sebagai penggiat pemberdayaan masyarakat yang melekat selama ini terus berpengaruh hingga menjadi anggota DPR RI.

Martinus Luan

Kepala Desa Lakekun Barat - Kec. Kobalima-Kab. Belu - NTT



Fary Djemy Francis. Pada tanggal 1 Oktober 2009 dilantik menjadi Anggota DPR RI setelah dipilih secara langsung oleh masyarakat

dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur II (Timor, Rote, Sabu, Sumba).

Pada periode 2009-2010 ditugaskan oleh Fraksi GERINDRA menjadi Ketua Poksi Fraksi Gerindra di Komisi V, Anggota Badan Anggaran DPR RI, Anggota Tim ad Hoc MPR RI, Anggota Panja Transportasi Komisi V dan Anggota Panja RUU Perumahan Pemukiman.

Sebelum menjadi Anggota DPR RI, selama lima belas tahun menjadi Fasilitator Masyarakat tinggal dan hidup bersama masyarakat dan lima tahun terakhir menjadi Direktur INCREASE Lembaga Kajian & Pemberdayaan Masyarakat di NTT dan terlibat sebagai *In house consultant* pada beberapa lembaga bantuan internasional (JICA, UNHCR, GTZ, Plan Int, UNICEF, ii-net Japan, Care Int). Bersama-sama dengan 7 (tujuh) orang tokoh kawasan Timur Indonesia seperti Erna Witoelar, Prof. Marwah Daud, PhD, Prof Willy Toisuta, PhD mendirikan dan membina lembaga BAKTI sebagai Lembaga Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia yang berpusat di Makasar.

Tahun 1996 meraih Master Management Agribusiness (S2) di IPB Bogor, kemudian tahun 2003 atas sponsorship dari Kementerian Luar Negeri USA mendapat studi "*Peace and Conflict Resolution*" di OHIO University USA. Pada tahun 2005 mendapat sponsorship dari *Japan International Cooperation Agency* (JICA) belajar secara khusus pemberdayaan masyarakat di bidang "*Water Sheet Management for Community Development*", di SOMNEED Institute Andhra Pradesh, India. Saat ini sedang menyelesaikan Program Doktor (S3) Ilmu Lingkungan di Universitas Indonesia.